



SEJARAH PENDIDIKAN DI MALUKU SEJAK MASA PRAKOLONIAL HINGGA ORDE BARU

Penjajahan, Partisipasi, dan Kepedulian

**ktorat
ayaan**

SEJARAH PENDIDIKAN DI MALUKU
SEJAK MASA PRAKOLONIAL HINGGA ORDE BARU
Penjajahan, Partisipasi, Kepedulian

Sem Touwe

Universitas Pattimura

Rina Pusparani

Universitas Pattimura

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI BUDAYA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2013

SEJARAH PENDIDIKAN DI
MALUKU
SEJAK MASA PRAKOLONIAL
HINGGA ORDE BARU
Penjajahan, Partisipasi, Kepedulian

Penulis:

DR. SEM TOUWE, M.Pd

RINA PUSPARANI, SS, M.Hum

Editor:

Kasijanto M Hum

ISBN:

978-602-17497-7-7

Penerbit:

Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya

Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan

Jl.Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta

10270

Telp./Fax.: 021-5725539

viii + 218 hlm; 17.6x25 cm



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat-Nya sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya, walaupun masih terdapat banyak kekeliruan. Buku ini memuat uraian tentang perkembangan pendidikan di Maluku mulai dari masa prakolonial yang ditandai oleh masuknya agama Islam ke Maluku, pengaruh agama Kristen sejak awal kedatangan Portugis, kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Selanjutnya, diuraikan perkembangan pendidikan pada masa pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan Republik Indonesia hingga pemerintah Orde Baru. Juga dibahas tentang pendidikan semasa Negara Indonesia Timur.

Penulisan buku Sejarah pendidikan di Maluku ini bertujuan melengkapi penerbitan seri sejarah lokal yang telah ditulis dari berbagai periode. Gambaran masa lalu dari proses pembentukan watak masyarakat Maluku melalui pendidikan sangat berguna bagi generasi masa kini untuk dijadikan sebagai penentu arah dan kebijakan pendidikan di wilayah Maluku sehingga menunjang pendidikan nasional. Tentunya proses seleksi terhadap berbagai pengalaman pengajaran yang sangat beragam pada masa lalu itu harus dilakukan secara cermat agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia ataupun nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, melalui Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, yang telah memberikan berbagai fasilitas sehingga penerbitan ini terwujud. Kami juga sangat mengharapkan kritik pembaca demi perbaikan buku ini pada masa mendatang. Harapan kami semoga penerbitan buku ini dapat memperkaya khazanah sejarah bagi masyarakat umumnya, dan pencinta sejarah khususnya.

Sem Touwe
Rina Pusparani

Ambon, 6 Oktober 2013

SAMBUTAN DIREKTUR SEJARAH DAN NILAI BUDAYA

Sejarah bukan hanya cerita masa lalu yang usang kemudian ditinggalkan. Sejarah melekat dalam kepribadian suatu bangsa karena sejarahlah yang membentuk karakter serta kepribadian bangsa. Oleh karena itu dengan melihat sejarahnya sendiri, suatu bangsa dapat berjalan ke depan berpegangan pada pengalaman-pengalaman masa lampau menuju ke arah yang lebih baik.

Berbicara mengenai sejarah nasional tentu tidak terlepas dari sejarah lokal karena ada peran serta dari peristiwa lokal terhadap terjadinya peristiwa nasional. Dengan melakukan penelitian sejarah lokal, kita tidak hanya memperkaya perbendaharaan sejarah nasional, tapi lebih penting lagi memperdalam pengetahuan tentang dinamika sosiokultural dari masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.

Salah satu bentuk penggalan sejarah lokal adalah penelitian dan penulisan sejarah lokal. Melalui penulisan sejarah, peristiwa-peristiwa lokal yang pernah terjadi pada sebuah daerah dapat didokumentasi dan dipublikasikan, sehingga dapat diketahui masyarakat luas, yang apada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran sejarah, khususnya pada masyarakat lokal tersebut. Sehubungan dengan itu, Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, pada tahun anggaran 2013 melaksanakan kegiatan Fasilitasi Penulisan Sejarah Lokal Indonesia dan dari kegiatan ini berhasil dicetak dua buah naskah sejarah lokal yang berasal dari Kalimantan Barat serta Maluku.

Buku yang berjudul Sejarah Pendidikan di Maluku Sejak Masa Prakolonial Hingga Orde Baru: Penjajahan, Partisipasi, Kepedulian merupakan buku sejarah lokal yang berasal dari Maluku. Buku ini membahas sejarah pendidikan formal yang ada di Maluku sejak masa prakolonial hingga orde baru dan bagaimana pendidikan tersebut akhirnya mengubah pola pikir masyarakat Maluku dalam hal berpikir, bertindak dan berperilaku sebagai manusia yang terdidik. Semoga buku ini dapat memperkaya ingatan kolektif bangsa guna peningkatan wawasan dan komitmen untuk membuat sejarah lebih bermartabat ke depannya khususnya bagi bangsa dan negara tercinta.

Akhirnya ucapan terimakasih kami haturkan kepada penulis buku ini, semoga sumbangsih yang sangat berharga ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sebagai salah satu upaya dalam memperkokoh jati diri dan karakter bangsa.

**Direktur Sejarah dan Nilai Budaya,
Endjat Djaenuderadjat**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN DIREKTUR SEJARAH DAN NILAI BUDAYA	v
DAFTAR ISI	vii
I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Masalah	3
1.2 Metode Kerja.....	3
1.3 Lingkup Kajian.....	8
II GAMBARAN UMUM DAERAH MALUKU	
2.1 Kondisi Geografis.....	13
2.2 Penduduk dan Ekonomi.....	15
2.3 Struktur Politik Tradisional	23
III AWAL PENDIDIKAN FORMAL	
3.1 Sistem Pendidikan setelah Kedatangan Islam	29
3.2 Sistem Pendidikan pada Zaman Portugis.....	34
3.3 Pendidikan pada Zaman VOC.....	37
3.4 Perkembangan Pendidikan pada Abad Ke-19	50
3.5 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan 1869–1942	66
3.6 Kebijakan Pemerintah Mengubah Sistem Pendidikan	71
3.7 Peralihan Pendidikan Bercorak Agama Kristen Menjadi Pendidikan Barat Sekuler	74
IV PENINGKATAN PENDIDIKAN SETELAH POLITIK ETIS	
4.1 Perbaikan Nasib Kaum Pribumi	103
4.2 Sekolah yang Dikelola Pemerintah.....	106
4.3 Sekolah yang Dikelola Swasta	112
4.4 Sekolah yang Dikelola Masyarakat dengan Subsidi Pemerintah..	118
V PENDIDIKAN PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG	
5.1 Kebijakan Umum Tentara Jepang dalam Pendidikan.....	149

5.1.1 Usaha Memajukan Pendidikan Rendah.....	151
5.1.2 Usaha Memajukan Pendidikan Menengah.....	152
5.1.3 Usaha Memperluas Sekolah Guru	153
5.1.4 Pembangunan Pendidikan Tinggi	153
5.1.5 Soal Pendidikan Partikelir.....	154
5.1.6 Usaha Pemberantasan Buta huruf	154
5.1.7 Soal Melanjutkan Pelajaran	155
5.2 Sistem Pendidikan yang Diterapkan Pemerintah Jepang.....	155
5.3 Kemunduran Pendidikan.....	156

VI PENDIDIKAN PADA MASA KEMERDEKAAN REPUBLIK . INDONESIA

6.1 Kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku dalam Pendidikan	165
6.2 Penataan Pendidikan oleh NICA Pascakemerdekaan	168
6.2.1 Penyelenggaraan Pendidikan di Tengah Situasi Revolusi	168
6.2.2 Aksi Militer dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan.....	170
6.3 Penataan Pendidikan Semasa Negara Indonesia Timur.....	173
6.3.1 Kebijakan Pemerintah NIT dalam Pendidikan	173
6.3.2 Pendidikan Masa NIT di Daerah Maluku.....	176
6.4 Pemulihan Pendidikan setelah Pergolakan Republik Maluku Selatan	178

PENUTUP.....	197
DAFTAR SUMBER.....	203
DAFTAR TABEL.....	211
DAFTAR GAMBAR.....	212
DAFTAR ISTILAH	213

I PENDAHULUAN

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Masalah

Perkembangan sejarah pendidikan di daerah Maluku tidak terlepas dari pengaruh budaya luar yang masuk ke Nusantara dan berasimilasi melalui proses panjang dan mengalami pasang-surut sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat di daerah Maluku itu sendiri dari abad ke abad. Persentuhan kebudayaan asing telah membawa banyak perubahan di Maluku karena terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat bahkan memperkaya budaya lokal daerah Maluku sehingga makin memperkaya nilai. Seiring perjalanan waktu, perubahan dan perkembangan budaya terus berlangsung dan pada akhirnya diakui sebagai kebudayaan yang berlaku umum bagi masyarakat di daerah Maluku.

Unsur-unsur baru yang datang dari luar bersamaan dengan penyiaran Islam dan Kristen dianggap sebagai kekuatan dan bukan hambatan karena telah berperan memperkaya budaya masyarakat di Maluku secara umum. Yang jelas, pertumbuhan dan perkembangan pendidikan di Maluku tidak terlepas dari pengaruh Islam dan Kristen karena melalui dua agama besar ini orang di Maluku mulai mengenal budaya baca dan tulis sebagai pengetahuan dasar untuk berkomunikasi. Sebelum kedatangan agama Islam dan Kristen ke Nusantara telah terjadi pengaruh Hindu dan Budha di beberapa tempat dan turut berpengaruh terhadap pertumbuhan budaya asli di Nusantara. Namun kedua agama tersebut tidak berpengaruh secara langsung di Maluku sehingga unsur-unsurnya pun tidak ditemukan. Hal inilah yang membedakan daerah Maluku dengan daerah Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi ataupun daerah lain di Nusantara yang menerima pengaruh budaya Hindu dan Budha.

Dengan demikian, kedatangan agama Islam dan Kristen ke Maluku yang membawa peradaban baru merupakan kontak awal persentuhan masyarakat Maluku dengan kebudayaan dari luar. Persentuhan tersebut lambat-laun mengubah kehidupan orang di Maluku karena sejak kedatangan kedua agama

itu masyarakat mulai berkenalan dengan budaya membaca dan menulis dalam bahasa Arab, Latin ataupun Belanda. Bahasa-bahasa ini diperkenalkan saat para pendatang mulai menguasai wilayah Nusantara termasuk Maluku yang menjadi incaran pertama karena hasil rempah-rempah cengkih dan pala. Komunikasi yang terjalin beratus tahun dengan berbagai sentuhan kegiatan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan telah menghasilkan suatu kekuatan positif dalam membangun peradaban masyarakat kepulauan di daerah Maluku.

Sebelum agama Islam dan Kristen masuk ke Maluku, proses pendidikan diberikan langsung oleh orang tua atau tokoh dalam keluarga dan masyarakat yang dipandang memiliki pengetahuan spiritual, moral, dan etika, ataupun kecakapan yang unggul untuk menjalani kehidupan. Pendidikan yang berlangsung sangat sederhana ini diberikan oleh orang tua dalam bentuk praktik kehidupan sehari-hari secara nyata sehingga pengetahuan anak-anak juga berkembang secara otodidak. Setelah Islam dan Kristen hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat Maluku, pendidikan formal mulai diperkenalkan walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Proses pertumbuhan pendidikan saat itu ditandai oleh munculnya lembaga pendidikan yang sangat sederhana. Proses belajar-mengajarnya menggunakan pola menghafal dan mengenalkan huruf atau teks tertentu kepada peserta didik.

Pola pengajaran tersebut dianggap berhasil mengubah karakter masyarakat di Kepulauan Maluku sehingga mendorong otoritas saat itu, yakni penyiar Islam dan Kristen, untuk membentuk lembaga pendidikan yang diawali dengan pengajaran agama, bahkan mata pelajaran yang tertua adalah agama. Persentuhan kebudayaan Islam dengan kebudayaan lokal Maluku yang telah melahirkan suatu peradaban baru, yakni ajaran Islam, secara perlahan mengubah pola pikir masyarakat dan para pemeluknya untuk meninggalkan kepercayaan lokal berupa animisme dan dinamisme. Hal yang sama dijumpai pada sebagian masyarakat Maluku yang diperkenalkan dengan peradaban Kristen karena secara otomatis pemeluknya mulai meninggalkan sikap hidup yang berorientasi pada animisme dan dinamisme.

Bagi sebagian ahli, persentuhan kedua unsur kebudayaan baru yang berbasis Islam dan Kristen di daerah Maluku tersebut dianggap telah mengubah dan menghancurkan tatanan adat dan budaya orang Maluku. Namun, di sisi lain, kedua kebudayaan itu telah membangun dunia pendidikan dari proses yang

sangat sederhana, kemudian terus berkembang mengikuti arus perubahan zaman hingga sekarang. Proses itu belum banyak diteliti oleh sejarawan ataupun peminat lainnya.

Banyak dokumen berupa arsip dan tulisan lain mengenai pendidikan di Maluku yang tersimpan di berbagai lembaga arsip dan perpustakaan, terutama di Negeri Belanda dan kantor Arsip Nasional di Jakarta, belum banyak dimanfaatkan sebagai sumber penelitian untuk merekonstruksi perkembangan pendidikan sejak awal kedatangan agama-agama besar ke Nusantara hingga periode kontemporer. Beberapa penulis dengan tema yang lain mengenai Maluku telah memasukkan sejarah perkembangan pendidikan di Maluku namun hanya berupa informasi singkat atau gambaran umum untuk melengkapi apa yang menjadi fokus penulisan mereka. Atau, hanya mengulas mengenai sejarah pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak gereja atau zending. Selain itu kajian sejarah lokal dengan mengambil tema pendidikan di Maluku sangat terbatas. Oleh karena itu harapan untuk melahirkan suatu penulisan tentang pendidikan di Maluku sampai periode Orde Baru menjadi sorotan isi buku ini. Uraian diberikan secara periodik dan direkonstruksi secara sistematis dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas tentang pendidikan di Maluku.

Masalah penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial di Maluku belum dikaji secara baik karena kelangkaan sumber lokal. Kelangkaan atau keterbatasan sumber jenis ini sangat terasa saat proses penelusuran dokumen dan arsip, bahkan untuk memperolehnya memerlukan biaya cukup besar dan waktu yang lama. Kelangkaan sumber lokal terutama pada periode setelah kemerdekaan, periode Negara Indonesia Timur, periode Jepang, dan periode setelah proklamasi kelompok Republik Maluku Selatan. Tim penulis tetap berusaha melakukan heuristik terhadap sumber lokal ini dengan harapan dapat melahirkan tulisan yang berharga bagi bekal pengetahuan generasi Maluku mengenai pendidikan pada masa lalu sehingga menjadikan motivasi hari ini dan akan datang.

Periode setelah kemerdekaan yang ditandai oleh munculnya persoalan baru ketika NICA kembali menguasai daerah Maluku dan munculnya Negara Indonesia Timur serta timbulnya pergolakan kelompok Republik Maluku Selatan merupakan babakan menarik untuk dikaji tentang bagaimana kondisi pendidikan saat itu yang berlangsung dalam keadaan perang. Proses sejarah yang terjadi saat itu turut berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan dan

perkembangan pendidikan di Maluku, namun fibrasi sejarah masa pendudukan Jepang sampai periode Negara Indonesia Timur belum dikaji secara tuntas.

Yang jelas, proses penyelenggaraan pendidikan di Maluku pada zaman kedatangan budaya Islam dan Kristen sampai masa kemerdekaan banyak melibatkan berbagai elemen masyarakat lokal yang turut berperan positif membantu proses pendidikan yang diajarkan oleh para penyiar Islam, padri Katolik ataupun pemerintah kolonial Belanda. Proses tersebut telah melahirkan iklim belajar yang harmonis walaupun dari sisi politik merupakan kebijakan pemerintah kolonial untuk memenangkan strategi politik birokrasi dan ekonominya. Masuknya unsur baru, terutama pola penerapan pendidikan yang diberikan saat itu, telah berhasil mengubah masyarakat di berbagai segmen kehidupannya sehingga menjadi lebih dinamis. Peran elemen masyarakat atau lembaga pendidikan yang berasal dari kelompok pribumi di Maluku yang secara suka rela memberikan subsidi dan kerelaan membangun gedung sekolah belum direkonstruksi secara baik. Aspek ini patut digali lebih dalam sehingga memberikan bobot tersendiri terhadap berbagai masalah kesejarahan yang terkait dengan proses penyelenggaraan pendidikan di Maluku pada periode tersebut. Demikian pula, aspek keterlibatan guru zending dan guru jemaat dalam membantu pemerintah kolonial Belanda untuk melaksanakan pendidikan di berbagai daerah Maluku, termasuk wilayah Papua Barat, merupakan peristiwa sejarah yang menarik, namun belum banyak diteliti.

Dari gambaran permasalahan tersebut, beberapa pertanyaan mendasar diajukan dalam buku ini. Bagaimana proses awal pendidikan formal diterapkan pada masyarakat di daerah Maluku terkait dengan pendidikan berbasis Islam dan pendidikan semasa Portugis yang berbasis Katolik? Bagaimana penerapan pendidikan oleh VOC dan bagaimana sistem pendidikan tersebut untuk menghapuskan system pendidikan Portugis pada masa sebelumnya? Bagaimana perkembangan pendidikan di Maluku pada abad ke-17 dan abad ke-18 saat ekonomi rakyat terpuruk akibat meningkatnya pergolakan di berbagai negeri terhadap kebijakan VOC? Bagaimana pula kebijakan pemerintah kolonial dan masyarakat dalam memberikan subsidi bagi kelanjutan pendidikan di Maluku? Bagaimana kelanjutan pertumbuhan pendidikan di Maluku setelah lembaga zending diberi kewenangan untuk menangani pendidikan di Maluku? Bagaimana pola dan strategi pengembangan pendidikan pemerintah Hindia Belanda dalam

menerapkan pendidikan di Maluku setelah berlakunya Politik Etis di tanah jajahan dan kelanjutannya hingga kedatangan tentara Jepang?

Selanjutnya, bagaimana peran pemerintah Republik Indonesia dalam membina pertumbuhan pendidikan sejak proklamasi kemerdekaan? Bagaimana proses pemulihan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dalam hal ini NICA setelah kemerdekaan? Apa kebijakan pemerintah Negara Indonesia Timur dalam bidang pendidikan ketika terjadi perubahan ketatanegaraan Republik Indonesia menjadi Negara Republik Indonesia Serikat sejak 1946–49? Bagaimana kelanjutan pengembangan pendidikan pada saat pembentukan NIT dan dilanjutkan kembali oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Bab terakhir buku ini menguraikan peyelenggaraan pendidikan di Maluku setelah proklamasi kelompok Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950 yang penuh dengan problem politik. Selanjutnya dibahas penerapan pendidikan pada saat pemulihan keamanan di Maluku setelah pemberontakan Republik Maluku Selatan berakhir hingga kelahiran Orde Baru pada 1966.

1.2 Metode Kerja

Penyusunan buku ini menggunakan metode sejarah sebagaimana lazimnya penulisan sejarah. Studi arsip dilakukan untuk menemukan sumber primer dan sekunder pada lembaga arsip dan perpustakaan resmi milik pemerintah dan swasta. Dokumen yang dilacak terutama berupa catatan atau arsip, buku dan surat kabar yang berhubungan dengan sejarah awal pelaksanaan pendidikan formal di Maluku prakolonial hingga masa setelah pemulihan keamanan di Maluku akibat aksi kelompok Republik Maluku Selatan. Sumber yang dimaksud terutama dokumen pembentukan lembaga pendidikan dan surat-surat keputusan serta arsip sezaman yang lain, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta.

Sumber lain menyangkut periode sejak invasi Balatentara Jepang, masa kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintahan NICA (Netherlands Indies Civil Administration), pemerintah Negara Indonesia Timur, dan berbagai dokumen setelah proses intergrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk sumber setelah pergolakan Republik Maluku Selatan yang dianggap relevan dengan tema penulisan buku ini. Pelacakan sumber dilakukan berdasarkan babakan peristiwa sejarah dengan tujuan mempermudah pemilahan data dan verifikasi sumber. Pelacakan sumber dilakukan di beberapa tempat

terutama di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta; Perpustakaan Katedral Rumpius, Ambon; Perpustakaan Daerah Maluku, Arsip Nasional, Jakarta; dan di Arsip Nasional Kerajaan Belanda (ARA, Algemeen Rijksarchief) di Den Haag saat ketua tim penulis melakukan penelitian di Negeri Belanda pada 2010 untuk kepentingan penulisan disertasi.

Selain itu, pelacakan sumber dilakukan di Perpustakaan KILTV (Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land-, en Volkenkunde) di Leiden, Negeri Belanda, dan Bibliotheek Universitet Leiden. Selain itu ketua tim penulisan buku memperoleh sumber dari koleksi khusus tentang Maluku yang tersimpan di Perpustakaan Museum Maluku di Utrecht, Negeri Belanda. Setelah proses kerja heuristik ini, dilanjutkan dengan melakukan verifikasi atau telaah dokumen dan membuat catatan untuk dilakukan interpretasi terhadap berbagai sumber yang diperoleh untuk menghasikan keabsahan data. Proses akhir dari pola kerja ini adalah melakukan penulisan untuk merangkaikan berbagai peristiwa sejarah yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti menjadi sebuah kisah sejarah yang kronologis dan imajinatif mengenai sejarah pendidikan di Maluku sesuai kurun waktu penulisan buku ini.

1.3 Lingkup Kajian

Lingkup kajian buku ini mengacu pada tema sejarah pendidikan di Maluku sejak masa pra- kolonial, dilanjutkan masa VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) yang menggantikan Portugis, hingga masa setelah pemulihan keamanan di Maluku akibat aksi kelompok RMS (1966). Yang dimaksudkan dengan Maluku pada tulisan ini adalah wilayah Maluku yang mencakup kesultanan Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan, kemudian perluasan wilayah administratif Maluku pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Dengan demikian, cakupan tulisan ini meliputi seluruh Maluku Utara dan Maluku Selatan dan sebagian kepala burung Papua Barat sesuai wilayah pemerintahan yang dibangun oleh pemerintah kolonial dengan sebutan Gouvernement der Molukche Eilanden 1817–66 (lihat Atlas van Nederlandsch-Indië, Gambar 1, hlm. 12, koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia).

Pembahasan dimulai dengan latar historis mengenai Maluku dengan fokus pada geografi, alam, penduduk, kehidupan ekonomi, dan struktur sosial tradisional masyarakat Maluku sebelum kedatangan bangsa Eropa dan Arab ke

daerah ini (Bab 2). Babakan sejarah yang menjadi ulasan tulisan ini mulai dari pengaruh agama-agama besar yang masuk ke daerah Maluku dan melahirkan suatu peradaban baru dalam hal ini proses pertumbuhan pendidikan.

Faktor-faktor tersebut merupakan modal sosial pendukung yang diulas secara umum untuk memperoleh gambaran kehidupan sosial masyarakat Maluku pada zaman sebelum pendidikan formal diterapkan.

Bab 3 mengulas tentang sejarah awal penyelenggaraan pendidikan di Maluku yang dimulai dengan kedatangan Islam ke Maluku, dilanjutkan dengan pendidikan setelah bangsa-bangsa Barat terutama Portugis dan Belanda di Kepulauan Maluku. Zaman yang penuh dengan pergolakan akibat tindakan penguasa baru, orang-orang Belanda mulai menerapkan peraturan dan ikatan dalam bentuk perjanjian (plakaat) yang melemahkan penduduk pribumi. Namun pada sisi lain mereka mulai menerapkan sistem pendidikan Barat kepada orang-orang di Maluku saat itu sebagai upaya VOC untuk menghapuskan sistem pendidikan yang ditanamkan oleh Portugis termasuk ajaran agama Roma Katolik.

Bagaimana kebijakan Gubernur Ambon Frederik de Hotman memberikan dukungan besar terhadap pembangunan sekolah dan menerbitkan buku ajar dan kamus bahasa Melayu untuk kepentingan sarana pembelajaran bagi anak-anak didik saat itu, dan mendatangkan guru-guru dari Belanda untuk mengajar di sekolah pada tahap awal pembukaan sekolah di Kota Ambon, tidak lepas dari ulasan buku ini. Peran pendeta dalam menyiarkan agama dan membantu kelancaran pendidikan di berbagai daerah saat itu dibahas secara lugas tanpa mengabaikan perkembangan pendidikan pada abad ke-18/19 yang ditandai dengan berakhirnya kekuasaan VOC sebagai badan dagang, dan terjadi penyerahan tugas-tugas pendidikan kepada lembaga zending yang kemudian memunculkan birokrasi pendidikan yang diatur secara penuh oleh pemerintah kolonial Belanda.

Bab 4 mengenai penyelenggaraan pendidikan pada awal abad ke-20 yang ditandai dengan peningkatan pendidikan di Maluku setelah penerapan Politik Etis terutama penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan untuk perbaikan nasib kaum bumiputra di tanah jajahan khususnya di Maluku. Tanggung jawab pemerintah Hindia Belanda membangun sekolah dan bersama masyarakat pribumi memberikan subsidi bagi kelanjutan pendidikan akan ditampilkan besaran biaya yang pernah disumbangkan kepada sekolah-sekolah di Maluku.

Pembangunan sekolah-sekolah dasar Eropa dan sekolah dasar pribumi untuk dikelola bersama antara pemerintah Hindia Belanda dan masyarakat diulas pada bab ini.

Bab 5 menyoroti penyelenggaraan pendidikan zaman pendudukan Jepang, meliputi strategi dan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalankan oleh penguasa militer angkatan Laut Jepang di Maluku, terutama menyangkut pergantian sistem pendidikan semasa kolonial Belanda dengan pola kebijakan Jepang. Bab ini juga mengulas orientasi pendidikan yang terfokus pada peningkatan pengajaran rendah, pengajaran menengah, sekolah guru, sekolah partikuler dan pembangunan perguruan tinggi.

Bab 6 mengulas pendidikan di Maluku setelah kemerdekaan Republik Indonesia kurun 1945–50, terutama kebijakan pemerintah Provinsi Maluku terhadap pendidikan di wilayah Maluku, dilanjutkan dengan penataan pendidikan oleh NICA pasca-kemerdekaan republik Indonesia, aksi militer Belanda dan pengaruhnya terhadap pendidikan di Maluku. Kajian bab ini tidak lepas dari pendidikan semasa pembentukan Negara Indonesia Timur, terutama kebijakan pemerintah NIT dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Pengajaran P. J. M. Katopo untuk menyelenggarakan pendidikan di kawasan NIT termasuk daerah Maluku, kemudian dilanjutkan dengan program pemulihan pendidikan setelah integrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan penataan pendidikan Nasional Republik Indonesia. Bagian akhir bab ini menyangkut masa pergolakan Republik Maluku Selatan 1950, terutama menyoroti kemunduran pendidikan di Maluku yang diakibatkan oleh pergolakan sehingga mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan keamanan. Penjelasan akhir tulisan ini mengenai pembagunan pendidikan tinggi di Maluku.

II

GAMBARAN UMUM DAERAH MALUKU

II GAMBARAN UMUM DAERAH MALUKU

2.1 Kondisi Geografis

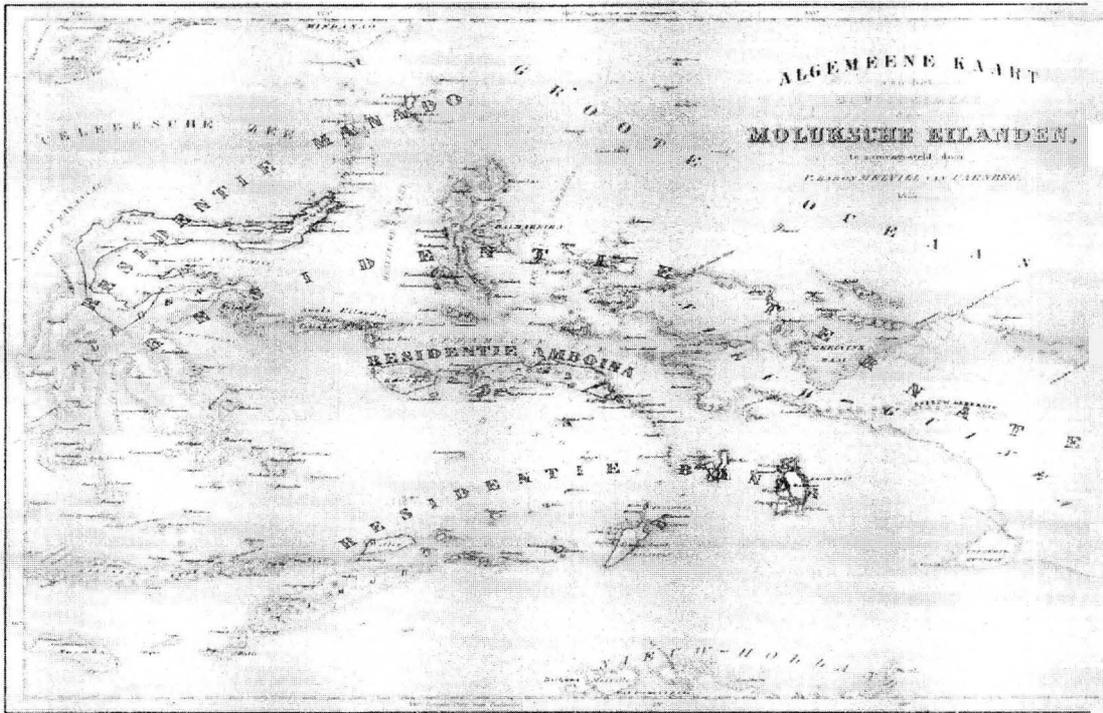
Secara astronomis, Kepulauan Maluku terletak antara 3° Lintang Utara dan 8° Lintang Selatan serta 122° Bujur Barat dan 132° Bujur Timur. Kepulauan Maluku memiliki luas 110 kilometer persegi dengan batas-batas wilayah Filipina (utara), Pantai New Guinea (timur), Kepulauan Wetar, Timor, Flores, dan Sumbawa (selatan), Sulawesi (barat) (Graaf dan Meijlan 1856: 1–5). Luas wilayah Maluku sebelum pemekaran Maluku Utara mencakup 80 ribu kilometer persegi yang dibagi ke dalam dua daerah, yaitu Ternate (Maluku Utara) dan Ambon (Maluku Selatan). Sebagian besar kawasan Maluku, sekitar 55 persen didominasi oleh Ambon (Maluku Tengah). Kepulauan Maluku dibatasi oleh dua Samudera, yaitu Lautan Teduh di utara dan Samudera Hindia di selatan. Daerah Maluku terdiri dari pulau-pulau kecil, kecuali Halmahera di Maluku Utara dan Seram di Maluku Tengah (Clemens dan Lindblad 1984: 10–15).

Di Maluku Utara, selain Pulau Halmahera, terdapat pulau penting lainnya seperti Obi, Sula, Morotai, Bacan, Makian, Ternate, Tidore, Taliabu, Magoli dan Maitara. Sama juga dengan wilayah Maluku Tengah, selain Pulau Seram yang besar terdapat pulau Buru, Ambon, Saparua, Nusalaut, Haruku, Banda, Manipa, Kelang, Buano, Ambalau, Teon, Nila, Serua dan ratusan pulau kecil lainnya. Di bagian Tenggara terdapat gugusan kepulauan Key, Toyando, Kur, dan Kepulauan Dobo. Lebih ke selatan terdapat Pulau Yamdena dalam ukuran besar dan dikelilingi oleh pulau-pulau Kisar, Wetar, Romang, Pordata, Leti, Moa, Lakor, Luang, Sermata, dan Selaru yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia. Hampir seluruh kepulauan ini termasuk ke dalam gugusan Kepulauan Tanimbar (Lundeking 1969: 1–10).

Wilayah gunung api terutama berada di Ternate, Tidore, Jailolo, dan Banda yang membuat tanah di daerah ini subur. Pulau-pulau besar seperti Seram, Halmahera, Yamdena, dan Buru merupakan daerah-daerah yang subur dan

terdapat beragam jenis flora dan fauna. Lautan yang mengelilingi kepulauan Maluku menyimpan banyak biota laut yang beragam jenis dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi kehidupan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar penduduk menjadi petani dan nelayan. Faktor kesuburan tanah dan letak geografi Maluku menyebabkan daerah itu memiliki potensi ekonomi berupa komoditi cengkih, pala, damar, kopra, dan hasil laut yang sangat menunjang aktivitas masyarakat termasuk pendidikan.

Pada masa kolonial wilayah administratif pemerintahan Maluku meliputi sebagian wilayah Sulawesi dan Papua Barat sehingga nama Maluku yang semula bermakna gugusan pulau Ternate, Tidore, Makian, dan Bacan karena pada 1817 pemerintah Hindia Belanda memperluas wilayah kekuasaan meliputi seluruh Maluku Utara, Maluku Selatan, dan sebagian Sulawesi Utara. Selama hampir setengah abad, yakni dari 1817 hingga 1866, Maluku berkembang menjadi sebuah wilayah yang luas sehingga dari sisi letak geografi meliputi seluruh wilayah Maluku Utara, Maluku Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara sampai ke Papua (Bosscher, *MoI* 1959). Pada 1866 pemerintah Hindia Belanda kembali mengubah wilayah ini dengan *Besluit* Gubernur Jenderal No. 2 Tanggal 6 Desember 1866 (*Staatsblad* Tahun 1866 No. 139) menjadi suatu wilayah pemerintahan baru dengan nama *Gouvernement der Molukse Eilanden*. Wilayah administrasi pemerintahan yang dimaksud dapat dilihat dalam peta pada Gambar 1.



Gambar 1

Peta Gouvernement der Moluckhe Eilanden

(Sumber: *Atlas van Nederlandsch-Indië*, Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

2.2 Penduduk dan Ekonomi

Keadaan penduduk dan ekonomi sangat terkait dengan kebijakan pemerintah kolonial dalam menerapkan manajemen pendidikan di Maluku saat itu. Peran masyarakat dalam memberikan subsidi untuk membantu penyelenggaraan pendidikan dan penyediaan dana dari pemerintah kolonial merupakan bagian dari keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di daerah Maluku. Faktor penduduk dan ekonomi daerah ini dipercaya telah memacu terciptanya suatu pertumbuhan aktivitas pendidikan. Berbagai suku bangsa, ras, dan pemeluk agama yang terpadu dalam sebuah keharmonisan hidup telah mendorong terciptanya suatu dinamika masyarakat Maluku ke arah perubahan secara cepat sehingga dengan sendirinya memerlukan pendidikan sebagai bekal hidup. Di sisi yang lain, sekecil apa pun, faktor ekonomi jelas berperan dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di Maluku, walaupun faktor ini didominasi oleh pemerintah kolonial Belanda.

Dari berbagai sumber diketahui bahwa hasil bumi Kepulauan Maluku berupa rempah-rempah, terutama cengkih dan pala, telah mendorong para pedagang dari berbagai wilayah Nusantara dan belahan dunia berdatangan ke daerah ini. Kelompok pedagang asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan etnik Bugis, Makassar, Jawa, Bali, Madura, Toraja, dan Buton tinggal tersebar di Kepulauan Maluku, dan sebagian bercampur dengan penduduk asli, bahkan sampai membangun kehidupan rumah tangga. Penduduk pendatang terutama menetap di daerah pesisir bercampur dengan sebagian penduduk asli yang rata-rata melakukan aktivitas perdagangan. Penduduk asli Kepulauan Maluku di pulau-pulau besar seperti Halmahera, Seram, Yamdena, Buru dan beberapa pulau lainnya, telah menempati wilayah itu jauh sebelum Masehi. Penduduk yang tinggal di pedalaman pulau-pulau besar, terutama Seram dan Halmahera, dianggap oleh orang-orang Belanda sebagai penduduk yang masih primitif dan mereka menyebut penduduk itu dengan istilah orang-orang “Alifoeroe” (Sachse 1907: 76–9).

Penyebutan “Alifoeroe” itu keliru karena suku-suku asli yang tersebar di kepulauan Maluku telah mempunyai nama tersendiri seperti Togutil di Halmahera, Alune, Wemale, Nuaulu, Huaulu, Bonvia, Nisaweke, dan Batik di Pulau Seram (Sachse 1907: 78–80). Di bagian selatan daya Kepulauan Maluku terdapat suku-suku asli seperti Oirta dan Meher yang mendiami Pulau Kisar (Paerara dan Lakalay 1987: 5–9). Masing-masing etnik memiliki bahasa sendiri. Namun bahasa yang digunakan secara umum adalah bahasa Melayu dengan berbagai dialek lokalnya dan menjadi *lingua franca* karena bahasa itu telah lama digunakan di Kepulauan Maluku terutama dalam perdagangan sehingga pada waktu proses pendidikan diterapkan pada masyarakat di daerah ini, bahasa Melayu dijadikan sebagai salah satu bahasa pengantar di sekolah.

Heterogenitas penduduk daerah Maluku sudah terbentuk jauh sebelum bangsa Eropa terutama Portugis, Belanda dan Inggris menduduki Kepulauan Maluku. Heterogenitas yang membentuk struktur penduduk Kepulauan Maluku sezaman dengan persentuhan para pedagang yang datang ke daerah Maluku baik dari Arab, Cina, Jawa, Bugis, Makasar, Sumatra, dan lain-lain. Pada masa pemerintahan kolonial, komposisi penduduk Maluku secara garis besar terdiri atas golongan pribumi, Eropa, dan Timur Asing yang didominasi oleh etnis Cina. Hal itu tampak dalam statistik 1905 hingga 1930 seperti pada Tabel 1.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Maluku menurut Etnis

DAERAH	TAHUN	PRIBUMI	EROPA	TIMUR ASING	JUMLAH
Ambon	1905	294.466	2.232	2.306	229.004
	1917	262.593	2.463	3.291	268.347
	1920	271.879	2.635	3.452	277.966
	1930	389.325	3.547	7.670	400.642
Ternate	1905	106.632	497	1.286	108.415
	1917	125.803	582	1.583	127.968
	1920	146.391	724	2.130	149.245
	1930	486.803	853	5.102	492.758
Maluku	1905	401.098	2.729	3.592	407.419
	1917	388.396	3.045	4.874	396.315
	1920	418.270	3.359	5.582	427.211
	1930	876.128	4.400	12.772	893.300

Sumber: Clemens dan Lindblad 1989: 58–60.

Pertumbuhan penduduk Maluku dua tahun pertama abad ke-20 seperti terlihat pada Tabel 1 tetap stabil disebabkan oleh kondisi kesehatan yang buruk dan wabah penyakit influenza pada 1918 yang mengakibatkan kematian di beberapa pulau di daerah Maluku naik hingga 90 persen, dan migrasi orang Maluku dari Keresidenan Ambon dan Ternate ke wilayah lain di Hindia Belanda, turut berpengaruh pada berkurangnya penduduk.¹ Data dalam Surat Edaran Bagian Perekonomian Indonesia Timur tentang cacah jiwa seluruh Indonesia Timur pada 1950 menunjukkan jumlah penduduk Maluku Utara 218.000 jiwa,

¹Menurut Clemens dan Lindblad (1989: 58–60), kepadatan penduduk di wilayah Ambon pada 1920 mencapai 6,18 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk di Maluku termasuk rata-rata luar Jawa (8,1), sangat rendah dibandingkan dengan konsentrasi penduduk di Jawa dan Madura yang mencapai sekitar 266 per kilometer persegi. Pada 1930, penduduk Maluku meningkat, tetapi pertumbuhan itu tidak mencapai 1,5 persen dari jumlah penduduk di Hindia Belanda. Pulau Ambon pada masa itu merupakan daerah berpenduduk terpadat di Maluku dengan 82 orang per kilometer persegi.

Maluku Selatan 147.000 jiwa, Kisar (Wondreli) 162.300 jiwa, dan *Gementee* Ambon bersama Saparua 161.550 jiwa. Pada masa NIT, keseluruhan penduduk negara bagian ini berjumlah 10.873.775 jiwa.²

Mata pencaharian orang Maluku pada umumnya adalah sebagai petani, nelayan, pedagang, buruh, dan pegawai pemerintah. Berbagai jenis rempah-rempah seperti pala, cengkih, dan komoditi andalan lain, yakni damar, kelapa, dan cokelat merupakan produk utama perkebunan penduduk. Terutama cengkih, pala, dan kelapa merupakan primadona perkebunan di Maluku sejak masa pemerintah kolonial. Perkebunan milik pemerintah kolonial hampir terdapat di seluruh pulau besar dan kecil di Maluku terutama Seram, Buru, dan Halmahera. Komoditi andalan itu dihasilkan oleh penduduk Maluku sebelum kedatangan bangsa-bangsa asing dan merupakan hasil tukar yang bernilai tinggi dengan para pedagang dari berbagai belahan dunia sehingga sangat berpengaruh ketika pemerintah kolonial mulai mengembangkan produk unggulan tersebut untuk kepentingan mereka. Ekspor rempah-rempah, hasil pertambangan, kehutanan, dan hasil laut dari Keresidenan Ambon dan Ternate pada 1924 rata-rata mencapai 2,5 juta gulden; 65 persen tercatat di Ambon (Clemens dan Lindblad 1989: 22–23).

Pada 1936, ekspor Maluku di bidang perikanan sebanyak 1,4 juta, dan minyak bumi mencapai 79,9 juta kilogram yang berasal dari Bula di Pulau Seram. Pada 1904, nilai ekspor dengan cepat meningkat dan mencapai puncak pada 1909 sebanyak 5 juta gulden. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya ekspor produk laut dari Keresidenan Ambon, sedangkan ekspor dari Keresidenan Ternate hampir tetap stabil. Faktor penurunan ekspor dari Keresidenan Ternate disebabkan oleh kurangnya produksi sehingga turut mempengaruhi nilai ekspor selama 1900–22 yang hanya mencapai 100 ribu gulden (Haga 1937: 29–31). Di Kepulauan Banda, perhatian besar dicurahkan pada perawatan kebun pala dan pengolahan produk yang telah berlangsung sejak awal abad ke-17. Pada 1930, jumlah kebun itu semakin banyak dan dikuasai oleh perusahaan dagang CHV Banda yang langsung mengapalkan produknya ke Eropa. Selain pala dan fuli, ternyata cengkih, vanila, minyak kayu putih, dan damar juga mendominasi ekspor Maluku (Clemens dan Lindblad, 1989: 257–62).³

²*Libat Arsip Tator 695/33, dan Surat Edaran Bagian Perekonomian Indonesia Timur tentang cacah jiwa penduduk seluruh Indonesia Timur 1950.*

³*Menurut Clemens dan Lindblad (1989: 230–70), ekspor komoditi pala mendominasi ekspor rempah-rempah.*

Di Seram terdapat konsensi damar yang hasilnya banyak dijual kepada pedagang Cina. Konsensi damar berada di bawah pengawasan CHV Banda dan firma dagang Manders. Ekspor damar sebelum Perang Dunia I di bawah setengah juta gulden. Selain Seram, daerah penghasil damar terpenting di Maluku adalah Pulau Bacan dan Obi di *Onderafdeeling* Bacan. Di Bacan pada mulanya Sultan yang menjadi pembeli damar dari para pengumpul, tetapi pada awal abad ke-20 permintaan damar terus meningkat sehingga para pengusaha Barat berusaha mendapat konsensi damar (Clemens dan Lindblad 1989: 253–54).

Perusahaan Kepulauan Bacan (BAM), Perusahaan Dagang dan Industri Diepenheim (HNO Diepenheim), Perusahaan Dagang Maluku (MHV), kongsi Obi-Gom, dan Firma Schmid en Jaendel menjadi pembeli produk damar. Ekspor Maluku juga diselingi dengan produk hutan berbagai jenis kayu terutama kayu cendana dari Halmahera. Kayu berharga lain dari Pulau Seram, Buru, dan kayu kuning dari Kepulauan Tanimbar yang berfungsi untuk pembuatan warna sarung (Clemens dan Lindblad 1989: 254). Komoditi lain seperti kopra merupakan hasil yang tidak kalah harganya sehingga mendorong masyarakat dan pemerintah Hindia Belanda menanam kelapa. Perkebunan kelapa seperti Liang Awaiya, Loki, Pulau Tujuh, di Pulau Seram dan Kepulauan Aru juga didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ekspor kopra ditangani oleh Perusahaan Dagang Celebes yang menurut data 1916 mencapai 250 ribu gulden. Di Ternate konsentrasi penduduk untuk menanam kelapa semakin banyak, bahkan perusahaan milik pemerintah seperti HNO Diepenheim, MHV, dan BAM ikut menanam pohon kelapa. Nilai ekspor kopra di Ternate pada 1930 mencapai tertinggi bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 3 juta gulden dengan produksi 15 ribu ton per tahun (Clemens dan Lindblad 1998: 253).

Selain kopra, penduduk Maluku juga menghasilkan kopi berkualitas tinggi. Perusahaan perkebunan milik pemerintah Belanda turut menanam kopi yang didatangkan dari Liberia. Ekspor kopi terbesar berasal dari Kepulauan Bacan di Maluku Utara (Ternate), mencapai 271.280 kilogram pada 1922. Produksi karet juga ditemukan di Seram Barat yang diusahakan oleh perkebunan Awaiya di Teluk Elpaputih, tetapi tidak banyak menghasilkan sehingga diabaikan oleh pemerintah Belanda pada waktu itu (Clemens dan Lindblad 1998: 256). Usaha

pab Ambon. Pada 1900–11, rata-rata nilai ekspor berjumlah satu juta gulden, namun pada tahun berikutnya merosot tajam tidak kurang dari 500 ribu gulden. Setelah 1914 beranjak naik dan pada 1927 nilai ekspor ini mencapai puncaknya sekitar 2 juta gulden per tahun, dan sejak itu pula harga ekspor mengalami fluktuasi.

perikanan di Maluku dikelola oleh penduduk pribumi dan orang-orang Makassar tetapi sejak awal abad ke-20 pemerintah Belanda ikut bergabung. Hak mencari ikan di luar jarak lima *vadem* atau lima mil diberikan kepada penduduk pribumi. Usaha ini dilakukan terhadap semua jenis ikan, kerang, teripang, mutiara, dan lola. Andil produk laut dalam seluruh ekspor Maluku terutama di Ambon selama 1906–14 mencapai 25–50 persen dengan hasil 1,5 juta gulden. Sedangkan di Ternate produk laut hanya mencapai 5–10 persen dengan jumlah di bawah 200 ribu gulden (Clemens dan Lindblad 1998: 257).

Selain produk ekspor yang telah disebutkan, masih terdapat hasil pertambangan terutama minyak bumi di Teluk Bula, Pulau Seram. Pertambangan minyak diusahakan oleh dua perusahaan utama, Koninklijke dan Shell, yang kemudian membentuk satu perusahaan pengelola yang disebut Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) yang menguasai seluruh industri minyak di Hindia Belanda. Pada 1920, sekitar 250 ton minyak bumi untuk pertama kali diekspor dan pada 1924 mencapai 400 ribu gulden dengan produksi 14 ribu ton. Menurut laporan resmi J. Tideman, Gubernur Maluku yang bertugas di Ambon pada 1928–30, jumlah ekspor minyak pada 1928 sebanyak 47 juta kilogram, kira-kira 300 kali lebih tinggi daripada catatan statistik yang hanya terbukti menunjukkan sebagian ekspor (Clemens dan Lindblad 1998: 261).

Kesalahan pencatatan tersebut disebabkan oleh pengangkutan sebagian besar minyak mentah yang berasal dari Bula di Pulau Seram ke Balikpapan untuk diolah sehingga informasi ekspor dicatat dalam angka-angka penyulingan BPM di Balikpapan. Statistik perdagangan juga sering salah dalam melaporkan nilai ekspor produk kopra karena kopra dari Maluku ternyata dikapalkan ke pelabuhan penampung Makasar dan Tanjungpriok, dan tidak disebut sebagai angka-angka produk ekspor Maluku (Clemens dan Lindblad 1998: 261). Ekspor kopra pada 1934 menurut statistik duane berjumlah 10,8 juta kilogram. Pada tahun yang sama, sebanyak 25,6 juta kilogram kopra Maluku diekspor melalui Makassar. Sistem regulasi seperti itu, dari sisi perhitungan ekonomi banyak merugikan masyarakat Maluku.

Dalam sektor perikanan, menurut Residen B. J. Haga dalam *Memorie van Overgave* 1936, upaya pemerintah Hindia Belanda ditekankan pada program penelitian untuk meningkatkan sumber pendapatan dari sektor tersebut. Menurut Haga, laut Maluku sangat luas dan banyak mengandung ikan namun

tidak terdapat ekspor ikan dari daerah ini ke negara-negara yang membutuhkan ikan segar. Kenyataan yang lebih membingungkan adalah terdapat banyak kapal motor Jepang ikut terlibat dalam usaha perikanan dan terbukti usaha mereka sangat menguntungkan. Setelah proses penelitian dijalankan sesuai usul pemerintah, maka kantor lokal Bank Perkreditan Rakyat Umum menyediakan dana untuk pembelian perlengkapan yang memadai bagi nelayan. Hasilnya menunjukkan kemajuan dalam usaha perikanan walaupun belum optimal. Pada laporan Residen B. J. Haga diperoleh angka-angka ekspor dan impor Maluku dalam kurun 1934–36 seperti terlihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2
Volume Ekspor Maluku 1934–36
(dalam jutaan kilogram)

KOMODITAS	TAHUN		
	1934	1935	1936
Kopra	36,4	52,7	49
Damar	5,8	5,5	6,0
Kayu Putih	0,14	0,14	0,3
Kopi	0,02	0,015	0,012
Kerang	0,8	0,3	0,6
Cengkih	0,2	0,09	0,6
Pala	1,8	0,9	1,6
Fuli	0,2	0,3	0,88
Mutiara	0,2	0,9	0,5
Jumlah	48	6,50	61

Sumber: *Memorie van Obergave van Bestuur van den Aftreden den Resident der Malukken*. Ambon, Juni 1937.

Tabel 3
Volume Impor Maluku 1934–36
(dalam jutaan kilogram)

TAHUN	BERAS	GULA	TERIGU	SEMEN
1934	16,0	1,3	0,8	-
1935	15,0	1,5	0,9	-
1936	23,5	1,8	0,8	2,7

Sumber: Memorie van Opgeave van Bestuur van den Aftreden den Resident der Malukken. Ambon, Juni 1937.

Hasil ikan dan minyak bumi pada 1936 adalah 1,4 juta dan 79,9 juta (angka ini tidak menyangkut ekspor melalui KPM sehingga yang tercatat dalam ekspor ini sebesar 79 juta kilogram minyak dari Bula). Yang jelas, pemerintah kebijakan untuk menjawab kesulitan ekonomi yang timbul akibat perang, baik di tanah jajahan maupun perang antara Belanda melawan Belgia selama 1825–1939 yang menuntut pemerintah Belanda mengeluarkan uang sangat banyak (Mubyarto 1987:26). Untuk mengatasi problem keuangan tersebut, pemerintah membuat siasat untuk menutup pengeluaran dari negara jajahan termasuk pengeluaran untuk membiayai pendidikan di daerah Maluku. Dari beberapa determinan tersebut dapat disimpulkan bahwa Tanam Paksa atau kerja paksa dianggap cara yang paling baik untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Rakyat miskin selalu menjadi bagian yang dirugikan karena dijadikan sebagai tenaga kerja murah untuk menambah kas negara penguasa.

Puncak kebijakan pemerintah terjadi pada waktu Politik Etis mulai dijalankan di seluruh tanah jajahan dengan menjalankan program peningkatan ekonomi rakyat di bidang irigasi, transmigrasi, dan pendidikan. Di Pulau Jawa irigasi dibangun agar panen padi tidak terancam gagal dan memperoleh hasil yang memuaskan. Transmigrasi berfungsi untuk penyebaran tenaga kerja di berbagai perkebunan milik pemerintah kolonial yang tersebar hampir di seluruh Hindia Belanda termasuk daerah Maluku. Dalam kebijakan Politik Etis, terutama transmigrasi, terlihat bahwa pemerintah kolonial mendatangkan tenaga kerja ke Kepulauan Maluku terutama Pulau Banda dan Bacan dalam jumlah yang sangat banyak untuk dijadikan sebagai tenaga kerja murah di perkebunan pala

Banda dan perkebunan kelapa maupun kopi di Pulau Bacan. Tenaga kerja murah itu pada umumnya didatangkan dari Sulawesi Tenggara dan Jawa karena saat itu penduduk di Pulau Banda telah meninggalkan kampung halaman mereka sejak perang melawan VOC pada 1612 dan memuncak pada tahun 1621 yang mengakibatkan banyak pemimpin pribumi di Banda terbunuh.⁴

Tenaga kerja di Pulau Bacan pada umumnya didatangkan dari Sulawesi Tenggara sedangkan beberapa perkebunan milik pemerintah kolonial Belanda di Seram Barat seperti Loki Bedrif dan Liang Awaiya mendatangkan para pekerja dari pulau-pulau kecil seperti Nusalaut, Saparua, Haruku, dan pulau-pulau di bagian tenggara terutama orang-orang Kisar. Sampai saat ini pekerja perkebunan baik di Pulau Banda, Seram, maupun Bacan menetap dan mengaku sebagai penduduk kepulauan tersebut, bahkan pada generasi mudanya tidak mengetahui lagi dari mana asal mereka. Yang jelas kehadiran para leluhur mereka di Kepulauan Maluku telah membantu jalannya roda perekonomian di daerah itu walaupun sesungguhnya untuk kepentingan penjajah Belanda. Namun, sekecil apapun aktivitas mereka, ada imbalan jasa yang mereka peroleh sebagai pegawai perkebunan selama bertahun-tahun.

2.3 Struktur Politik Tradisional

Sebelum kedatangan bangsa-bangsa asing, di Maluku terdapat berbagai kesatuan sosial dari klen tertentu, kemudian berkembang menjadi kekuatan politik lokal yang satu sama lain hidup independen dalam suatu unit teritorial sebagai daerah yang bebas tanpa tekanan politik apa pun. Di Maluku Utara kesatuan politik itu dikenal dengan istilah *soa* yang terdiri dari beberapa marga dan mendiami suatu dukuh (setingkat desa) yang dipimpin oleh seorang pemimpin *soa* bergelar *fomanyira*. Beberapa *soa* kemudian membentuk persekutuan lebih besar yaitu *gam* dengan seorang pemimpin bergelar *gimelaba*. Selanjutnya, *gimelaba* membentuk persekutuan yang lebih besar yaitu *boldan* yang dipimpin oleh seorang *kolano* (Nachrawy dalam Abdulrahman, dkk.: 2001: 167).

Struktur tradisional itu ternyata tidak bertahan lama karena pada waktu Boldan Ternate, Boldan Tidore, Boldan Bacan, dan Boldan Jailolo, mulai memeluk Islam sejak abad ke-12, struktur pemerintahan lokal semakin lemah

⁴Dijelaskan dalam surat Gubernur Jenderal Coen dan Dewan kepada Bewindhebbers, 16 November 1621 (Tiele 1621: 294–95).

dan akhirnya diganti dengan kesultanan. Setiap kesultanan kemudian membentuk pemerintahan, dan dilanjutkan dengan penguasaan atas beberapa wilayah teritorial yang menyebabkan hegemoni pada keempat kesultanan, dan berujung pada peperangan antar-mereka. Ternate berhasil memperluas pengaruhnya ke bagian selatan dan menguasai Pulau Seram bagian barat, Pulau Ambon, Haruku, Nusalaut, Banda, Saparua, Buano, Kelang, Manipa, dan Buru. Sejak penguasaan itu, Sultan mengadakan perjanjian dengan para pemimpin lokal atau *upu latu* di berbagai wilayah taklukannya (Nachrawy dalam Abdulrahman dkk.: 2001: 174).

Di setiap tempat yang ditaklukkan, ditempatkan seorang pemimpin yang bergelar *sangaji* yang dibantu oleh dua orang penasihat, yaitu *bobato duniawi* (berhubungan dengan hal keduniawian), dan *bobato akhirat* (imam, khotib, modin). Pejabat lain di bawah *sangaji* adalah *mataogu* atau *menyira* yang mempunyai kedudukan sebagai seorang pembantu *sangaji* untuk mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus berfungsi sebagai kepala kumpulan beberapa marga. Jabatan terendah struktur ini adalah *mahimo* yang bertugas menyampaikan hal-hal yang diperintahkan oleh *sangaji*, *mataogu* ataupun *menyira*. Sistem pemerintahan kesultanan yang terkenal dengan istilah *Al-Mamlakatul Molukije* ini diperkirakan dibentuk pada masa sultan pertama Baab Malamo Syekh Rafial Tasyriful Jafar Shidik sekitar 1257 (Nachrawy 1997: 174–77).

Pemerintahan kesultanan itu turut memengaruhi sistem pemerintahan tradisonal di Maluku Tengah yang telah melembaga di kalangan masyarakat terutama lembaga adat yaitu *saniri* (lembaga musyawarah). Struktur terkecil dari sistem pemerintahan lokal di Maluku Tengah adalah *lumatau* (kepala marga), kemudian beberapa *lumatau* menggabungkan diri menjadi satu *soa* yang artinya ikatan persekutuan beberapa marga yang dikepalai oleh seorang kepala *soa*. Beberapa *soa* membentuk persekutuan lebih besar, yaitu Hena dan Aman yang memiliki kedudukan setingkat negeri atau desa dan pemimpinnya bergelar *upu latu* yang memiliki makna ‘raja’ (Holeman 1923: 93–5).

Terdapat pejabat lain untuk membantu *upu latu* dalam fungsi koordinasi yaitu *mauweng* (unsur penyatu antara manusia dengan sang pencipta), *malessi* (panglima perang yang bertanggung jawab atas keamanan seluruh warga), dan *kewang* (berfungsi menjaga dan menata kelestarian lingkungan hidup). Pejabat yang secara hirarki bertanggung jawab kepada *upu latu* adalah kepala-kepala *soa* yang diangkat dari kelompok marga. Pemimpin terendah dalam sistem pemerintahan

saniri adalah *maatita* yang bertugas menyampaikan setiap berita dari *upu latu* kepada masyarakat yang berada di Hena dan Aman (Keuning 1973: 11–5).⁵

Di Maluku Tenggara, terutama di Kepulauan Key, terbangun sistem pemerintahan lokal mulai dari *rinraban* atau *ub*, yaitu “persekutuan inti rumah tangga” yang dipimpin oleh seorang kepala adat yang bergelar *Yamab-Ar-Rin*. Dari ikatan beberapa *ub* membentuk *rabanjam* atau gabungan beberapa marga yang dipimpin oleh Halaai, seorang pemimpin spiritual. Beberapa *rabanjam* membentuk persekutuan lebih besar dengan istilah *oboivotun*. Dalam perkembangannya beberapa *oboivotun* membentuk aliansi atau kekuatan politik lokal seperti *Loor Lim* dan *Loor Siiu* atau Persekutuan Lima dan Sembilan.

Sebelum kedatangan bangsa Eropa ke daerah itu berbagai kelompok sosial telah membentuk suatu aliansi atau ikatan politik teritorial (federasi), meliputi seluruh Maluku Tengah, dan di Maluku Tenggara untuk mempersatukan berbagai *oboivotun* atau desa-desa di wilayah itu. Aliansi *Pata Siva* dan *Pata Lima* (di Seram), *Uli Siva* dan *Uli Lima* (di Ambon Lease), *Loor Siiu* dan *Loor Lim* (di Maluku Tenggara), *Orlima Orsiva* (di Kepulauan Banda), merupakan bentuk kekuatan politik lokal yang hidup dalam ikatan politik, sosial, ekonomi, dan budaya tanpa tekanan walaupun ada respons dari Kesultanan Ternate dan Tidore, untuk menguasai berbagai ikatan politik lokal itu (Keuning 1973: 44–6).

Setelah berhasil menguasai sebagian wilayah selatan di Maluku, Ternate kembali melancarkan ekspansi ke barat untuk menguasai Sulawesi Utara, dan menghambat gerakan Kerajaan Gowa yang pada 1626 menguasai Sulawesi Selatan dan Tenggara terutama Buton, Muna dan Kepulauan Sula. Sebagian Pulau Halmahera dan pulau-pulau bagian utara Morotai sampai ke Mindanao juga dikuasai oleh Ternate. Tidore menguasai Pulau Seram bagian timur, terutama Gorong dan Seram Laut, Kepulauan Raja Ampat, Kepulauan Misol, dan sebagian besar daerah pesisir Papua Barat termasuk Kepulauan Aru dan sebagian Maluku Tenggara (Leirissa 1975: 1–4).⁶

⁵Menurut Holeman (1923: 96), *uli* dapat disebut *suku bangsa (stam)*, yaitu suatu kelompok masyarakat yang besar dan kadang-kadang lebih kecil, terdiri dari orang-orang yang merasa bahwa mereka adalah kesatuan tersendiri serta beranggapan berasal dari satu keturunan di samping kelompok lain yang strukturnya sama. *Uli* itu kemudian terbagi dalam teori sembilan yang dijumpai pada *Uli Siva* dan lima pada *Uli Lima*. Subkelompok yang terdapat dalam *uli* disebut *bena dan aman* (nama yang masih dikenal pada masyarakat muslim dan masyarakat adat di Pulau Seram terutama kelompok *Pata Siva* dan *Pata Lima* di Seram Barat). *Hena dan aman* terbentuk dari ikatan beberapa marga yang dikenal dengan istilah *soa*, kemudian terdapat struktur terkecil di bawah *soa* ialah *luma tau*, sama dengan keluarga inti. Sebagai perbandingan, baca Leirissa (1987: 5–7).

⁶Menurut Nachrany (dalam Abdulrahman 2001), Sultan Zainal Abidin dari Ternate memiliki kekuatan

Kedua kesultanan saling bermusuhan dan bersaing ketat karena didukung oleh sejumlah daerah taklukan yang dijadikan sebagai aliansi untuk memperkuat pertahanan masing-masing. Hegemoni dua kekuasaan itu mengakibatkan Kerajaan Jailolo dan Bacan kalah dalam persaingan karena tidak mendapat daerah taklukan yang besar untuk dijadikan sebagai aliansi sehingga akhirnya bergabung dengan Ternate membentuk suatu kekuatan lokal dan merangsang proses ke arah integrasi teritorial Maluku. Kekuatan aliansi itu digunakan oleh Ternate untuk melanjutkan keinginannya sebagai penguasa lokal di Maluku walaupun selalu bersaing dengan Tidore (Leirissa 1975: 3).

Proses ke arah intergrasi teritorial tersebut tidak sepenuhnya menjangkau Maluku secara utuh karena pada saat proses intergrasi itu disinergikan oleh dua kekuatan lokal, muncullah di Ternate dan Tidore, pendatang baru dari Portugis di Ternate pada 1512 dan diterima oleh sultan sebagai tamu kehormatan dan dijadikan sebagai sekutu untuk membendung penyerangan yang sering dilancarkan oleh orang-orang Tidore. Beberapa kesepakatan atau perjanjian antara Ternate dan Portugis ternyata membuka peluang kepada Portugis untuk memainkan peranannya dalam bidang politik pemerintahan dan ekonomi secara perlahan-lahan. Pada lain kesempatan, Spanyol tiba di Tidore pada 1522 dan mulai memainkan peran baru bersama Sultan Tidore dan masyarakat menghadapi Ternate dan sekutunya Portugis yang menyebabkan perang antara kedua kesultanan itu semakin meluas dan akhirnya dimenangkan oleh Ternate (Leirissa 1975: 3–4).

Hubungan antara Ternate dan Portugis tidak bertahan lama karena Portugis mulai menunjukkan sikap monopoli dan arogan dalam bidang perdagangan dan pemerintahan sehingga terjadi peperangan antara orang-orang Portugis melawan Ternate. Puncak pertikaian terjadi ketika Sultan Ternate dibunuh oleh Portugis sehingga putranya Baabullah bereaksi mengangkat senjata melawan Portugis. Ia mendapat bantuan dari Belanda yang pada waktu itu telah menduduki Pulau Ambon sejak 1605 dan seterusnya ke Ternate untuk melakukan hubungan kerja sama dengan pihak kesultanan (Des Alwi 2005: 289–94).⁷

dan perangkatnya yang sangat kuat sehingga dapat menguasai Halmahera, Ambon, Papua, Minabasa, Sangir, Mangindano, Zulu, Brunai, Sabah, Gorontalo, Luwuk-Banggai, Gowa, Buton, Bone, Bima, Alor, Lawayong (Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara Timor).

⁷*Leirissa (1975) mengatakan bahwa Sultan Tidore mencoba mengambil keuntungan dengan tibanya pendatang baru yaitu orang-orang Spanyol pada 1522 melalui Filipina.*

III

AWAL PENDIDIKAN FORMAL DI MALUKU

III

AWAL PENDIDIKAN FORMAL DI MALUKU

3.1 Sistem Pendidikan Setelah Kedatangan Islam

Dari berbagai catatan sejarah dan bukti-bukti arkeologi yang ditemukan, diperkirakan Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke 13 bersamaan dengan berkembangnya dunia perdagangan dan tumbuhnya pengetahuan dan teknologi baru yang memacu tumbuhnya peradaban-peradaban baru di dunia Barat. Jalur-jalur perdagangan kuno yang sejak lama menjadi urat nadi perdagangan yang berkembang sebelum masehi, kembali diramaikan, dan bukan saja melalui jalur darat yang dikenal dengan istilah sejarah jalur sutera tetapi dengan menggunakan kapal-kapal layar dengan muatan berpuluh-puluh ton dan kekuatan angkatan laut yang memadai. Dengan perlengkapan memadai para pedagang asing yang berasal dari Arab, Gujarat, India, dan Cina yang sudah lama melakukan hubungan dengan secara teratur dengan daerah-daerah di Nusantara terutama kerajaan-kerajaan di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil yang semuanya menghasilkan rempah-rempah dan hasil bumi mahal dan sangat dibutuhkan di dunia Barat.

Pada umumnya para saudagar yang datang ke Nusantara telah memeluk ajaran Islam sehingga kontak dagang yang dilakukan sekaligus mereka melakukan sosialisasi secara damai dan pada akhirnya daerah Nusantara menjadi ladang subur bagi para mubaliki yang datang bersamaan dengan para pedagang. Pada awal proses penyebaran Islam dilakukan bukan saja diberikan tanggungjawab kepada para mubaliki saja tetapi para pedagang juga sama-sama memiliki andil dalam proses itu sehingga dengan cepat dikenal oleh masyarakat terutama daerah-daerah pesisir di kepulauan Maluku. Strategi inilah yang menjadi ukuran keberhasilan dari proses penyiaran Islam yang diberikan kepada masyarakat di daerah Maluku secara bertahap, dan proses pendidikan formal dalam bentuk yang sangat sederhana juga dilakukan secara bersamaan.

3.1.1 Pola Pendidikan di Langgar

Sistem pendidikan ini berlaku umum disetiap daerah yang telah memeluk ajaran Islam. Pada dasarnya pelajaran yang diberikan berupa membaca beberapa bagian dari Al-Qura'an terutama surat surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek dalam Juz Amma dengan tujuan dapat melaksanakan ibadah (Abdullah, 1984: 8)⁸. Pada awal masuknya Islam ke Maluku, hampir disetiap negeri (desa) muslim, pendidikan dilaksanakan oleh lembaga agama seperti Langgar dan rumah Mangaji (mengaji). Langgar merupakan lembaga pendidikan Islam pada tingkat permulaan dengan tujuan pendidikannya mendidik anak-anak untuk dapat membaca huruf Arab dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau para siswa di langgar ini telah lulus membaca Al-Qur'an maka, berakhirlah pendidikan di Langgar (Sedyawati, dkk 1991: 53-53).

Di Maluku setiap langgar dikelola oleh seorang petugas yang disebut Modim. Seorang Modim mempunyai tugas untuk mengajar agama kepada setiap anak yang sudah mulai dianggap dewasa dan mulai mengenal kehidupan secara luas. Langgar biasanya ada yang diperuntukan secara khusus untuk wanita dan laki-laki yang dianggap sudah memiliki kemampuan untuk membaca Al-Qur'an. Dilembaga ini anak didik secara individual dan dibimbing satu persatu secara bergilir untuk menghafal ayat-ayat Al-Qur'an (wawancara dengan Bapak S. Mawen di Negeri Kasieh pada tanggal 11 November 2013).

Pola pendidikan dilanggar melibatkan orang tua murid sehingga pola pengawasan terhadap anak-anak juga tetap dilakukan setiap waktu. Kebiasaan di desa-desa Muslim Maluku, dalam hal melaksanakan pengajaran di langgar, biasanya berlangsung di pagi dan sore hari selama 2 jam sehingga anak-anak dididik untuk menggunakan waktu mereka secara efektif dan efisien. Pendidikan diwaktu pagi mulai dari 6.30-7.30 WIT setelah shalat subuh, dan sore hari dimulai pukul 16.00 sampai magrib dengan tujuan mereka dapat mengikuti shalat magrib secara teratur. Lama pendidikan atau masa belajar di lembaga Langgar tidak dibatasi karena sasarannya adalah sampai

⁸Menurut Yusuf Abdullah dalam karyanya "Masuknya Islam Ke Indonesia" bahwa penyelenggaraan pendidikan islam yang dilaksanakan oleh Langgar maupun mangaji, merupakan pelajaran yang sangat sederhana karena tidak membutuhkan guru yang banyak dan sarana prasarana berupa gedung maupun perlengkapan belajar moderen.

anak didik bisa membaca Al-Qur'an dan menguasai ayat-ayat penting untuk kepentingan dakwah. Mereka yang berhasil menimba ilmu agama di langgar-langgar dan secara praktek mahir membaca Al-Qur'an, akan diambil untuk menjadi guru mengaji baik untuk kelompok wanita maupun laki-laki. Disamping Langgar sebagai pusat pendidikan agama, terdapat pula kelompok-kelompok pembaca Al-Qur'an yang sering disebut Mangaji dan biasanya dituntun oleh seorang guru mangaji yang dianggap mahir dan telah menguasai seluruh isi Al-Qur'an. Pola pendidikan semacam ini di beberapa negeri Muslim Maluku disebut pendidikan Tikar. Artinya selama proses pendidikan berlangsung anak-anak murid pengajian itu duduk diatas tikar sambil membaca dan menulis Al-Qur'an (wawancara dengan U. Thalib pada tanggal 20 November 2013 di Kota Ambon).

Kedua lembaga yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan ini dilaksanakan tanpa memungut biaya pendidikan dan para muridnya bisa dari kalangan mana saja tanpa dibatasi. Sistem atau pola perekrutan seperti inilah yang membuat banyak minat dari anak-anak untuk mengikuti pendidikan sehingga anak-anak secara sukarela menimba ilmu di lembaga pendidikan langgar tanpa mendapat tantangan apapun. Pola pendidikan semacam ini telah melahirkan anak-anak didik yang menguasai ilmu agama Islam dan para lulusannya yang laki-laki dapat berdakwah di mesjid-mesjid sebagai seorang Imam dalam menyampaikan amanah Allah (wawancara dengan Imam mesjid Kasieh S. Latumapayahu pada tanggal 13 September di Negeri Kasieh 2013).

Mereka yang dianggap cakap diangkat sebagai seorang Imam mesjid ataupun Modim untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan Jamah. Di Maluku ada satu hal yang agak berbeda dengan daerah lain yaitu kalau anak didik yang telah berhasil dari pendidikan di langgar ataupun di rumah-rumah mangaji, maka orang tua dari anak didik tersebut membuat acara Khatam Al-Qur'an sebagai suatu pertanda bahwa ia telah berhasil menguasai Al-Qur'an (wawancara dengan Imam mesjid Kasieh S. Latumapayahu di Negeri Kasieh tanggal 13 September 2013). Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan doa selamat sebagai pembukaan dan diikuti oleh pembacaan ayat-ayat Alquran oleh anak yang telah tamat belajar di langgar ataupun di rumah-rumah mangaji.

3.1.2 Pola Pendidikan di Pesantren

Di Maluku pada awal masuknya Islam tidak ditemukan pesantren, tetapi orang-orang Maluku yang pernah belajar di Pesantren yang terdapat di pulau Jawa dan berhasil membawa pengaruh tersebut ke Maluku sehingga ajaran tersebut dapat diterima dengan baik tanpa ada tantantangan yang berarti dari pemeluk Animisme dan Dinamisme di daerah ini. Sumber historiografi tradisional yang terkenal “Hikayat Tanah Hitu” yang ditulis oleh Imam Rijali salah seorang pejuang yang pernah menetap di Jazirah Hitu pantai Utara pulau Ambon, ditulis kembali oleh Valentijn sehingga dari catatan itu diperoleh keterangan bahwa beberapa puluh tahun sebelum kedatangan orang-orang Portugis ke pulau Ambon sudah ada hubungan antara orang Ambon khususnya penduduk Jazirah Hitu dengan dunia luar terutama dari pulau Jawa dan Ternate. Dijelaskan bahwa Pati Putih atau yang disebut Pati Tuban sudah pernah mengunjungi pulau Jawa dan didaerah ini ia belajar ilmu agama Islam dan setelah kembali ke Hitu ia menjadi guru agama untuk menyiarkan Islam kepada para penduduk di negeri-negeri yang tersebar di pesisir tanah Hitu.

Dijelaskan oleh Valentijn bahwa sewaktu Pati Putih berada di pulau Jawa ia bertemu dengan salah seorang sultan dari Kesultanan Ternaateyang sama-sama mengikuti pendidikan di sebuah Pesantren di Jawa (Keuning, 1973: 8-9). Kalau dianalisa, kedua pemimpin yang berasal dari Maluku yaitu Pati Putih dan Sultan dari Ternate dikirim ke Tuban yang terletak di Jawa Timur untuk mengikuti pendidikan agama Islam yang pada waktu itu sudah berkembang luas di tanah Jawa. Baik Pati Tuban maupun Sultan dari Ternate adalah orang-orang yang berpengaruh luas di daerahnya sehingga diambil oleh pemimpin-pemimpin pesantren untuk mendalami ilmu agama Islam agar kelak mereka dapat menyiarkan kembali bagi masyarakatnya tanpa ada tantangan. Hubungan ini sebenarnya berawal dari para pedagang Islam yang datang dari pulau Jawa ke Jazirah Hitu dan terjadi kontak yang lebih mengarah pada pengembangan ajaran agama Islam di Maluku.

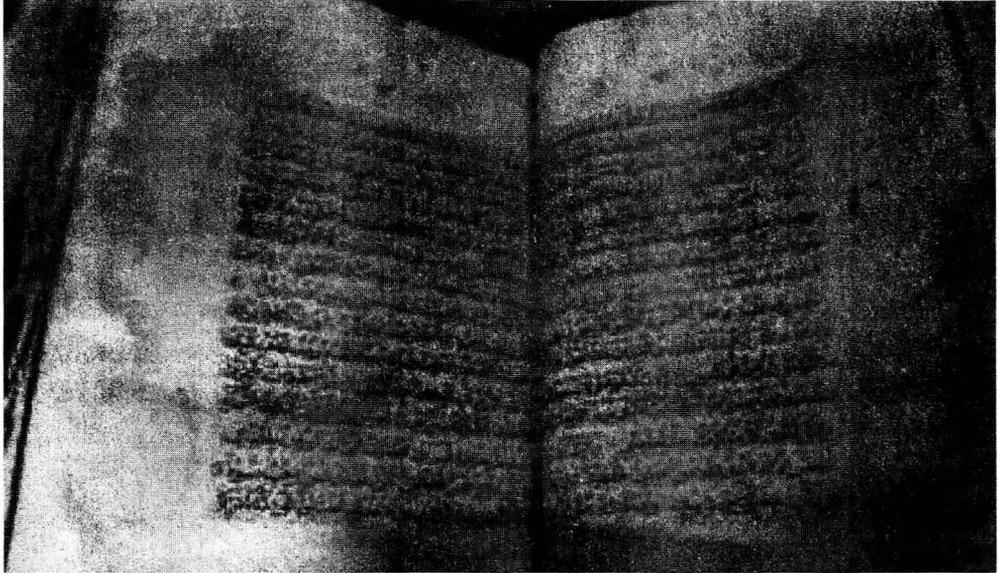
Pati Putih adalah nama seorang guru agama yang menyiarkan agama Islam di tanah Hitu dan mempunyai gelar Patih Tuban setelah ia mengikuti pendidikan Islam di lembaga Pesantren yang ada di Tuban. Mengenai Sosok Pati Tuban dan Imam Rijali yang sudah lama memeluk Islam dan berprofesi

sebagai guru agama ataupun Imam, perlu ditelusuri lebih cermat lagi dari berbagai sumber lisan karena ada kemungkinan kedua tokoh ini pernah mempunyai lembaga dakwah semacam pesantren yang pernah ada di Jazirah Hitu pulau Ambon bagian Utara.

Dari gambaran di atas dapat diperkirakan bahwa pendidikan Islam sudah dilakukan secara baik lewat lembaga-lembaga pendidikan Islam, apapun bentuk dan namanya tetapi telah dilakukan aktivitas pendidikan, karena saat itu pola pengajaran dimulai dengan pengenalan membaca dan menulis huruf-huruf arab untuk kepentingankhotbah di Mesjid danpenyiaraan agama Islam ke berbagai negeri di setiap pulau yang tersebar di Maluku. Salah satau tulisan Arab dalam bentuk gulungan kertas yang tersimpan di Negeri Iha yang terletak di pesisir jazirah Huamual pulau Seram bagian Barat merupakan salah satu karya kuno yang bermanfaat untuk mempelajari keberhasilan pendidikan di daerah Maluku terutama menyangkut ketrampilan menulis huruf Arab untuk kepentingan khotbah di Mesjid. Sayangnya benda ini dianggap keramat oleh penduduk negeri Iha sehingga tidak bisa diperlihatkan kepada siapapun termasuk tim penulis.

Pengenalan tulisan Arab kepada masyarakat Maluku juga dilakukan kepada penduduk di Jazirah Hitu, sehingga telah melahirkan orang-orang yang pandai dalam membaca Al-Qur'an dan menulis Al-Qur'an di wilayah tersebut. Salah satu bukti dari hasil belajar menulis dengan menggunakan huruf-huruf Arab adalah penulisan salah satu karya dalam bentuk Al-Qur'an kuno yang berhasil ditulis oleh Imam Muhamad Ari Kulapessy pada tahun 1550. Ia adalah seorang Imam mesjid di negeri Kaitetu yang sebelum kedatangan bangsa Eropa terutama Portugis dan Belanda, negeri tersebut masih berada di perbukitan Wawane tepatnya di arah selatan negeri Kaitetu sekarang. Bahan kertas yang dipakai oleh Imam Ari Kulapessy berasal dari Eropa, dan kini masih tetap tersimpan di Mesjid Tua Wapauwe sebagai arsip kuno. Benda ini sampai sekarang tetap dijaga dan dirawat oleh pengurus mesjid dan banyak dikunjungi para pesiarah baik dalam negeri maupu mancanegara.

Gambar 2
Alquran di Mesjid Tua Wapauwe, Negeri Kaitetu



Sumber: Dokumentasi S.Touwe.

3.2 Sistem Pendidikan pada Masa Portugis

Setelah menguasai Malaka pada awal abad ke-16, orang-orang Portugis bergerak mencari daerah sumber rempah-rempah di Indonesia bagian Timur. Mereka menguasai pulau-pulau Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan, Ambon dan Banda yang merupakan daerah penghasil rempah-rempah. Perjalanan mencari rempah-rempah ternyata bukan saja menjadi tujuan utama karena penyiaran agama Kristen Katolik merupakan tujuan yang sangat penting dan dianggap sebagai misi suci, sehingga dalam setiap pelayaran kemanapun pasti selalu diikuti oleh misionaris Roma Katolik. Oleh karena tugas utama adalah menyiarkan agama Roma Katolik maka, setiap daerah yang disinggahi, pasti misi penyiaran akan dilaksanakan dengan cara menawarkan kepada penduduk daerah yang disinggahi untuk memeluk agama Roma Khatolik, dan tugas ini hanya bisa dilaksanakan oleh padri-padri atau misionaris dari “ordo Franciskan”. Sesudah orang-orang dibaptiskan, langkah berikutnya adalah memberikan “pendidikan” kepada mereka agar agama baru yang anut itu dapat diresapi dan didalami. Peran para misionaris dari Ordo Fransiskan ini kemudian terdesak oleh kaum

“Yezuit” (salah satu kelompok Padri Khatolik) di bawah pimpinan Franciscus Xavierius (1506 – 1552) yang kemudian menjadi peletak dasar dari Katholicisme di Indonesia termasuk di daerah Maluku.

Catatan sejarah mengenai masuknya Portugis di Maluku khususnya di pulau Ambon dan Ternate, bertepatan dengan ketidakstabilan politik di daerah ini, karena terjadi perebutan kekuasaan oleh Ternate dan Tidore yang menyebabkan peperangan antara kedua kesultanan dimaksud. Di sisi yang lain pada waktu itu terjadi peperangan antara suku-suku di Pulau Seram khususnya Seram Barat dengan penduduk pulau Ambon bagian Utara yang dikenal dengan nama Jazirah Hitu. Kondisi politik yang tidak harmonis antarkedua kesultanan maupun negeri-negeri yang bertikai saat itu dimanfaatkan oleh Portugis untuk mendapatkan dukungan. Demikian juga dengan para penguasa dalam hal ini Sultan dan Upu Latu = Raja Negeri selaku penguasa yang disinggahi oleh Portugis, karena dari sisi strategi politik mereka berharap Portugis akan membantu melawan musuh-musuh yang selalu menjadi batu sandungan dalam kekuasaan mereka.

Hal tersebut pernah terjadi ketika Portugis pertama kali tiba di negeri Hitu yang terletak di pantai Utara pulau Ambon. Masyarakat Hitu dan negeri sekitarnya menerima Francisco Serrao selaku pemimpin ekspedisi bersama delapan orang anak buah kapalnya pada tahun 1512 dengan harapan dapat bekerja sama untuk menghalau musuh-musuh terutama yang datang dari pesisir seram Barat. Pada waktu itu kapal pelaut Portugis karam di celah Nusa Penyu, dan akhirnya terdampar di Nusa Telu (pulau tiga) di depan negeri Asilulu ujung barat Hitu kemudian Mereka di terima oleh raja negeri Hitu Meseng selaku penguasa tanah Hitu. Menurut Rumphius dan Valentijn, bahwa mereka diberikan tempat tinggal di sekitar sungai Pikapoli yang berada di selatan negeri Mamala. Selama beberapa tahun mereka tinggal ditempat itu, namun penduduk Hitu yang beragama Islam menolak menerima orang Portugis karena dua alasan yaitu; pertama tindakan mereka yang tidak sopan dan kasar terhadap penduduk. Kedua adalah karena keterikatan mereka dengan agama Kristen yang bersebrangan dengan agama Islam yang telah dianut oleh penduduk di daerah Hitu dan sekitarnya.

Persahabatan yang telah diikat ternyata tidak bertahan lama karena Portugis menekan masyarakat untuk memeluk ajaran agama Kristen sehingga mereka diusir dari Hitu. Alasan lain pengusiran ini adalah penguasa negeri Hitu Meseng, menganggap Portugis telah melanggar kedaulatan orang Hitu dengan keinginan

mereka untuk membangun benteng dan membuat peraturan-peraturan yang mengikat masyarakat. Empat Perdana Hitu memerintahkan Portugis pindah ke Leitimur bagian Selatan Pulau Ambon karena menganggap mereka kafir sama dengan orang-orang di Leitimur bagian selatan Pulau Ambon yang pada waktu itu penduduknya belum banyak memeluk Islam. (Keuning, 1973: 16). Pendapat Rumpius dan Valentijn bahwa Antonio de Brito tahun (1522-1525), tampaknya memindahkan pemukiman kecil Pikapoli ke selatan kira-kira ke negeri Poka atau ke Hukunalo, negeri Rumahtiga sekarang dan pada akhirnya ditahun 1576, Sancho de vasconcelos membangun benteng baru di teluk yang diberi nama oleh penduduk Ambon “Benteng Kota Laha (benteng di teluk). Sejak itu pula penduduk Leitimur (bagian selatan pulau Ambon) merasa mendapat perlindungan dari Portugis sehingga mereka mau menjadi Kristen dan pendidikan agama Kristen Katolik mulai dilaksanakan oleh para misionaris atau padri Katolik yang tinggal di benteng Kota Laha (Valentijn dalam H Jacob, 1975: 429).

Pada tahun 1536, penguasa Portugis di Maluku (Ternate) bernama Antonio de Galvao, mendirikan sekolah seminari untuk anak-anak dari pemuka-pemuka Bumiputera. Sistem pengajaran di sekolah ini selain pelajaran agama diajarkan juga membaca, menulis dan berhitung. Menyangkut bahasa yang dipakai sebagai alat komunikasi di sekolah seminaria yang didirikan, samasekali tidak ada sumber sejarah yang menjelaskan mengenai hal itu, namun dapat dianalisa bahwa bahasa yang dipakai adalah bahasa Melayu disamping bahasa Latin yang dipakai oleh orang-orang Portugis. Unsur-unsur bahasa yang dipakai saat itu masih tersisa dalam setiap komunikasi sampai saat ini di Maluku seperti: kadera (kursi), capeu (topi), Kapitein panglima (perang), Marinyos (pesuru/pembawah berita), potlot (pensil), dan lain-lain.

Sekolah-sekolah semacam itu didirikan pula di Pulau Solor, yang mencapai 50 orang murid dan dari beberapa sumber diketahui bahwa bahasa latin diajarkan pada sekolah seminari yang didirikan didaerah itu. Murid-murid Bumiputera yang ternyata dapat mengikuti pelajaran dan ingin sekolah lanjut, dapat meneruskan studi di Goa (India), pusat kekuatan Portugis di Asia. Fransiskus Xaverius sendiri pada tahun 1547 pergi ke Goa dari Ternate dengan membawa pemuda-pemuda Maluku untuk melanjutkan pendidikan di Goa, namun kelanjutan dari aktivitas pemuda-pemuda yang dibawa oleh Fansiskus Xaverius tidak diketahui secara pasti. Penyebaran agama Katolik di daerah kepulauan Maluku, maupun proses

penyelenggaraan pendidikan tidak banyak mengalami kemajuan yang berarti karena selain hubungan orang-orang Portugis dengan Sultan Ternate kurang baik, mereka juga harus bersaing dan berperang melawan orang-orang Spanyol maupun orang-orang Inggris yang juga ingin menguasai daerah Maluku yang kaya akan rempah-rempah cengkih dan pala.

Pertarungan untuk merebut daerah Maluku pada akhirnya dimenangkan oleh Belanda yang dapat menghalau orang Portugis, Spanyol dan Inggris dari wilayah bagian Timur Nusantara, dan kemudian mengambil alih segala harta benda termasuk milik Gereja Khatolik beserta lembaga pendidikannya. Upaya Belanda ternyata tidak sepenuhnya berhasil karena ternyata sebagian besar penduduk daerah Maluku masih tetap setia terhadap agama Roma Khatolik hingga sekarang bahkan lembaga-lembaga pendidikan Katolik cukup banyak dan tetap eksis sampai saat ini. Penganut katolik terbanyak berada pada Maluku Tenggara dengan konsentrasinya terbanyak di Kepulauan Key, dan Saumlaki.

3.3 Pendidikan pada Masa VOC

Abad ke-16 merupakan zaman yang tidak damai di Maluku karena perang terjadi di mana-mana, terutama di Pulau Ambon dan pulau-pulau lease (Saparua, Nusalaut, dan Haruku), dan Pulau Seram. Pertentangan terjadi baik dengan Portugis, Ternate dan antara negeri-negeri yang ada di daerah Maluku sendiri. Kehadiran orang-orang Belanda yang tergabung dalam badang dagang VOC merupakan faktor yang mengganggu ketentraman penduduk dan turut memperuncing pertentangan yang sudah lama terjadi. Kehadiran VOC pada akhirnya membagi seluruh negeri dalam dua kelompok kekuatan yaitu ada kekuatan pro Belanda dan yang lain bermusuhan sehingga terus-menerus saling perang (Keuning, 1973: 20)

Puncak dari pertentangan ini setelah VOC mendapat hak *Octrooi* yang di dalamnya tercantum hak monopoli, sehingga perdagangan bebas yang biasa dilakukan oleh penduduk Maluku dengan pedagang Nusantara dan pedagang asing lainnya makin terancam. Walau perjanjian yang dibuat tahun 1605 antara van der Haghen dan Empat Perdana di Hitu tidak dicantumkan suatu pasal tentang monopoli, namun perjanjian itu terasa sangat membatasi ruang gerak penduduk Hitu dalam perdagangan bebasnya dengan para pedagang yang biasa membawa kebutuhan hidup sehari-hari berupa bahan-

bahan makanan dan pakaian yang biasa dilakukan secara barter (tukar menukar).

Kemenangan VOC atas Portugis dan kebebasan dalam perdagangan cengkih yang diberikan oleh pihak Hitu sejak tahun 1605, memaksa Belanda untuk mengklaim semua daerah yang menurutnya pernah dikuasai oleh Portugis, sehingga daerah-daerah tersebut hanya boleh berdagang dengan VOC. Tindakan VOC ini tidak memperhatikan bahwa ada daerah-daerah di Maluku Tengah yang merupakan daerah kekuasaan Sultan Ternate, seperti Seram Barat dan Selatan yang kaya dengan hasil cengkehnya, terutama Jazirah Hoamual yang tak pernah dikuasai Portugis. Kehadiran pedagang Nusantara dan bangsa asing lainnya yang sering mendatangi Maluku secara bebas setelah VOC bercokol di Maluku, dirasakan sangat merugikan VOC dalam perdagangan rempah-rempah sebab itu VOC memaksakan keinginan sepihaknya kepada penduduk agar mengusir para pedagang yang dianggap merugikan mereka dari daerah yang telah mereka duduki.

Namun karena harga cengkih yang ditentukan oleh VOC terlalu rendah, ditambah lagi dengan kesulitan untuk memperoleh bahan-bahan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat, semakin sulit diperoleh, akhirnya mendorong penduduk di daerah-daerah penghasil rempah-rempah tetap melaksanakan perdagangan secara diam-diam tanpa diketahui oleh pihak VOC. Tindakan penjualan rempah-rempah dianggap melanggar peraturan yang telah disepakati antara penguasa VOC dengan pihak penguasa bumiputra, sehingga VOC melakukan tindakan tegas dengan cara menjalankan pelayaran *hongitochten*⁹ untuk mengawasi perdagangan cengkeh. *Hongitochten* merupakan bagian dari *rodi* atau wajib kerja dengan melakukan pekerjaan untuk kepentingan penguasa VOC

⁹*Hongi adalah istilah rakyat bagi armada kora-kora mereka yang bergerak untuk berperang. Oleh VOC ini dimanfaatkan untuk melancarkan monopoli mereka di Maluku dikenal dengan Hongitochten, adalah ekspedisi-ekspedisi perang atau operasi pembersihan (eksterpasi) terhadap mereka yang tidak mentaati peraturan VOC yang mengharuskan supaya produksi rempah-rempah dijual kepada VOC saja. Tiap-tiap tahun menurut aturan yang berlaku masing-masing negeri harus menyediakan sekian banyak kora-kora (perahu perang) lengkap dengan tenaga pendayung untuk membentuk pasukan yang dipimpin oleh Gubernur di Ambon dan dipergunakan untuk memukul daerah-daerah dan negeri-negeri yang menjual rempah-rempah kepada orang Inggris dan pihak-pihak lain. Kebun-kebun cengkeh dan pala itu dirusak dan penduduknya diusir atau dibunuh. Di antara tahun 1625-1655 seluruh daerah Hoamoal di semenanjung Seram Barat di seberang Hitu yang sebelumnya merupakan suatu daerah yang cukup padat penduduknya dan banyak kebun-kebun cengkehnya, dirusakkan dan daerahnya dikosongkan sama sekali oleh hongitochten tersebut (Cooley dalam Abdurrahman, 1973: 124, Nanulaitta, 1966: 49).*

tanpa dibayar. Ada juga yang termasuk *kuarto* atau pekerjaan yang dibebankan kepada anak negeri untuk kepentingan pribadi pemimpin atau Kepala Negeri tanpa diberikan upah upah (Effendi, 1987: 115-7).

Struktur masyarakat adat yang sudah ada sejak terbentuknya negeri-negeri di Maluku Tengah mengalami perubahan setelah masuknya pengaruh agama Islam dan pengaruh bangsa Barat akan tetapi sifat dasar dari kehidupan masyarakat seperti kegotongroyongan (*masohi*), kekeluargaan dan ketaatan kepada para pemimpin tetap dihargai, dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh masyarakat karena mereka dianggap memiliki kharisma dalam kepemimpinan. Hubungan kekerabatan tetap dipelihara dan diperkuat dengan ikatan-ikatan persaudaraan yang dikenal sebagai *pela* dan *gandong* (ikatan atau hubungan kekerabatan antara satu negeri dengan negeri yang lain). Pada umumnya perubahan dalam struktur masyarakat tersebut berhubungan erat dengan perubahan sosial termasuk unsur-unsur pendidikan yang masuk ke daerah Maluku.

Pada 1607, Laksamana Cornelis Matelief de Jonge datang ke Ambon, dan ia memanggil *orangkaya-orangkaya* (pemimpin Bumiputra), untuk bertatap muka dengan tujuan memberikan perintah kepada mereka untuk tetap tunduk di bawah kekuasaan Belanda dan turut aktif menyelesaikan pekerjaan pembangunan sistem pertahanan di benteng dengan janji bahwa apabila mereka melakukan hubungan kerjasam dengan baik maka mereka akan tetap diberikan kebebasan. Disaat itu terjadi dialog dari para pemimpin bumiputra untuk menyampaikan keluhan mereka kepada pemimpin VOC termasuk masalah pendidikan yang dialami pada periode transisi dari Portugis ke VOC. Keluhan tentang agama dan pendidikan dijawab dengan mendirikan sekolah di dalam benteng Victoria, oleh Matelief dan ia mengangkat Joannes Wogma sebagai guru untuk mengajarkan membaca, menulis, berhitung dan pelajaran agama Kristen Protestan. Wogma menerima gaji sebesar 18 gulden per bulan atas imbalannya sebagai tenaga pengajar di sekolah yang pertama di bangun oleh pemerintah VOC.

Para siswa terdiri dari anak-anak hasil perkawinan campuran pegawai VOC dengan perempuan pribumi dan anak-anak dari keluarga Katolik di sekitar benteng. Pihak Belanda beranggapan bahwa pendidikan itu juga bermanfaat terutama untuk memperkenalkan agama mereka guna menggantikan agama yang telah diajarkan oleh pihak Portugis sebelumnya yaitu Kristen Roma Katolik. Menurut pihak VOC pendidikan adalah cara terbaik untuk membina watak

masyarakat oleh sebab itu, sekolah perlu dibina dan dikembangkan. Pendirian sekolah ini didukung juga oleh Gubernur Ambon pertama yaitu Frederik de Houtman (Brugman 1938: 21; Rumphius 1910: 25; de Graaf 1977: 55-6; Koolen 1993:154-6).

Tujuan utama pendidikan diselenggarakan untuk menghapuskan agama Katolik dengan melaksanakan penyebaran dan pemeliharaan agama Protestan (Djumhur dan Danasuparta, 1976: 115-6; Nasution 1995: 4-5). Untuk itu didirikan sekolah-sekolah terutama di daerah-daerah yang telah dikristenkan oleh Portugis. Tenaga pengajar yang diangkat untuk melaksanakan pendidikan pada proses awal saat itu adalah para pendeta yang berasal dari Belanda dan orang pertama yang bekerja sebagai pendeta dan guru adalah Matthias van den Brouch yang diangkat tahun 1611 karena ia dianggap pendeta yang memiliki latar belakang akademi teologi. Pendeta Matthias van den Brouck diutus ke Ambon untuk mendidik anak-anak yang tinggal di dalam benteng Victoria maupun di luar areal benteng, namun keadaan sekolah sangat menyedihkan karena anak-anak banyak yang tidak datang ke sekolah karena harus membantu orang tua mereka bekerja di kebun atau pergi mencari ikan di laut (de Graaf, 1977: 57, Pattikayhatu, 1980:16).

Kondisi seperti ini bila dianalisa dapat dibenarkan karena saat itu anak-anak maupun orang tua belum melihat pendidikan sebagai suatu hal yang penting bagi kehidupannya mereka. Yang terpenting adalah melakukan aktivitas untuk memperoleh nafkah sehari-hari karena menurut mereka mengikuti pendidikan hanya membuang waktu dan tidak memperoleh sesuatu yang bisa mereka dapatkan saat itu. Namun secara perlahan-lahan dari waktu ke waktu timbul kesadaran untuk mengikuti pendidikan secara teratur walaupun harus melalui suatu pengawasan yang ketat baik dari orang tua maupun guru. Dalam perkembangan Gubernur Ambon Frederik de Houtman memberikan dukungan yang sangat besar terhadap kelangsungan sekolah terutama dengan menerjemahkan beberapa buku pelajaran untuk anak-anak sekolah dan menerbitkan sebuah kamus melayu, namun buku-buku ini kurang diminati oleh murid-murid karena bahasa yang digunakan terlalu banyak bercampur dengan bahasa melayu dari Aceh yang dirasa kurang cocok dengan masyarakat Maluku (Boissevain, 1934: 29-30).

De Houtman juga yang berinisiatif menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah yang pada awal pendiriannya menggunakan bahasa Belanda

sebagai bahasa pengantar, namun karena dirasakan sulitan maka bahasa Melayu yang sudah menjadi bahasa pergaulan di daerah Maluku diajarkan juga pada sekolah yang diselenggarakan saat itu. Frederik de Houtman memiliki kemauan keras bahkan ia menggunakan kebijaksanaan tertentu untuk menyelamatkan sekolah ini. Akhirnya usaha untuk menyelamatkan sekolah yang ia dirikan tidak berhasil, dan pada akhirnya sekolah ini ditutup ketika de Houtman diganti¹⁰.

Gubernur berikut Jasper Jansz tidak terlalu memperhatikan keberadaan sekolah dan kurang bersikap keras kepada orang tuayang anaknya bersekolah dilembanga pendidikan yang diusahakan oleh VOC. Begitupula dengan kondisi para murid yang bersekolah di lembaga pendidikan itu tidak pernah diawasi secara baik oleh pemerintah sehingga para muridnya tidak serius mengikuti pelajaran (Keuning, 1973: 39, Tanamal, 1987: 18-9).

Pada 1615, Pendeta Caspar Wiltens diangkat menjadi pendeta yang pertama di Ambon. Dalam melaksanakan tugasnya ia lebih banyak memberikan perhatian untuk mengalihkan orang Katolik dan orang kafir dari Leitimor dan pulau-pulau Lease ke agama Protestan. Wiltens mencoba memasukkan bahasa Belanda sebagai mata pelajaran dan sangat memperhatikan penggunaan bahasa Belanda tetapi usahanya tidak berhasil karena bahasa Melayu sudah menjadi bahasa pengantar di sekolah dan gereja pada waktu itu. Kemudian Wiltens mulai mempelajari bahasa Melayu dan setiap hari minggu di gereja dia mengadakan kebaktian dalam bahasa Melayu. Wiltens yang merangkap sebagai guru sekaligus pendeta tidak berhasil dalam memajukan sekolah namun ia berjasa dalam menyusun 28 khotbah singkat dalam bahasa Melayu (Brugmans, 1938: 22; Keuning 1973: 39).

Pendeta selanjutnya adalah Sebastian Danckaerts yang datang ke Ambon pada 2 Agustus 1618. Beliau merintis lagi sekolah yang telah dibuka di benteng Victoria yang telah ada sebelumnya. Pendeta ini juga berusaha mengajarkan bahasa Belanda di sekolah ini namun ia menyadari bahwa usaha ini sama sekali tidak mungkin berhasil. Oleh karena itu ia mempelajari bahasa Melayu dengan tujuan dapat berkhotbah di gereja dengan mempergunakan bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Setahun kemudian usahanya dalam memajukan sekolah tidak menunjukkan hasil, bahkan beberapa kali ditutup karena kekurangan siswa. Hal ini disebabkan orang tua tidak begitu senang untuk mengijinkan anak-anaknya

¹⁰Setelah memerintah selama 6 tahun Frederik Houtman meninggalkan Ambon pada tahun 1611. Ketika pulang ke Belanda, Houtman membawa serta beberapa orang pribumi yaitu putu-putra dari beberapa orang kaya untuk belajar teologi dan saat kembali mereka menjadi guru-guru sekolah (de Graaf, 1977: 59).

ke sekolah karena menganggap sekolah tidak ada manfaatnya. Pandangan mereka bahwa anak-anak lebih bermanfaat jika membantu pekerjaan orang tua khususnya bekerja pada kebun atau melaut.

Ketika Jendral Jan Pietersz Coen datang ke Ambon pada Februari 1619 ia mengeluarkan surat keputusan untuk memberikan subsidi kepada setiap anak sekolah yang orang tuanya tergolong miskin, untuk mendapatkan satu pon beras setiap hari. Hasilnya dalam waktu singkat jumlah siswa meningkat menjadi 60-70 orang sehingga dapat diprediksi bahwa kenaikan jumlah siswa bukan karena keinginan mereka untuk mempelajari agama tapi semata-mata karena jatah beras yang diberikan sehingga ada julukan pada anak-anak yang masuk sekolah saat itu adalah “Kristen Beras” (*rijst-Christenan*) (Brugmans, 1938: 22-3, Keuning, 1973: 39-40, de Graaf, 1977: 58).

Pendeta kedua yang datang ke Ambon adalah Danckaerts dan ia diberikan sejumlah pekerjaan yang tergolong besar dari penguasa VOC yaitu mendirikan sekolah (*Inlandsb Seminarië*) untuk melatih anak-anak pribumi menjadi guru (*schoolmeesters* atau guru agama, dalam bahasa Melayu Guru Injil). Hal ini dilakukan karena ia tidak setuju dengan kebijakan pemerintah VOC yang hanya mendirikan satu sekolah saja di kota Ambon. Ia menginginkan adanya pembagunan sekolah-sekolah lain didirikan di negeri-negeri di Leitimur, Laihitu dan Pulau-Pulau Lease karena langkah ini untuk melatih pribumi menjadi guru yang nantinya dapat disebarkan diberbagai daerah yang ada di Maluku. Langkah awal yang dijalankan adalah mendidik sepuluh pemuda Ambon berusia antara 20 hingga 24 tahun untuk belajar agama maupun pelajaran umum. Setelah tiga bulan sekolah ini mendapat pengesahan dari Gubernur Jenderal Coen dengan memberikan subsidi pada tiap siswa sebesar f 7.5 setiap bulan. Mereka yang tamat disekolah ini diharuskan bekerja sebagai guru pada negeri-negeri di Leitimur. Selain fungsi mereka sebagai guru sekolah, mereka juga menjalankan pelayanan jemaat dan berkhotbah pada hari minggu di gereja dengan menggunakan khotbah bahasa Melayu yang disusun oleh Pendeta Wiltens¹¹ (de Graaf, 1977: 58-9, Tanamal, 1987: 20).

Hasil pendidikan ini ternyata memberikan manfaat bagi perkembangan pendidikan di Maluku, sesudah tahun 1620 di negeri-negeri yang tidak termasuk dalam lingkungan benteng Victoria. Pada tahun 1620 terdapat beberapa sekolah

¹¹Khotbah ini telah disalin sebanyak 5-6 buah namun tidak ada koreksi. Khotbah dibacakan oleh guru namun gurunya sendiri terkadang tidak begitu memahaminya isinya, apalagi orang-orang yang datang mendengarkannya (Keuning, 1973: 40)

yang kecil dengan guru-guru Ambon yang telah didik oleh Pendeta Danckaerts. Pemimpin VOC merasa puas atas hasil pekerjaan Danckaerts sehingga mulai tahun itu juga setiap pergantian tahun ajaran VOC menghadiahkan kain berwarna hitam kepada masing-masing guru sekolah. Sejak saat itu pakaian berwarna hitam merupakan seragam yang dipakai oleh para guru dalam aktivitasnya di sekolah. Asumsi kami bahwa Kebiasaan ini juga dilakukan oleh para guru sewaktu mereka mengadakan ibadah di gereja sehingga secara perlahan-lahan banyak orang yang beribadah menggunakan pakaian hitam dan membudaya sampai saat ini terutama dikalangan orang tua-tua. Pada periode ini jumlah sekolah menjadi meningkat walaupun dalam pengajaran masih banyak terdapat kekurangan terutama kurangnya alat-alat pelajaran seperti buku dan lain-lain.

Setelah berakhir masa tugas di Ambon, Danckaerts kembali ke Belanda pada 1622. Usahnya dalam mengembangkan pendidikan dilanjutkan oleh Pendeta Halmichius dan Pendeta Vertrecht. Halmichius datang ke Ambon tanggal 7 Juli 1633 dan sejak itu juga ia, membuka sekolah untuk melatih calon guru di negeri Ulati pulau Saparua. Pendeta Halmichius mendidik anak-anak dari kepala-kepala negeri terutama dari Saparua, Haruku dan Nusalaut. Ia juga membuka kursus untuk para guru agar bertambah trampil dalam mengajar. Di Banda juga diadakan hal yang serupa oleh Pendeta Clarenbeek (de Graaf, 1977: 60, Tanamal, 1987: 21).

Selain mendatangkan pendeta dari Belanda, usaha lain yang dilakukan pihak Belanda adalah mengirimkan anak-anak *raja* atau *orangkaya* ke Belanda untuk mempelajari ilmu teologia, bahasa Belanda dan beberapa mata pelajaran ketrampilan. Usaha untuk mengirimkan pemuda Ambon ke Belanda dimulai oleh tuan Matelief pada tahun 1607 ketika berangkat menuju Belanda dan saat itu ia membawa serta tiga orang pemuda yaitu putra-putra dari beberapa *orangkaya* yaitu Halaene, putra dari Kapitan Hitu Tepil, Laurenso putra dari Don Marcus yaitu Hukom dari Hative, dan Martinjoe putra dari Anthonio *orangkaya* dari Tawiri. Tujuan utama membawa pemuda Ambon ini untuk memperlihatkan keadaan Negeri Belanda sehingga apabila kembali ke Ambon mereka dapat menjelaskan gambaran yang sebenarnya tentang Belanda guna menghapus istilah yang telah dilontarkan oleh orang-orang Portugis yang mengatakan bahwa Bangsa Belanda adalah bangsa perampok dan kehidupan negaranya tidak teratur (Rumphius 1910: 25; Tanamal 1987: 21).

Selanjutnya pada tahun 1611 Gubernur de Houtman membawa beberapa orang ke Belanda untuk didik ilmu teologi (de Graaf 1977: 59). Pada tahun 1620 berdasarkan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat di Amsterdam kepada *Bewindhebbers* yang berkuasa atas VOC di Indonesia bagian timur untuk mempersiapkan pemuda-pemuda asal Ambon, khususnya anak-anak dari *raja-raja* di negeri-negeri agar didatangkan ke Belanda dengan biaya VOC. Oleh Gubernur Jenderal Coen dikirim lima pemuda yang salah satunya berasal dari Banda berangkat ke Belanda. Setelah sebelas tahun belajar di Belanda mereka kembali pada tahun 1631 namun hasilnya sangat mengecewakan karena mereka tidak sanggup berbuat sesuai kebutuhan masyarakat di sini, selain itu bahasa Melayu mereka sudah kaku karena tidak dipakai selama berada di Belanda. Berdasarkan pengalaman tersebut tidak ada lagi orang Ambon yang dikirim ke Belanda untuk menuntut ilmu, dan akhirnya VOC menerima anjuran dari seorang pendeta di Amsterdam untuk tidak lagi mengirinkan anak-anak ke Belanda tetapi memilih saja diantara mereka yang pintar untuk didik oleh pendeta di Ambon (Beverluis 1929: 159; Keuning 1973: 41; Tanamal 1987: 20-1).

Setelah adanya sekolah untuk mendidik calon guru ini, pertumbuhan sekolah di negeri-negeri di Pulau Ambon, Pulau-Pulau Lease, Pulau Seram dan Banda semakin meningkat. Pada tahun 1627 di Ambon sudah ada 16 sekolah dan 18 buah di pulau-pulau sekitarnya. Pada tahun 1645 terdapat 33 sekolah dengan murid 1300 orang (Brugmans, 1938: 23). Pada tahun 1649 ada 10 sekolah di Leitimur, 4 sekolah di Hitu, 5 sekolah di Haruku, 9 sekolah di Saparua, 6 sekolah di Nusalaut, 2 sekolah di Pulau Seram (Amahai dan Kaibobo) (Koolen, 1993:158).

Jumlah sekolah dan murid semakin meningkat namun terkendala dengan jumlah guru yang terbatas karena selain menjadi guru, pendeta juga memiliki tugas untuk melayani jemat sehingga dalam mendidik siswa waktunya tidak maksimal. Untuk itu Pendeta Heurnius menyampaikan permohonan kepada gubernur jenderal agar di Ambon dibuka sekolah yang lebih baik dan dipimpin oleh pendeta yang dikhususkan di bidang pendidikan seperti seminari yang ada di Belanda. Permohonan ini juga didukung oleh Ever Hulft, seorang saudagar kepala (*opperkoopman*), yang disampaikan kepada Gubernur Jenderal Brouwer. Usulan ini bertujuan agar dapat memenuhi kekurangan guru yang dialami sekolah-sekolah yang sudah bertambah banyak dan agar sekolah ini dapat menghasilkan

para pemimpin yang dipersiapkan untuk mengajar agama (Coolsma, 1901: 37). Berdasarkan usul tersebut maka muridmurid dari Pendeta Heurnius dan Pendeta Vertrecht disatukan dalam seminari di Ambon dan Pendeta Vertrecht langsung diangkat menjadi pemimpin Seminari. Para murid ini diajarkan Bahasa Belanda sehingga mereka dapat membaca buku-buku berbahasa Belanda guna memperkaya pengetahuan mereka.

Memasuki pertengahan abad ke-17 kondisi di Maluku tidak teratur karena terjadi peperangan antara pribumi melawan Belanda akibat monopoli cengkik oleh VOC. Akibatnya kehidupan masyarakat menjadi tidak aman sehingga mereka tidak mengunjungi sekolah, hal ini menyebabkan penurunan jumlah murid terutama di daerah-daerah yang terjadi peperangan. Di Pulau Ambon pada tahun 1654 terjadi gempa yang mengakibatkan kerusakan gedung sekolah. Ini juga mengurangi jumlah sekolah. Faktor lain yang sangat penting dalam menurunnya tingkat pendidikan pada pertengahan abad ke-17 adalah kurangnya tenaga pendidik, seperti di Ambon pada tahun 1638 terdapat 18 sekolah, menurun menjadi 10 sekolah pada tahun 1644.

Permasalahan keterbatasan guru sudah terpecahkan, muncul lagi masalah mengenai alat-alat pelajaran khususnya buku-buku pelajaran terutama yang berbahasa Melayu baik itu untuk para guru maupun murid. Pada saat itu ada tiga jenis buku pelajaran dari karangan yang berbeda-beda, yang pertama yang dibuat oleh Gubernur de Houtman seperti "Sembayang Bapa Kami, Kedua Belas Perkara Imam Masehi, Kesepuluh Penyuruhan, Ringkasan Catechismus Heidelberg dan Buku Logat". Kedua, buku-buku karangan Albert Corneliesz Ruyl yang sama dengan buku-buku de Houtman namun bahasa Melayu yang dipakai berbeda. Ketiga, buku-buku karangan Jan van Hazel yang menggunakan bahasa Melayu Tinggi. Semua Buku-buku ini tidak memenuhi kebutuhan di sekolah karena menggunakan bahasa Melayu yang berasal dari Aceh dan Malaka (Melayu Tinggi) sehingga buku-buku tersebut sukar diartikan. Kesulitan lainnya adalah tentang tulisan karena bahasa Melayu menggunakan huruf Arab sehingga harus diubah ke huruf latin seperti dalam bahasa Belanda. Namun demikian adanya kesulitan-kesulitan ini, mendorong usaha-usaha ke arah perbaikan dalam soal bahasa Melayu (Tanamal, 1987:23-5). Situasi ini dapat dipecahkan ketika terbit Alkitab berbahasa Melayu klasik terjemahan pendeta Melchior Leydekker pada tahun 1733 (Brugmans, 1938: 24, de Graaf, 1977: 184-6).

Pendidikan yang berlangsung pada masa itu tidak memiliki kurikulum khusus karena sekolah-sekolah selama VOC berkaitan erat dengan gereja. Menurut instruksi *Heeren XVII*, badan tertinggi VOC di Negeri Belanda tahun 1617, gubernur di Indonesia harus menyebarkan agama Kristen Protestan dan mendirikan sekolah untuk tujuan itu. Menurut Peraturan sekolah tahun 1643 tugas guru adalah memupuk rasa takut terhadap Tuhan, mengajarkan dasar-dasar agama Kristen, mengajar anak berdoa, bernyanyi, pergi ke gereja, mematuhi orang tua, penguasa VOC, dan guru-guru. Walaupun tidak ada kurikulum yang ditentukan, biasanya sekolah menyajikan pelajaran tentang katekismus, agama, membaca, menulis, dan bernyanyi. Untuk lamanya belajar juga tidak ditentukan. Peraturan hanya menentukan bahwa anak laki-laki lebih dari umur 16 dan perempuan lebih dari 12 tahun sebaiknya jangan dikeluarkan dari sekolah. Kemudian usia itu diturunkan menjadi 12 tahun untuk anak laki-laki dan 10 tahun untuk anak perempuan (Brugmans, 1938: 25). Pada saat itu belum terdapat pengajaran klasikal. Mengajar tetap berdasarkan pengajaran individual. Murid-murid datang seorang demi seorang ke meja guru dan menerima pelajaran secara individu. Menyanyi lagu gerejani dan resitasi teks buku Injil dilakukan bersama-sama seluruh murid. Pembagian dalam 3 kelas baru terjadi pada tahun 1778. Kelas 3 merupakan kelas terendah, murid belajar abjad, kelas 2 membaca, menulis, dan bernyanyi dan kelas 3 merupakan kelas tertinggi: membaca, menulis, katekismus, bernyanyi, dan berhitung (Nasution, 2008: 5-6).

Pendidikan dan pengajaran pada masa VOC dilaksanakan oleh lembaga-lembaga keagamaan yaitu gereja. Namun gereja tidak berkuasa penuh dalam pengelolaan pendidikan. Kegiatan gereja merupakan bagian dari kegiatan VOC oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran walaupun dilakukan oleh kalangan agama tetapi mereka adalah pegawai-pegawai VOC. Karena pendidikan dilaksanakan oleh pihak gereja maka tidak mengherankan bahwa dasar dari pendidikannya adalah agama Kristen (Protestan). Sebagai lanjutan dari pada pembinaan terhadap sekolah-sekolah, maka pada tahun 1684, VOC mengeluarkan peraturan-peraturan yang isinya adalah sekolah dimulai dengan sembahyang dan menyanyi, demikian pula pada waktu keluar sekolah, anak-anak harus belajar sembahyang Bapa Kami, Dua belas Kepercayaan Iman Kristen, Katekismus Heidelberg dan menyanyikan mazmur, belajar membaca, menulis dan berhitung (Baron, 1947: 114).

Perkembangan baru terjadi dengan diterbitkannya Instruksi berdasarkan Keputusan Rapat Gerejawi (*kerkelijke vergadering*) pada 17 Pebruari 1688. Selain lima belas butir penting dari instruksi tersebut menyangkut gereja, juga menyinggung tentang sekolah. Guru (*schoolmeester*), dan pengunjung orang sakit (*kerankebezoeker*) diwajibkan mengunjungi sekolah di tempat mereka berdomisili, kemudian menulis laporan tentang sekolah, seperti kehadiran murid, perkunjungan dan percakapan dengan orang tua murid untuk mendorong anak-anak mengikuti pendidikan, namun ia tidak berhak memecat murid tanpa seizin pendeta (Valentyan dalam Alyona, 2009: 21).

Sejak dikeluarkan instruksi tersebut, penataan sekolah berlangsung semakin baik. Kunjungan Pendeta Petrus van der Vorm pada tahun 1692 menunjukkan bahwa lima puluh dua sekolah diajar oleh enam puluh satu guru yang diklasifikasi atas tiga guru dan enam guru keliling di Ambon, sedangkan yang lainnya bertugas di Ambon, Haruku, Lease, Nusalaut, Seram, Buano, Manipa dan pulau Buru. Para pendeta yang melakukan kunjungan ke negeri-negeri tidak hanya melaporkan jumlah murid, tetapi juga mengenai buku-buku yang digunakan di sekolah (dan di gereja), seperti kitab *Kejadian* dan kitab *Perjanjian Baru* Brouwerius, *Kitab Khotbah Carons* dan D. Wiltens. *Kitab ABC* berisi doa-doa sederhana, *Buku Tanya-jawab*, *Djalan ka Surga* serta *Katekismus Heidelberg*, ajaran iman dan sejumlah doa (Brugmans, 1938: 26).

Ikhtisar Katekismus berbahasa Melayu masih jarang atau tidak digunakan. Dua atau tiga kamus yang umumnya digunakan orang-orang Belanda untuk belajar bahasa Melayu. Semua buku itu digunakan oleh para pelayan khusus (*buytengewoone dienaarsz*) untuk mengajar di sekolah dan gereja. Yang dimaksudkan dengan pelayan khusus, selain, pendeta (*predikanten*) ada juga penatua (*ouderlingen*), guru kepala (*oppermeester*), guru (*meesters* atau *ondermeesters*). Pendeta dan penatua selain menjalankan tugas pokok seperti berkhotbah, melayani Sakramen, mencatat jumlah anggota jemaat, melakukan doa malam dan katekisasi, juga melakukan kunjungan ke sekolah dan jemaat sekitar dua atau tiga kali setahun untuk mengamati dari dekat tentang seberapa banyak kehadiran murid di sekolah, apa saja yang dipelajari murid, bagaimana guru melakukan pekerjaannya di sekolah.

Guru kepala berjumlah dua orang, yakni di Ambon dan Saparua. Guru yang mengerjakan tugas kegerejaan yang agak berat di samping menyelenggarakan pendidikan di sekolah secara keseluruhan berjumlah lima puluh dua orang, dan

guru keliling yang berjumlah tujuh orang mengajar di rumah-rumah (kadang kala bebas), berdoa, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagaimana tertera dalam buku *De Weg naar den Hemel* (Jalan Menuju Surga). Penyelenggaraan pendidikan di sekolah berlangsung selama empat hari dalam seminggu, pada pagi dan siang hari dilakukan pada hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, sedangkan hari Rabu dan Sabtu diselenggarakan pada pagi hari saja (*Arsip Ambon*, 992, Jakarta: ANRI).

Pada abad ke-18, sekolah (dan gereja) mengalami sedikit kemajuan. Di negeri-negeri yang terletak di bagian Barat dan Timur benteng *Nieuw Victoria* terdapat enam sekolah di bagian Barat dan tiga sekolah di bagian Timur. Beberapa negeri Kristen di pulau Buru, Manipa dan Buano juga sudah memiliki sekolah. Di Saparua dari tiga belas negeri terdapat sembilan sekolah. Di Nusalaut dari tujuh negeri terdapat enam sekolah. Di Seram dari sejumlah negeri terdapat dua sekolah. Di pulau Haruku dari tujuh negeri terdapat enam sekolah. Semuanya berada dalam pemerintahan Amboina dengan perincian di enam puluh sembilan negeri terdapat lima puluh empat sekolah. Gambaran tersebut dapat dilihat dalam surat majelis gereja Ambon kepada Sinode Hollandia Utara dan Selatan (*Synoden van Noord- En Zuid-Holland*) yang memperlihatkan keadaan sekolah dari enam puluh sembilan negeri, terdapat lima puluh empat sekolah dengan 17.544 orang murid (tidak termasuk anak-anak di luar sekolah yang mencapai jumlah 5.190 orang dari jumlah total 32.921 orang Kristen (Alyona, 2009: 25).

Menurut laporan Pendeta Francois Valentijn pada tahun 1700 di wilayah sekitar benteng ada 6 negeri antara lain Nusaniwe dan Hative ada 2 sekolah yang memiliki 590 murid. Di daerah Leitimor ada 9 sekolah memiliki 857 murid, di daerah pesisir seperti Liliboi ada 9 sekolah dengan 659 murid, di Pulau Buru, Manipa, dan Boano memiliki masing-masing 1 sekolah dengan total murid untuk ketiga sekolah tersebut 146 murid. Di Saparua ada 9 sekolah yang dihadiri oleh 1.161 murid, Nusalaut ada 6 sekolah dengan 629 murid, Haruku ada 6 sekolah dengan 623 murid. Di Pulau Seram (Amahai, Sowoku, Elpapatih) ada 2 sekolah dengan 199 murid, di Seram Barat (Kaibobo, Tanuno, Piru) ada 8 sekolah dengan 387 murid. Jadi total sekolah dan murid pada tahun 1700 adalah 54 sekolah dengan 5190 murid (Koolen, 1993: 160). Kondisi ini mengalami penurunan pada tahun 1784 total seluruh daerah jumlah muridnya hanya 2515 murid (*Arsip Ambon*, No. 994, Jakarta: ANRI).

Pada awalnya pendidikan diselenggarakan tanpa kepengurusan yang tetap dan hanya terdiri atas para pendeta dan penatua pribumi yang setelah menjalankan tugas sekitar enam bulan, kemudian melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah. Mereka diizinkan juga berkhotbah di gereja sebanyak satu atau dua kali, melayani baptisan anak dan Perjamuan Kudus. Untuk melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah, mereka diharuskan memiliki konsep tentang pendidikan, melakukan observasi dan memiliki cara untuk mengajar agama dan berdoa, serta menganjurkan agar anak-anak sepulang gereja harus membaca sejumlah nama tokoh yang berperan dalam kekristenan serta melakukan observasi dan mendenda murid yang alpa ke sekolah sebesar satu *schelling* yang diambil oleh *marinyo* (*Arsip Ambon*, No. 992, Jakarta: ANRI).

Selanjutnya dalam menghadapi perkembangan dan untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka diperlukan sistem kepengurusan pengorganisasian yang tepat. Untuk itu diangkat kurator sebagai penilik sekolah. Empat orang yang mula-mula diangkat untuk jabatan itu adalah Pendeta Wouter Melchiorz, Jan de Meijer, Pieter Christian dan Manuel Castanic. Pengorganisasian tugas serta wewenang para kurator dan guru-guru ditetapkan dengan Ordonansi yang diatur oleh Gubernur Lucasz dan mendapat pengesahan dari gubernur jenderal. Selain itu, sering diutus pejabat-pejabat tertentu oleh pimpinan gereja di Batavia untuk mengadakan inspeksi pada semua sekolah, guru dan kurator. Inspeksi pertama dilakukan oleh Pendeta Daenckertsz yang di dalam laporannya mengatakan bahwa pendidikan di Ambon semakin menunjukkan kemajuan dan mempunyai harapan untuk maju. Ia mencatat ada dua sekolah dekat benteng yakni sekolah di Hative (sekitar islamisenter sekarang ini), dan Soya kecil yang jumlah muridnya masing-masing 57 dan 53 orang, 10 sekolah di jazirah Hitu dan Leitimur yaitu di Suli, Waai, Hattu, Lilibooi, Allang, Ema, Kilang, Naku, Hatalai dan Hutumuri. Di Pulau Saparua terdapat 3 sekolah, masing-masing di Sirisori, Ullath dan Booi. Di Pulau Haruku dikatakan ada kemajuan, tanpa menyebut jumlah sekolah atau murid. Di Pulau Nusalaut ada sekolah di Ameth dan Titawai. Semua sekolah yang disebut di atas mempunyai 590 murid (Tanamal, 1987: 26-27).

Pengorganisasian dan kepengurusan di bidang pendidikan ditinjau dari latar belakang dan motif VOC, maka bentuk pengorganisasian dan kepengurusan di bidang pendidikan tergantung dari perhitungan-perhitungan sosial-politik kekuasaan dan perdagangan yang menghasilkan keuntungan. Sampai dengan

abad ke-17, VOC lebih mementingkan kepentingan politik perdagangan dan kurang menghiraukan kebutuhan keagamaan dan pengetahuan masyarakat pribumi. Namun sesudah itu perhatian VOC agak membaik, karena adanya suara-suara khusus dari kalangan para pendeta yang menyadari tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama, kendati VOC tetap memainkan peranan “penguasa”, baik terhadap gereja maupun bentuk-bentuk lain dari kegiatan penyebaran Injil.

Dari gambaran perkembangan pendidikan pada periode ini ada beberapa hal yang dapat dicatat yaitu Sekolah Kristen adalah identik dengan sekolah pemerintah (VOC). Keadaan yang sama berlaku juga bagi gereja. VOC merasa dirinya sebagai penguasa gereja. Hal ini berarti pula bahwa sekolah-sekolah itu bukan milik gereja tapi pemerintah VOC. Sekolah Kristen berpusat di Indonesia bagian Timur dan perkembangannya tergantung pada kuat tidaknya kekuasaan VOC di bidang politik pada suatu daerah tertentu, bahkan prinsip keuntungan dalam bidang perdagangan turut menentukan perkembangan itu artinya bahwa VOC tidak akan mendirikan sekolah-sekolah di daerah yang tidak memiliki bahan-bahan perdagangan rempah-rempah di zaman itu. Dipandang dari segi kehidupan gereja di Indonesia, maka sekolah-sekolah sebagai alat pekabaran Injil merupakan perwujudan dari pada *Culus regio eius religio* (siapa yang punya negeri, dia punya agama). Dari berbagai bukti sejarah yang direkonstruksi sewaktu berkuasanya VOC dapat dianalisa bahwa pendidikan yang dibangun semta-mata untuk kepentingan penyiaran agama Kristen Protestan sehingga pengajaran yang diajarkan pada umumnya berorientasi kepada pengenalan agama dan pemahaman secara mendasar terhadap unsur-unsur iman Kristen secara mendalam. Walaupun orientasi kurikulumnya pada pemahaman agama Kristen Protestan secara khusus, namun terdapat pengajaran bahasa, menulis dan ilmu pengetahuan umum sehingga anak-anak memiliki ketrampilan berbahsa dan menulis sangat baik, dan ketrampilan ini digunakan lebih banyak oleh para guru bumiputra untuk peyelenggaraan pendidikan di berbagai daerah di Maluku.

3.4 Perkembangan Pendidikan pada Abad Ke-19

Pada 1 Januari 1800 kekuasaan VOC sebagai suatu badan dagang mewakili pemerintah Belanda di Nusantara dinyatakan berakhir. Namun kepulauan Maluku sejak tahun 1796 sudah bukan merupakan daerah kekuasaan Belanda lagi, akan tetapi berada di bawah kekuasaan Inggris. Kepulauan Maluku dikuasai

Inggris selama dua periode yaitu dari tahun 1796-1803, kemudian tahun 1810-1817. Antara tahun 1803-1810 Kepulauan Maluku kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Silih bergantinya kekuasaan ini membawa dampak yang tidak baik bagi Pemerintah Belanda yang telah berkuasa sekian lama dan juga berdampak kepada orang Maluku sendiri. Hal ini disebabkan sistem kekuasaan yang berbeda antara Belanda dan Inggris dan pola pengaturan birokrasinya juga berbeda. Inggris lebih bersifat demokrasi dan sangat lues dalam menata kehidupan masyarakat karena dipengaruhi oleh paham-paham baru yang lebih demokratis dan humanis. (de Graaf 1977: 196).

Semasa kekuasaan Belanda masih dipegang oleh Gubernur Jenderal Daendels sebagai penguasa tertinggi Hindia Belanda, ia telah berusaha sekuat tenaga untuk menegakkan kembali kekuasaan Belanda di Maluku, tetapi pada waktu itu keadaan laut dari dan menuju Ambon diblokade oleh pihak Inggris, sehingga perdagangan merosot tajam. Harga-harga barang meningkat cukup pesat sehingga rakyat saat itu dipaksa memakai uang kertas. Pihak Belanda hanya ingin menghimpun kekayaan dengan cepat melalui perdagangan dengan menjalankan sistem monopoli yang menyensarakan rakyat. Pemuda-pemuda Maluku direkrut untuk menjadi tentara di luar Maluku dan sebahagian dijadikan sebagai tenaga kerja untuk membangun pertahanan. Belanda membangun benteng pertahanan dengan memaksa rakyat menyediakan bahan-bahan berupa batu, pasir kayu dan material lain. Ketika Inggris datang kesengsaraan itu berakhir dan rakyat merasa aman karena pemerintah Inggris melalui residen Inggris untuk Ambon yaitu William Bryan Martin mulai membuat pembaharuan sehingga perdagangan lancar dengan harga yang terjangkau. Administrasi pemerintah juga diadakan perbaikan misalnya pajak pasar dihapuskan, penanaman cengkeh tidak dilarang lagi. Dengan demikian orang-orang Ambon boleh menanam cengkeh sesuka hati mereka, walaupun hasilnya harus dijual ke pihak Inggris. Rakyat merasa senang dengan pola pemerintahan baru yang dijalankan oleh Inggris (de Graaf 1977: 199-201).

Sekolah dan Gereja di Maluku juga terpengaruh dengan ketidakstabilan kondisi pada waktu itu. Pada tahun 1780-an masih terdapat tiga orang pendeta di Ambon akan tetapi akibat runtuhnya VOC, hubungan dengan dunia luar terputus samasekali. Sejak 1793 sampai 1813 tidak ada lagi seorang pendeta di Ambon (Brugmans 1938: 67), kecuali selama beberapa bulan saja seperti di

Saparua seorang pendeta masih bertahan sampai tahun 1801. Di Ternate dan Banda, keadaan tidak banyak berbeda karena walaupun perhubungan terputus dengan dunia luar, namun tidak berarti bahwa gereja Kristen di Ambon dan daerah-daerah lain menjadi punah termasuk pendidikan yang telah ditanamkan sejak bertahun-tahun. Orang-orang Kristen Ambon ingin tetap berpegang pada agama Kristen yang telah mereka anut. Sejak masuknya kekristenan di Ambon ternyata mereka tetap berkembang karena terutama terpelihara oleh guru-guru zending dan bukan saja oleh pendeta-pendeta dari tanah Belanda. Ternyata guru-guru zending telah meneruskan kegiatan yang biasa dilakukan di gereja dan di sekolah-sekolah untuk membina masyarakat. Pada masa itu pendidikan mereka tidak memadai ditambah lagi dengan gaji mereka dihapus semasa Daendels memerintah wilayah Hindia Belanda karena pemerintah Kolonial Belanda kekurangan dana.

Keadaan ini mulai diperbaiki oleh pemerintah Inggris dengan mendirikan *central-school* semacam seminari untuk guru-guru Injil dan pada tahun 1814, pemerintah Inggris mendatangkan seorang pendeta dari India, yaitu Jabez Carey, anak William Carey untuk memimpin sekolah yang ada di Maluku dan melakukan pengabaran Injil (misionaris). Perhatian yang besar terhadap gereja dan sekolah sangat disukai oleh orang-orang Ambon. Perlakuan terhadap guru-gurupun diterima dengan baik karena Inggris membayar kembali gaji para guru secara teratur (Enklaar 1980: 35-38; de Graaf 1977: 206-7).

Kelanjutan tugas memajukan sekolah dan gereja di daerah Maluku dilaksanakan oleh badan-badan zending yang pada waktu itu menjalankan misinya di Ambon dan seluruh kepulauan Maluku yaitu *Nederlandsch Zendeling Genootschap* (selajutnya disingkat NZG). Lembaga *zending* ini bekerja di Ambon sebelum Inggris menyerahkan kekuasaan kembali ke Belanda yaitu dengan mendatangkan seorang pendeta bernama Joseph Kam yang tiba di Ambon pada tanggal 3 Maret 1815 yang waktu itu umurnya sudah mencapai 45 tahun (Brugmans 1938: 115-6; Enklaar 1980: 45). Ia disambut oleh orang-orang terkemuka di Jemaat gereja dan 25 orang guru sekolah¹² di Ambon. Keadaan sekolah di Pulau Ambon dan pulau-pulau sekitarnya saat kedatangan Kam, baik sistem pengajaran maupun situasinya masih sama seperti pada masa VOC. Gereja dan sekolah masih merupakan satu

¹²Dalam dokumen-dokumen abad ke-19 para guru ini dinamakan "guru midras". Sekolahnya disebut "midras" sedangkan muridnya dinamakan "anak midras". Istilah ini digunakan untuk menamakan sistem pendidikan yang dikelola oleh pihak zending (Leirissa, 1984: 47)

kesatuan yaitu dikelola dan diawasi oleh pemerintah. Masyarakatnya pun masih mengutamakan pengetahuan agama sehingga belum ada kebutuhan pendidikan umum untuk tingkat lanjut (Kroeskamp 1974: 59).

Langkah pertama yang dilakukan oleh Yosep Kam guna memperbaiki keadaan pendidikan dan agama yaitu dengan melakukan perjalanan ke daerah-daerah untuk berkotbah dan membaptis masyarakat sambil meninjau keadaan gereja dan sekolah-sekolah (de Graaf 1977: 210). Hal yang ia dapati adalah standar pendidikan sangat rendah karena ternyata murid bisa membaca tapi tidak mengerti apa yang mereka baca. Hal lain adalah kekurangan tenaga guru karena pada saat itu banyak guru berhenti bekerja karena tidak diberi gaji sehingga mereka memilih bekerja di perkebunan dan faktor umur karena banyak guru yang sudah tua serta kekurangan materi pelajaran berupa buku-buku. Sewaktu kekuasaan kembali diberikan oleh Inggris ke tangan Belanda pada tahun 1817 Joseph Kam mengajukan permohonan kepada gubernur Maluku, J.A. van Middelkoop agar penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada pihak *zendings*, namun permohonan ini ditolak karena pemerintah beranggapan merekalah yang bertanggungjawab terhadap pendidikan karena mereka yang mengangkat guru dan memberi gaji kepada mereka sehingga guru adalah pegawai dari pemerintah yang harus tunduk dan patuh pada pemerintah (Kroeskamp 1974: 60).

Kondisi sekolah pada waktu itu sangat sulit terutama kekurangan tenaga guru sehingga mendorong Kam mendirikan sekolah dengan ijin pemerintah, *Institute for training proficient assistants* ("Kam's Institute") sebuah lembaga untuk melatih asisten yang terampil¹³ dan aktivitas belajarnya berpusat di rumahnya sendiri sejak tahun 1819 (Kroeskamp 1974: 61). Di lembaga ini Kam melatih para muridnya agar kelak bisa membantu tugas-tugas di gereja dan sekolah-sekolah. Pendirian didasarkan pada kebutuhan untuk tenaga gereja dan sekaligus dididik sebagai guru yang akan dimanfaatkan bagi pendidikan karena pada waktu itu pendeta-pendeta berfungsi juga sebagai guru sekolah (Pattikayhatu 1980: 22).

Masa pelatihan ini berlangsung selama lima tahun. Murid pertama Kam sekitar sepuluh hingga enam belas orang, sayangnya nama-nama mereka tidak dicantumkan pada dokumen-dokumen sejamin. Mereka pada umumnya berasal

¹³Menurut Enklaar lembaga yang didirikan Kam bernama Lembaga Pendidikan Pembantu-Pembantu yang Terampil (Enklaar 1980: 50).

dari kalangan *burger* yang tinggal di kampung-kampung *burger* dekat kota Ambon. Anak-anak negeri tidak bisa dilatih pada institut ini karena mereka terikat dengan kerja wajib (*kwartodienst*) kepada kepala negeri (*Raja*) kecuali mereka sudah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah negeri atau telah mendapat ijin dari kepala pemerintahan negeri. Tenaga pendidik yang ada pada lembaga pelatihan ini hanyalah Kam dan istrinya Sara Maria Timmerman dan mereka berdua dibantu oleh seorang guru pribumi H. Huwae.

Kam memberikan latihan kepada murid-muridnya dengan mata pelajaran pedagogik, dan setiap Minggu malam istrinya mengajar membaca Alkitab kepada anak-anak budak dan yatim piatu, orang-orang dewasa serta orang kafir (masyarakat yang belum memeluk ajaran agama). Selain itu terdapat para murid-murid institute. Guru M. Huwae dipercayakan memberikan pelajaran membaca, menafsir Alkitab dan matematika (Kroeskamp 1974: 61, Chauvel 1990: 27). Buku-buku dan sarana pelajaran lain pada saat itu sangat sulit dijumpai karena harganya yang mahal. Untuk itu Kam mendirikan percetakan untuk mencetak buku-buku pelajaran terutama Alkitab dan buku-buku lagu gereja untuk kepentingan peribadatan. Buku-buku yang dicetak semuanya bercorakan agama Kristen karena belum ada buku-buku pelajaran yang diterbitkan oleh badan-badan yang berwewenang dalam urusan pendidikan. Buku yang dicetak mencapai 14.000 buah yang terdiri dari Alkitab dan buku lagu-lagu rohani (Kroeskamp 1974: 62-3; Pattikayhatu 1980: 22).

Lembaga ini memang tidak berhasil meningkatkan kualitas para guru karena masih pada penekanan agama ditambah lagi Kam harus bekerja sendirian lagipula ia juga harus mengunjungi gereja dan sekolah di daerah-daerah di luar kota Ambon bahkan sampai ke Manado. Ia juga tidak memiliki konsep tentang data pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah Maluku terutama mengenai penempatan guru-guru yang sudah sekian lama bertugas menempati sekolah-sekolah namun di daerah terpencil tidak mendapat pelatihan lebih lanjut dan jarang dilakukan inspeksi ke sekolah tersebut. Guru-guru hasil didikan pada lembaga pelatihan Kam, harus bersedia ditempatkan di pulau-pulau terpencil terutama di Banda, Kepulauan Aru, Kupang, Rote, Wahai (Seram Utara), Minahasa, Pulau Sangir dan daerah Papua. Perkembangan dapat dilihat dari jumlah murid untuk daerah kepulauan Lease pada tahun 1821 terdapat sekitar 2000 murid meningkat pada tahun 1833 menjadi 3100 murid (Kroeskamp 1974: 62).

Perkembangan pendidikan bukanlah tanggung jawab NZG tapi pemerintah namun dalam perjalanan mereka mengabarkan Injil dan mereka menaruh perhatian besar pada pendidikan karena melalui sekolah, misi gereja dapat dijalankan. Demikianlah yang dilakukan Kam dalam perjalanannya ke daerah-daerah, tidak lepas dari pengawasan dan evaluasi terhadap sekolah-sekolah dan mengambil tindakan untuk kelangsungan sekolah dengan memberikan buku-buku hasil cetakannya. Namun pekerjaan dan perjalanannya yang sangat padat membuat ia tidak dapat menyusun dan melaksanakan rencananya untuk mengatur perbaikan sekolah-sekolah tepat pada waktunya. Sekolah yang ada di Ambon dan sekitarnya pada waktu itu adalah sekolah pemerintah yang merupakan tanggung jawab gubernur Ambon.

Pada 1824, Gubernur Jenderal Van der Capellen berkunjung ke Maluku dan menyaksikan kondisi pendidikan, ia memberika perhatian khusus pada sekolah dengan melakukan pemulihan pendidikan yaitu dengan dikeluarkan sebuah resolusi pemerintah nomor 17 tanggal 8 Februari 1825 isinya tentang perawatan dan pengawasan sekitar seratus sekolah di Maluku dan dipercayakan kepada komite untuk pengawasan sistem sekolah di Maluku yang jumlahnya empat orang. Komite ini dinamakan inspektur sekolah. Salah satunya yang ditunjuk adalah Joseph Kam karena ia sudah terbiasa melakukan inspeksi ke sekolah-sekolah yang dikunjungi dalam perjalanan misionernya. Untuk pengawasan sehari-hari, pemeliharaan gedung sekolah dan tempat tinggal guru diserahkan kepada kepala negeri (*raja*). Pengawasan sekolah oleh inspektur pendidikan tidak berlangsung lama karena pada tahun 1827 pemerintah membentuk Komite Pusat untuk Pendidikan di Batavia sehingga inspektur sekolah berubah menjadi Sub-Komite untuk Pendidikan yang tugasnya melaporkan keadaan sekolah ke Komite Pusat. Tugas pengawasan ini hanya terbatas masalah administrasi saja (Kroeskamp 1974: 64-5).

Setelah 1827, pemerintah mulai mengambil langkah-langkah guna meningkatkan pendidikan di Maluku antara lain dengan menjamin pelatihan yang lebih baik untuk guru-guru karena dianggap selama itu *Kam's Institute* kurang meningkatkan kualitas para guru. Untuk itu pemerintah merencanakan untuk mengirim beberapa pemuda Maluku untuk bersekolah di ELS di Batavia yang sudah didirikan sejak 1817 dan sebagian ke ELS di kota Ambon dengan biaya pemerintah. Rencana ini tidak berhasil karena pihak orang tua dari calon murid

tersebut tidak mengijinkan anak-anak mereka keluar dari Negeri. Oleh sebab itu untuk mencapai tujuan menciptakan guru yang berkualitas harus didirikan sekolah pelatihan guru.

Sekolah pelatihan guru ini baru terbentuk sewaktu NZG mengirimkan utusannya Bernhard Nicolaas Johann Roskott pada 1834. Roskott mendirikan sekolah untuk guru-guru pribumi di Ambon pada tanggal 12 Maret 1835 yaitu “Sekolah Guru di Batumerah” yang disebut “Institut”. Tujuan pendiriannya yaitu untuk mendidik anak-anak menjadi anggota persekutuan Kristen (tujuan NZG). Namun bagi pemerintah tujuan pendidikan seperti ini tidak cukup, bagi Komite Pusat untuk Pendidikan, karena pendidikan harus lebih diarahkan secara lebih teratur ke arah pencerahan, ketekunan dan industri dengan jalan memberikan mata pelajaran yang diiringi dengan praktek-praktek baik di bidang bangunan dan pertanian guna mempersiapkan murid yang memiliki keahlian di bidang dimaksud.

Jumlah murid pada awalnya sekitar dua belas orang kemudian meningkat menjadi delapan belas orang dan semakin bertambah pada tahun-tahun berikutnya sehingga Roskott membaginya menjadi tiga kelas. Murid kelas satu dan dua diajar oleh Roskott, sedangkan kelas tiga diajar oleh tuan Picaulij. Untuk kelas satu Roskott memberi pelajaran berupa pengetahuan umum, pemahaman dan penggunaan Alkitab, termasuk penjelasan sekitar kata-kata Melayu tinggi yang terdapat dalam Alkitab, ajaran iaman Kristen, ajaran tentang budi pekerti, perjalanan rasul-rasul dan khotbah pendek. Di kelas dua Roskott memberikan pelajaran pengetahuan bahasa Melayu tinggi yang terdapat dalam Alkitab, menulis indah, berhitung, sejarah Alkitab, ilmu bumi, menyanyi dan meniup suling. Selain pelajaran tersebut ada beberapa pelajaran lainnya seperti ilmu bumi Eropa, peta Palestina, Asia Kecil, Mecodonia, Yunani, pulau-pulau di Laut Tengah dan semua yang terdapat dalam sejarah Alkitab.

Murid yang diterima pada sekolah ini berumur sekitar dua puluh tahun karena pada usia ini seorang pemuda dianggap telah memiliki kepribadian yang matang sehingga cocok untuk menjadi guru sekolah dan pendeta. Namun ada sedikit kesulitan dalam mendidik murid pada usia ini karena biasanya mereka telah tamat dari sekolah dasar pada umur 13 dan 14 sehingga pengetahuan yang mereka peroleh pada masa sekolah sudah dilupakan. Sama seperti pelatihan dimasa Kam, murid lebih banyak berasal dari golongan *burger*. Para murid yang sudah memiliki pengetahuan tentang pendidikan guru, oleh Roskott diadakan magang selama satu

bulan di sekolah pemerintah untuk orang-orang Kristen Ambon yang pada waktu itu berada di Mardika.

Pada pagi hingga siang para murid mendapatkan pelajaran di kelas dan sorenya mereka bekerja di kebun atau ikut dalam pertukangan atau kerajinan lainnya yang tempatnya disediakan di halaman belakang sekolah dan asrama. Setiap murid juga diberi tugas piket mengurus makanan, bersih-bersih sekolah dan asrama, termasuk kerja di percetakan atau belajar beternak sapi. Mereka juga kadang diberi tugas di rumah Roskott. Semua ini diharapkan nantinya setelah tamat belajar di Institut, mereka menjadi guru yang handal dan memiliki keahlian. Institut Batumerah ini melatih setiap murid untuk dua fungsi yaitu sebagai guru dan sebagai pendeta dalam komunitas Kristen. Pendidikan di sekolah guru ini didasarkan pada gagasan bahwa fungsi utama dari murid adalah sebagai seorang pengkhotbah di masyarakat. Menurut Pendeta L. J. van Rhijn, Inspektur dari NZG yang mengunjungi Institut pada tahun 1847, pendidikan Roskott adalah pendidikan teologis. Ia mengatakan bahwa “anak Ambon tidak perlu membaca atau menulis atau berhitung untuk tujuan sosial. Satu-satunya alasan kebutuhan sekolah adalah untuk melayani kepentingan moral dan agama” (Brugmans 1938: 117).

Menurut Dr. Bleeker, yang mengunjungi Ambon pada 1855, mengatakan bahwa kualifikasi pendidikan di sekolah guru “sebagian besar berorientasi kepada agama. Yang ia maksudkan agama disini adalah “gerejawi” dan menyebut sekolah tersebut berorientasi pada “pelatihan murid untuk menjadi anggota komunitas Gereja”, dan ia menilai pendidikan yang dikelola oleh Roskott pada umumnya sangat efisien karena sesuai dengan misi pemerintah Kolonial Belanda saat itu. Karakter ganda institut Roskott menempatkannya pada posisi yang sulit. Di satu sisi ada Gubernur NZG di Rotterdam, mencelanya dengan kenyataan bahwa lembaga ini dibuat untuk melayani niat pemerintah dalam hal perbaikan sistem sekolah bukan pekerjaan misionaris di Ambon dan terdapat keluhan bahwa pelatihan guru untuk bekerja di komunitas Kristen sangat sedikit. Di sisi lain pemerintah dan orang-orang seperti Bleeker mengharapkan pelatihan guru sekolah akan diarahkan dalam ukuran yang lebih besar bagi pembangunan masyarakat. Namun Roskott memiliki visi untuk bisa meyakinkan kedua belah pihak dengan berpikir yang tajam dan obyektif sehingga ia melahirkan formulasi bahwa sintesis dari dua sudut pandang, dalam arti bahwa pelatihan dan pengajaran

pendidikan Kristen dapat menjadi kekuatan pendorong untuk pembangunan kehidupan sosial yang lebih baik (Kroeskamp 1974: 73).

Pada 1842, Roskott dan Gubernur De Seriere bekerja sama untuk mengembangkan ekonomi yang mulai merosot karena tanaman cengkeh yang merosot tajam. Cara kerja sama adalah dengan membangun kebun di setiap sekolah dan setiap negeri harus menyediakan tanah untuk dijadikan kebun percobaan antara lain untuk menanam pohon murbai untuk membudidayakan ulat sutra, menanam nopal sejenis kaktus akan tetapi setelah beberapa tahun dilakukan percobaan, usaha ini akhirnya gagal. Ada beberapa produk dari kebun sekolah dikirim ke Belanda, tetapi kualitasnya rendah sehingga tidak dapat dipasarkan. Segala macam alasan, seperti penyakit tanaman, kurangnya kepemimpinan dan kekurangan modal, menyebabkan kebun diabaikan. Hal ini cukup beralasan karena anak-anak tidak bisa diharapkan untuk bekerja dalam waktu sepuluh jam setiap hari, setengah waktu di udara terbuka di taman dan setengah jam lainnya di sekolah. Kondisi seperti ini tidak menjamin kesehatan anak-anak juga tidak masuk akal untuk menempatkan tugas tambahan mengelola sebuah proyek kemakmuran di pundak para guru, yang sudah dibebani dengan tugas ganda mereka sebagai guru sekolah dan pendeta (Kroeskamp 1974: 78-9).

Walaupun proyek De Seriere-Roskott sia-sia, tetapi tidak mencegah Sub-Komite untuk Pendidikan di Ambon untuk mempresentasikan lagi rencana serupa pada 1848 meskipun rencana ini memiliki lingkup yang agak sempit. Idenya adalah bahwa perkebunan untuk menanam pala, cengkeh dan coklat akan diletakkan pada setiap sekolah, dimana anak-anak sekolah tertua akan bekerja di bawah bimbingan guru mereka. Diharapkan bahwa dengan adanya proyek perkebunan ini, akan terkumpul dana masyarakat, dan akan dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Pertama uang itu akan digunakan untuk menaikkan gaji guru yang sangat rendah sehingga dengan kenaikan gaji itu diharapkan akan menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Selain itu akan digunakan untuk pemeliharaan gedung sekolah, sedangkan dari sisi aspek pedagogik bertujuan untuk mengajarkan anak mengembangkan sikap yang rajin dan penuh tanggungjawab. Pada 1849 mulai dibuat kebun sekolah yang diprogramkan pada beberapa desa. Para orang tua dan saudara-saudara dari para murid juga sangat antusias dengan rencana pengadaan kebun ini, bahkan mereka membantu mengelola kebun tersebut secara sukarela. Akan tetapi sama dengan usaha yang

pertama, rencana ini gagal akibat pengrusakan tanaman oleh babi hutan dan kebun beberapa kebun diabaikan karena penyakit tanaman (Kroeskamp 1974: 80).

Murid yang sudah menyelesaikan pendidikannya dan memiliki sertifikat diangkat oleh pemerintah menjadi guru di sekolah pemerintah sejak tahun 1840. Pada 1849 di setiap negeri Kristen memiliki sebuah gereja dan sekolah dengan seorang guru yang melayani murid dan Jemaat. Di Pulau Ambon ada 27 sekolah, di Saparua ada 21 sekolah, di Haruku 12 sekolah, di Hila dan Larike ada 6 sekolah dan di pulau Buru ada 1 sekolah. Jumlah guru sekitar 64 orang dan 3 orang guru kepala (Bahasa Melayu: Guruw Besaar). Jumlah murid sekitar tujuh ribu orang (Brugmans 1938: 116). Dua puluh tahun setelah berdirinya Institut Roskott telah menghasilkan 82 guru, di antaranya 61 telah ditempatkan di Residensi Amboina, 3 guru di Banda, 2 guru ke Timor, 6 guru ke pulau-pulau di Tenggara Maluku, 6 guru ke Aru, 1 guru ke Ternate, dan 3 guru ke Manado (Kroeskamp 1974: 75-6).

Pada 1852, dibuat kurikulum sekolah untuk menciptakan standarisasi namun proporsinya masih ke bidang keagamaan dan sedikit nilai sosial. Dari hasil laporan inspektur sekolah didapatkan kenyataan, banyak guru kembali ke kebiasaan menghafal tidak memperbiasakan diri untuk lebih kepada tingkat pemahaman secara mendalam dari isi materi pelajaran. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman teks-teks pelajaran yang menggunakan bahasa Melayu tinggi. Roskott diangkat menjadi pengawas sekolah pada tahun 1852 oleh pemerintah. Dalam perjalanan mengunjungi sekolah-sekolah, ia mendapati guru-guru yang mahir namun ada juga dijumpai guru yang malas karena sibuk memancing ikan dan berkebun. Metode mengajar yang digunakan guru monoton dan membosankan sehingga Roskott selalu memberi contoh yang baik ketika berkunjung ke sekolah (Alyona 2009: 55). Bagi guru yang kurang trampil dalam mengajar tetapi sekolahnya berada di sekitar Ambon dibina kembali di Institut selama beberapa waktu. Pengawasan sekolah di Pulau Ambon dan sekitarnya dapat dilakukan dengan intensif sehingga dapat menambah kualitasnya, namun untuk wilayah terpencil seperti di Maluku Selatan pengawasannya sangat kurang karena jarak yang sangat jauh (Kroeskamp 1974: 76).

Dari hasil pengawasannya Roskott disadari bahwa tidak ada kemajuan dalam peningkatan pendidikan. Hal ini dikarenakan kurangnya bahan pelajaran untuk mengasah pengetahuan mereka. Bahan-bahan pelajaran umumnya hanya tentang

agama Kristen yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan para guru hanya menguasai bahasa Melayu sehingga pengetahuan mereka hanya terbatas tentang agama. Untuk itu Roskott mulai memperkenalkan bahasa Belanda sebagai salah satu mata pelajaran di Institut. Dengan mengetahui bahasa Belanda akan membuka pengetahuan calon guru tentang ilmu-ilmu umum dan tentang peradaban Barat (Kroeskamp 1974: 81). Pada tahun 1853 S. A. Buddingh sebagai anggota Komite Pusat melakukan kunjungan ke Maluku, dari hasil kunjungan tersebut ia mengusulkan untuk menggantikan penggunaan bahasa Melayu ke bahasa Belanda dalam dunia pendidikan guna meningkatkan pengetahuan para murid. Hal ini baru dirumuskan oleh Komite Pusat pada tahun 1859. Pada 1862 bahasa Belanda mulai diperkenalkan di sekolah-sekolah Kristen (Brugmans 1938: 172-3).

Perkembangan pengawasan *zending* atas sistem pendidikan di daerah Maluku dalam pertengahan abad ke-19 mulai dipertanyakan oleh pemerintah. Terutama campur tangan para guru dan para *zending* dalam masalah-masalah pemerintahan desa menimbulkan kritik dari pihak pemerintah. Hal ini dikarenakan usul Roskott pada gubernur agar para guru dan *zending* diberi kekuasaan yang lebih luas namun usulan tersebut ditolak. Pertentangan ini meningkat pada tahun 1854 ketika pemerintah melarang pihak *zending* mengawasi pendidikan. Walaupun hal ini dilakukan, namun hubungan Roskott dengan bekas muridnya tetap berlangsung melalui jabatan sebagai guru dan muridnya. Martabatnya tetap tinggi dalam masyarakat Maluku, antara lain karena ia juga menjadi anggota istimewa *Raad van Justitie*. Tetapi akhirnya Roskott sendiri bertentangan dengan pimpinan NZG di Belanda (Leirissa dalam Depdikbud 1989: 66).

Pada 1860-an, prioritas pemerintah di bidang pendidikan sudah bergeser. Pemerintah menginginkan sebuah orientasi praktis diberikan kepada pendidikan di Maluku (Leirissa, *et al.*, 1982: 228). Dengan ekspansi geografis kekuasaan Belanda di Nusantara dan meningkatkan keterlibatan pemerintah dalam masyarakat Indonesia, pemerintah kolonial saat itu mencari orang dengan keaksaraan dasar dan keterampilan numerik, maupun ketrampilan dan pemahaman tentang Belanda, untuk mengisi birokrasi golongan bawah dan golongan menengah dari jajaran birokrasi yang ada saat itu. Pada 1864 ada ujian untuk pengangkatan pegawai sipil baru (*kleinambtenaarsexamen*) untuk memfasilitasi pengangkatan pribumi. Di bawah arahan dari Departemen Pendidikan, Agama dan Industri,

dibuat pada tahun 1867 dan ada perluasan fasilitas pendidikan yang cukup besar untuk pribumi di seluruh nusantara. Di Pulau Ambon sudah ada sistem sekolah yang luas di negeri Kristen untuk kepentingan pemerintah, bahkan dalam lembaga pendidikan itu bertujuan untuk meningkatkan standar pendidikan bukan ekspansi (Chauvel 1990: 27). Sekolah-sekolah yang tersebar di berbagai daerah dengan komposisi tenaga pengajar dan jumlah siswanya terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Daftar Lokasi Sekolah Rendah, Tenaga Pengajar dan Jumlah Siswa
1866

NO	LOKASI SEKOLAH RENDAH	TENAGA PENGAJAR	JUMLAH SISWA
	Amboina		
1	Waii	J. Latuheru	73
		A. Tanamal	
		J. J. Sijahainenya	
2	Tiaal Serani	J. H. lopulalan	19
3	Soeli	J. A. Siwalete	121-134
		J. J. Manusama	
4	Passo	P. J. De queljoe	65
5	Negeri Lama	J. D. Nendissa	42
6	Waiheru	N. Ririmasse	88
7	Pokka	J. D. Manusama	45
8	Lata dan Lateri	L. A. J. Manusama	131-132
		A. Manusama	
9	Halong	Lelipaly	24
10	Galala	A. Z. Latumanuwuy	49
11	Mardika	P. P. Rizakotta	127
		J. O. Nanlohy	
12	Hative Besar	E. P. Soumokil	278
		S. Pattisilano	
		J. Sahertian	
13	Noesaniwe	B. L. Huwae	252

		J. H. Tapanno	
		J. B. Siahaya	
		M. Nanlohy	
14	Hatooe	J. C. Sepania	81
15	Lilibooi	P. T. Peijlouw	110
16	Alang	T. H. Lilipaly	242
		J. P. Metekohij	
		H. W. C. V. Kuhuwael	
17	Amahoeseo	J. E. Risakotta	98
18	Roematiga	B. Lainsamputij	46
19	Soia diatas	J. M. Matahele	27
20	Hatalai	C. Nanlohy	79
		S. Pattiselano	
21	Nakoe	M. A. Lilipalij	47
22	Kilang	E. O. Lastunij	54
23	Hoekoerila	H. P. Matulapelwa	16
24	Ema	A. S. Makatita	126
		M. Lainsamputij	
		A. Hanlessij	
25	Leahari	J. M. Tallane	17
26	Roetoeng	S. Hukom	57
27	Hoetoemoeri	P. P. Pajis	147
28	Larike	W. N. Manuhutu	21
29	Lima	P. W. Rikumahu	100
		M. Pikaulij	
30	Hila	J. W. Tanamal	45
		J. L. Reawaroe	
	Buano		
31	Buano	J. W. Pattinasaranij	131
	Manipa		
32	Manipa	J. P. Pelupssij	25
	Seram		

33	Loki	P. S. Huka	42
34	Piroe	P. R. Hukom	?
35	Roemaki	A. N. Wattimena	91
36	Tihulale	P. P. Leiwakabessij	52
37	Kamarian dan Kaibobo	S. Tanamal	?
		P. Rikumahu	
		N. Picaulij	
38	Amahai	E. C. Pattiasina	225
		P. J. Mahudin	
		P. J. Kuhuwael	
39	Makariki	A. M. Lakollo	89
40	Awaia	M. Anakotta	70
41	Elpapoeti	A. P. Siahaija	250
		J. P. Manuhutu	
		B. W. Jungerman	
42	Saparua		
	Saparoea Entiouw	J. L. Wattimena	267
		B. M. Simallo	
		A. T. Haulussij	
		C. T. Siahaija	
43	Paperoe	A. T. Haulussij	111
		A. T. Siahaija	
		A. T. Hitipeuw	
44	Booi	P. Pastora	168
		J. Nikiuluw	
45	Haria	E. Tapiheru	314
		A. A. De Fretes	
		M. Timisela	
46	Porto	H. Kuhuwael	195
		C. Rensanpessij	
47	Toehaha	M. Nahumurij	237

		H. Ruhukail	
		A. M. Nijpassa	
48	Ihamahoe	J. Pattipelohij	217
		H. Wattimena	
		T. J. Sopakuwa	
49	Nolloth	J. J. Hetaria	204
		J. B. Siahija	
50	Itawaka	T. Sahupala	138
		J. Latumanuwij	
51	Serri Sorri	L. Reawaruw	144
		J. Nikiuluw	
52	Oelath	A. Soplanit	159
		P. Dalima	
53	Ouw	P. Nanlesij	147
		F. Manuputij	
	Noesa Laut		
54	Sila dan Leinitoe	J. Pikanusa	83
55	Titawai	J. Huliselan	206
		J. Pelamonia	
56	Aboeboe	A. J. Anakotta	120
		T. A. Tentuwa	
57	Akoon	M. S. Hukom	82
58	Ameth	J. M. Sarimonela	226
		L. Litaaij	
		C. Waas	
59	Nalahia	L. Lupulisa	83
	Haroeke		
60	Haroeke dan Sameth	A. M. Haulussij	223
		M. S. Kaija	
61	Oma	J. M. Pattij	124
		A. O. M. Lahasian	
62	Wassoe	J. J. Noija	72

		J. J. Wattimena	
63	Aboeroe	A. P. Sihaneina	164
64	Hoelalioe	C. Mustamu	182
		M. F. Rugebert	
65	Kario	G. Simatauw	62

Sumber: *Verslag van het Inlands Onderwijs in Nederlands-Indie over 1866.*

Nasib Roskott sebagai seorang pendidik dan kebanggaan dari sekolah yang ia bina sangat menderita karena adanya perubahan mendadak yang dilakukan oleh pemerintah. Penekanan pemerintah terutama pada pelajaran agama yang menurut Gubernur tidak lagi sebanding dengan nilai-nilai liberal dari birokrasi pendidikan baru, dan lulusan sekolah pelatihan guru yang diselenggarakan Roskott tidak memiliki tingkat keterampilan yang diinginkan. Pada tahun 1863 Gubernur Maluku diminta untuk memberikan nasihat mengenai penyelenggaraan sekolah pelatihan guru dan reformasi birokrasi pendidikan karena sangat dibutuhkan untuk mendapat perhatian secara langsung di bawah pengawasan pemerintah. Gubernur menjawab bahwa pemerintah tidak terlibat dalam pengoperasian sekolah karena menurut Gubernur, sistem pendidikan yang diterapkan pada seluruh lapisan telah berada di bawah tanggungjawab NZG (Roskott). Namun setelah beberapa investigasi ke sekolah-sekolah, Gubernur mengambil kesimpulan bahwa apa yang telah dilakukan oleh NZG (Roskott) telah memenuhi standar dan sudah memenuhi tuntutan pendidikan umum yang diharapkan, tetapi menurut Gubernur juga bahwa tujuan kurikulum pendidikan saat itu terlalu berorientasi pada hal-hal keagamaan dibanding untuk kegunaan praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Satu-satunya solusi menurut Gubernur adalah pemerintah harus segera mengambil tanggungjawab pelatihan guru-guru. Seorang guru sekolah perlu mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan menurut Gubernur pemerintah mampu melayani program pelatihan pegawai pribumi secara baik. Sekolah pelatihan tersebut akan dikhususkan kepada pengembangan pengetahuan dan peningkatan kualitas pendidikan anak-anak penguasa. Kesulitan Roskott tidak hanya dengan pemerintah sipil di Ambon karena pada tahun 1864 ia diberhentikan oleh NZG atas dasar perilaku moral yang tidak benar. Sebelum sekolah-sekolah *zendings* itu diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah pada 1864,

Roskott sudah dipecat oleh NZG. Seperti apa perlakuan moral yang tidak benara menurut pemerintah saat itu tidak dijelaskan pada berbagai dokumen (Leirissa, dkk. 1982: 228-31).

3.5 Sistem Penyelenggaraan Sejak 1869

Peralihan prioritas pemerintah terhadap pendidikan yaitu menginginkan sebuah orientasi praktis diberikan kepada pendidikan di Maluku dipengaruhi juga oleh berkembangnya pemikiran, ide-ide dan aliran baru di Eropa yang disebut dengan ide-ide liberal yang lebih dikenal dengan abad *Aufklarung* atau Abad Pencerahan. Aliran liberalisme itu timbul pada abad ke-17 dan mempengaruhi seluruh Eropa pada abad ke-18. Prinsip ajaran aliran itu sebagai berikut.

- 1) Manusia dibebaskan dari absolutisme negara dan mengharapkan agar kebebasan terutama kebebasan ekonomi dapat menghasilkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh umat manusia. Dalam lapangan pendidikan ada kepercayaan bahwa pendidikan dan pengajaran dapat menimbulkan perbaikan sosial.
- 2) Pendidikan hendaknya dapat membebaskan manusia. Pengajaran harus lepas dari pengaruh gereja yang telah mengikatnya berabad-abad lamanya. Hendaknya negara yang harus menyelenggarakannya. Aliran liberalisme yang memperjuangkan toleransi dan pemisahan antara gereja dan negara. Sekarang menjadi pelopor pula dari bentuk pengajaran baru yakni sekolah negara.
- 3) Pentingnya penerangan pengajaran bagi rakyat umum. Hal ini merupakan reaksi terhadap usaha-usaha gereja yang hanya memperhatikan anggota-anggotanya saja maka diusahakan agar ilmu pengetahuan tersebar seluas-luasnya. Dorongan yang kuat didapat dari revolusi Perancis, yang di antaranya menghasilkan pengajaran cuma-cuma bagi semua warga Negara (Djumhur dan Darnasuparta 1976: 118-119).

Aliran liberalisme tersebut tidak saja berpengaruh pada penyebaran pengajaran tapi juga pada isi pelajaran. Beberapa pelajaran baru dimasukkan ke sekolah diantaranya ilmu pasti, ilmu bumi, sejarah, menggambar dan pekerjaan tangan. Sekolah-sekolah lama hanya memberikan membaca, menulis kadang-kadang berhitung, disamping pelajaran-pelajaran agama. (Pattikayhatu, dkk. 1980: 19) Pengaruh liberalisme itu masuk juga ke negeri Belanda, maka timbul pemikiran mengenai pengajaran kolonial. Timbul masalah bagaimana usaha

untuk memperbaiki keadaan pendidikan di daerah jajahan. Maka, sebagai perwujudan dari pemikiran baru ini yaitu mengenai pemisahan antara Negara dan Gereja, maka Gereja harus melepaskan diri dari keterlibatannya dalam kegiatan pendidikan. Dengan kata lain paham *Aufklarung* ini menjadi pelopor dari sistem pendidikan baru yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh negara yang kemudian menjelma dalam bentuk sekolah-sekolah negeri. Berbeda dengan sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh gereja atau agama tertentu yang mengutamakan kepada warga gereja atau agama masing-masing, maka paham baru tersebut memperkenalkan sistem pendidikan untuk masyarakat atau rakyat banyak yang membebaskan kewajiban itu kepada negara atau pemerintah.

Walaupun pemerintah Hindia Belanda pengadopsi paham ini namun prinsip pendidikan yang diselenggarakan adalah *pertama*, pemerintah berusaha untuk tidak memihak salah satu agama tertentu. *Kedua*, tidak diusahakan untuk dapat hidup secara selaras dengan lingkungannya tetapi lebih ditekankan agar supaya anak didik di kelak kemudian hari dapat mencari penghidupan atau pekerjaan demi kepentingan kolonial. *Ketiga*, sistem persekolahan disusun menurut adanya perbedaan lapisan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di pulau Jawa. *Keempat*, pada umumnya pendidikan diukur dan diarahkan untuk membentuk suatu golongan Elite Sosial agar dapat dipakai sebagai alat bagi kepentingan atau keperluan supremasi politik dan ekonomi Belanda di Indonesia (Mestoko, dkk.1986: 86).

Pendidikan di Nusantara sebenarnya telah mengalami perkembangan setelah 1848 yang ditandai dengan dikelurkannya peraturan yang menunjukkan bahwa pemerintah perlahan-lahan menerima tanggung jawab yang lebih besar atas pendidikan anak-anak Indonesia sebagai hasil perdebatan di parlemen Belanda dan mencerminkan sikap liberalnya. Melalui surat keputusan Raja Belanda No. 95 tanggal 30 September 1848 yang isinya memberikan wewenang kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk menyediakan dana f. 25.000,- per tahun guna pendirian sekolah-sekolah bumiputra. Berdasarkan keputusan ini maka didirikan 20 sekolah dasar negeri di setiap ibukota keresidenan (Mestoko, dkk. 1986 : 92-93; Lubis, dkk. 2003²: 10-11; Nasution 2008: 12).

Pada 1863, Fransen van de Putte, Menteri Urusan Jajahan yang beraliran liberal, berhasil mempercepat pembangunan sekolah dengan menghapuskan batas biaya 25.000 gulden bagi pendidikan dan pada 1883 anggaran tersebut naik

hingga 400.000 gulden. Jumlah murid meningkat pesat. Sekolah ini dikhususkan untuk mempersiapkan pegawai dari orang pribumi. Inilah pertama kalinya uang pemerintah dipakai untuk pendidikan anak-anak bukan Kristen (Nasution 2008: 12-4).

Politik pengajaran liberal yang dijalankan sejak 1864 sampai akhir abad ke-19 itu ternyata tidak untuk mendidik rakyat dalam arti yang umum. Sistem pengajaran bumiputra yang didegungkan ternyata sama sekali tidak memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Diferensiasi pengajaran bumiputra malah memecah-mecahkan masyarakat dalam tingkatan-tingkatan dan kelas-kelas masyarakat, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah.¹⁴ Dalam politik tersebut terlihat jelas bahwa pribumi tidak perlu mendapat bimbingan untuk mencapai kemajuan, sedangkan sebagian kecil rakyat Indonesia yang menerima pengajaran Barat yang intelektualistis itu dipakai untuk menunjang aparat pemerintah kolonial.

Perubahan sistem pendidikan dilaksanakan setelah Inspektur Van der Chijs melakukan perjalanan pengawasan ke beberapa wilayah dan mendapati sistem yang dilaksanakan tidak teratur dan tidak mengikuti prinsip-prinsip yang diinginkan pemerintah, sehingga dikeluarkan peraturan baru yang mengatur pelaksanaan pendidikan untuk pribumi agar lebih sistematis (*Staatsblad* No. 104 tahun 1871). Perubahan tersebut antara lain adalah perluasan sekolah-sekolah pribumi (*Inlandsch Onderwijs*) yang diawali dengan pembukaan sekolah guru (*Kweekschool*). Tujuan dari sekolah pribumi ini adalah untuk mengajar anak-anak bangsawan atau pemimpin pribumi dan penduduk pribumi lainnya. Perubahan lain yaitu dari segi bahasa yang digunakan dalam proses pembelajaran saat itu. Proses belajar mengajar di sekolah-sekolah pribumi diberikan dengan menggunakan bahasa daerah karena kurangnya alat bantu pengajaran dalam bahasa Melayu sehinggalah adanya peraturan baru tersebut ditetapkan matapelajaran wajib seperti membaca, menulis, berhitung, dan salah satu tambahan mata pelajaran yaitu Bahasa Belanda. Dalam peraturan ini juga berisi tentang biaya pendidikan sekolah-sekolah pribumi ditanggung oleh pemerintah sesuai pasal 6 dari peraturan pemerintah Hindia Belanda. Untuk tercapainya program pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah sesuai peraturan yang ditetapkan diatas maka diberbagai afdeling sekolah-sekolah dibuka untuk memenuhi program wajib belajar yang diharapkan oleh Pemerintah.

¹⁴Untuk mengatur dasar-dasar baru bagi pengajaran Bumiputera dikeluarkan *Indisch Staatsblad* 1893 No. 125 yang membagi sekolah-sekolah Bumiputera menjadi dua bahagian yaitu sekolah kelas satu dan kelas dua.

Tabel 5
Daftar Lokasi Sekolah Rendah dan Tahun Berdirinya

NO.	DAFTAR LOKASI	TAHUN BERDIRI
	Afdeeling Ambonia	
1	Waii	1874
2	Tiaal Serani	1870
3	Soeli	1863
4	Passo	1873
5	Negeri Lama	1865
6	Waiheoroe	1867
7	Pokka	1873
8	Latta	1872
9	Lateri	?
10	Halong	1873
11	Galala	1865
12	Hative Besar	1874
13	Hatoe	1865
14	Lilibooi	1867
15	Alang	1865
16	Amahoesoe	1868
17	Roematiga	1872
18	Soia diatas	1869
19	Hatalai	1873
20	Nakoe	1865
21	Kilang	1873
22	Hoekoerila	1870
23	Ema	1873
24	Leahari	1869
25	Roetoeng	1874
26	Hoetoemoeri	1873
27	Mardika	1867

	Afdeeling Hila dan Larike	
28	Hila	
29	Larike	
30	Manipa	
31	Buano	
32	Loki	
	Afdeeling Saparoea dan Haroekoe	
33	Saparoea En tiouw	1873
34	Paperoe	1873
35	Booi	1873
36	Haria	1868
37	Porto	1860
38	Toehaha	1868
39	Ihamahoe	1865
40	Nolloth	1865
41	Itawaka	1862
	Afdeeling Saparoea dan Haroekoe	Tahun Berdiri
42	Serri Sorri	1873
43	Oelath	1869
44	Ouw	1873
45	Nalahia	1868
46	Ameth	1865
47	Sila dan Leinitoe	1873
48	Titawai	1873
49	Aboeboe	1868
50	Akoon	1873
51	Ameth	1865
52	Nalahia	1868
53	Tihoelale	1873
54	Haroekoe dan Sameth	1868
55	Oma	1865

56	Wassoe	1873
57	Aboeroe	1868
58	Hoelalioe	1865
59	Karioe	1865
60	Roemakai	1873
61	Kamariang	1873
	Afdeeling Boeroe	
62	Hatoesoea	1873
63	Waisamoe	1873
64	Kaiboboe	1873
65	Kajeli	1874
	Afdeeling Amahai	
66	Amahai	1865
67	Makariki	1869
68	Aiwaija	1868
69	Parlohi	1869

Sumber: *Regeerings Almanak voor Nederlandsch-Indië* (I) 1874.

Selain pendidikan pribumi, pendidikan dasar Eropa juga mengalami pergantian sistem. Ini tertuang dalam *Staatblad* No. 81 tahun 1868. Isinya antara lain, kesempatan memasuki sekolah-sekolah Belanda sejak saat itu terbuka untuk anak-anak pribumi dan anak-anak Timur Asing.

3.6 Kebijakan Pemerintah Mengubah Sistem Pendidikan

Pemerintah Kolonial ternyata cukup memainkan peranan penting dalam segala masalah pendidikan. Setiap ada perubahan harus dengan persetujuan gubernur jenderal atau direktur pendidikan, oleh karenanya pendidikan dikontrol secara terpusat baik itu mengenai sekolah, kurikulum, buku pelajaran, persyaratan guru, jumlah sekolah, jenis sekolah, pengangkatan guru ditentukan oleh pusat. Jadi, setiap kebijakan tentang pendidikan di daerah harus ikut dengan kebijakan di pusat. Ini dapat kita lihat ketika terjadi kelesuan ekonomi yang melanda

Hindia Belanda karena terjadi krisis gula pada 1884 yang menyebabkan ekonomi di Hindia Belanda terpuruk sehingga berdampak pada gaji guru saat itu. Kondisi ini menyebabkan peraturan mengenai pendidikan tahun 1871 segera diganti dengan keputusan pemerintah tahun 1885 yang mengurangi biaya pendidikan dan menyederhanakan kurikulum. Pada 1887, W. P. Groenevelt, Direktur Pengajaran, Agama, dan Industri mengajukan usul yang akhirnya menghasilkan reorganisasi sekolah pada 1892. Usul ini disetujui Gubernur Jenderal, Dewan Hindia, Direktur Pengajaran, Agama, dan Industri pada 1892. Kemudian usul disampaikan kepada Menteri Urusan Jajahan yang merundingkannya dengan Raja dan akhirnya dituangkan dalam Keputusan Raja pada 28 September 1892 yang termuat dalam Lembaran Negara (*staatsblad*) No. 125 tahun 1893.

Groenevelt melihat dua kelemahan sekolah untuk pribumi yang ada. Sekolah itu tidak disesuaikan dengan kebutuhan penduduk, karena pada satu pihak memberikan terlampau sedikit dan di lain pihak terlampau banyak. Mereka dipersiapkan untuk menjadi pegawai mendapat pendidikan yang terlampau sedikit sedangkan bagi rakyat biasa apa yang diajarkan itu terlampau banyak. Untuk memperbaiki kekurangan ini Groenevelt selaku Direktur agama dan industri, mengusulkan agar menerapkan dua jenis sekolah saja yaitu Sekolah Kelas Satu (*Eerste Klasse School*) untuk anak-anak golongan atas yang akan menjadi pegawai dan Sekolah Kelas Dua (*Twede Klasse School*) untuk rakyat biasa. Kedua sekolah yang diusulkan itu tetap menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar, namun pada tahun 1907 pemerintah mewajibkan penggunaan bahasa Belanda di sekolah kelas satu. (Hanya yang pertama lima tahun dan memakai guru-guru tamatan *Kweekschool*, yang kedua hanya berlangsung tiga tahun dan guru-gurunya bukan tamatan *Kweekschool*) (Mestoko, 1986: 93; Lubis, dkk. 2003²: 13-14; Nasution 2008: 26, 28, 36, 50).

Sejak awal abad ke-20 di seluruh muka bumi terdapat perkembangan dan pembaruan, yang sangat pesat khususnya di bidang politik dan ekonomi, termasuk di Hindia Belanda. Perusahaan-perusahaan Eropa di Hindia Belanda mengalami kemajuan pesat dan terjadi peningkatan dalam berbagai sektor kehidupan. Seiring dengan kemajuan yang dicapai dalam berbagai sektor kehidupan, dengan sendirinya meningkat pula permintaan tenaga kerja terdidik dan ahli. Di satu sisi penduduk pribumi pada waktu itu mulai termotivasi dan menyadari dirinya bahwa terjadi peningkatan dalam berbagai sektor kehidupan

merupakan peluang bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup dan perbaikan ekonomi. Peningkatan atau kemajuan saat itu lebih dirasakan oleh penduduk di kota-kota besar atau pusat-pusat aktivitas pemerintah Hindia Belanda karena ternyata perubahan peningkatan itu tidak secara menyeluruh dirasakan oleh rakyat yang berada di daerah periferi. Di kalangan orang-orang Belanda timbul aliran untuk memberikan kepada penduduk asli bagian dari keuntungan yang diperoleh orang Eropa (Belanda), selama mereka menguasai Indonesia. Aliran ini mempunyai pendapat bahwa kepada orang-orang pribumi harus diperkenalkan kebudayaan dan pengetahuan Barat yang telah menjadikan Belanda bangsa yang besar. Aliran atau paham ini dikenal sebagai politik Etis (*Etische Politiek*).

Gagasan tersebut dicetuskan semula oleh Van Deventer pada 1899 dengan motonya “Utang Kehormatan” (*de Eereschuld*). Politik Etis ini diarahkan untuk kepentingan penduduk pribumi dengan cara memajukan penduduk asli secepat-cepatnya melalui pendidikan secara Barat. Langkah politik baru menjadi terkenal dengan slogan “pendidikan, irigasi, emigrasi”. Oleh karena itu dalam dua dasawarsa sejak 1900 pemerintah Hindia Belanda banyak mendirikan sekolah berorientasi Barat.

Tokoh ini tidak secara tegas menyatakan bahwa orang dari golongan rakyat biasa yang harus didahulukan tetapi menganjurkan supaya rakyat biasa tidak diabaikan. Dengan dijalankannya Politik Etis pada awal abad ke-20 terbukalah peluang untuk pribumi mengenyam pendidikan berorientasi Barat lebih luas karena mulai ada penambahan dan perbaikan pendidikan untuk orang Indonesia (Niel, 1984: 70, Nasution, 2008: 19-20).

Berkaitan dengan “arah etis” (*etische koers*) yang menjadi landasan langkah-langkah dalam pendidikan di Hindia-Belanda, maka pemerintah mendasarkan kebijaksanaannya pada pokok-pokok pikiran antara lain, pertama, pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan penduduk pribumi. Untuk itu bahasa Belanda diharapkan dapat menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Kedua, pemberian pendidikan rendah bagi golongan pribumi disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Atas dasar itu maka corak dan sistem pendidikan dan persekolahan di Hindia Belanda pada abad ke-20 dapat ditempuh melalui dua jalur tersebut. Di satu pihak melalui jalur pertama diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan akan unsur-unsur dari lapisan atas serta tenaga terdidik bermutu tinggi bagi keperluan

industri dan ekonomi, dan di lain pihak terpenuhi kebutuhan tenaga menengah dan rendah yang berpendidikan. Politik Etis yang menurut pemerintah adalah untuk membalas budi kepada tanah jajahan, namun tetap saja perkembangan pendidikan Barat ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pihak Belanda akan tenaga kerja.

Pertumbuhan sekolah dapat dibedakan menjadi empat kategori sekolah yaitu:

- 1) Sekolah Eropa yang sepenuhnya memakai model sekolah Negeri Belanda, tingkatannya antara lain *Europeesche Lagere School* (ELS), *Hogere Burger School* (HBS), dilanjutkan ke sekolah tinggi di Negeri Belanda.
- 2) Sekolah untuk pribumi yang menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Tingkatannya antara lain *Hollandsch Inlandsche School* (HIS), dilanjutkan ke *Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs* (MULO), kemudian ke *Algemeene Middelbare School* (AMS), dan ke sekolah tinggi
- 3) Sekolah untuk bumiputra yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar antara lain *Inlandsche School der Tweede Klass*, *Volksschool* (Sekolah Desa), *Vervolgschool* (Sekolah Lanjutan Volksschool), *Schakelschool* (Sekolah Penghubung)
- 4) Sekolah menggunakan sistem pribumi (Kartodirdjo 1999: 76), seperti Muhammadiyah, Taman Siswa, INS Kayu Tanam, dan lain-lain.

3.7 Peralihan Pendidikan Bercorak Kristen ke Pendidikan Barat Sekuler

Untuk melaksanakan sistem pendidikan sesuai dengan aliran liberalisme, pada pertengahan abad ke-19 pemerintah colonial membangun sistem pendidikan bumiputera (*Inlandsch onderwijs*) (Leirissa 1989: 54). Pertama dapat dicatat adalah timbulnya sekolah pribumi yang netral dancorak pendidikannya tidak lagi bertumpuh pada pola pikir dan pengaruh agama khususnya agama Kristen Protestan. Berdasarkan Ordonansi April 1874 yang dimuat dalam *Staatsblad* No. 99 menetapkan bahwa pengajaran merupakan tanggung jawab penuh pemerintah. Perubahan lain adalah dalam bidang administrasi pendidikan yang dikelola oleh pemerintah. Perubahan ini terutama untuk menghapus sistem administrasi pendidikan pada kurun sebelumnya khusus sekolah-sekolah Kristen yang didirikan sejak 1865 dihilangkan dan sejak itu tidak pernah diadakan lagi (Brugmans 1938: 167).

Sikap pemerintah Hindia Belanda mulai diarahkan untuk meniadakan peyelenggaraan dan pengawasan pendidikan oleh *zending* sejak pertengahan 1850-an. Hal ini bisa dipahami mengingat sejak tahun 1848 pemerintah Hindia Belanda sudah mulai membuka sekolah-sekolah mereka di pulau Jawa. Sejak itu pula sistem pendidikan bumiputera diawasi oleh seorang pejabat yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu J.A. van der Chijs dan ia diberi tugas sebagai *Inspectuer van het Inlandsch Onderwijs* (Inspektur Pengajaran Bumiputera).¹⁵ Kemajuan yang dicapai setelah dihapuskannya sistem pendidikan yang dikelola *Zending* adalah penerapan sistem pendidikan yang menyeluruh di wilayah Hindia Belanda. Perubahan ini ternyata tidak sama diberbagai daerah karena ternyata di Maluku, Minahasa, dan Timor ada perkembangan yang khas karena pengaruh *Zending* sangat kuat menyebabkan sistem pendidikan di sana sulit disinkronkan dengan sistem pendidikan yang muncul di Jawa dan Sumatera.

Penghapusan peranan *zending* dinyatakan secara formal dalam Peraturan Pemerintah tahun 1871. Pada dasarnya politik pendidikan sejak itu mengeluarkan pengajaran agama dari pendidikan umum. Pemerintah harus netral dalam soal agama, dan ini merupakan salah satu dari prinsip-prinsip *Aufklarung* yang muncul di Eropa abad ke-18 tetapi baru bisa diterapkan di Hindia Belanda dalam abad ke-19 (Brugmans, 1938: 160-161). Sejak itu sekolah-sekolah *zending* diambil alih oleh pemerintah di Maluku pada awal abad ke-20. Akan tetapi sekolah-sekolah yang ada selama abad ke-19 tidak dapat begitu saja menghilangkan cirinya yang diperoleh selama masa pembinaan *zending* berlangsung (Leirissa dalam Depdikbud, 1989: 66). Pihak *zending* meminta kepada pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mempertahankan Sembilan sekolah NZG di Residensi Amboina dengan gaji gurunya dibayar oleh pemerintah.¹⁶

¹⁵Oleh karena diperlukan pengawasan bagi sekolah bumiputera maka pada 1864 diangkat seorang *Inspecteur van het Inlandsch Onderwijs* (Inspektur Pengajaran Pribumi). Sebelumnya pada 1827 telah dibentuk suatu komisi yaitu *Hoofdcommissie* untuk tugas pengawasan sekolah bagi anak-anak Belanda dan anak-anak pribumi yang memeluk agama Kristen namun Inspektur Pengajaran Pribumi yang baru dibentuk ini tidak bertanggung jawab kepada *Hoofdcommissie*. Ia diberi wewenang untuk langsung melaporkan dan mengajukan usul-usul kepada gubernur jenderal. Pengawasan terhadap pengajaran pribumi itu dirasakan agak ganjil maka pada 1865 pengawasan bagi sekolah anak-anak pribumi dan anak-anak pribumi yang memeluk agama Kristen diserahkan kepada Inspektur. Pada perkembangan selanjutnya dibentuk departemen khusus untuk mengatur pengajaran di Hindia Belanda yaitu *Departement van Onderwijs, Eredienst en Nijverheid* (Departemen Pengajaran, Ibadat dan Industri) tahun 1867. Pada 1911, nama departemen ini diubah menjadi *Departement van Onderwijs en Eredienst* (Nasution 2008: 45; Djumbar dan Danasuparta 1976: 126-7).

¹⁶Lihat dalam *Algemeen Verslag van den Staat van Het Schoolwezen in Nederlandsch-Indië over het Jaar*

Dalam peraturan 1871 Pasal 4 juga diatur tentang pelajaran agama yang tidak diajarkan lagi dalam sekolah-sekolah pemerintah, bahkan karakter khusus Kristen dihapuskan dari sekolah pribumi pemerintah karena dianggap bertentangan dengan netralisasi negara. Dasar dari peraturan ini adalah sejak 1865 dihilangkannya administrasi sekolah Kristen pribumi sedangkan tidak pernah dibuat pembedaan pada departemen pendidikan terhadap jenis sekolah ini. Setelah tahun 1864 dalam laporan pendidikan, sekolah Kristen pribumi dipisahkan dengan yang lain (Brugmans 1938: 165-167). Bahkan gedung-gedung sekolah yang akan dipakai untuk kegiatan keagamaan hanya bisa digunakan saat jam sekolah berakhir. Akibatnya banyak orang tua memberhentikan anaknya keluar sekolah karena mereka berpendapat bahwa tidak ada gunanya anak-anak mereka bersekolah jika sekolah tidak lagi mengajarkan agama dan membaca Alkitab (de Graaf 1977: 252)

Ordonansi April 1874 yang dimuat dalam *Staatsblad* No. 99 menetapkan bahwa pengajaran agama dikeluarkan dari kurikulum sekolah-sekolah negeri dan pengajaran dianggap menjadi tanggung jawab penuh pemerintah. Dengan perubahan ini mulai berdiri sekolah pemerintah. Keadaan ini mudah dilaksanakan apabila di negeri-negeri yang belum ada sekolah Kristen (*zending*). Perubahan sulit dilaksanakan di daerah yang sudah ada sekolah Kristen. Cara untuk mengubahnya yaitu pemerintah memberikan subsidi kepada sekolah tersebut dengan syarat sekolah harus melakukan peningkatan mutu dan perbaikan kondisi sekolah sesuai dengan kemauan pihak pemerintah yaitu sekolah netral.

Pihak gereja mulai merasa terdesak oleh keadaan tersebut sehingga mereka melepaskan sifat keagamaan pada sekolah karena jika tetap mempertahankan sifat sekolah Kristen mereka tidak mendapat sokongan dana dari pemerintah dan harus menanggung sendiri biaya pendidikan yang mereka laksanakan. Akhirnya terjadi pergeseran dari sekolah gereja ke sekolah pemerintah. Sekolah-sekolah di Maluku Tengah sudah terbiasa mengharapkan dana dari pemerintah, maka tidak mengherankan banyak sekolah Kristen yang berubah menjadi sekolah pemerintah. Penghapusan sekolah Kristen di Maluku Tengah mengakibatkan ditutupnya sekolah Guru Batumerah yang didirikan oleh Roskott (Brugmans 1938: 167; Tanamal 1987: 32-3).

1864 (Batavia 1865: 100). Sembilan sekolah tersebut di negeri Allang, Negeri Waai, Galala, Lata, Negeri Lama, Waaiheru, Poka, Hila dan Lokkie.



Gambar 3

Bangunan Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzers
Sumber: Chauvel 1990: 28 (Repro).

Selain sekolah-sekolah pemerintah yang didirikan di Ambon, pada 1858 pemerintah mendirikan sekolah khusus untuk anak-anak golongan *burger* dan anak-anak kepala negeri (*raja*) yang disebut *Ambonsche Burgerschool*. Sekolah ini mendapat pengesahan dari pemerintah pusat pada 1869. Sekolah tersebut menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar sama seperti di ELS untuk orang Belanda,¹⁷ sekalipun digolongkan *Inlandsch Ondernijis* karena sekolah ini bukan untuk orang Belanda. Di sekolah itu tidak diajarkan pelajaran agama sehingga merupakan sekolah sekuler. Mata pelajaran yang diberikan bersifat umum yang berbeda dengan sekolah Kristen yang

¹⁷Selain menggunakan bahasa Belanda, tenaga pengajarnya juga bukan lulusan sekolah guru Roskott, tetapi orang Belanda. Buku-buku yang digunakan juga berasal dari ELS. Singkatnya, *Ambonsche Burgerschool* adalah versi *Inlandsch* dari ELS (Brugmans, 1938: 176-7).

didirikan oleh *zending*. *Ambonsche Burgerschool* didirikan untuk mendidik calon pegawai (*ambtenaar*) di kantor-kantor pemerintah Belanda (de Graaf 1977: 252; Chauvel 1990: 30).

Dapat dimengerti bahwa sebagai negara yang berusaha untuk memelihara kestabilan politik dan karena ingin mempertahankan sifat kenetralan maka kegiatan pengabaran injil kepada orang-orang di luar Kristen akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kenetralan pemerintah. Sikap inilah yang menyebabkan sekolah-sekolah gereja yang sudah berkembang di sini diubah menjadi sekolah pemerintah (Kruger 1959: 88). Akan tetapi perkembangan sekolah pemerintah ini tidak didukung oleh ketersediaan tenaga pengajar sehingga pada 1872 timbul ikatan antara pemerintah dan pihak *zending*, dengan memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah *zending* pemerintah mengharapkan semakin diperbaiki mutu sekolah tersebut yang nanti lulusannya dapat disumbangkan kepada sekolah-sekolah pemerintah. Pemerintah menyadari bahwa keadaan pendidikan di Maluku sejak dahulu telah dipelopori dan dikembangkan oleh pihak gereja. Kekurangan guru ini terjadi karena tidak ada lagi sekolah guru yang didirikan di Ambon sejak ditutupnya sekolah guru Batumerah. Pemerintah merencanakan setelah penutupan tersebut akan dibangun *Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzers* (sekolah guru untuk guru pribumi) namun rencana tersebut baru terlaksana pada 1872.

Pembukaan sekolah guru pribumi tersebut disesuaikan dengan sekolah-sekolah rakyat yang telah ada. Pemerintah melalui pengalaman selama itu menyadari bahwa sebenarnya standar yang dipergunakan oleh *zending* lebih menguntungkan bagi situasi permulaan seperti ini. Sekolah pribumi pemerintah tidak hanya mengajarkan membaca, menulis dan berhitung saja namun disesuaikan dengan pelajaran yang ada di sekolah guru tanpa mata pelajaran pedagogi seperti ilmu bangunan, ilmu bumi, sejarah, ilmu alam, menggambar dan menyanyi. Bagi rakyat biasa, tambahan mata pelajaran ini menyulitkan sehingga banyak dari mereka yang tidak bertahan dalam sekolah ini, bagi mereka untuk tahu membaca, menulis dan berhitung sudah cukup agar mereka tidak dibodohi (Tanamal 1987: 34-5).

Dengan dibukanya sekolah-sekolah pemerintah (netral) di wilayah negeri Kristen, masyarakat merasa dengan demikian tanggungan semua urusan

persekolahan bagi anak-anak mereka dipikul oleh Pemerintah, maka dengan pengertian itulah, banyak sekolah-sekolah disini yang dialihkan kepada sekolah netral tersebut. Peralihan sistem pendidikan tidak menghilangkan peranan *zending* dalam dunia pendidikan di Maluku. Di tempat yang jauh dari pusat pemerintahan atau yang terpencil seperti di daerah Seram yang dihuni oleh orang-orang Alifuru yang masih kafir yang tinggal di lembah-lembah dan gunung-gunung yang terisolir dan tidak ada keinginan pemerintah membuka sekolah mereka di sana, maka dari pihak gereja dan badan-badan *zending* membuka sekolah-sekolah Kristen di negeri-negeri pedalaman, disamping menjalankan tugas-tugas gerejani dan keagamaan.¹⁸ Jadi sekolah-sekolah pemerintah cenderung dikonsentrasikan di daerah yang sudah terbuka atau daerah yang sebelumnya sudah ada sekolah yang dikelola oleh pihak *zending* sedangkan pihak *zending* cenderung dikosentarsikan pada daerah yang sebelumnya belum atau kurang mendapat fasilitas pendidikan (Leirissa dalam Depdikbud 1989: 75).

Setelah pemerintah mengambil alih pendidikan di Maluku, peranan *zending* dalam pendidikan masih tetap ada terutama di daerah-daerah terpencil dengan mendirikan sekolah-sekolah agama. Sekolah ini termasuk pada sekolah partikular (swasta). Lembaga *zending* ini antara lain *Nederlandsch Zending Genootschap* (NZG) dan *Utrechtsche Zending Vereeniging* (UZV) yang hanya bekerja di Pulau Buru dan sebagian kecil dikelola oleh Gereja Katolik. Pendidikan di Maluku tidak bisa dilepaskan sepenuhnya dari pihak *zending* karena keterlibatan mereka di Maluku sudah sejak awal abad-19. Bahkan Pendidikan di Maluku Tengah pada umumnya didasari pada nuansa Kristiani. Perkembangan sekolah *zending* di daerah-daerah ini tidak ditunjang dengan ketersediaan tenaga pengajar sehingga pihak gereja mengambil langkah untuk membuka sekolah guru pada tahun 1885 yang diberi nama STOVIL (*School tot Opleiding van Inlandsch Leeraar*) atau Sekolah Pendidikan Guru Pribumi, sering disebut Sekolah Pendeta Pribumi. Pendiriannya terkait erat dengan penegasan sikap netral pemerintah terhadap gereja.

Pemerintah Hindia Belanda menegaskan bahwa semua guru sekolah yang digaji oleh pemerintah dan membantu di jemaat seperti alumni sekolah *Roskott* hanya dibolehkan bekerja di sekolah. Akibatnya terjadi defisit tenaga pelayan dalam gereja. Untuk mengisi kekosongan tenaga di Jemaat-jemaat maka dipilih

¹⁸*Libat Algemeen Verslag van den Staat van het Schoolewezen in Nederlandsch-Indië over het Jaar 1864 (Batavia 1865: 104).*

dari warga gereja seperti *tuagama*, mereka disebut “goeroe di jemaat” untuk membedakan mereka dari *goeroe midras* atau guru sekolah. Oleh karena mereka tidak dipersiapkan oleh NZG, maka perlu dibuka lembaga pendidikan untuk pembinaan. STOVIL dan sebagian sekolah-sekolah partikulier mendapatkan subsidi oleh pemerintah¹⁹ dan diawasi oleh pemerintah Hindia Belanda (Alyona, 2009: 76, 150). Reorganisasi sekolah tahun 1892 yang terjadi di daerah Jawa tidak keseluruhannya diterapkan di Maluku karena jenis Sekolah Kelas Satu (*Eerste Klasse School*) untuk golongan atas tidak dibuka di sini hingga tahun 1920-an (MrO van Tideman 1930 dalam van Fraassen, ed., 1997³: 127).

Ambonsche Burgerschool dianggap sudah memadai untuk golongan atas. Sejak 1894 sekolah-sekolah pemerintah (bekas *Zending*) dinyatakan termasuk jenis Sekolah Kelas Dua (*Tweede Klasse School*) (Leirissa dalam Depdikbud, 1989: 71). Di banyak negeri dibuka Sekolah Pribumi Kelas Dua yang pada umumnya bertempat di pusat kota pemerintahan. Di seluruh Maluku dicatat sudah terdapat 78 buah sekolah pribumi klas-2, dengan 254 guru dan 700 murid. Di pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease saja sudah terdapat masing-masing 25 dan 24 buah (Beverluis dan Gieben 1929: 160).

Sementara kontrol pendidikan dan campur tangan pemerintah berada di tangan orang-orang Eropa, aspirasi-aspirasi yang berkembang dalam masyarakat biasanya sengaja tidak diperhatikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dikembangkan menurut model Barat, baik organisasi, maupun kurikulumnya. Antara pemerintah dan masyarakat terdapat perbedaan pandangan dalam cara mereka melihat kehadiran lembaga pendidikan ditengah-tengah kehidupan mereka. Di beberapa negeri atau desa timbul dualisme mengenai pendidikan yang baruh diterapkan oleh pemerintah. Di satu sisi kehadiran pendidikan di tengah kehidupan masyarakat Maluku khususnya negeri-negeri Kristen dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan sehingga mereka dapat menerimanya dengan baik. Disisi lain ada sejumlah negeri-negeri Islam yang menolak atau bersikap apatis terhadap kehadiran pendidikan tempat mereka.

Perbedaan pandangan tersebut menyebabkan penyelenggaraan pendidikan di Maluku tidak bisa disamakan dengan pendidikan yang berkembang di pulau Jawa secara umum. Pendidikan yang sesuai peraturan adalah yang harus lepas dari pengaruh agama namun yang terjadi di Maluku Tengah saat itu adalah

¹⁹ Sekolah bersubsidi dari pemerintah dimuat dalam *Staatblad* 1895 No. 146.

penyelenggaraan pendidikan Barat dan pendidikan agama berjalan bersama-sama, bahkan pendidikan agama mendapat dukungan dari pemerintah dengan pemberian

subsidi. Pemerintah tidak menjalankan pendidikan di daerah yang dianggap tidak dapat menghasilkan pendapatan dalam bidang ekonomi. Pemerintah juga tidak bisa menyelenggarakan pendidikan seorang diri karena keterbatasan kemampuan menyediakan dana dan tenaga pengajar yang bersedia masuk ke daerah terpencil sehingga ini digunakan oleh pihak zending dan gereja Katolik untuk mengembangkan pendidikan dan misi mereka di daerah Maluku.

3.7.1 Pelaksanaan Pendidikan oleh Pemerintah

Setelah pelaksanaan pendidikan yang ditangani oleh pemerintah mulai diwujudkan, di Maluku didirikan berbagai sekolah sebagai berikut.

a. Sekolah Negeri

Setelah ada penghapusan peranan *zending*, maka semua sekolah yang telah dikelola oleh *zending* menjadi sekolah pemerintah. Semua sekolah di negeri-negeri di Maluku Tengah mejadi tanggung jawab pemerintah dan semua guru-gurunya digaji oleh pemerintah. Perubahan yang terjadi pada sekolah-sekolah ini terutama adalah kurikulum dan pendanaan. Pemerintah memberikan dana untuk pengadaan fasilitas untuk menunjang pendidikan serta untuk menambah bangunan sekolah (*Besluit* 3 Juli 1892 No. 33).

Perubahan kurikulum seperti yang disebutkan di atas adalah penambahan beberapa mata pelajaran, yang sebelumnya hanya terdiri dari pelajaran membaca, menulis dan berhitung ditambah dengan ilmu bangun, geografi, sejarah, ilmu alam, menggambar dan seni suara. Mata pelajaran yang diajarkan di sekolah ini mencakup hampir semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah guru kecuali mata pelajaran pedagogik (Kroeskamp 1974: 84-88; Tanamal 1987: 35).

Pertumbuhan sekolah untuk pribumi yang dikelola oleh pemerintah tidak terlalu mengalami peningkatan dari segi jumlah sekolah. Tercatat pada 1866 terdapat 64 sekolah,²⁰ meningkat menjadi 69 sekolah pada 1874.²¹ Sejak 1894 sekolah-sekolah pemerintah (bekas *Zending*) dinyatakan termasuk jenis

²⁰Diolah dari *Verslag van Het Inlandsch Onderwijs in Nederlandsch-Indie over 1866*.

²¹Diolah dari *Regeringalmanak voor Nederlands-Indie 1875. Eerste Gedeelte*.

Sekolah Kelas Dua (*Tweede Klasse School*) (Leirissa dalam Depdikbud 1989: 71). Di banyak negeri dibuka Sekolah Pribumi Kelas Dua yang pada umumnya bertempat di pusat kota pemerintahan. Di seluruh Maluku dicatat sudah terdapat 78 buah Sekolah Pribumi Kelas Dua, dengan 254 guru dan 700 murid. Di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease saja sudah terdapat masing-masing 25 dan 24 buah (Beverluis dan Gieben 1929: 160).

b. Sekolah Guru Pribumi

Setelah penutupan sekolah guru di negeri Batumerah tidak ada lagi sekolah guru yang didirikan di Ambon. Pemerintah merencanakan setelah penutupan tersebut akan dibangun *Kweekschool voor Inlandsb Onderwijzers* (sekolah guru untuk guru pribumi). Usulan Gubernur Maluku untuk sekolah guru pemerintah tidak dilaksanakan sampai tahun 1874, padahal Gubernur Jenderal di Batavia menyatakan bahwa kebutuhan pembangunan sekolah harus lebih banyak di Maluku, dan penambahan jumlah sekolah untuk kaum pribumi harus lebih banyak,²² namun rencana tersebut baru terlaksana pada 2 November 1874 (*Regerings-Almanak* 1875:329).

Kurikulum yang dipakai sangat berbeda dari sekolah guru Batumerah (Roskott). Mata pelajaran yang diajarkan terdiri dari bahasa Belanda, bahasa Malayu, matematika, geografi, sejarah, ilmu alam, pedagogi, menggambar dan musik. Pendidikannya berlangsung selama empat tahun, pada akhir pendidikan siswa diuji secara tertulis dan lisan selama enam hari.²³ Bahasa Melayu digunakan dalam tahun-tahun pertama sebagai bahasa pengantar, karena beberapa siswa hanya tamatan sekolah pemerintah di negeri mereka. Ujian lisan pada akhir pendidikan dilakukan dalam bahasa Belanda.

²²Nasib pelatihan guru selama sembilan tahun antara penutupan sekolah Roskott dan pembukaan sekolah pemerintah tidak jelas. Namun, lulusan tahun 1877 telah dimulai pelatihan guru mereka di Tondano (Minabassa). Ada kemungkinan bahwa siswa Ambon telah dilatih di sana pada periode intervensi (Leirissa et al. 1982:231).

²³Dapat dilihat dalam *Verslag van het eindexamen gehouden aan den voor Inlandsche Kweekschool te Onderwijzers Amboina, 1877 dan 1879*. Untuk ujian sejarah siswa diharapkan untuk menulis sesuatu: 1. *Het Driemanschap* (tiga komisaris yang menyiapkan kembalinya Raja Belanda setelah pendudukan Perancis di 1813); 2. *Louis XIV*; 3. *Oldenbarnevelt* (pengacara dari *State of holland 1586-1618*); 4. *Pembagian Kerajaan Mataram tahun 1755*. Topik geografi meliputi keresidenan Timor dan penjelasan dari Laut Utara.

Bahasa Belanda dijadikan mata pelajaran wajib dengan maksud agar dengan memahami pelajaran ini, calon guru mampu mengungkapkan sesuatu yang ia inginkan terutama mengerti bahan pelajaran yang ditulis dalam bahasa Belanda bagi sekolah-sekolah dasar karena setiap hari mereka harus menggunakannya sebagai buku pegangan untuk mengajar di sekolah-sekolah dasar pribumi. Walaupun jumlah jam pelajaran bahasa Belanda ditingkatkan tetapi hasilnya di sekolah guru di Pulau Jawa dan Sumatera tetap mengecewakan karena kebanyakan sekolah guru tidak hanya mengajarkan bahasa Belanda sebagai mata pelajaran, tetapi juga sebagai bahasa pengantar. Untuk sekolah-sekolah guru di Ambon, Tondano, dan seluruh Minahasa hasilnya tidak terlalu mengecewakan karena sekolah-sekolah dasarnya sejak dahulu dibina oleh pendeta-pendeta yang berasal dari Belanda.

Departemen Pendidikan menekankan kembali tujuan pendidikan dalam bahasa Belanda namun ditentukan agar pada tahun-tahun pertama bahasa Melayu harus digunakan sebagai bahasa pengantar. Setelah murid sudah matang belajar bahasa asing, baru bahasa Belanda diberikan di kelas-kelas tinggi, namun itu pun harus tetap menggunakan bahasa pribumi sebagai bahasa bantu. Ternyata kendala besar ditimbulkan oleh kurangnya guru bangsa Belanda yang cukup menguasai bahasa Melayu, apalagi bahasa daerah yang menurut peraturan seharusnya menjadi bahasa pengantar sehingga guru-guru Belanda terpaksa mengajar dalam bahasa Belanda dan walaupun kebanyakan sekolah mengajarkan bahasa Belanda sebagai mata pelajaran di kelas-kelas rendah, tetap saja hasilnya tidak memuaskan.

Menurut Kees Groeneboer, kesulitan ini disebabkan oleh siswa yang kurang bergaul dengan orang Belanda, dan tidak tersedia bahan pelajaran untuk mengajarkan bahasa Belanda, kurangnya jam pelajaran yang diberikan dan umur para siswa sudah terlalu tua (14-16 tahun) sehingga sulit memahami bahasa Belanda dengan cepat (Groeneboer 1993: 195). Oleh karena tamatan dan usaha mengajarkan bahasa Belanda tidak sebanding dengan hasilnya, maka pada 1883 diajukan usul agar bahasa Belanda tidak dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, apalagi pengetahuan bahasa pribumi telah dikuasai oleh para guru berkebangsaan Belanda. Di kemudian hari perhatian terhadap bahasa Pribumi kian bertambah disebabkan gagalnya bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan memaksa

guru Belanda mempelajari bahasa Pribumi. Maka berdasarkan Keputusan Kerajaan Belanda 21 September 1885 (Staatsblad No. 204) ditetapkan bahwa bahasa Belanda tidak lagi diwajibkan di sekolah-sekolah guru.

Usia murid dan syarat masuk *kweekschool* berhubungan dengan tingkat pertumbuhan dan kemampuan anak, materi pelajaran dan tuntutan lapangan kerja tertuang dalam peraturan sekolah guru isinya bahwa calon siswa tidak diizinkan mengikuti ujian akhir atau tidak diterima untuk masuk *kweekschool* jika belum mencapai usia 13 tahun atau melebihi usia 15 tahun artinya usia anak-anak muda yang ingin masuk *Kweekschool*, hanya dituntut tidak berusia lebih dari 15 tahun, namun tidak dicantumkan berapa usia minimal yang diperkenankan untuk memasuki *Kweekschool*. Kendati demikian disebutkan dalam lanjutan peraturan tersebut bahwa anak-anak muda berusia antara 10 atau 11 tahun diizinkan mengikuti pendidikan pada *Kweekschool*, tetapi juga mengikuti kursus selama 4 tahun. Jika berhasil, barulah bisa meneruskan pendidikan pada usia 14 atau 15 tahun untuk mendapatkan diploma (Staatsblad 1894 No. 100).

Pendidikan guru yang dilaksanakan di Ambon pada 1874 baru meluluskan murid dalam jumlah kecil, yaitu 5 orang pada 1877, dan 6 orang pada 1878. Barulah pada tahun berikutnya jumlah lulusan bertambah banyak. Hanya sedikit yang diketahui tentang latar belakang siswa. Pada angkatan 1877, terdapat dua anak pensiunan guru negeri, seorang anak vaksinator dan seorang anak sersan tentara. Mengingat jumlah kecil lulusan, dampak sekolah baru pada standar pengajaran pasti bertahap. Namun, sejak 1879 Residen Ambon menyatakan bahwa standar pendidikan di sekolah guru itu sendiri dan di sekolah-sekolah negeri di mana para guru telah dilatih di sekolah guru-guru baru meninggalkan apa-apa yang akan diinginkan, sedangkan pendidikan di negeri lain bisa saja sangat baik (Chauvel 1990: 29-30).

Gambar 4
Guru Pribumi Asli Ambon



Fig. 4. Indigenous Ambonese teachers. (Source: <http://riedm.blogspot.com/2010/12/ambon-tempo-doeboe.html?px=4198800:60:28abb>) (Diunduh 14/3/2011; 09.30 WIB)

Sumber: <http://riedm.blogspot.com/2010/12/ambon-tempo-doeboe.html?px=4198800:60:28abb> (Diunduh 14/3/2011; 09.30 WIB)

Setelah pembentukan Sekolah Guru (*Kweekschool*) di Ambon jumlah guru meningkat. Pada 1890 jumlah guru pribumi mencapai 25 orang yang bertugas di berbagai tempat di Ambon dan pada 1891 meningkat menjadi 31 orang. Selanjutnya perkembangan sekolah guru ini tidak terlalu meningkat. Pada tahun 1913 sekolah guru ini ditutup dengan keputusan pemerintah 29 Agustus 1913 No. 47. Penutupan ini dilakukan atas usulan J. A. F. Schut (guru zending dari yayasan Zending Utrecht) dalam Nota Ajun Penasehat Urusan Pemerintah Luar Jawa, Mr Kielstra, mengenai reorganisasi pendidikan pribumi di Keresidenan Ambon tanggal 18 Januari 1912. guru zending ini mengajukan usul yaitu

Untuk menolak pendirian sebuah sekolah guru hanya bagi Halmahera, tetapi dengan penghapusan sekolah guru pemerintah di Ambon dari Yayasan

Zending Utrecht di sana didirikan sebuah sekolah guru pusat bagi guru sekolah rakyat, dengan kesempatan bagi sebagian besar murid yang paling berbakat untuk juga dididik menjadi guru di sekolah standard. Sekolah ini harus berkaitan dengan sekolah klas-2 pemerintah, agar para murid sekolah ini bisa dididik menjadi guru rakyat di sana, tetapi biasanya juga bagi para bekas siswa sekolah kelas satu dan bagi murid sekolah khusus di Ambon dan Saparua (*Ambonsche Burgerschool* dan *Saparoeasche School*) bisa memasukinya. Untuk menciptakan guru sekolah rakyat, orang memerlukan kursus dua tahun. Para siswa paling berbakat juga harus melewati sekolah ini dan harus menerima pendidikan lebih lanjut, dengan tujuan bisa disediakan bagi tenaga pengajar yang cocok untuk sekolah standard. Dalam ukuran kelas yang kecil di mana pendidikan bagi mereka yang lebih berbakat diberikan, orang menganggap kelanjutan pendidikan selama dua atau maksimal tiga tahun diperlukan. Pada sekolah guru yang didirikan untuk para guru ini juga diperintahkan untuk meluluskan guru pribumi dan guru jemaat bagi gereja, di mana guru pribumi sekarang dididik di sekolah pemerintah, atau setidaknya perintisnya yang akan ikut terlibat di daerah terbelakang untuk mengelola pendidikan rakyat sejauh sesuai dengan tinjauan yang dimaksudkan di atas, pada lembaga kursus ini terdapat mata pelajaran lebih khusus yang berkaitan dengan pemberian pendidikan (Jobse, ed. 1997¹: 295-96).

Penutupan sekolah guru ini membawa perdebatan di Departemen Pendidikan dan Agama bahkan pengurus *Ambonsch Studiefonds* mengajukan keberatan karena penutupan sekolah tersebut. Pengurus organisasi ini menulis surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua W.J. Siahaj dan sekretaris A. J. Patty dari *Ambonsch Studiefonds* tertanggal Batavia 29 April 1913, isi surat permohonan itu berbunyi sebagai berikut.

Dengan rasa hormat menyampaikan, Yayasan Studiefonds Ambon yang anggarannya disetujui dengan Keputusan Pemerintah tanggal 14 Januari 1911 nomor 32, dalam hal ini bertindak lewat pengurus pusatnya, yang berkedudukan di Batavia; bahwa menurut berita yang dimuat dalam surat kabar lokal sebuah mosi untuk menghapuskan sekolah guru bagi para guru pribumi di kota Ambon telah disampaikan kepada pemerintah. Pengurus pusat Yayasan Studiefond Ambon menduga harus mengajukan keberatan terhadap mosi itu. Pertama, sekolah guru itu merupakan satu-

satunya lembaga di karesidenan Ambon tempat para pemuda Ambon bisa mendapatkan pendidikan dasar dalam bahasa Melayu yang diperluas dan kelulusan dari sekolah ini memberikan jaminan sehingga lembaga pendidikan tersebut menjadi sangat terkenal dan oleh penduduk Ambon dianggap sebagai permata di Karesidenan Ambon. Kedua, sekolah tersebut selain itu dilihat oleh penduduk Ambon sebagai bukti perhatian serius pemerintah kepada rakyat, dan di samping itu dengan penghapusan sekolah ini rakyat Ambon berpendapat bahwa simpati yang ditunjukkan oleh pemerintah telah berakhir. Ketiga, dari sudut pandang Kristen hubungan dengan sesama siswa dari pemeluk agama yang berbeda, pergaulannya terhenti sebagai akibat langsung dari penghapusan sekolah guru di Ambon dan pada saat yang sama kunjungan ke sekolah guru di Makasar atau tempat lain, yang tidak berpengaruh positif bagi para pemuda Kristen Ambon. Alasan mengapa kami menghadap kepada Paduka adalah dengan permohonan ini, Paduka bisa merasa bangga atas permohonan itu untuk mempertahankan sekolah guru bagi Ambon itu, memuat permohonan untuk mempertahankan sekolah guru Ambon, pengurus pusat Yayasan Studiefonds Ambon. Dalam keputusan sesuai usul saya, kepada pemohon keinginan dilontarkan.²⁴

Dengan ini diputuskan untuk membuka kembali sekolah guru untuk pribumi dengan keputusan 15 Mei 1914 nomor 40. Sejak bulan Juli diterima siswa baru untuk kelas pertama. Menurut Direktur pendidikan dan Agama, bagi Ambon sebuah sekolah guru empat tahun dengan bahasa Belanda diajarkan sebagai pelajaran, tetapi bukan digunakan sebagai pengantar bagi pelajaran lain, untuk sementara dianggap memadai (Jobse, ed., 1997¹: 368). Pada tahun 1927 sekolah guru pribumi mengalami reorganisasi yaitu para siswa terutama harus mendapatkan ijazah akhir MULO terlebih dahulu, sebelum memulai belajar sebagai guru pribumi. Bagi Maluku, para siswa pertama-tama harus lulus MULO di Ambon, Tondano atau Makassar. Untuk sementara hal ini diatur dengan keputusan Direktur Pendidikan, Agama tanggal 31 Maret 1927 nomor D 57/1/7 dan bagi sekolah guru di Ambona khususnya dalam surat tanggal 31 Maret 1927 nomor 57/1/16. Jumlah kelas dari sekolah guru dirombak berjumlah 2, jumlah siswa adalah 7

²⁴Surat ini dilampirkan dalam Surat Direktur Pendidikan dan Agama Hazeu kepada Gubernur Jenderal Idenburg, tanggal 17 April 1914 (Jobse, ed., 1997¹: 369)

dan 15 (MvO van Tideman 1930 dalam Fraassen, ed., 1997³:127-8). Menurut Gubernur R.J. Koppenol, sekolah guru pemerintah di Ambon dihapuskan sehubungan dengan penghematan. Para siswa ditempatkan di sekolah guru di Bandung 15 (MvO van Koppenol 1934 dalam Fraassen, ed. 1997³: 306).

c. *Ambonsche Burgerschool*

Berawal dari perjalanan Gubernur Jenderal Van der Capellen pada 1824 ke Ambon, ia mendapati besarnya jumlah golongan burger yang terdapat di Pulau Ambon dan Pulau Lease terutama di Saparua. Di Afdeling Ambon terdapat 1.854 orang dan di keseluruhan afdeling di Maluku ada sekitar 3.897 orang. Mereka merupakan golongan bebas yang tidak memiliki tugas wajib seperti masyarakat negeri asli pada umumnya (de Graaf 1977: 252). Laporan tentang pendidikan di Ambon juga di sampaikan oleh dr. Buddingh (*inspecteur-predikant*) ketika kunjungannya ke Ambon pada 1853-54, ia sangat puas dengan keadaan pendidikan di Maluku Tengah. Masyarakat di negeri-negeri Kristen sangat antusias mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak zending ini. Namun bagi golongan *burger* sekolah ini kurang mendapat minat karena menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan tidak diajarkan bahasa Belanda pada sekolah ini. Untuk itu dr. Buddingh menyarankan selain sekolah-sekolah Eropa yang ada, sekolah model Eropa ini harus didirikan khusus untuk anak-anak burger Ambon (Brugmans 1938: 176; de Graaf 1977: 252).

Oleh Komisi Utama (*hoofdcommissie*) usul ini diterima dan pada 1858 didirikan sebuah sekolah khusus yaitu *Ambonsche Burgerschool* di Kota Ambon. Sebuah sekolah yang sama tipe dengan sekolah dasar Eropa namun siswanya adalah pribumi keturunan *burger* Ambon. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda. Sekolah dipimpin oleh orang Belanda dan dibantu oleh guru pribumi.²⁵Setelah sembilan tahun sekolah ini berlangsung, timbul perbedaan

²⁵Berdasarkan Regering Almanak tahun 1875:

Hoofdonderwijzer (Kepala sekolah) : J. F. Benz (13 Februari 1869)

Eerstehulp onderwijzer : B. Soumokil (23 Juli 1870),

hulp onderwijzer : E. Souhoka (7 Mei 1869) dan J. C. Souhoka (23 Juni 1870),

kweekelingen (guru magang) : J. H. Nanlobij (7 Mei 1869) dan L. Kubumael (23 Juni 1870).

Berdasarkan Regering Almanak tahun 1898:

Hoofdonderwijzer : J. F. Benz

Inlandschhulp onderwijzer van den 1sten rang : J. H. Wattimena (6 Januari 1887)

pendapat di antara para pejabat Belanda. Gubernur Maluku menyarankan agar sekolah dihapuskan. Dia yakin bahwa jenis pendidikan yang diberikan dalam bahasa Belanda untuk anak-anak yang berbicara Malayu, akan membahayakan. Para murid muncul dengan pengetahuan Belanda, sehingga mereka menolak pekerjaan manual, mereka mencari pekerjaan di kantor pemerintahan, di mana hanya beberapa dari mereka dapat digunakan sebagai juru tulis. Sisanya menjadi pengangguran. Gubernur mengakui bahwa golongan burger akan keberatan jika anak-anak mereka dikirim ke sekolah-sekolah negeri biasa (*Missive van den Gouverneur der Moluksche Eilanden*, 22-4-1864, dalam Leirissa, dkk. 1982: 229-30).

Usulan Gubernur Maluku ini tidak diterima oleh Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal meminta pertimbangan lebih lanjut tentang masalah ini kepada Kepala Komisi Pendidikan dan mengutus Inspektur Pendidikan J. A. van der Chijs mengunjungi Ambon untuk menilai sekolah ini. Hasilnya van der Chijs menentang penghapusan sekolah dengan alasan bahwa setelah sembilan tahun berdiri, sekolah ini tidak bisa dihapuskan begitu saja karena penghapusan sekolah akan menyebabkan ketidakpuasan terbesar di antara burger (Chauvel, 1990: 30-1). Van der Chijs berpendapat bahwa orang *burger* Ambon sangat pintar berbahasa Belanda dan pengetahuan mereka tentang budaya orang Belanda sangat baik dibandingkan orang Jawa dan Malayu. Anak-anak pribumi di Jawa lebih suka menggunakan kebudayaan mereka dan berbahasa daerah atau melayu sedangkan di Ambon sebaliknya, mereka ingin menjadi orang Belanda, bergaya Belanda dan berbahasa Belanda. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri dan meningkatkan status mereka. Pemisahan antara Eropa, anak-anak asli Ambon hampir sulit ditemukan. Alasan inilah akhirnya pada 6 Januari 1869 *Ambonsche Burgerschool* resmi diakui (*Gouvernementbesluit* 6 Januari 1869 No. 13) sebagai sekolah khusus (Brugmans 1938: 176-7).

Ambonsche Burgerschool terutama untuk anak-anak golongan burger, serta anak-anak kepala negeri. Ciri khasnya adalah bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda. Sekolah ini digolongkan *Inlandsch Onderwijs* karena sekolah itu bukan untuk orang Belanda, namun bahasa pengantarnya sama dengan di

Eerste bulpondervijzer : J. C. Souboka (13 Juli 1882)

bulpondervijzer : Risakotta (13 Juli 1882) dan D. Lopius (7 November 1882)

kweekelingen (guru magang) : J. Tapiheroe (13 Juli 1882) dan H. F. de Wanna (30 September 1892)

ELS. Sekolah semacam ini untuk wilayah-wilayah lainnya di Nusantara baru dibuka secara umum pada tahun 1914 yaitu HIS (*Hollandsch Inlandsche School*). Jadi seperti halnya dengan sekolah-sekolah *zending*, *Ambonsche Burgerschool* pun mempunyai akar yang berbeda sama sekali dengan sistem pendidikan modern yang dimulai di Jawa pada pertengahan abad ke-19. Sampai tahun 1911, baru dibuka sekolah sejenis ini yaitu *Saparoeasche School* di Saparua, jadi *Ambonsche Burgerschool* merupakan satu-satunya sekolah jenis ini yang ada di Ambon (de Graaf 1977: 252).

Berbeda dengan sistem pendidikan *zending*, *Ambonsche Burgerschool* adalah sekolah sekuler karena pelajaran agama sejak semula tidak diajarkan. Tujuan pendidikan juga berlainan yaitu untuk menciptakan tenaga kerja bagi pemerintahan, banyak lulusan *Ambonsche Burgerschool* yang dipekerjakan sebagai *klerk* di kantor-kantor pemerintah, tidak saja di Ambon tetapi di pelbagai tempat di luar Maluku. Selain menggunakan bahasa Belanda, guru-gurunya juga bukan lulusan *Kweekschool*/Roskott, tetapi orang Belanda. Buku-buku yang digunakan juga berasal dari ELS. Dengan kata lain *Ambonsche Burgerschool* adalah model *inlandsch* dari ELS (Leirissa dalam Depdikbud 1989: 67).

Siswa di *Ambonsche Burgerschool* pada umumnya adalah anak-anak golongan *burger* yang orang tuanya bekerja sebagai pejabat di pemerintahandan anak-anak kepala negeri (bangsawan). Sekolah ini tidak dipungut biaya karena disubsidi oleh pemerintah makanya bagi orang tua yang tidak mampu bisa menyekolahkan anaknya di sekolah ini. Usia siswa yang masuk pada sekolah ini sekitar 6 hingga 12 tahun. Namun ada juga siswa yang sudah berumur lebih dari kisaran tersebut makanya dibuat batasan untuk siswa perempuan batasan umurnya tidak lebih dari 16 tahun dan siswa laki-laki 17 hingga 20 tahun. Pada tahun 1886 sekolah ini meluluskan 75 siswa. Jumlah siswa pada akhir tahun 1887 ada 250 orang yang termasuk di dalamnya 40 siswa perempuan. Rinciannya adalah di kelas 1 atau kelas persiapan ada 105 siswa laki-laki dan 37 siswa perempuan, di kelas 2 ada 78 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan, di kelas 3 ada 27 siswa laki-laki dan tidak memiliki siswa perempuan (*Derde Algemeen Vijfjarig Verslag van het Inlandsch Ondernijis* 1890: 212-13).

Pada awalnya sekolah ini hanya menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan sebagai mata pelajaran namun pada April 1887 bahasa Melayu juga diajarkan di sekolah ini, sehingga dibutuhkan tenaga pengajar yang dapat memberikan pelajaran bahasa Melayu.²⁶ Bahasa Melayu mulai diajarkan oleh seorang guru bantu bernama J. H. Wattimena, yang menamatkan pendidikan gurunya di Belanda. Pelajaran Bahasa Melayu ini diajarkan selama satu jam per hari di kelas menengah dan kelas atas (*Derde Algemeen Vijffaring Verslag van het Inlandsch Ondervijis* 1890: 212).

Gambar 5
Guru dan Murid HIS di Ambon
(1908)



Sumber: Chauvel 1990: 34 (repro).

Selanjutnya sekolah ini tidak mengalami perubahan yang berarti dalam struktur dan jumlah sekolah. Akan tetapi *Ambonsche Burgerschool* adalah sebagai dasar ekspansi pendidikan bahasa Belanda (Chauvel 1990: 32). Sekolah khusus ini merupakan cikal bakal pembentukan HIS (Brugmans 1938: 323). Sekolah sejenis sekolah khusus ini baru terbentuk pada tahun 1914 yaitu

²⁶Hal ini diajukan oleh Direktur Pendidikan, Agama dan Kerajinan dalam suratnya tertanggal 19 Agustus 1889 No. 8606 dengan mengacu pada Besluit 6 Januari 1887 No: 6, serta disetujui oleh Sekretaris Gubememen isinya yaitu secara definitif bahasa Melayu ditetapkan sebagai mata pelajaran di *Ambonsche Burgerschool*.

HIS, sekolah untuk pribumi namun menggunakan sistem pendidikan Eropa (Barat) (Nasution 2008: 115). Pembukaan HIS ini tidak diselenggarakan di Maluku Tengah karena pemerintah menganggap *Ambonsche Burgerschool* sudah memadai, ditambah lagi pada tahun 1911 sekolah serupa didirikan di Saparua yaitu *Saparoeasche School*. Baru pada tahun 1919 HIS dibuka di Piru dan Ternate. Pada tahun 1922, pemerintah menetapkan status *Ambonsche Burgerschool* dan *Saparoeasche School* sama dengan HIS namun namanya boleh tetap dipertahankan (Leirissa dalam Depdikbud 1989: 71-2).

3.7.2 Penyelenggaraan Pendidikan oleh Swasta

a. Sekolah Zending

Setelah pengambilalihan sekolah-sekolah oleh pemerintah, pihak zending tidak langsung berhenti melaksanakan tugas mereka dalam memperluas pendidikan di Maluku terutama Maluku Tengah dan ternate karena pendidikan merupakan salah satu cara penting bagi mereka untuk mensosialisasikan Injil dan memperluas agama Kristen. Pihak zending melalui yayasan yang mewadahi mereka mulai mengembangkan pendidikan di daerah yang tidak jajah oleh pemerintah. Lembaga *zending* ini antara lain *Nederlandsch Zendeling Genootschap* (NZG) dan *Utrechtsche Zendelings Vereeniging* (UZV) yang hanya bekerja di Pulau Buru serta juga sebagian kecil yang dikelola oleh Gereja Katolik (*Roomsch-Katholieke Missie*).

Sistem sekolah yang dirikan di negeri-negeri terpencil tersebut sama dengan sekolah-sekolah zending sebelumnya yaitu merupakan kerja sama dengan pihak pemerintah negeri (raja) dan perangkatnya. Guru dibantu oleh *Tua agama* dan *marinyo*. Waktu mengajar guru di sekolah adalah empat jam sehari selama seminggu, tidak termasuk hari raya dan hari Minggu. Oleh sebab itu guru tidak diperkenankan keluar selama waktu mengajar, khususnya *orang tua agama* dan *marinyo*. Pekerjaan *marinyo* diawasi oleh guru dengan maksud agar bekerja dengan baik dan benar. Oleh sebab itu pula guru menjadwalkan murid-murid untuk membantu *marinyo* membersihkan kelas. Setiap sekolah diharuskan memiliki dua orang *tua agama* dan dua *marinyo*. Secara bergiliran *tua agama* menolong guru sedangkan *marinyo* bertugas untuk memukul tifa pada waktu sekolah dan waktu gereja, ketika membersihkan gereja dan sekolah, memanggil murid-murid yang tidak ke sekolah.

Kedudukan *tua agama* dan *marinyo* berada di bawah guru. Sehubungan dengan tugasnya, *orang tua agama* dan *marinyo* harus yang terpilih, yaitu laki-laki yang berilmu dan dipandang layak. Pengangkatan mereka dilakukan oleh Assistent-Resident di negeri itu. Selain mereka, Pemerintah Negeri dan Kepala Kampung turut bertanggung jawab untuk merawat gedung sekolah, gereja, rumah guru. Mereka juga bertanggungjawab terhadap pemeliharaan peralatan sekolah seperti bangku, meja, papan tulis hitam, lemari khusus yang terkunci untuk menyimpan barang-barang sekolah. Mereka juga berkewajiban mengawasi murid-murid agar ke sekolah secara teratur, dan memperhatikan guru-guru jika ada laporan yang disampaikan kepadanya.

Guru *zending* dibagi atas beberapa kategori antara lain pertama, mereka yang telah diangkat menjadi guru midras dan diizinkan oleh penguasa tertentu. Kedua, mereka yang dipilih dari murid-murid sekolah *zending*. Syaratnya: berusia 18 tahun, memiliki Surat Kesaksian dari pendeta pembantu (*bulpprediker*), memiliki kelakuan baik, memiliki ilmu yang cukup, memiliki Surat Keterangan menyangkut jenis pelajaran yang dipelajarinya sebagai calon guru *zending*. Ketiga, mereka yang tidak memperoleh pendidikan *zending*, namun memperoleh izin dari orang-orang tertentu atau sekolah-sekolah yang dikelola oleh Pemerintah. Oleh sebab itu mereka mesti diuji oleh Subkomisi Pendidikan agar diketahui apakah mereka memiliki ilmu yang cukup dan dipandang layak menjadi guru *zending*. Selain kategori tersebut dikenal juga guru yang hidup dari *gouvernement* dan dibagi atas enam kategori yaitu Guru Senior, Guru Kelas Satu, Guru Kelas Dua, Guru Kelas Tiga, Guru Kelas Empat, Guru Keliling. Guru kategori ini bisa pindah ke kategori lebih tinggi, menerima upah yang ditentukan kepadanya jika rajin bekerja, dan diperhitungkan dengan tahun kerja. Perpindahan kategori hanya jika yang bersangkutan tidak sedang menjalani tindakan disiplin oleh Sub-Komisi Pendidikan (Leirissa dalam Depdikbud 1989: 64).

Sebagai guru mereka diharuskan melakukan pekerjaan, mentaati peraturan yang diberikan Sub-Komisi Pendidikan dan tidak diperbolehkan memberikan pelajaran tanpa kurikulum serta berpatokan pada buku ajar, disiplin murid ke sekolah dan mengikuti pelajaran sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Peraturan *Zending*. Selain itu mereka turut bertanggungjawab terhadap jemaat tempat mereka tinggal atau jemaat yang berdekatan namun

tidak memiliki pendeta atau utusan Injil sehingga dapat menjalankan tugas keagamaan seperti menghibur warga yang sakit, memberikan pelajaran agama selama dua kali seminggu (Kamis dan Sabtu) dari jam 15.00-17.00. Pada hari Kamis diberikan pelajaran agama kepada warga jemaat yang akan sidi, pada hari Sabtu pelajaran agama diberikan kepada pembaca Alkitab. Jika selama menjalankan tugasnya guru kedatangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan, akan dikenakan sanksi oleh Subkomisi Pendidikan. Sanksi *pertama* adalah nasihat dalam bentuk bicara, surat, atau nasihat. Sanksi *kedua*, pangkatnya ditahan atau diturunkan. Sanksi *ketiga*, guru yang bersangkutan dipecat (Alyona 2009: 147-8).

Kurikulum pada sekolah ini meliputi enam mata pelajaran, yakni Membaca, Menulis, Ilmu Hitung, Ilmu Nyanyian, Bahasa Melayu, Ilmu Zamin (pengetahuan) yang muatannya tidak lain dari pengetahuan umum tentang Hindia Belanda dan Tanah Kanan yang hubungkan dengan Sejarah Alkitab. Dari buku *midras*, murid-murid diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Namun pokok pentingnya diletakkan pada agama Kristen (Alyona 2009: 146-7).

Murid yang diterima pada sekolah ini adalah anak-anak yang berusia 6-14 tahun untuk anak laki-laki dan 6-13 untuk anak-anak perempuan. Data murid dicatat dalam daftar maka setiap tahun hari Sabtu minggu ketiga bulan Desember guru dan pemerintah negeri mengeluarkan murid dari sekolah. Sekolah jenis ini tidak mengenal sistem kelas dan kelulusan seperti yang dikelola pemerintah. Oleh sebab itu orang tua atau wali diharuskan menyekolahkan anak-anak secara teratur. Jika sakit atau berhalangan, wajib memberitahukan agar guru mencatatnya dalam daftar. Terhadap orang tua atau wali yang alpa menyekolahkan anak-anak atau anak piara dikenakan denda yaitu 10 sen sehari untuk murid yang tidak sekolah tanpa izin dan 15 sen sehari untuk seorang anak atau lebih dalam satu keluarga yang kedatangan tidak ke sekolah tanpa izin. Murid diharuskan keluar dari kelas dengan teratur dan dalam perjalanan diharuskan berkelakuan baik.

Demi memelihara ketertiban dan pembentukan watak murid, maka peraturan *zending* harus ditempatkan di kelas dan dibacakan pada setiap hari Senin. Peraturan dimaksud sebagai berikut: pertama, murid tidak diperkenankan keluar sekolah tanpa izin. Kedua, murid tidak boleh terlambat

masuk kelas. Ketiga, murid harus mandi, sisir rambut dan berpakaian bersih. Keempat, murid harus berkelakuan baik, tahu adat dan tatakrama terhadap semua orang. Kelima, murid harus diam dalam kelas, dilarang mengganggu teman-teman, dan tidak diizinkan pindah dari tempat duduknya. Keenam, murid harus memperhatikan dengan saksama ketika teman-temannya sedang belajar, menghafal apa yang dibaca dari buku- buku pelajaran, atau dengar dari guru. Ketujuh, murid harus memelihara kebersihan buku dan kertas-kertas. Kedelapan, murid tidak boleh berdusta. Kesembilan, jika murid menemukan sesuatu, ia diharuskan membawanya kepada guru (Alyona 2009: 149).

Dapat disimpulkan bahwa dalam dua hal penting yang dijalankan oleh Gereja dan badan-badan zending tersebut yakni membangun kehidupan iman Kristen dengan pengajaran moral Kristen, dan pengajaran serta pendidikan umum sekolah khusus kepada masyarakat yang masih sederhana sekali. Perkembangan dan kemajuan sekolah-sekolah Kristen ini sebegitu bertambah jelas yang disebabkan oleh adanya bantuan atau subsidi dari pihak pemerintah yang diputuskan dalam tahun 1890 untuk diberikan kepada sekolah-sekolah Gereja, disamping hasrat yang besar dari orang-orang Kristen untuk memenuhi panggilan mereka dalam bidang pendidikan ditempat dan di tengah masyarakat. Sejak saat itu sekolah rakyat yang dikelola oleh *zending* ada yang mendapatkan subsidi dan ada yang tidak (Tanamal 1987: 38).

Perkembangan sekolah-sekolah rakyat yang oleh Gereja dapat dicatat sebagai berikut. Wilayah Ambon 4 buah disubsidi, Saparua 2 buah tidak disubsidi, Seram Barat 30 buah diantaranya 24 buah disubsidi, Amahai 40 buah di antaranya 36 disubsidi, Larat 43 buah diantaranya 36 disubsidi, Babar 40 buah diantaranya 36 disubsidi, Saumlaki 30 buah diantaranya 19 buah disubsidi, Kei 68 buah diantaranya 50 disubsidi. Disamping itu ada juga yang dibangun oleh *Utrechtsche Zendingvereeniging* di Buru dan Halmahera yang pada umumnya disubsidi seperti diwilayah Leksula 19 buah, Tobelo 15 buah, Duma 24 buah, Jailolo 20 buah, Gemlaha 24 buah. Sedang dari pihak Katolik terdapat di wilayah Langgur 51 buah disubsidi dan di Saumlaki 24 buah (Beverluis dan Gieben 1929: 164-6).

b. Stovil (*School tot Opleiding van Inlandsch Leeraar*)

Stovil adalah Sekolah Pendidikan Guru Pribumi, sering disebut Sekolah Pendeta Pribumi. Pembentukannya terkait erat dengan penegasan sikap netral pemerintah terhadap gereja. Pemerintah Hindia Belanda menegaskan bahwa semua guru sekolah yang digaji oleh pemerintah dan membantu di jemaat seperti alumni sekolah Roskott hanya dibolehkan bekerja di sekolah pemerintah. Akibatnya terjadi defisit tenaga pelayan dalam gereja. Untuk mengisi kekosongan tenaga di Jemaat maka dipilih dari warga gereja seperti *tuagama*, mereka disebut “goeroe di jemaat” untuk membedakan dari *goeroe midras* (guru *zending*) atau guru sekolah. Oleh karena mereka tidak dipersiapkan oleh NZG, maka perlu dibuka lembaga pendidikan untuk membina mereka.

Pada 1867, diterbitkan *Koninklijke Besluit* tentang jabatan pendeta pembantu (*hulppre-diker*). *Besluit* itu menyatakan bahwa pendeta pembantu harus mendidik tenaga pribumi untuk menjadi guru pribumi. Mulai tahun 1874 beberapa pendeta jemaat ditugaskan mendidik putra-putra pribumi agar menjadi guru pribumi.²⁷ Pendidikan yang dilakukan oleh para pendeta Jemaat itu dipandang tidak memadai karena semuanya gagal ujian akhir 1883. Kegagalan itu antara lain disebabkan oleh metode dan pengajaran, peraturan pendidikan, dan khususnya beban ganda tugas pendeta sebagai guru dan guru Injil sehingga tidak fokus dan efektif dalam menjalankan pendidikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gubernur jenderal memutuskan agar semua murid yang berada dalam tanggung jawab pendeta jemaat itu dikumpulkan pada sebuah sekolah untuk diajar dan dididik oleh seorang pendeta sebagai direktur. Untuk itu diterbitkan *Besluit* Gubernur Jenderal No. 3, tanggal 11 April 1885 dengan nama *Vereenigde Opleiding van Kweekelingen voor het Inlandschleeraarambt* dengan direktur pertama *Hulpprediker* B. C. Kornfeldt. Tugas tersebut baru dimulai beberapa bulan kemudian karena Kornfeldt ketika itu masih bertugas sebagai pendeta di Jemaat

²⁷Pendeta Cornfeldt di Hutumuri mendidik Christiaan P. Soselisa, Petrus Tehupeiorij, Izaak Leiwakabessij, Benjamin Thenu, E. Hursepunij. Pendeta J. J. Bar di Waai mendidik Deminicus Thenu, Loekas Pattiwael, Jacob Maitimu dan David Pattinama. Pendeta R. Bossert di Haruku mendidik Cornelis Pastora, Cornelis Mustamu, Christiaan Ferdinandus dan Pendeta S. J. de Vries di Saparna mendidik Pieter Uruilal, Jacob Nanlobij, Frans Manuputty dan Adriannus Hulselan. Pendeta J. M. van Enst di Ameth mendidik Elisa Wairissal, Jan Sopacna, Hendrik Picanlij dan Esau Hetharia. Pendeta Graafland di Amabei mendidik Demianus Lokollo, Izaak Hallam, Jacob Hiarie dan Bernardus Wattimena. Nama-nama ini diperoleh dari Majalah Pedoman Kebidoepan yang diberikan oleh S. Marantika dan disimpan di Bibliotheek Hendrik Kraemer Instituut, Leidsestraatweg 111, Oegstgeest, 716.

Hutumuri. Menurut beberapa guru pribumi tua, murid-murid yang mula-mula dikumpulkan dalam Stovil berjumlah 14 orang. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, jumlah murid Stovil mencapai 24, dan pada tahun 1886 menjadi 28 murid, empat murid yang masuk itu dipersiapkan untuk bekerja di Kupang (Duyverman 1927: 55).

Stovil berada di bawah tanggung jawab Gereja Protestan. Oleh karena itu mulai dari direktur pertama, kedua dan seterusnya selama menjalankan tugas rangkap sebagai penanggung jawab di jemaat, juga mengajar. Dengan sendirinya Gereja mengatur penempatan dan pemindahan. Sejak Stovil didirikan pada 11 April 1885 digunakan bahasa Melayu, baru pada 1926 digunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pada masa-masa awal Stovil, mata pelajaran yang diberikan adalah Hikayat Petjanjian Lama, Hikayat Perjanjian Baru, Pembimbing Petjanjian Lama, Pembimbing Petjanjian Baru, Dogmatika, Etika, Hikayat DJemaat dan Hikayat Dunia, Agama-agama, Katiketika, Membuat Riwayat dan Ilmu Nyanyian, Pertukangan, Pergerakan Badan (Olah Raga) atau Gimnastik.

Pada 1915, murid diberi pelajaran ilmu-ilmu teologi dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar karena mulai 1916 mereka yang dididik itu akan menjadi *hulponderwijzer* atau guru bantu. Sejak itu juga dimasukkan mata pelajaran bahasa Belanda sebagai percobaan hingga enam tahun lamanya sehingga bahasa Belanda ditetapkan sebagai bahasa pengantar. Pada dua tahun terakhir, dimasukkan lagi mata pelajaran Hikayat *Zending*, Ajaran Bidat, Hikayat Sosial, Pengobatan, *Landbouw*, Ilmu Pendidikan, *land- en volkenkunde* serta Filsafat, sedangkan bahasa Belanda lebih diperhalus dengan riwayat pada malam minggu secara bergantian oleh murid-murid kelas *lezing* serta debat oleh dan untuk semua murid, diberikan juga mata pelajaran surat-menyurat atau administrasi di kelas 4 dan kelas 5 dengan harapan agar tamatan Stovil menjadi pemimpin jemaat yang baik sesuai dengan perkembangan jaman.

Pada mulanya penerimaan murid dilakukan secara sederhana dan selektif oleh pendeta Jemaat, namun kemudian menjadi lebih teratur dan baik. Satu bulan sebelum *volksonder-wijzerscursus* dibuka, sudah harus dilakukan ujian masuk yang tanggalnya ditetapkan oleh direktur Stovil. Jumlah murid yang diterima ditentukan oleh Sinode, dalam hal

ini Pengurus Sinode bersama direktur Stovil. Persyaratannya, murid berusia 15-19 tahun, menyerahkan Surat Baptis, Surat Kesehatan, Surat Keterangan Kelakuan Baik yang ditandatangani oleh pimpinan negeri, Surat Keterangan *levenswandel* orangtua yang ditandatangani oleh Majelis Gereja dan pimpinan Negeri, Surat Keterangan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tamatan HIS atau yang setara dan telah menyelesaikan pendidikan yang disertai laporan pendidikan terakhir, serta Surat Izin orangtua/wali yang menyatakan sanggup membayar uang sekolah dan uang asrama yang ditentukan yaitu 15 gulden per bulan. Masa belajar adalah 7 tahun.

Jika lulus, maka tahun pertama merupakan tahun percobaan. Jika murid tidak bisa melanjutkannya maka yang bersangkutan dikeluarkan. Untuk murid yang telah memiliki *acte-volksonderwijs* dapat langsung duduk di kelas tiga Stovil. Semua murid diwajibkan tinggal di asrama sekolah, hidup dengan disiplin berdasarkan peraturan asrama yang dibuat oleh Direktur (ANRI, GPI 468: *School- tot Opleiding voor Inlandsch Leeraar Stovilj Regeling Betreffende School en Internaat*).

Dalam perkembangannya ujian masuk Stovil untuk tamatan HIS dan *Schakelschool*, jika lulus maka murid bisa belajar selama 2 tahun dengan bahasa pengantar Melayu, tiga tahun mengikuti pendidikan teologi yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Untuk pendidikan teologi dipelajari mata pelajaran teologi dan Alkitab (pengetahuan Alkitab, *Exegese*, Sejarah Gereja dan Sejarah *Zending*, Etika, Sejarah Agama-agama, ilmu berkhotbah (*Homiletika*), Kateketik). Selain dipelajari bahasa Melayu, Belanda dan Inggris (fakultatif), juga *Grondbeginselen der Psychologie en Paedagogiek* (ANRI, GPI 468, *Afschrijf Gegevens betreffende Stovil-opleiding te Amboina*).

Ujian akhir Stovil dilakukan oleh sebuah komisi yang bernama Komisi Ujian Akhir sekolah yang dibentuk oleh Pengurus Sinode bersama direktur dan tenaga pengajar Stovil untuk menguji murid kelas 5. Mata pelajaran yang diuji adalah Sejarah Alkitab (Perjanjian Lama, Perjanjian Baru), Pembimbing (Perjanjian Lama, Perjanjian Baru), Tafsiran (Perjanjian Lama, Perjanjian baru), Dogmatika, Etika, Sejarah Gereja, Ilmu Berkhotbah (Homiletika), Sejarah Umum, Agama Islam, Sejarah *Zending*, Bahasa Belanda (ANRI, GPI 416, Amboina, 13 Juli 1933, *Namens de Examen-Commissie; De Predekan-*

Voorzitter in de Molukken, De Hulppredikers Opleider, Tutuarima). Jika ada yang belum lulus, maka akan dilakukan ujian susulan, setelah itu barulah diserahkan kepada pengurus Sinode untuk ditempatkan dengan *besluit* (ANRI,GPI 416, *Uittreksel uit het Register der Besluit van een Predekanat-Voorzitter in de Molukken Amboina*, No. 203, Tanggal 19 Juni 1935).

Dengan diresmikan berdirinya Gereja Potestan Maluku (GPM) pada tanggal 6 September 1935 artinya terlepas dari Gereja Protestan Indonesia (GPI) maka GPM mempunyai kebebasan mengurus sendiri soal-soal administrasi dengan tanggung jawabnya di bawah suatu badan kepemimpinan dengan nama “Badan Pekerja Sinode”, maka soal-soal kepengurusan di bidang persekolahan dan pendidikan Kristen beralih dari tangan Zending (Indische Kerk) kepada Badan Pekerja Sinode itu. Dengan demikian STOVIL berada di bawah asuhan Gereja Protestan Maluku (Tanamal 1987: 42, 45).

Pendidikan yang dikaji tersebut pada umumnya adalah pendidikan yang dijalani oleh sebagian masyarakat Maluku yaitu masyarakat yang beragama Kristen yang tinggal di negeri-negeri Kristen, padahal di Maluku Tengah ada golongan masyarakat yang beragama Islam yang tinggal di negeri-negeri Islam. Masyarakat Islam tidak disinggung perkembangannya dalam pendidikan pada masa abad ke-19 karena masyarakat Maluku Tengah yang beragama Islam hampir tidak mendapat kesempatan untuk bersekolah karena tidak ada sekolah yang didirikan di daerah mereka. Semua sekolah pada zaman ini didirikan di negeri-negeri (desa-desa) yang penduduknya beragama Kristen. Di samping itu, ada keengganan golongan Islam Maluku sendiri untuk menerima lembaga pendidikan yang didirikan oleh orang-orang swasta kulit putih karena lembaga itu dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama mereka. Mereka melihat lembaga ini sebagai suatu lembaga kafir karena didirikan oleh orang kafir (orang kulit putih yang bukan beragama Islam). Dengan sendirinya menurut anggapan mereka barang siapa yang menyekolahkan anaknya pada lembaga itu adalah orang kafir.

Sebagian besar masyarakat Maluku Tengah yang beragama Islam menyerahkan anak-anaknya untuk belajar pada imam-imam yang beragama Islam. Para Imam ini dianggap cukup pandai dan tepat untuk memberikan pendidikan Islam bagi anak-anak karena mereka sebelumnya telah pergi

belajar ke Mekah mengenai ajaran-ajaran Islam, ilmu pengetahuan dan tulis-menulis serta bahasa Arab. Imam ini dipanggil dengan sebutan *tuangguru*. Anak-anak menerima pelajaran bahasa Arab, menulis Arab, belajar agama Islam dan belajar mengaji Alquran. Pada saat itu mereka belajar di mesjid atau langgar atau di rumah imam tersebut. Gedung sekolah tidak ada untuk mereka belajar. Mereka belajar dengan duduk di atas tikar mengelilingi imam. Sekolah dengan sistem modern baru diadakan di negeri Islam pada abad ke-20 (Depdikbud 1978: 18-19).

IV

GAMBARAN UMUM DAERAH MALUKU

IV PENINGKATAN PENDIDIKAN DI MALUKU SETELAH POLITIK ETIS

4.1 Perbaikan Nasib Kaum Pribumi

Pada saat memasuki abad ke-20, sistem kolonial di Hindia Belanda banyak mengalami perubahan dan perkembangan baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal itu juga secara langsung mempengaruhi pola pikir masyarakat tanah jajahan terutama kaum terpelajar yang minoritas dan elit-elit lokal yang merasa kehilangan peran untuk melakukan upaya peningkatan sumberdaya masyarakat lewat pendidikan. Suatu era kebebasan muncul bagi kaum pribumi setelah adanya politik etis yang dimotori oleh Conrad Theodore van Deventer pada awal 1901, terutama kebebasan untuk memperoleh pendidikan sehingga dicapai kesadaran emansipasi bangsa. Banyak orang tua pribumi yang masuk dalam golongan mampu bersedia mengorbankan harta bendanya demi pendidikan anak-anak mereka (Abdulrahman dkk. 2006: 1-2).

Sebenarnya sejak 1855 pemerintah Hindia Belanda telah merasakan pentingnya pendidikan bagi pribumi terutama mempersiapkan tenaga guru, untuk ditempatkan diberbagai daerah sehingga pada waktu itu sekolah guru (*kweekschool*) dibangun di beberapa wilayah Hindia Belanda. Yang menarik adalah pendidikan tenaga pengajar bagi sekolah pribumi seperti sekolah rakyat negeri, dan sekolah kelas dua pribumi negeri yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di Maluku. Sebagian besar tenaga pengajar dalam sekolah pribumi pemerintah, mengajar dengan memiliki ijazah guru bantu biasa, yang diperoleh setelah mereka dididik selama dua tahun dalam pendidikan praktis di bawah pengawasan kepala sekolah kelas dua, dan ujian dilaksanakan setelah melewati magang sebagai guru bantu. Pola ini bertahan hingga 1822, karena pemerintah Hindia Belanda menghapuskan ujian calon guru dan setahun kemudian berlaku juga untuk guru bantu. Sejak itu pula siswa sekolah normal dari Makassar dan Tomohon ditempatkan sebagai guru di Maluku. Pengangkatan dan penempatan dilaksanakan melalui keputusan Direktur Pendidikan dan Agama atas usul

Inspektur Pendidikan Pribumi yang waktu itu dijabat oleh van der Chijs, yang kemudian diganti oleh J. Hardeman (N. J. van den Brandhof, *Memori van Opeergave*, 12 Mei 1921).

Sebelum Politik Etis dijalankan telah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda lewat Direktur Pendidikan dan Agama pada 1866 dengan mendirikan Departemen Pendidikan Agama dan Industri untuk meningkatkan sumber daya dan kehidupan sosial ekonomi kaum pribumi seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya. Kepedulian ini semakin ditingkatkan pada 1870 sehingga subsidi dari pemerintah Hindia Belanda untuk sekolah bumiputra meningkat menjadi 300.000 gulden setahun, namun hanya berlaku untuk pulau Jawa saja (Lubis 1997: 1-2). Selain itu untuk mendidik calon pegawai pangreh praja, pada 1878 didirikan *Hoofdenschool* yang terdapat di Bandung, Magelang, dan Probolinggo. Syarat utama dari sekolah ini adalah calon murid harus memenuhi ketentuan berikut: telah duduk di kelas tujuh *HollandschInlandsche School* (HIS) atau kelas enam *Europesche Lagere School* (ELS) dan harus bisa berbahasa Melayu di samping bahasa daerahnya sendiri. Di samping itu penerimaan murid di sekolah tersebut tidak boleh berumur lebih dari lima belas tahun dan hanya diperuntukkan bagi anak-anak kaum bangsawan saja (Lubis 1997: 24).

Setelah penerapan Politik Etis di seluruh Hindia Belanda orang berlomba-lomba untuk mendapat pendidikan Barat karena kesempatan secara luas diberikan kepada kalangan pribumi untuk mengikuti pendidikan normal dan adanya peluang kerja di berbagai sektor, baik milik pemerintah maupun swasta. Penduduk Ambon yang sudah lama hidup dalam perjumpaan dengan budaya Eropa memperoleh hak istimewa karena ada keterkaitan erat dengan penguasa Belanda sehingga mereka memiliki peluang mengikuti pendidikan lebih besar. Penguasaan bahasa Belanda menjadi syarat mutlak bagi karier administratif umum atau jabatan pemerintahan, dan hal ini bukan sesuatu yang sulit bagi masyarakat Maluku khususnya yang menetap di kota-kota *afdeeling*, *onderafdeeling*, atau Keresidenan Ambon. Yang tidak mendapat kesempatan bagi karier administrasi umum dan jabatan pemerintahan, masih selalu ada kemungkinan untuk mendaftar menjadi anggota KNIL.

Setelah penerapan Politik Etis, pola penerapan sistem pendidikan di Indonesia termasuk Maluku mengalami perubahan dan hal itu sempat menjadi

bahan perdebatan dan polemik di kalangan pemerintah Hindia Belanda di Maluku. Menurut Residen Ambon G. Sieburgh, pihak pemerintah Hindia Belanda telah melakukan satu kesalahan dalam pengembangan pendidikan karena pemerintah tidak pernah menganut sistem pendidikan yang tetap dan selalu berubah-ubah sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*MvO van Sieburgh* 1910 dalam Jobse, ed., 1997¹: 252).

Untuk mengetahui perkembangan pendidikan di Maluku, terkait dengan konversi dan masalah pemberian subsidi khusus bagi pendidikan pribumi, diketahui bahwa pada saat itu pemerintah akan mengalihkan sebagian tugas negara dan pendidikan di daerah-daerah tertentu kepada zending atau misi. Kepada pengurus zending dan misi diberikan kewajiban kontrak tertentu dan akan dibebankan pengawasan di sekolah-sekolah kepada mereka. Untuk itu kepala Departemen Pendidikan meminta penasihat urusan pemerintahan luar Jawa W. Frijling untuk melakukan perjalanan dinas ke wilayah Maluku dalam rangka melakukan dialog dengan residen H. J. A. Raedt van Olderbanerveldt, pendeta bantu E. J. B. Janzen selaku ketua konferensi pendeta pembantu di Karesidenan Ambon dan Inspektur Pendidikan Pribumi di bagian Wilayah V, J. G. Dammerboer. Tujuan kunjungan tersebut untuk memperoleh keterangan dari para penduduk terkait dengan kebijakan yang akan diambil dalam rangka membuat usulan kepada pemerintah dalam menyusun rencana pengembangan pendidikan. Dari upaya ini akhirnya muncul nota rahasia ajun penasihat urusan pemerintahan untuk luar Jawa J. C. Kielstra, yang diajukan pada 18 Januari 1912 tentang reorganisasi pendidikan pribumi di Karesidenan Ambon (*Nota van De Adjunct-Adviseur voor De Bestuurszaken der Buitenbezittingen Kielstra Inzake De Reorganisatie van Het Inlands Onderwijs in De Residentie Ambon, 18 Januari 1912*, dalam Jobse, ed., 1997¹: 275-6).

Setelah diadakan penelitian oleh Inspektur Pendidikan Rakyat di Jawa J. Ziesel yang mengunjungi Ambon pada Maret 1914 maka didapati tujuan utama dari reorganisasi ini adalah membagi sekolah menjadi dua yaitu sekolah pemerintah dan sekolah kotapraja. Sekolah kotapraja diletakkan di bawah pengelolaan swasta, yang di karesidenan ini ditangani oleh Gereja Hindia. Reorganisasi ini ingin mengembalikan pada tingkat pendidikan tanpa harus memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi dan akan menanggung pengeluaran oleh yang bersangkutan, tanpa harus mengurangi kewajiban pemerintah. Sekolah yang saling berdekatan

hendaknya dilebur menjadi satu dan yang lain adalah sekolah kota yang disatukan. Pada sekolah swasta yang disatukan, uang sekolah dipungut seperti pada sekolah pemerintah biasa dan dalam hal ini di sekolah swasta ditetapkan f0,50.- Di antara keduanya dibuat hubungan yang diperlukan, dalam arti sekolah swasta akan mengisi tiga kelas dan program ini memuat kurikulum yang sama seperti tiga kelas pertama di sekolah pemerintah, sehingga siswa bisa lulus dengan ijazah dari sekolah swasta untuk memasuki kelas 4 di sekolah pemerintah. Selanjutnya seperti yang telah disebutkan, sekolah pemerintah akan menjadi titik tengah di antara sekolah swasta (*MvO van Oldenbarnevelt* 1915 dalam Jobse, ed., 1997¹: 411-12).

Dengan demikian biaya pendidikan yang mahal di Maluku akan diakhiri dan beban yang dirasakan akan dihapuskan agar bisa lebih memperluas pendidikan di wilayah Maluku tanpa harus melaksanakan suatu sistem yang kaku. Tingkat pendidikan ditekan kembali pada ukuran yang bisa disamakan dengan kondisi yang ada dan kebutuhan penduduk (*MvO van Oldenbarnevelt* 1915 dalam Jobse, ed., 1997¹: 411-413). Perkembangan pendidikan di Maluku pada abad ke-20 darisisi penyelenggaraannya yaitu sekolah yang dikelola oleh Pemerintah, sekolah yang dikelola oleh pihak swasta dan sekolah pemerintah yang dikelola negeri.

4.2 Sekolah yang Dikelola Pemerintah

a. *Europeesche Lagere School*

Sekolah ini untuk anak-anak Belanda, peranakan Belanda, *gelijkegesteld Ambonezen*, dan anak-anak *ambtenaar*, dank arena itu menggunakan bahasa pengantar Belanda. ELS di wilayah ini berada di bawah pengawasan inspektur Wilayah IV yang berkedudukan di Tomohon, yang juga menjadi inspektur dari pendidikan pribumi Belanda di Wilayah V. Pengawasan lokal pada sekolah-sekolah diserahkan kepada komisi sekolah Eropa. Di Ambon, wali kota selain itu menjadi anggota komisi dan anggotanya diangkat oleh Dewan Kotapraja. Dari komisi di tempat lain, jabatan ketua sejak 1 Januari 1926 diserahkan kepada residen kepala *afdeeling* dan para anggotanya diangkat oleh residen tersebut. Jumlah sekolah dasar Eropa di wilayah ini mencapai lima buah. Tiga dari sekolah itu berada di Ambon (dimana salah satunya adalah sekolah pertama), dua yang lain di Ternate dan Banda (*MvO van Sandick* dalam Fraassen, ed. 1997²: 611).

b. *Gouvernements Inlandsche Scholen der 2e klasse*

Sekolah Kelas Dua Pemerintah ini menggunakan bahasa pengantar Melayu,

tersebar di seluruh wilayah pemerintah sebanyak 79 buah, di antaranya di Pulau Ambon 25 buah²⁸ dan Pulau-pulau Lease sebanyak 24 buah (Beverluis dan Gieben 1929: 160). Selain sejumlah sekolah di ibu kota wilayah *afdeeling* ini mencakup sejumlah besar (lebih dari 60) sekolah pribumi pemerintah Kelas Dua. Di Onderafdeeling Ambon dan Saparua masing-masing negeri Kristen yang penting mempunyai satu buah sekolah itu. Pajak negeri selama setahun tidak cukup untuk membayar gaji para pendidik selama lebih dari empat bulan. Kunjungan sekolah pada umumnya sangat baik. Orang-orang Ambon bersedia melakukan banyak pengeluaran untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Perhatian ini dianggap sebagai suatu jaminan hidup. Mereka berharap agar anak-anaknya siap untuk bisa membantu keuangannya pada hari tua, apa yang berlangsung secara rutin. Seseorang dari keluarga yang memperoleh penghasilan memadai ikut membantu untuk menjaga keutuhan seluruh keluarga. Kenaikan uang sekolah di sekolah pribumi pemerintah, di mana uang sekolah minimum ditetapkan antara 0,15 gulden dan 0,20 gulden merupakan tindakan yang adil, mengakibatkan perkembangan sementara siswa, tetapi lebih berasal dari perlawanan pihak orangtua daripada karena kebutuhan. Perkembangan ini perlahan-lahan pulih (*MvO van Schmidt* 1924 dalam van Fraassen, ed. 1997²: 455)

Dalam sidang umum pertama Volksraad (1926) diterima sebuah mosi de Queljoe, yang menegaskan bahwa sekolah-sekolah yang dimaksudkan atau perawatan gedung perlu dialihkan kepada pemerintah atau perlti diberikan pembebasan uang sekolah. Menurut Gubernur I. H. W. Sandick, de Queljoe kurang memperhitungkan posisi wilayah ini yang diutamakan dalam perawatan pendidikan. Penetapan dasar-dasar bagi tarif uang sekolah untuk sekolah Kelas Dua dan sekolah lanjutan (menurut surat edaran Direktur Pendidikan dan Agama tanggal 4 Maret 1925 nomor 11129/1) terjadi melalui residen Ambon dan Ternate dalam keputusan tanggal 25 Juni 1926 Nomor 226 dan 31 Mei 1926 Nomor 70 (*MvO van Sandick* 1926 dalam van Fraassen, ed. 1997²: 615).

Pada 1928, jumlah Sekolah Pribumi Pemerintah Kelas Dua berkurang satu dengan penutupan sekolah lanjutan di Ngofakiaha (Pulau Makian) terhitung

²⁸Negeri-negeri yang ada sekolah pemerintah klas-2 yaitu Larike, Hila, Hutumuri, Rutong, Ema, Kilang, Hatalai, Soya Diatas, Latubalat, Eri, Amabusu, Alang, Liliboi, Hatu, Tawiri, Hatiwe Besar, Waai, Suli, Paso, Rumbatiga, Lateri, Halong dan Galala serta dua sekolah di ibukota yaitu Mardika dan Batu Gantung (menurut tempatnya berada) jumlahnya mencapai 25 (*MvO van Schmidt* 1924 dalam van Fraassen, 1997²: 479)

sejak 1 Januari 1928. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk menutup tiga sekolah pribumi klas-2 di Seram Barat terhitung sejak 1 Januari 1931. Pemerintah juga melakukan reorganisasi Sekolah Kelas Dua pribumi di Ambon dan Uliaser, di mana sejumlah Sekolah Kelas Dua pribumi diganti dengan sekolah rakyat di bawah pengelolaan Gereja Hindia dengan pembukaan sekolah lanjutan untuk memberi kesempatan anak-anak yang orangtuanya sangat menghargai pendidikan, yang layak diterima. Ternyata ini merupakan pengembangan lebih lanjut untuk bisa menempatkan guru sekolah rakyat di Sekolah Kelas Dua pribumi di kalangan terbawah. Jumlah sekolah bertambah dengan dibukanya sekolah kelas 5 menjadi 20 buah dan sejak 1 Januari 1929 pada Sekolah Kelas Dua pribumi di Ambon sebuah kelas enam ditambahkan. Oleh inspektur pendidikan pribumi, pendidikan dirombak. Pada berbagai kesempatan bagi pameran hasil kerja para siswa dikirimkan. Bagi pengiriman di pekan tahunan kedua di Yogyakarta pada bulan Juli 1928 sebuah ijasah kehormatan dan medali perunggu diberikan (MvO van Tideman 1930 dalam van Fraassen, ed. 19973: 127).

c. Ambonsche Burgerschool, Saparoe School, 29 dan Hollandsch Inlandsche School

Kedua jenis sekolah dasar ini, Ambonsche Burgerschool dan Saparoe School, pada 1922 diubah menjadi HIS pemerintah. Pendidikan pribumi Belanda diberikan kepada Ambonsche Burgerschool di Ambon, Saparoea School terletak di Saparua (lihat keputusan pemerintah 7 Juli 1922 No. 8, Lembaran Negara No. 486 tentang sekolah khusus), pada HIS di Ternate dan di Piroe, dan pada HIS di Saparua. HIS yang didirikan di Piroe pada 1920 mengalami kehidupan yang merana, ada keraguan apakah sekolah ini terbukti mampu bertahan dan persaingan dari sekolah Ambon di dekatnya (MvO van Sandick 1926 dalam van Fraassen, ed. 19972: 612).

a. Kweekschool

Sekolah ini dibuka pada 1874, kemudian ditutup pada 1913, dan dibuka kembali pada 1914.³⁰

b. Meer Uitgebreid Lager Onderwijs

Didirikan pada 1920 di Kota Ambon, MULO merupakan sekolah lanjutan dari sekolah dasar HIS. Sekolah Pribumi Kelas Dua juga bisa memasuki sekolah ini dengan pengikuti sekolah penghubung terlebih dahulu. Sekolah

²⁹Jenis sekolah ini telah dibahas dalam subbab sebelumnya.

³⁰Lihat uraian pada bagian-bagian sebelumnya.

MULO di Ambon terbukti memenuhi kebutuhan. Para siswa sebagian besar termasuk penduduk pribumi Ambon dan sekitarnya. Hasil-hasil pendidikan sangat memuaskan. Pada tahun 1926 setelah menunggu lama, pendirian bangunan sebuah sekolah baru untuk MULO telah siap dipakai (*MvO van Sandick* dalam Fraassen, ed., 1997²: 613).

c. Schakelschool

Jenis sekolah ini dibuka pada 1925 di Kota Ambon (Beverluis dan Gieben 1929: 159-62). Pada mulanya dengan satu kelas, yang diizinkan masuk sekolah ini adalah pemuda yang telah lulus kelas tiga dari Sekolah Kelas Dua dan memberikan bukti tentang pangkat yang baik, juga para siswa yang memiliki ijazah akhir dari sekolah rakyat bisa masuk. Bagi sekolah ini bangunan didirikan dimana rencana diajukan. Untuk sementara sekolah ini bersama-sama di dua kelas menampung 65 murid (*MOV van Sandick* dalam Fraassen, ed., 1997²: 612). Sekolah *schakel* pada bulan Juni 1930 untuk pertama kalinya meluluskan siswanya. Kualitas para murid masih perlu ditingkatkan untuk itu penerimaan hanya terjadi setelah uji kecerdasan tetapi masih terlalu sering terbukti pada tahun ajaran pertama *schakelschool*, banyak siswanya yang kewalahan terutama dalam bahasa Belanda. Jika satu sisi ini merupakan akibat dari kondisi pendidikan di wilayah ini, di sisi lain pilihan (penerimaan) sendiri juga perhatian yang lebih intensif bisa diberikan (*MvO van Tideman 1930* dalam van Fraassen, ed. 1997³: 125).

d. Kopschool

Sekolah ini dimaksudkan sebagai pendidikan kerajinan bagi kaum wanita. Sekolah ini terdapat di Ambon dan Saparua yang mendapat perhatian besar dari masyarakat. Bagi sekolah di Saparua, sebelum awal tahun ajaran 1930 lebih dari dua kali jumlah calon yang diluluskan daripada yang ditempatkan. Bagi sekolah di Neira dan Ternate semangatnya lebih rendah, sehubungan dengan kenyataan bahwa di sini penduduknya mayoritas Islam. Pendidikan bagi gadis yang mencakup pelajaran umum ini juga termasuk menjahit, memasak, mencuci dan menyeterika, bagi penduduk sangat penting. Gadis pribumi karena itu lebih siap bagi tugas kehidupan lebih lanjut (*MvO van Tideman 1930* dalam van Fraassen, ed., 1997³: 127).

e. Standaardonderwijs dan Vervolgschool

Pendidikan standard di Maluku berkembang pesat. Jumlah Sekolah Pribumi

Kelas Dua sangat besar. Di bawah inspektur pendidikan pribumi saat itu, Geurts, dimulai penerapan sistem pendidikan yang telah berlaku di tempat lain, yakni pengurangan jumlah sekolah standard dengan mengubah semua sekolah ini menjadi sekolah rakyat dengan atau tanpa sekolah lanjutan. Bagi perubahan ini terutama dipertimbangkan sekolah-sekolah kecil yang tidak menunjukkan ketahanan hidup, di samping sekolah yang berdiri di dua negeri atau lebih yang saling berdekatan. Dalam hal ini sebuah sekolah rakyat di setiap negeri memberikan pendidikan dasar (tiga kelas terendah dari sekolah standard) sementara sekolah lanjutan dua tahun di setiap negeri memberikan kesempatan bagi pendidikan lebih lanjut (dua sekolah tertinggi dari sekolah standard).

Untuk sekolah lanjutan, ada perbedaan antara sekolah lanjutan pria, wanita dan campuran. Sekolah lanjutan wanita mencakup tiga kelas. Dengan perkecualian sebuah sekolah lanjutan pemuda dan campuran mencakup tiga kelas. Ini tergantung pada tingkat sekolah rakyat itu. Ketika proses ini berlangsung dan perubahan itu terjadi tergantung pada keberadaan formasi guru. Karena guru rakyat bekerja pada sekolah rakyat dan sekolah lanjutan kebanyakan memerlukan satu atau maksimal 2 tenaga pengajar, segera tersedia tenaga tambahan dan guru bantu. Kelebihan jumlah ini diimbangi dengan pensiunnya tenaga pengajar yang sudah memiliki pengalaman dinas 30 tahun atau lebih, pemberhentian tenaga pengajar wanita yang hamil, pemberhentian tenaga pria yang sedang berdinis, penurunan penjabat kepala dan pemberian uang tunjangan kepada tenaga pengajar dalam dinas tetap.

Dengan penerapan empat tindakan tersebut, proses berlangsung sangat cepat dan tujuan bisa dicapai yakni sekolah standard hanya dibuka di tempat-tempat yang dianggap sebagai pusat perdagangan dan lalu-lintas, sementara sekolah rakyat dan sekolah lanjutan dibuka di semua tempat lain yang dipertimbangkan untuk itu. Perubahan yang dijelaskan di atas memang mengakibatkan perluasan pendidikan rakyat. Juga sehubungan dengan kondisi keuangan negara, pada akhir 1931, 1932, dan 1933 penghapusan di samping perubahan sekolah standard terjadi. Sebagai akibat dari pemberhentian semua tenaga pengajar bantu pria sementara, kini pada setiap tahun kursus yakni pada akhir Maret 6 sekolah dihapuskan dan 4 sekolah diubah.

Pada 1 April 1934 jumlah sekolah lanjutan ada 24 buah dan sekolah standard di Maluku ada 36 buah dan jumlah tenaga pengajar ada sekitar 166 orang. Dari situ kesimpulan bisa ditarik bahwa melalui banyaknya pendidikan yang jauh melebihi sekolah lanjutan tidak bisa dipastikan. Di berbagai sekolah kini terjadi kemunduran jumlah siswa, yang juga disebabkan oleh buruknya kondisi keuangan. Di banyak tempat gedung sekolah adalah milik negeri di mana sewa dilakukan oleh pemerintah dengan uang sewa bulanan yang berkisar dari 5 gulden dan 10 gulden. Ini tidak mampu memenuhi semua tuntutan kecocokan dan kejelasan. Sejumlah bangunan tampak menyedihkan. Di beberapa tempat gedung itu memiliki lantai tanah atau jika lebih menguntungkan, lantai semen yang ditinggikan dan terbuat dari batang kayu liar atau gaba-gaba yang banyak ngengat putih atau bubuk. Diharapkan agar perhatian pada bangunan sekolah menduduki posisi penting dalam hati setiap warga negeri seperti halnya bagi rumah ibadah. Perbedaan yang tampak di berbagai negeri antara gereja yang kurang terawat dan sekolah yang terabaikan bukan hanya menyakitkan. Gedung sekolah pemerintah terawat dengan baik (*MvO van Keppenol* 1934 dalam van Fraassen, ed. 1997³: 307-8).

Tabel 6

Jumlah Sekolah Lanjutan dan Sekolah Standard di Maluku
(1934)

DAERAH	STANDARD-SCHOOL	VERVOLG-SCHOOL	JUMLAH GURU
Pulau Ambon	11	7	47
Pulau Saparua	4	8	30
Pulau Haruku	4	1	10
Pulau Nusalaut	4	1	10
Pulau Seram	5	2	15
Pulau Buru	1	-	4
Pulau Ternate	1	1	
Pulau Tidore	-	1	
Pulau Sula	-	1	
Pulau Bacan	-	-	
Banda Naira	1	-	

Geser	1	-	
Manokwari	1	-	
Merauke	1	-	
Tual	1	-	
Dobo	1	-	
Wonreli	-	1	
Total	36	24	166

Sumber: *Memorie van Overgave van Gouverneur der Malukken Koppenol, April 1934*, dalam van Fraassen (ed.). 1997: 308.

4.3 Sekolah yang Dikelola oleh Pihak Swasta

Sekolah ini adalah sekolah yang dikelola di wilayah ini didirikan oleh *Indische Kerk* (Gereja Hindia), Yayasan Zending Utrecht, Misi Katolik dan golongan Arab. Sekolah swasta ini ada yang mendapatkan subsidi dari pemerintah dan ada yang tidak. Sekolah ini pada umumnya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Pihak Gereja Hindia pada tahun 1918 mendirikan *Christelijke HIS* (HIS Kristen) di Ambon dan Saparua. Pada tahun 1925 sudah ada dua HIS Kristen di Ambon, satu di Saparua dan satu di Tual. Sekolah ini mendapatkan subsidi dari pemerintah (Beverluis dan Gieben 1929: 163-6).

Dalam Lembaran Negara 1924 nomor 68 (juncto 1925 nomor 296) ditetapkan sebuah peraturan subsidi umum dari Pendidikan Dasar Pribumi yang bagi wilayah ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1925, dengan perkecualian hanya New Guinea Selatan (*MvO van Sandick* 1926 dalam Fraassen, ed., 1997²: 615). Onderafdeeling Saparua tidak memiliki sekolah bersubsidi. Onderafdeeling Ambon memiliki tiga sekolah yang sebelumnya ditambah satu. Onderafdeeling Banda memiliki beberapa yakni Pulau Teun, Nila dan Serua sementara pendidikan di Onderafdeeling Buru dengan perkecualian sekolah pribumi pemerintah dan tiga sekolah rakyat sepenuhnya berada di tangan Yayasan Zending Utrecht (*MvO van Schmidt* 1924 dalam van Fraassen, ed., 1997²: 455). Selain sekolah Kristen ibukota, ada juga dijumpai sekolah pribumi bersubsidi di Naku, Seri, Hunuth, dan Mahia. Sekolah ini terutama berada pada tingkat lebih rendah daripada sekolah pemerintah pribumi (*MvO van Schmidt* 1924 dalam van Fraassen, ed., 1997²: 479).

Sekolah Kristen pertama dan kedua di Ambon dan sekolah yang sama di Saparua semuanya didirikan oleh organisasi untuk dikelola dan mendirikan

sekolah-sekolah Kristen Maluku yang kemudian jumlah siswanya jelas mampu memenuhi kebutuhan itu. Bagi sekolah kedua di Ambon dan sekolah di Saparua, pada tahun 1925 bangunan-bangunan baru telah disiapkan dimana subsidi dari pemerintah dinikmati. Bagi sekolah pertama dan kedua di Ambon dan sekolah di Saparua, pada tahun 1925 dari kas Negara disubsidi kepada tenaga pengajar diberikan kepada organisasi tersebut sebesar 19.106,67 gulden; 18.059,72 gulden dan 18.729,05 gulden (*MvO van Sandick* 1926 dalam Fraassen, ed. 1997²: 612).

Pada 1934, di Kota Ambon terdapat lima sekolah swasta bersubsidi dan enam sekolah swasta tidak bersubsidi, dua HIS Kristen tidak bersubsidi, tiga HIS swasta tidak bersubsidi untuk pendidikan dasar Barat. Di Saparua terdapat satu HIS Kristen bersubsidi dan satu HIS swasta tidak bersubsidi. Di Piru ada satu HIS Kristen bersubsidi (*MvO van Keppenol* 1934 dalam van Fraassen, ed. 1997³: 307).

a. *Arabsche Onderwijs*

Sekolah ini dibuka di Kota Ambon pada 2 Mei 1925, dikelola oleh Yayasan Mahasin al Echlaag, berlokasi di sebuah rumah sewaan di Jalan Urimesing. Dengan perpecahan di antara orang Arab dan melalui perampasan yayasan ini oleh sekelompok Jong Arabieren di bawah pimpinan Sech Mohamad bin Abdullah Alamudi, pada tahun 1926 dua sekolah Arab swasta dibuka, ditempatkan di sebuah rumah sewaan di jalan Lurung Kuan. Ijin untuk membuka didasarkan pada anggaran dasar yayasan, tetapi tidak pernah diminta atau dilaporkan kepada pemerintah. Pada akhir tahun 1929 sekolah klas-2 ini dipindahkan ke rumah sewaan di Jalan Paradijs. Sekolah pertama yang dimiliki kelompok Kaum Tua, kini memiliki tiga pengajar dan menampung 90 siswa, yaitu 40 pemuda Arab dan 50 pemuda Ambon Islam. Sekolah kedua tersebut, yang dimiliki kelompok Kaum Muda, menampung empat tenaga pengajar dan 124 siswa, yaitu 36 orang Arab dan 46 orang Ambon Islam serta 29 gadis Arab dan 13 gadis Ambon Islam. Sekretaris yayasan Sech Mohamad bin Abdullah Alamudi kini berusaha keras untuk mengubah lembaga pendidikan yang didirikan olehnya menjadi sebuah *Hollandsch Arabische School* (*MvO van Tideman* 1930 dalam van Fraassen, ed. 1997³: 128).

b. Sekolah Standard Swasta

Dibandingkan dengan sekolah negeri, sekolah swasta menduduki posisi yang

sangat istimewa. Pada awal April tahun ini jumlah sekolah standard swasta di samping sekolah lanjutan mencapai 7 buah dengan 2, 2 dan 3 sekolah dikelola oleh Gereja Hindia, Yayasan Zending Utrecht dan Misi Katolik di Ambon, Tual, Tobelo, Miei, Langgur, dan Saumlaki. Melalui keputusan residen Ambon tanggal 17 Oktober 1932 nomor 249 dan Residen Ternate tanggal 8 Oktober 1932 nomor 135 diatur lebih lanjut pengalihan aktivitas pendidikan rakyat kepada Inspektur Pendidikan Pribumi di Ambon. Jika pada sekolah standard dikatakan bahwa pihak swasta menduduki peranan penting, hal itu tidak terjadi pada sekolah rakyat. Dengan perkecualian Onderafdeeling Ambon, Saparua, Ternate dan Kepulauan Sula, pendidikan rakyat negeri lebih menjadi pelengkap pendidikan swasta yang dikuasai oleh tiga lembaga yaitu Gereja Hindia, Yayasan Zending Utrecht dan Misi Katolik.

Gereja Hindia menemukan sebagian besar karyanya di Onderafdeeling Ambon, Zending Utrecht berkarya di Halmahera, New Guinea Utara dan Barat sementara Misi Katolik berkarya di Kepulauan Tanimbar dan Kei, New Guinea Selatan dan Barat Laut. Telah jelas bahwa dengan pembentukan dan pengelolaan sekolah swasta ini, karya zending dan pengadaban menjadi tujuannya. Sekolah menjadi sarana yang paling cocok untuk mencapai tujuan ini. Pendidikan memang bisa dikorbankan seperti yang telah jelas terjadi, tingkat kualitas sekolah rakyat swasta juga lebih rendah daripada sekolah negeri. Jika hal ini disesalkan dari sudut pandang pendidikan, kondisinya lebih parah apabila zending ganda berkarya di daerah tertentu. Muncul masa persaingan yang berpengaruh buruk pada pertumbuhan sekolah yang ada (MvO van Keppenol 1934 dalam van Fraassen, ed., 1997³: 309). Jumlah sekolah tahun 1931 dan 1936 adalah 554 dan 361 sekolah swasta bersubsidi dan 248 dan 419 sekolah swasta tidak bersubsidi (MvO van Haga 1937 dalam van Fraassen, ed., 1997³: 527).

c. Sekolah Balai Pendidikan

Pada 1934 di Kota Ambon didirikan sebuah sekolah yang bercorak Taman Siswa oleh salah seorang bekas murid Taman Siswa E. U. Papella. Sekolah ini diberi nama Balai Pendidikan. Pemberian nama Balai Pendidikan dan bukannya sekolah Taman Siswa karena menurut penilaiannya penamaan Taman Siswa adalah kurang cocok untuk kondisi daerah. Sebab menurut

mereka yang perlu di sini bukanlah nama sekolah itu, tetapi tujuan dan pendirian sekolah itu dan ini nanti tercermin dalam pendidikan yang diterapkan pada anak-anak tersebut yang dapat dikatakan sama dengan pendidikan di Taman Siswa.³¹

Sekolah Balai Pendidikan mempunyai lima dasar, yaitu *pertama*, Dasar Umum yaitu anak-anak harus dapat berkembang atas tenaga sendiri. Tugas pendidikan bukanlah memelopori tetapi memberi pimpinan jika ternyata perlu. *Kedua*, Dasar Kemerdekaan yaitu anak-anak harus diberi kesempatan untuk berkembang dengan bebas. Ia harus menjadi orang yang merdeka dalam hal berpikir dan bertindak atas tanggungjawab sendiri. *Ketiga*, Dasar Kebudayaan yaitu Supaya anak-anak kelak jangan merasa asing terhadap bangsanya, pendidikan harus diberikan berdasarkan kebudayaan bersama. *Keempat*, Dasar Kebangsaan yaitu Pendidikan harus diberikan kepada seluruh rakyat. *Kelima*, Dasar Kemanusiaan yaitu pendidikan harus membimbing anak-anak menjadi manusia yang mempunyai pengetahuan, yang dicarinya atas usaha sendiri untuk diamalkannya sendiri dalam pergaulan.

Selain dasar-dasar tersebut, Balai Pendidikan mempunyai sifat dan corak pendidikan Nasional yang bertujuan mendidik anak-anak menjadi pendukung cita-cita kebangsaan dengan menyempurnakan dirinya sebagai seorang nasionalis yang mengutamakan kepentingan bangsa dan pencinta bangsa. Berpatokan pada dasar dan tujuan inilah Sekolah Balai Pendidikan telah dijalankan. Pada tahun permulaan sekolah Balai Pendidikan didirikan, sekolah ini memiliki 12 orang murid dan dengan tiga kelas. Gedungnya yang terletak di Kampung Soa Bali. Kemudian sekolah ini berkembang menjadi 6 kelas. Pada mulanya Balai Pendidikan diajar hanya oleh dua orang guru yaitu E. U. Pupella dan istri. Kedua mereka ini adalah murid-murid Taman Siswa. Kemudian sesudah itu tambah lagi seorang guru Taman Siswa yang datang untuk membantu Pupella yaitu Tjokro.³²

Dalam waktu yang singkat guru-guru pada Balai Pendidikan mulai bertambah. Mereka membantu membangun sekolah ini bukan karena motif

³¹Keterangan ini berdasarkan hasil wawancara dengan E.U.Pupella pada tanggal 15 Desember 1978. Wawancara dilakukan oleh Prof. John A Pattikaayhatu.

³²Ia adalah seorang guru yang terkenal sangat baik pada masa itu, masa Jepang, masa sekitar Proklamasi Kemerdekaan, dan masa pergolakan RMS. Kepopuleran Tjokro begitu menonjol sehingga ia bersama-sama dengan Pupella berhasil dipilih dan duduk dalam Dewan Maluku Selatan (Depdikbud, 1978: 128)

mencari keuntungan, akan tetapi karena setuju dengan dasar dan tujuan sekolah ini, yaitu mendidik anak-anak untuk mengenal diri sendiri, berkembang sendiri dan mengutamakan bangsa Indonesia. Balai Pendidikan di Ambon dalam pergolakan-pergolakan politik mempunyai corak yang lain dari Taman Siswa, Kalau dalam Taman Siswa para gurunya tidak terlihat dalam soal-soal politik dan hanya berkecimpung dalam soal-soal sosial. sebaliknya pada Balai Pendidikan, masalah politik maupun masalah sosial digeluti. Oleh karena itulah hanya tokoh-tokoh Balai Pendidikan dalam pergerakan nasional di Maluku terjun langsung masuk ke dalam organisasi-organisasi yang memperjuangkan Indonesia merdeka seperti Sarekat Ambon. Sebagian dari mereka bahkan duduk dan memimpin Sarekat Ambon atau mewakili organisasi ini dalam Ambon Raad.

Meskipun tokoh-tokoh Balai Pendidikan terlibat dalam masalah-masalah politik dan untuk ini mereka harus sering berurusan dengan Pemerintah Hindia Belanda, tetapi bagi anak didik mereka dijaga begitu rupa sehingga mereka tidak terlibat langsung dalam soal-soal politik. Karena terlibatnya para tokoh Balai Pendidikan dalam masalah-masalah politik, maka Pemerintah Hindia Belanda sering melakukan inspeksi-inspeksi terhadap sekolah ini. Semuanya itu dilakukan dengan maksud agar supaya kegiatan Sekolah Balai Pendidikan dapat dilihat dari dekat dan diketahui apa-apa saja yang dikerjakan dalam sekolah tersebut.³³

Dana atau keuangan yang diterima adalah dari uang sekolah para murid dan bantuan-bantuan lainnya. Pada masa itu banyak sekali para simpatisan yang membantu Balai Pendidikan. Diantara mereka adalah pemuka-pemuka masyarakat, para cendekiawan, beberapa orang Cina, dan pedagang pribumi seperti Abu Kasim, Abdulalie dan Raden Panji. Dari uang sekolah dan bantuan-bantuan tersebut gaji guru dibayar, peralatan pendidikan dibeli dan sewa gedung sekolah. Pembagian penggunaan anggaran adalah 75 persen untuk gaji guru dan 25 persen untuk keperluan lainnya. Apabila pendapatan guru-guru Balai Pendidikan dibandingkan dengan pendapatan guru-guru sekolah lainnya maka pendapatan guru-guru Balai Pendidikan sangat kecil namun demikian mereka tidak menarik diri dalam membantu Balai Pendidikan dan mereka juga tidak merasa kekurangan disebabkan mereka secara individual selalu mendapat

³³Keterangan ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk Tjokro pada tanggal Desember 1978. Wawancara dilakukan oleh Prof. John A Pattikaaybatu.

bantuan dari masyarakat simpatisan Balai Pendidikan atau dari orang tua murid, misalnya berupa pakaian, sepatu dan lain-lain.

Mengenai mata pelajaran yang diberikan hampir sama dengan mata pelajaran yang diberikan di sekolah-sekolah pemerintah, yaitu pengetahuan umum, berhitung, bahasa Belanda, bahasa Inggris (diberikan di Kelas 4). Yang berbeda hanyalah dalam mata pelajaran sejarah. Pada sekolah-sekolah lain mata pelajaran sejarah terbagi atas dua bahagian yaitu *Algemene Geschiedenis* (Sejarah Dunia) dan *Vaderlandsche Geschiedenis* (Sejarah Tanah Air) sedangkan pemberian mata pelajaran sejarah pada Balai Pendidikan didasarkan pada pandangan nasional Indonesia. Oleh sebab itu mata pelajaran sejarah Tanah Air yang diajarkan adalah para pahlawan Indonesia yaitu mereka yang berjuang melawan Pemerintah Hindia Belanda seperti Kapitan Pattimura, Diponegoro dan lain-lain. Padahal di sekolah-sekolah pemerintah, mata pelajaran sejarah tentang pahlawan tanah air seperti Pattimura dan Diponegoro itu dianggap sebagai pemberontak. Di samping itu diajarkan pula untuk menghargai kebudayaan sendiri yang derajatnya tidak kalah dengan bangsa lain. Juga dididik untuk menghargai bahasa nasional dan bahasa daerah serta menghargai pula akan pakaian daerah. Pemupukan perasaan nasional melewati kebudayaan bahasa dan pakaian sama sekali tidak diperhatikan dalam sekolah-sekolah pemerintah.

Di Balai Pendidikan para guru dianjurkan untuk tidak membayar *loon belasting* (pajak pendapatan) kepada pemerintah Hindia Belanda, karena adanya anjuran ini maka guru-guru di Balai Pendidikan tidak pernah membayar *loon belasting* tersebut. Akibatnya para guru Balai Pendidikan ini ada yang ditangkap dan ditahan pihak Belanda. Untuk itu maka ketua bidang pendidikan juga ditahan karena umumnya penahanan ini dilanjutkan dengan diadilinya orang tersebut di pengadilan. Mereka selalu dinyatakan bersalah dan didenda sebanyak 7.50 gulden. Denda tersebut harus dibayar oleh Balai Pendidikan guna menebus guru atau anggotannya yang ditahan itu. Jika tidak ia akan dipenjarakan. Bagi Balai Pendidikan pengorbanan ini harus terus dijalankan demi tercapainya sasaran perjuangan yang dicita-citakan yaitu dihapusnya *belasting* tersebut bagi guru-guru.

Selain aksi tersebut, Balai Pendidikan juga telah menginstruksikan kepada murid-muridnya agar tidak mengikuti perayaan 31 Agustus. Perayaan 31 Agustus adalah perayaan hari ulang tahun Ratu Wilhelmina (Raja Belanda), yang biasanya di Ambon dirayakan secara besar-besaran oleh seluruh masyarakat. Mengenai hal

ini pemimpin Balai Pendidikan beranggapan bahwa tindaklah tepat bahwa orang yang masih hidup diagung-agungkan dengan perayaan yang besar dan meriah. Tindakan tersebut menyebabkan Pemerintah Hindia Belanda menuduh Balai Pendidikan sebagai anti kekuasaan pemerintah. Pemimpin Balai Pendidikan E. U. Pupella dipanggil untuk mempertanggungjawabkan tindakannya itu oleh Residen. Akan tetapi, dengan bentuk pembelaan seperti tersebut di atas, maka pemerintah akhirnya tidak mempunyai alasan yang kuat untuk memenjarakan ketua Balai Pendidikan atau menutup sekolah tersebut (Pattikayhatu, dkk. 1981: 35-38).

Perjuangan terhadap politik pendidikan Pemerintah Hindia Belanda ini telah menunjukkan kepada kita betapa besar peranan Balai Pendidikan dalam mendorong, menanamkan dan mengembangkan perasaan nasional anak-anak asuhannya serta guru-gurunya meskipun tidak secara langsung. Dapat dikatakan bahwa Balai Pendidikan Ambon banyak mempunyai andil dalam pergerakan nasional di Maluku baik dalam pencetakan kader-kadernya maupun sebagai lambang berjuang ke arah itu. Balai Pendidikan telah menanam perasaan kebangsaan menuju Indonesia merdeka. Dalam sekolahnya tanpa ragu-ragu, sementara sekolah-sekolah lainnya belum memikirkan hal itu.

4.4 Sekolah yang Dikelola Masyarakat dengan Subsidi Pemerintah

Sekolah Rakyat Negeri (*Openbare Volksscholen*) merupakan sekolah yang didirikan oleh masyarakat dan dikelola oleh lembaga hukum pribumi (Negeri) dengan subsidi pemerintah. Sekolah ini berjumlah 90 buah dengan rincian 24 di Keresidenan Ambon dan 66 di Keresidenan Ternate. Jumlah sekolah ini yang terutama dijumpai di negori Islam dan beberapa negori yang belum memeluk agama. Beberapa sekolah berlangsung sangat baik, tetapi di antara banyak sekolah prosentase pembolosan sangat besar, sampai 30 persen atau lebih. Bagi hampir semua sekolah ini selama tahun 1925, negara memberikan subsidi sampai sebanyak 26.930,50 gulden. Bangunan semuanya didirikan dan dirawat oleh lembaga hukum pribumi terkait. Sarana belajar diterima oleh sekolah atas permohonan dari depot negara. Pengelolaan atas sekolah-sekolah dijalankan oleh pemerintah Onderafdeeling terkait. Pengangkatan dan pemindahan tenaga pengajar dilakukan oleh residen kepala afdeeling atas perintah pengelola dan pemilik sekolah. Dalam pengangkatan pertama (pada kasus bermasalah), Inspektur Pendidikan Pribumi perlu diajak bicara.

Sejak 1925 dengan adanya pembicaraan dalam suatu konferensi yang diadakan di Ambon pada tahun 1924 bersama para pejabat pemerintah, guru zending dan pendeta bantu, yang juga dihadiri oleh Penasehat Pendidikan Rakyat Wolterbeek Muller, di sejumlah Onderafdeeling sumbangan sukarela dari penduduk melalui lembaga hukum pribumi diminta sebesar 1,00 gulden per orang, yang sebagian disiapkan untuk menutup saldo rugi pendidikan rakyat. Pada beberapa masyarakat pribumi, selain pengumpulan pajak kepala sukarela ini orang akan mengutamakan pemungutan uang sekolah di Onderafdeeling Ambon, Saparua dan Buru. Sejak ini sumbangan sukarela sebesar 1,00 gulden akan ditinjau lebih lanjut (*MvO van Sandick* 1926 dalam Fraassen, ed. 1997²: 614).

Sejauh ini semua negeri Islam tidak menerima pendidikan. Kebutuhan untuk itu juga tidak dirasakan dan banyak bupati Islam yang konservatif tidak mengetahui arti penting sekolah karena menurut dugaan mereka (yang bukannya tanpa alasan) orang harus menghindari pekerjaan kasar. Melalui uji coba kini sekolah dibuka di Onderafdeeling Ambon, di negeri Tulehu, Hitumesing dan Laha. Di Onderafdeeling Saparua sekolah dibuka di negori Kulur, Pelau dan Kailolo. Di Onderafdeeling Ambon sekolah sangat merana. Di Onderafdeeling Saparua perhatian lebih besar diperoleh. Pimpinan afdeeling tampil sebagai pengelola sekolah rakyat dan mengangkat tenaga guru menurut aturan yang ada. Terjadi kekurangan tenaga pengajar (*MvO van Schmidt* 1924 dalam van Fraassen, ed. 1997²: 455).

Sekolah pribumi pemerintah di Asilulu harus ditutup karena kurangnya perhatian. Nasib serupa terancam terjadi di Hila. Kaum ulama Islam mengancam kunjungan sekolah sehingga sekolah terpaksa hanya dikunjungi oleh anak-anak dari kampung warga Kristen yang ternyata jumlahnya tidak sepadan untuk menutup biaya sekolah ini. Sekolah rakyat dijumpai di negori Islam Tulehu dan Laha; sekolah bersubsidi di Seri, Naku dan Hunuth sementara ada satu yang dibuka di Mahia (*MvO van Schmidt* 1924 dalam van Fraassen, ed. 1997²: 479).

Kebutuhan bagi pendidikan rakyat (yang hanya dipertimbangkan bagi negori Islam, karena negori Kristen yang penting telah mempunyai sekolah pemerintah atau sekolah bersubsidi) di afdeeling ini tidak terasa. Sebagai uji coba sekolah rakyat dibuka di negori Tulehu, Hitunesing dan Laha. Kunjungan sekolah di sini kurang baik karena kurangnya kerjasama dari penguasa negori. Para bupati Islam salah menduga bahwa pendidikan sekolah membuat orang akan tidak mau

melakukan pekerjaan kasar. Pemberian pendidikan dengan pekerjaan tangan sebagai bidang utama mungkin akan lebih baik berlangsung. Pendidikan rakyat dalam bentuk seperti sekarang ini tidak ada di Onderafdeeling Ambon (*MrO van Schmidt* 1924 dalam van Fraassen, ed. 1997²: 481).

Jumlah sekolah rakyat negeri tidak banyak mengalami perubahan. Di Seram Timur dan Kepulauan Kei beberapa sekolah rakyat baru didirikan. Lima permohonan bagi Seram Timur masih dibahas. Beberapa sekolah di Seram ini dilimpahkan kepada Gereja Hindia, tidak selalu benar. Misalnya sekolah rakyat umum di Luhu (Seram Barat) dialihkan sementara sebagian besar penduduk adalah pemeluk Islam. Tidak tersedianya tenaga pengajar Islam menghambat perluasan pendidikan rakyat negeri (*MrO van Tideman* 1930 dalam van Fraassen, ed. 1997³: 126).

Pendidikan rakyat di wilayah ini merupakan suatu persoalan sangat penting bukan hanya karena kondisinya tetapi juga karena di wilayah ini banyak daerah primitive yang sebagian besar menggunakan pendidikan sebagai sarana pengadaban dan pasifikasi. Persoalan pertama yang menarik perhatian adalah pembentukan dana sekolah dan pembiayaan sekolah rakyat melalui lembaga hukum pribumi apabila masih dianggap mungkin, yang persoalannya di masa penghematan bisa memerlukan perhatian. Departemen Pendidikan dan Agama juga setuju bahwa pembentukan dana sekolah terbatas pada pendidikan negeri dan lembaga pendidikan swasta akan dibiarkan berada di bawah pengelolaan para pengelola sekolah, yaitu para pendeta bantu, petugas zending dan misionaris.

Di wilayah ini sejak bertahun-tahun sumbangan subsidi dipungut sebesar 1,00 gulden per wajib pajak demi kepentingan kas distrik dan kas onderafdeeling. Selain itu pemungutan ini diperluas di seluruh wilayah dan terikat pada aturan tetap, kini diputuskan untuk menyerahkan sebagian hasil sumbangan penduduk bagi pendidikan rakyat. Sebagai akibatnya subsidi negara menurun. Jika di sebuah distrik ada 6 sekolah negeri dan 4 sekolah rakyat swasta bersubsidi (sekolah tidak bersubsidi tidak ikut diperhitungkan) dan sumbangan penduduk khususnya mencapai 2000 gulden, maka $6/10 \times 1000$ gulden disetorkan dalam dana sekolah, dan $4/10$ dibayarkan kepada pengelola sekolah. Sebagai akibatnya penduduk saat itu harus menanggung jumlah dalam sumbangan bagi biaya pendidikan rakyat.

Manajemen ini bertahan sampai masa pemerintahan Residen van Sandick dan dilanjutkan oleh Residen B. J. Haga yang lebih banyak mencurahkan perhatiannya

pada masalah pendidikan dan reorganisasi bidang pemerintahan. Dalam kasus-kasus tertentu, pemerintah memberikan uang pinjaman tanpa bunga dari kas negara Hindia Belanda. Menyangkut penyebaran sekolah-sekolah di berbagai tempat dalam wilayah Keresidenan Ambon maupun Ternate termasuk jumlah tenaga pengajar dapat dilihat pada bagian lampiran *Memorie Van Oergave* G. D. Hooyer tahun 1926. Menurut Residen Ambon B. J. Haga dalam memori serah terimanya tahun 1937 bahwa pendidikan di daerah Maluku merupakan persoalan yang sangat penting untuk ditangani karena di wilayah ini penduduknya masih banyak primitif terutama di pedalaman-pedalaman, sehingga membuat kesenjangan dengan daerah perkotaan. Perhatian Haga mulai dicurahkan pada bidang pendidikan dengan menetapkan dana-dana sekolah dan pembiayaan pendidikan rakyat oleh ikatan hukum pribumi kepada sebagian daerah yang berhak memperoleh perhatian pemerintah. Departemen Pendidikan dan Agama juga menyetujui rencana itu sehingga subsidi pemerintah yang diberikan kepada sekolah umum dapat dibatasi (Haga, *Memorie van Oergave*. 1937).

Untuk pendidikan sekolah rakyat swasta diserahkan kepada para pengelola sekolah, yaitu para pendeta, pendeta *zending* dan misionaris. Di wilayah ini sejak bertahun-tahun sejak adanya penyelenggaraan pendidikan, sumbangan penduduk sebesar 1,00 gulden dipungut per wajib pajak (untuk *New Guinea* sumbangannya lebih rendah 10 persen dari jumlah pajak demi kepentingan kas *onderafdeeling* dan distrik). Apabila sumbangan penduduk untuk pendidikan pada 1936 mencapai 2.000 gulden maka ketentuannya $6/10 \times$ gulden 1000 dimasukan untuk dana sekolah, dan $4/10$ dibayarkan kepada pengelola sekolah. Semua ini merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Hindia Belanda sehingga bantuan penduduk dan pemerintah untuk dana pendidikan pada 1936 sangat memuaskan terutama bantuan kepada sekolah swasta, terbukti dari daftar Tabel 7.

Tabel 7
Subsidi Pendidikan dari Pemerintah dan Penduduk

STATUS SEKOLAH	SUMBER SUBSIDI (DALAM GULDEN)	
	PEMERINTAH	PENDUDUK
Sekolah rakyat negeri	24.445,99	15.928,50
Sekolah rakyat swasta	84.986,02	29.023,00
Jumlah	109.435,58	44.951,50

Sumber: B. J. Haga, *Memorie van Opervave*, Ambon 1937.

Dalam menilai angka-angka tersebut harus diperhitungkan kenyataan bahwa di Onderafdeeling Ambon dan Saparua, selain dalam bentuk uang sekolah, tidak ada sumbangan dalam biaya pendidikan rakyat. Di kedua daerah tersebut, selain pajak penghasilan, penduduk juga membayar pajak dewan Ambon sebesar 1,00 gulden rata-rata per wajib pajak, yang bisa dibandingkan dengan sumbangan penduduk di tempat lain. Kondisi ekonomi tidak memungkinkan lebih banyak beban dilimpahkan kepada penduduk (*MvO van Haga* 1937 dalam van Fraassen, ed., 1997³: 525).

Angka-angka pada Tabel 7 menunjukkan bahwa pemerintah Hindia Belanda memberikan bantuan lebih besar dibandingkan penduduk. Kebijakan pemerintah Belanda untuk menghemat anggaran pendidikan dengan menurunkan subsidi bagi seluruh sekolah swasta yang pada 1931 sebesar 194.000 gulden turun menjadi 90.00 gulden pada 1935, dan jumlah sekolah swasta bersubsidi dari 554 buah menjadi 361 buah. Sebagai contoh, sebelum tahun 1931, sekolah swasta di Kepulauan Kei berjumlah 107 buah yang terdiri dari 65 sekolah bersubsidi dan 45 sekolah tidak bersubsidi. Pada 1931 Pemerintah Hindia Belanda mengurangi sekolah swasta sehingga hanya tinggal 79 sekolah yang terdiri dari 39 sekolah bersubsidi dan 40 sekolah tidak bersubsidi. Di Kepulauan Barat Daya dari 71 buah sekolah, pada 1932 dikurangi menjadi 57 buah, di Aru dari 43 buah dikurangi menjadi 30 buah, dan di Tanimbar dari 67 dikurangi menjadi 47 buah. Kebijakan ini ditetapkan dalam Keputusan Direktur Pendidikan dan Agama tanggal 7 September 1936 Nomor O.E.17/7/25 (Haga, *Memorie van Opervave van Bestuur van den Aftredenden Resisent der Molukken* Ambon. 1937).

Di sisi lain, Direktur Pendidikan dan Agama pada 14 Mei 1938 mengeluarkan Surat Nomor 13918/E untuk pemberian subsidi kepada beberapa sekolah baru namun tetap berpegang pada aturan subsidi umum yang lama sehingga hanya 6 sekolah negeri dan 16 sekolah swasta yang akan diberikan subsidi dan tempat-tempatnya akan ditentukan oleh Direktur Pendidikan dan Agama. Kondisi seperti ini berbeda dengan sistem di Swapraja Ternate yang menunjukkan suatu ketimpangan karena sekolah-sekolah berstatus negeri yang baru dibangun harus diberi subsidi dari kas daerah, sedangkan sekolah-sekolah swasta dan negeri di wilayah ini tidak diberikan subsidi. Walaupun kondisi yang dijumpai seperti pada penjelasan di atas, namun kualitas pendidikan rakyat tetap dianggap memuaskan. Suatu catatan dari Residen B. J. Haga dalam Lampiran V *Memorie van Opergaven* pada 1938 menampilkan suatu kondisi perbandingan sekolah negeri dan swasta pada sekolah rakyat sebelum pengurangan pemberian subsidi mulai 1931 dan kondisi setelah pengurangan pemberian subsidi sampai 1937, seperti pada Tabel 8.

Tabel 8
Perbandingan Subsidi Pendidikan di Maluku
(1931 dan 1937)

JENIS SEKOLAH	TAHUN	
	1931	1936
Sekolah Negeri	109	160
Sekolah Swasta Bersubsidi	554	361
Sekolah Swasta Tidak Bersubsidi	248	419
Jumlah	911	940

Sumber: B. J. Haga, *Memorie van Opergaven*, Ambon, 1938.

Minat terhadap sekolah untuk masyarakat Maluku khususnya Maluku Tengah sangat tinggi karena dengan mengenyam pendidikan akan meningkatkan status mereka di mata masyarakat sehingga setiap tahun banyak siswa yang ditolak baik untuk masuk sekolah Eropa maupun sekolah pribumi. Hal ini terutama disebabkan oleh sejumlah besar mereka yang disamakan dengan orang Eropa (anak dari ayah pribumi dengan ibu Eropa) dan kembalinya para pensiunan militer yang anak-anaknya memasuki sekolah HIS khusus bagi anak-anak militer di tempat

lain. Mereka semua menghendaki agar anak-anaknya bisa memasuki sekolah Eropa atau setidaknya HIS. Anak-anak pensiunan ini terutama juga menerima pendidikan HIS dan bisa dipahami bila orangtuanya tidak ingin menempatkan mereka di sekolah pribumi. Dengan demikian jika bagi anak-anak pensiunan ini *Ambonsche Burgerschool* menjadi sebuah sekolah, kategori lain berhak diterima masuk sekolah Eropa, di mana juga oleh Departemen Pendidikan izin diberikan kepada anak-anak Cina, suatu tindakan penghematan untuk lolos dari kebutuhan bagi pendirian HCS di ibu kota. Tetapi kondisi ini mengakibatkan bahwa baik 8 Sekolah Eropa maupun 3 HIS setiap tahun harus menolak sejumlah besar siswa.

Selanjutnya keberatan terasa terhadap pendidikan anak-anak Ambon di sekolah Eropa, karena di rumah anak-anak ini menggunakan bahasa Melayu dan harus menerima pendidikan awal dari para guru Eropa yang tidak menguasai bahasa itu sementara anak-anak pensiunan tidak berhak untuk diterima di sekolah ini. Pada saat itu tampak menurut aturan-aturan bagi sekolah Eropa, anak-anak yang bisa memberikan bukti bahwa mereka tidak dapat meneruskan pendidikan ini tidak boleh diusir, sehingga seleksi murid tidak terjadi dan para calon yang cerdas ditolak karena kekurangan tempat. Akhirnya anak-anak yang berasal dari sekolah Eropa tidak memahami bahasa Melayu yang menjadi kesulitan dalam mencari pekerjaan.

Kondisi ini memberi alasan bagi Dewan Ambon pada tahun 1923 untuk menerima mosi dengan suara bulat yaitu meminta kepada Direktur Pendidikan untuk mengubah sekolah Eropa klas-2 dan klas-3 menjadi HIS. Perubahan ini menimbulkan beban tanggung jawab di kalangan dunia Eropa di ibukota (yang kondisinya sebelumnya telah disebutkan) dan cabang *Indo-Europesche Verbond* di ibukota mengadakan rapat di mana terdapat protes keras terhadap perubahan ini. Sejak itu oleh Inspektur Pendidikan Tinggi usul-usul diajukan setelah berunding dengan IEV untuk mengatasi keberatan tersebut dengan tetap mempertahankan sifat Eropa di kedua sekolah ini. Usul-usul ini diterima setelah pembicaraan lama dengan IEV, meskipun sekolah ini ternyata hanya di atas kertas bersifat Eropa.

Tindakan yang diusulkan adalah mengganti beberapa pengajar Eropa dengan tenaga pribumi, penerapan bahasa Melayu sebagai pelajaran, perubahan aturan dalam arti bahwa seorang siswa yang telah belajar dua kali di kelas yang sama dan tidak bisa beralih ke kelas yang lebih tinggi bisa dikeluarkan, dan hak untuk masuk bagi anak-anak pensiunan militer yang kembali. Apabila tindakan

ini diambil, semua keberatan bisa diatasi sementara nama sekolah itu tetap Eropa (*MvO van Schmidt* 1924 dalam van Fraassen, ed. 1997²: 480-1).

Di sekolah-sekolah bagi pendidikan dasar Barat di Ambon, dengan perkecualian sekolah Kelas 1 Eropa di Ambon terutama harus memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak pejabat dan militer pribumi, juga di luar ibukota. Sehubungan dengan itu dua persoalan menarik perhatian: penampungan anak-anak, dan cara pembayaran biayanya. Tentang persoalan pertama perlu disampaikan bahwa penampungan anak-anak di asrama tidaklah ideal. Perlu diperhitungkan apakah tidak mungkin untuk membangun sebuah asrama, lebih suka dengan subsidi pemerintah dan jika mungkin dengan bantuan dewan kotapraja dan dewan Ambon. Asrama ini bisa tumbuh di bawah kepemimpinan keluarga Eropa. Mungkin juga Gereja Hindia di sini memberikan bantuan. Dipenuhinya kebutuhan pegawai pribumi sebagai aparat, pengawas sekolah, guru, militer dan sebagainya yang sering bertahun-tahun lamanya ternyata hidup di tempat yang jauh dan melakukan pekerjaan yang baik demi kepentingan pemerintah, setidaknya bisa dibenarkan.

Mengenai persoalan kedua tersebut, perlu dinyatakan bahwa orangtua anak-anak yang berangkat ke sekolah di sini sering melakukan perjalanan yang sangat jauh sehingga mereka tetap tidak mampu untuk mengirimkan uang asrama tepat waktu yang disisihkan dari gajinya, sementara kiriman uang ini juga berulang kali menimbulkan biaya dan banyak kesulitan. Pertanyaan apakah tidak mungkin untuk menempatkan para pegawai ini secara gratis dengan cara seperti yang untuk itu ada kesempatan berangkat ke Belanda bagi para pegawai Eropa, karena itu diperlukan pertimbangan serius (*MvO van Tideman* 1930 dalam van Fraassen, ed., 1997³: 125).

Pendidikan pribumi dibawah pengawasan umum inspektur pendidikan di wilayah dengan kedudukan di Ambon. Inspektur ini dibantu oleh penilik sekolah pribumi yang diangkat dan ditempatkan oleh inspektur pendidikan dan agama dan yang daerah kerjanya diatur lebih lanjut oleh inspektur. Cabang pendidikan ini sangat penting bagi wilayah tersebut dan wilayah ini dalam konteks pendidikan sangat diutamakan. Dari situ terbukti bahwa setiap tahun untuk gaji tenaga pengajar pada pendidikan negeri dan pendidikan umum dan bagi subsidi untuk pendidikan swasta mencapai kira-kira 300.000 yang dibayarkan oleh Negara. Pada semua sekolah pemerintah terdapat sebuah perpustakaan

rakyat; pengelolanya adalah kepala sekolah yang meminjamkan buku dengan uang pinjam murah. Perpustakaan memuat buku-buku dalam berbagai bidang dan dalam bahasa Melayu. Melalui campur tangan inspektur pendidikan pribumi juga semua lembaga swasta dimana para guru sekolah rakyat dididik menerima perpustakaan dan juga semua sekolah standard dan akhirnya pada para pengelola sekolah rakyat demi kepentingan tenaga pendidik bagi sekolah itu.

Pengawasan lokal dijalankan oleh Komisi sekolah yang disusun dengan cara yang sesuai seperti pada sekolah Eropa. Pengawasan atas pendidikan yang diberikan oleh orang pribumi kepada orang pribumi berlangsung lewat peraturan yang dimuat dalam Lembaran Negara 1923 no. 136 yang ketentuannya disampaikan kepada kepala pemerintah wilayah. Campur tangan ini seperti wewenang yang diberikan kepada kepala pemerintah wilayah dalam Lembaran Negara tersebut digunakan demi kepentingan ketertiban umum tentang larangan pendidikan terhadap seorang guru tertentu, juga setelah 1 Januari 1926 menurut Lembaran Negara 1925 no. 433 diserahkan kepada Gubernur. Pembuatan larangan ini belum diperlukan. Jumlah pemberitahuan yang sampai saat ini dicatat di kantor wilayah mencapai dengan perkecualian sebuah sekolah di Dobo (sekolah Cina), semua sekolah berpusat di Saparua (termasuk sebuah sekolah Cina). Akhirnya perlu disebutkan yayasan Arab Mohasan Alchalak (disetujui dengan Keputusan Pemerintah tanggal 19 Mei 1910 no 68) (*MvO van Sandick* 1926 dalam Fraassen, ed. 1997²: 613).

Pada tahun-tahun selanjutnya pengawasan atas sekolah pribumi di wilayah pemerintahan Maluku diserahkan kepada Inspektur Pengganti Pendidikan Pribumi di Resort 5 di Ambon, yang juga disertai untuk mengawasi sekolah Pendidikan Dasar Barat tanpa mengurangi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Pendidikan Dasar Barat di resort 5. Sehubungan dengan pendidikan pribumi, inspektur itu dibantu dalam melaksanakan tugasnya oleh seorang penilik kepala. Untuk itu resort inspeksi dibagi menjadi 12 daerah penilikan sekolah: daerah Ambon dengan kedudukan penilik di ibukota Ambon, daerah Saparua dengan kedudukan penilik di Saparua, daerah Seram dengan kedudukan penilik di Piru (*MvO van Keppenol* 1934 dalam van Fraassen, ed. 1997³: 306).

Kenaikan uang sekolah, di mana uang sekolah minimum (terlepas dari mereka yang gratis) ditetapkan dari 15 sen menjadi 25 sen per bulan (suatu jumlah yang tidak kecil apabila orang menyelidiki bahwa setiap negori tidak

mampu membayar pajak tahunan untuk menutup gaji para guru selama sebulan) menimbulkan penurunan di sekolah, tetapi terutama lebih disebabkan oleh perlawanan dari pihak orang tua dibandingkan karena ketidakmampuannya. Yang jauh lebih terasa adalah tekanan kenaikan uang sekolah yang bertumpu pada prinsip lain pada orangtua yang anak-anaknya memasuki HIS atau *Ambonsche Burgerschool* (di Hindia Belanda sejak 1 Januari 1924 menurut garis ini uang sekolah dinaikkan. Untuk HIS pemerintah bagi setiap anak pertama dari satu keluarga yang orangtuanya menerima penghasilan bulanan tidak kurang dari 175 gulden per bulan, kenaikan terjadi dari 1,00 gulden menjadi 3,00 gulden per bulan). Lembaga pendidikan ini telah menghasilkan sejumlah besar tenaga kerja bagi pemerintah dan diharapkan agar peraturan uang sekolah yang lebih tinggi bagi lembaga ini diubah agar tidak begitu menekan. Sebuah sekolah milik Dana Studi Ambon dan sejumlah sekolah swasta kecil masih memasok pendidikan bagi anak-anaknya yang tidak mendapatkan pendidikan di sekolah lain. Jumlah anak yang menerima pendidikan di ibukota mencapai 3000 orang.

Jumlah sekolah cukup besar sehingga kebutuhan bagi pendidikan Barat dengan bahasa Belanda sebagai pengantar bisa terpenuhi. Tidak bisa dibantah bahwa apabila sekarang ini ada sejumlah sekolah dengan pendidikan dasar Barat dibuka, juga semua itu akan penuh. Dorongan bagi anak-anak Ambon untuk mencari pendidikan dengan bahasa Belanda sebagai pengantar bagi anak-anaknya begitu besar sehingga berulang kali kehidupan keluarga dikorbankan dan sebagian besar pendapatan digunakan (*MvO van Keppenol* 1934 dalam van Fraassen, ed. 1997³: 308).

Meskipun melalui pemberian peringkat penghematan penting bisa dicapai, dari situ terbukti bahwa seluruh jumlah subsidi bagi pendidikan rakyat swasta sekitar 208.000 gulden pada tahun 1932 turun menjadi 122.000 gulden pada tahun 1933. Untuk itu juga peraturan gaji baru bagi sekolah rakyat juga ikut membantu. Peraturan ini diperbaharui dan ditetapkan kembali sejak 1 April 1934 di mana para guru rakyat pribumi yang bekerja di New Guinea menduduki posisi khusus dan bergaji lebih rendah daripada rekan-rekannya di daerah lain. Tujuan akhirnya, swadaya dalam sekolah rakyat, di wilayah Maluku masih jauh dari harapan. Dana ini dikelola oleh sebuah komisi yang dipimpin oleh kepala *Onderafdeeling* dan sebagai anggotanya adalah para penilik sekolah dan wakil resort dari pendidikan rakyat pemerintah dan bersubsidi. Konsep peraturan kini

dikirimkan sebagai nasehat kepada yang bersangkutan. Terlepas dari pelaksanaan peraturan ini, memang kini setiap tahun perhitungan dibuat tentang uang subsidi bersama para pengelola sekolah, sementara pemberian subsidi pada penjabat Inspektur Pendidikan Pribumi atas nama kepala Afdeeling terjadi berdasarkan permohonan dan anggaran yang diajukan. Anggaran mengenai sekolah rakyat negeri bagi sekolah pemerintah dan daerah juga ditangani oleh inspektur (*MvO van Keppenol* 1934 dalam van Fraassen, ed. 1997³: 310).

Baru belakangan ini pemerintah mengambil alih tugas untuk mencurahkan perhatian bagi pendidikan dan selama beberapa tahun orang bisa menemukan kondisi bahwa di hampir semua negeri Kristen terdapat sekolah pemerintah Kelas 2; di beberapa tempat ketika hal ini tidak terjadi, orang bisa menemukan sekolah rakyat bersubsidi milik Gereja Hindia. Juga di daerah Islam pemerintah berusaha mendirikan sekolah, tetapi sampai sekarang hasilnya masih sangat kecil. Masih ada pandangan bahwa anak-anak yang berangkat ke sekolah akan menjadi Kristen, suatu pandangan yang disebarluaskan oleh guru mengaji. Meskipun mereka yang lebih cerdas mengetahui bahwa pemerintah tidak lagi menggunakan paksaan terhadap agama, ada sesuatu pada orang-orang di negori Islam yang telah lulus dari sekolah untuk lebih menjaga jarak dengan pandangan agama. Misalnya di Asilulu terdapat sebuah Sekolah Kelas Dua tetapi karena kurangnya perhatian harus segera ditutup. Laha dan Hitu harus melihat sekolahnya ditutup setelah jangka waktu lama. Satu-satunya sekolah di negori Islam yang bisa dibandingkan dengan sekolah di negori Kristen adalah di Tulehu. Juga di sana pada akhirnya persentase anak-anak yang mengunjungi sekolah hanya sedikit. Tetapi di sini sesuatu masih berjalan yang tampaknya menunjukkan bahwa tepat di dekat Tulehu terletak negori Kristen Waay dan melalui hubungan yang lama generasi muda di Tulehu semakin merasakan kebutuhan di bidang sekolah daripada mereka di Waai (*MvO van Wijck* 1937 dalam van Fraassen, ed. 1997³: 596).

Hasil dari semua ini adalah bahwa orang-orang di negori Kristen tidak lagi buta huruf, sementara di negori Islam masih ditemukan banyak yang buta huruf. Ambon tidak bisa menemukan perbandingan meskipun ada perkembangan sekolah ini, di mana mereka bisa menerapkan apa yang diajarkan. Tetapi ini bukan merupakan keberatan selama di berbagai bagian Hindia pendidikan masih belum bisa merata seperti di tempat ini. Tetapi ketika perlahan-lahan daerah lain menghasilkan cukup anak yang siap memenuhi kebutuhan ini, pendidikan

terbukti mendapatkan prioritas. Bagi kehidupan umum di negeri, Sekolah Pribumi Kelas Dua terlalu jauh. Untuk itu sekolah rakyat cukup memadai. Manfaat perubahan sekolah dengan sebuah sekolah lanjutan di sana-sini bagi mereka yang memutuskan akan dimuat dalam nota tetapi kondisi keuangan yang buruk saat itu memungkinkan perubahan sehingga dalam beberapa tahun berjalan belum dianggap mungkin atau memadai. Pada kesempatan ini orang di mana-mana juga memberikan subsidi lewat negeri, karena untuk sementara pemerintah menanggungnya. Saat itu hanya karena alasan keuangan orang tidak bisa mengenyam tingkat pendidikan lebih lanjut sehingga untuk sementara subsidi tetap diperlukan karena penduduk tidak siap bagi pembiayaan anak-anak mereka, meskipun pada umumnya orang juga mengeluarkan biaya bagi pendidikan.

Jumlah dan jenis sekolah yang saat itu berada di Afdeeling Ambon adalah sebuah sekolah MULO, tiga ELS negeri, satu ELS swasta, satu HIS negeri, dua HIS swasta besubsidi, satu HIS swasta tak bersubsidi, satu sekolah *schakel*, satu sekolah lanjutan untuk wanita, satu sekolah lanjutan negeri, satu sekolah rakyat negeri dan satu sekolah rakyat swasta bersubsidi. Di 32 negeri yang di Maluku dijumpai 14 sekolah lanjutan negeri, 23 sekolah rakyat negeri, 6 sekolah rakyat swasta bersubsidi dan satu sekolah rakyat swasta tidak bersubsidi (*MvO van Wijck* 1937 dalam van Fraassen, ed. 1997³: 596-7).

Kesempatan untuk mengikuti pendidikan, ternyata tidak dirasakan sepenuhnya oleh kalangan penduduk pedesaan dan hampir semua kalangan masyarakat muslim di Maluku. Dari berbagai sumber terutama arsip-arsip pemerintah Hindia Belanda diperoleh keterangan bahwa penduduk Maluku yang beragama Islam hampir tidak memiliki kemungkinan untuk mengikuti pendidikan Belanda, kecuali anak-anak raja yang selalu menjadi pertimbangan untuk memperoleh pendidikan. Para Raja Islam yang paling konservatif tidak menghendaki pendidikan Barat karena mereka takut pada satu saat rakyatnya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, bahkan kecurigaan bahwa apabila rakyatnya mengikuti pendidikan dan memperoleh pengetahuan lebih tinggi, akan meninggalkan agama Islam (D. G. Hooyer, *Memorie van Overgave*, 6 Juli 1926).

Perubahan kebijakan sebagai bagian dari tuntutan Politik Etis, mendorong pemerintah Hindia Belanda di daerah Maluku untuk menetapkan sebuah peraturan

subsidi umum dari pendidikan dasar pribumi, yang bagi wilayah ini diberlakukan pada 1 Januari 1925 kecuali New Guine Selatan. Peraturan ini tertuang dalam *Statsblad* 1924 Nomor 68 jo *Statsblad* 1925 Nomor 296. Berdasarkan peraturan tersebut, pada 1924 Asisten Residen H. J. Schmidt berusaha agar di enam desa Islam di Pulau Ambon harus di buka sekolah rakyat karena desa-desa Kristen di Ambon Lease semuanya terdapat sekolah pribumi kelas dua, sehingga dirasakan adanya ketimpangan sosial.

Sepuluh tahun kemudian hanya tiga sekolah yang bertahan, sedangkan lainnya ditutup karena kurangnya minat dan perhatian orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Yang tetap bertahan dan menjaga kualitas pendidikannya hanya sekolah di negeri Tulehu.³⁴ Melihat kondisi pendidikan di Maluku seperti yang dijumpai pada beberapa desa yang boleh dikatakan mati suri, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat pribumi di wilayah itu terutama pendidikan dasar (D. G. Hooyer *Memorie van Overgave*. 6 Juli 1926. Nomor 6369/17).

Di sisi lain, Direktur Pendidikan dan Agama pada 14 Mei 1938 mengeluarkan Surat Nomor 13918/E untuk pemberian subsidi kepada beberapa sekolah baru namun tetap berpegang pada aturan subsidi umum yang lama sehingga hanya 6 sekolah negeri dan 16 sekolah swasta yang akan diberikan subsidi dan tempat-tempatnya akan ditentukan oleh Direktur Pendidikan dan Agama. Kondisi seperti ini berbeda dengan sistem di Swapraja Ternate yang menunjukkan suatu ketimpangan karena sekolah-sekolah berstatus negeri yang baru dibangun harus diberi subsidi dari kas daerah, sedangkan sekolah-sekolah swasta dan negeri di wilayah ini tidak diberikan subsidi. Walaupun kondisi yang dijumpai seperti pada penjelasan di atas, namun kualitas pendidikan rakyat tetap dianggap memuaskan.

Misi Katolik telah memulai karyanya di daerah Mimika dan membuka beberapa sekolah di sana. Sejak penghapusan kewenangan antara pemerintah dan pihak *zending*, membuka kesempatan bagi misi untuk berkarya di bagian New Guinea Barat dan daerah sekitar Fak Fak, sementara di ibukota Ternate sebuah

³⁴Menurut Asisten Residen H.J.Jansen bahwa sebagian besar buta huruf dikalangan umat Islam Ambon, bukan berarti bahwa dalam perkembangan intelektual mereka tertinggal dengan rekan-rekan Kristennya, tetapi pada prinsipnya mereka terikat dengan pandangan-pandangan yang bertumpu pada dogma atau kebiasaan yang berlaku turun temurun. Tingkat buta huruf berpengaruh pada pemahaman politik sehingga kadang tidak memerlukan jalan keluar lebih lanjut.Ia mencontohkan dengan mengabil kasus propaganda Partai Insulinde dan Serikat Ambon di negeri-negeri muslim yang ternyata tidak mendapat respons dari masyarakat karena pemahaman politik masyarakat desa masih bertumpu pada politik keyakinan atau agama.

lahan tanah dibeli oleh pihak misi untuk membangun sebuah gereja Katolik dan diduga juga sebagai lembaga pendidikan. Berdasarkan laporan Residen Ternate, W. A. Hovenkamp, dijelaskan bahwa jumlah sekolah *zending* milik Yayasan Utrech yang bersubsidi di Halmahera berjumlah 84 buah dan di New Guinea berjumlah 161 buah, sedangkan milik Gereja Hindia di New Guinea Barat terdapat 14 sekolah dan di Pulau Taliabu 4 terdapat sekolah. Misi Katolik saat itu berhasil membuka 12 sekolah bersubsidi di Mimika, sedangkan jumlah sekolah rakyat di keresidenan ini mencapai 71 buah.

Di Tobelo dan di Miemi (New Guinea Utara) sebuah kursus normal untuk para guru *zending* dibuka dan dilengkapi dengan sebuah asrama sehingga menghasilkan guru-guru yang profesional dalam bidang ilmunya. Sehubungan dengan penerapan peraturan subsidi umum, timbul perbedaan pendapat karena terdapat kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lain sehingga muncul berbagai usul dari pemerintah Belanda untuk mengadakan konferensi di Ambon pada 16 Maret 1938, di bawah pimpinan gubernur dan pihak Yayasan Zending Utrech, Gereja Hindia, dan Misi Katolik. Konferensi ini diikuti oleh Croes, (Inspektur Pendidikan Pribumi) dan Geurts (Inspektur Pendidikan Hindia). Notulen yang dibuat tentang hal ini menunjukkan hasil pembicaraan yang mengarah pada penerapan lebih luwes dari penerapan subsidi umum (B. J. Haga, 1937. *Memorie van Overgave van Bestuur van den Aftredenden Resident der Molukken*).

Di ibu kota Ternate sebuah sekolah dibuka bagi anak-anak pribumi dan orang-orang swasta kaya yang memasuki HIS yang dilengkapi dengan sebuah asrama dan dikelola oleh Yayasan Asrama Ternate. Dari laporan politik Residen B. J. Haga dijelaskan bahwa Direktur Kehakiman pernah memberikan sumbangan kepada Yayasan Asrama Ternate dari hasil salah satu lotre terbesar saat itu sebesar 20.000 gulden untuk membangun gedung sekolah bagi kepentingan murid-murid yang pada saat itu berjumlah 24 orang. Pengawasan langsung di asrama dilakukan oleh seorang pengawas wanita yang tinggal di asrama, sedangkan seorang guru HIS menempati sebuah paviliun milik yayasan secara gratis, karena tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap kondisi pendidikan anak-anak saat itu (B. J. Haga, 1937. *Memorie van Overgave van Bestuur van den Aftredenden Resident der Molukken*).

Pendidikan rakyat di wilayah ini merupakan persoalan yang sangat penting, bukan hanya karena masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat,

namun ada faktor diskriminasi di wilayah ini yang masih melekat pada sebagian masyarakat sebagai hasil dari proses peradaban yang tumbuh dan berkembang didaerah ini sehingga ada klasifikasi antara masyarakat pendatang dengan semua orang pribumi. Persoalan pertama yang membutuhkan perhatian sejak kedatangan Residen Gubernur Maluku R. J. Koppenol di Ternate adalah usaha pengadaan dana sekolah dan pembiayaan pendidikan rakyat oleh masyarakat hokum adat sehingga pendidikan dapat ditangani secara baik di wilayah itu. Persoalan utama yang dilakukan dalam periode awal setelah R. J. Koppenol mulai melakukan aktivitasnya adalah upaya penghematan anggaran pendidikan yang menarik perhatian banyak penduduk. Departemen pendidikan dan agama juga memberikan persetujuan bahwa lembaga dana sekolah akan terbatas pada pendidikan negeri (peraturan ini dimuat dalam koleksi halaman 241 dari Memori serahterima jabatan dari gubernur R. J. Koppenol).

Suatu tinjauan tentang dana pendidikan dimuat dalam Lampiran 5 yang bisa dilihat pada memori serahterima jabatan dari gubernur R. J. Kopenol. Ada sebuah sekolah khususnya sebuah sekolah rakyat diawasi dan dikelola oleh sekolah yang terdiri atas para pendeta bantu, pendeta, dan misionaris yang bertugas diwilayah Ternate. Di wilayah ini selama bertahun-tahun sumbangan penduduk untuk membiayai pendidikan sebesar 1,00 gulden dan dipungut per wajib pajak (Untuk daerah New Guinea sumbangan semacam ini lebih renadah mengingat rendahnya pendapatan masyarakat dan tingkat kesejahteraan penduduk berkisar 10 persen dari jumlah pajak dengan batas maksimal 1,00 gulden), dan pembayaran pajak ini merupakan kewajiban demi kepentingan kas distrik dan onderafdeling (*Mvo Gubernur Maluku R. J. Koppenol April 1934, koleksi Mvo seri 2, rel nomer 26 Arsip Nasional RI Jakarta: 60*). Untuk lebih meningkatkan pajak daerah dalam rangka membantu pendidikan maka, wilayah pemungutann pajak diseluruh wilayah tersebut diperluas dan terikat pada peraturan khususperaturan tentang kas *onderafdeling* yang dimuat dalam halaman 202 pasal 6 dari peraturan pajak di wilayah Ternate). Peraturan wajib pajak yang berlaku saat itu diputuskan untuk menysisihkan sebagian hasil dari sumbangan rakyat kepada penyelenggaraan pendidikan rakyat, sehingga akibatnya subsidi negara merosot tajam.

Dengan adanya kasus seperti ini maka ada peraturan yang dibuat yaitu jika di sebuah distrik atau *onderafdeling* terdapat enam sekolah negeri dan empat sekolah swasta bersubsidi maka sekolah yang tidak bersubsidi dimasukan) dan

jika sumbangan penduduk berjumlah 2000 gulden maka $6/10 \times 1000$ gulden disetorkan ke dana sekolah dan $4/10$ dibayarkan kepada pihak pengelola sekolah. Hasil dari penerapan peraturan ini mengakibatkan penduduk menanggung sejumlah besar biaya untuk subsidi pendidikan rakyat seperti yang terbukti dari daftar sumbangan pendidikan tahun 1936 pada Tabel 6. Dalam menilai angka-angka di atas perhitungan harus dibuat dengan melihat kenyataan bahwa di onderafdeling Ambon dan Saparua, selain dalam bentuk uang sekolah tidak ada sumbangan yang diberikan untuk membiayai pendidikan rakyat (*Mvo Gubernur Maluku R.J. Koppenol April 1934, koleksi Mvo seri 2, rel nomer 26 Arsip Nasional RI Jakarta. bl: 61*).

Penduduk di dua wilayah ini selain pajak penghasilannya mereka masih membayar wajib pajak rata-rata 100 gulden per wajib pajak yang bisa dibandingkan dengan sumbangan penduduk yang dipungut pada tempat lain. Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang sangat tidak memungkinkan untuk memungut pajak lebih dari penduduk sehingga sebagian besar beban belum dilimpahkan kepada penduduk. Perlu di sebutkan bahwa Dewan Ambon harus memperhatikan kesanggupan masyarakat sejak awal untuk menyumbangkan sebagian hasil pajak Dewan Ambon kepada biaya pendidikan rakyat. Sehubungan dengan hal ini bagi persoalan pembiayaan pendidikan rakyat di onderafdeling Ambon dan Saparua tidak ditemukan penyelesaiannya.

Persoalan kedua yang menuntut perhatian adalah berkurangnya jumlah sekolah bersubsidi dan dari seluruh jumlah sekolah rakyat di onderafdeling tertentu. Sehubungan dengan ketentuan penghematan, yang pada tahun 1931-32 sebuah skema disusun dimana jumlah murid minimal bagi sekolah rakyat yang bersubsidi perlahan-lahan dinaikan (*Mvo Gubernur Maluku R.J. Koppenol April 1934, koleksi Mvo seri 2, rel nomer 26 Arsip Nasional RI Jakarta. bl: 62*). Ketika sebuah sekolah tidak mampu memenuhi tuntutan ini, subsidi akan dikurangi. Akibatnya adalah penghematan sangat besar atas subsidi namun kemunduran jumlah sekolah swasta bersubsidi dari 554 sampai 361 sehingga persoalan ini akhirnya ditetapkan dengan jumlah minimal murid untuk sebagian besar daerah yang belum tercapai (jumlah seluruh subsidi untuk jumlah sekolah swasta turun dari 194.000 gulden pada tahun 1931 menjadi f 90.000 pada tahun 1935. Untuk mencari perimbangan, maka dilakukan upaya agar terjadi kenaikan secara pesat, jumlah sekolah tidak bersubsidi, terutama di daerah dengan zending ganda

namun yang terjadi adalah merosotnya jumlah sekolah dan bisa dianalisa bahwa dengan kemajuan peradaban khususnya peningkatan dalam ilmu pengetahuan maka sekolah-sekolah yang dulunya dilaksanakan oleh masyarakat harus dianggap tidak diperlukan.

Sebagai contoh, jumlah sekolah di kepulauan Kei turun dari 62 yang (bersubsidi) menjadi 45 (tidak bersubsidi), jumlah seluruhnya 107 pada tahun 1931 menjadi 39 (bersubsidi) dan 40 (tidak bersubsidi). Di kepulauan barat daya 79 buah turun menjadi 71 bersubsidi dan pada akhirnya menjadi 57, di Aru dari 43 menjadi 30, di Tanimbar dari 67 menjadi 47. Untuk mencegah mencegah kemunduran lebih lanjut, maka pendidikan rakyat, diusulkan dan diterima untuk menetralkan kondisi sejak 1 Januari 1936 sehingga lebih kokoh dan dapat bertahan dengan jumlah murid yang dianggap telah ditentukan sejak tanggal 1 Januari yang telah ditetapkan. Kondisi ini ditetapkan dalam surat keputusan direktur pendidikan dan agama tanggal 7 September 1936 nomer 01 17/7 nomer 25. Penghentian pemberian subsidi dari sekolah-sekolah baru (sebagai tindakan penghematan) telah menimbulkan banyak pertanyaan dengan cara apa pembentukan sekolah-sekolah swasta baru di pedalaman New Guinea bisa diajukan untuk melengkapi sarana dan parasaran disetiap sekolah.

Sejak itu diputuskan dan diberlakukan tentang sekolah-sekolah di pedalaman New Guinea (aturan subsidi) yang memungkinkan pemberian subsidi sekolah yang baru di pedalaman New Guinea tanpa penerapan ASR dengan subsidi 15 gulden per bulan bagi setiap guru. Dengan demikian orang tidak perlu berpikir tentang bagaimana memberikan sumbangan untuk menangani ketertiban, kerapian dan kerajinan dengan tujuannya untuk memajukan pengembangan sekolah-sekolah rakyat sebagai sarana peradaban di wilayah Maluku sehingga pembangunan di daerah lain di wilayah Hindia Belanda tertinggal jauh.

Karena itu subsidi hanya akan diberikan kepada sekolah baru yang didirikan dan bukan pada sekolah yang telah ada dan selanjutnya di daerah dengan zending ganda, mengingat di sana persaingan yang ada menghambat pendirian sekolah-sekolah itu (*Mvo Gubernur Maluku R. J. Koppenol April 1934, koleksi Mvo seri 2, rel nomer 26 Arsip Nasional RI Jakarta.bl:4*). Selama tahun 1936-37 terhitung dari pemberian subsidi pada 64 sekolah di pedalaman (zending 35, misi 29), sehingga dari kondisi itu 47 buah sekolah disubsidi yang terdiri dari 27 buah zending dan 20 dari misi, namun misi telah meminta lagi subsidi bagi 31 sekolah baru

dan untuk sementara hanya 9 yang dipenuhi. Disamping itu Gubernur juga telah mengusulkan kepada direktur pendidikan (lihat surat gubernur tertanggal 7 April nomer OE17/1/28 Jo 31 bulan Mei nomor OE 17/3/30, dengan tujuan agar pemerintah memberi subsidi bagi 38 sekolah pedalaman di New Guinea selama tahun 1937-38) (*Mro Gubernur Maluku R. J. Koppenol April 1934, koleksi Mro seri 2, rel nomer 26 Arsip Nasional RI Jakarta.bl, 66*).

Karena pemberian subsidi bagi sekolah-sekolah baru di beberapa tempat di seluruh kawasa Hindia Belanda dihentikan termasuk di Maluku terutama pulau Seram dan Buru, maka kebutuhan mulai dirasakan bagi beberapa sekolah baru melalui sarana pengembangan ilmu pengetahuan, maka pemerintah menyetujui usulan bagi daerah-daerah pedalaman sejak 1 Agustus 1938 untuk pemberian subsidi kepada beberapa sekolah baru namun atas dasar pemberlakuan peraturan umum dari subsidi yaitu enam sekolah dasar negeri dan 16 sekolah swasta sesuai aturan yang telah ditetapkan. Secara umum di wilayah Ternate terjadi persaingan khusus karena di daerah pemerintahan swatantra Ternate sekolah-sekolah negeri yang baru dibuka bisa disubsidi dari kas daerah, namun sebaliknya sekolah-sekolah swasta di daerah ini dan sekolah negeri serta swasta di daerah yang diperintah secara langsung oleh Gubernur tidak bias memperoleh subsidi (*Surat direktur pendidikan dan agama tanggal 14 Mei lalu nomer 13918/E*).

Pada umumnya sehubungan dengan uraian di atas kondisi pendidikan rakyat bisa dianggap sebagai memuaskan. Dalam lampiran 5 telah diantara kondisi pendidikan rakyat pada tahun 1931 (jadi sebelum pengaruh oleh tindakan penghematan) perbandingan bisa ditarik dengan kondisi pada tanggal 1 Juni 1937. Sementara itu kenaikan pesat jumlah sekolah negeri yang memberikan kesan yang tidak benar, karena sebagian besar darinya yakni 66 merupakan sekolah kelas dua yang dirubah menjadi sekolah rakyat dan sekolah rakyat lanjutan. Pada kesulitan besar ini bisa ditunjukkan namun hampir tidak bisa diselesaikan. Umumnya keinginan harus diakui bahwa pendidikan rakyat harus diberikan dalam bahasa daerah.

Juga kenyataan menunjukkan bahwa pada masa penghematan jumlah pengawas sekolah sangat berkurang. Perluasan jumlah pemilik sekolah ini diperlukan juga sehubungan dengan sekolah pedalaman yang baru. Inspektur pendidikan dalam hal ini telah mengajukan usulan. Akhirnya masih harus

disebutkan bahwa suatu peraturan gaji baru muncul untuk guru sekolahnya dan ini ditetapkan sebagai pedoman sehubungan dengan pembangunan dan perawatan bangunan gereja, sekolah rakyat swasta dan rumah tinggal para guru pada sekolah rakyat swasta. Sumber yang sangat menarik mengenai pendidikan di Ternate, maupun Ambon diperoleh catatan dari inspektur pendidikan pribumi yang ditugasi untuk mengawasi pendidikan dasar Barat (Tuan Duin). Dalam keterangan yang disampaikan oleh tuan Dun inspektur pendidikan bahwa para murid sekolah MULO yang ada di Ternate maupun Ambon dipindahkan ke sekolah guru di Bandung. Selanjutnya di sini disebutkan tentang tulisan Tuan Duin. Dengan pengawasan atas pendidikan pribumi di wilayah Maluku telah diserahkan kepada inspektur setempat bagi pendidikan pribumi di wilayah di Ambon, yang sekaligus disertai untuk memeriksa sekolah-sekolah pendidikan dasar Barat, tanpa mengurangi pengawasan yang harus dilakukan oleh inspektur W. L. O di Wilayah Lima di Makasar.

Sehubungan dengan pendidikan pribumi, pejabat inspektur ini dalam tugasnya dibantu oleh seorang pengawas dan 12 penilik sekolah. Untuk itu daerah pengawasan dibagi menjadi 12 daerah penilik sekolah yakni; daerah Ambon dengan kedudukan Ambon, Saparua dengan kedudukan Saparua, Seram dengan kedudukan Piru, Kai dengan kedudukan di Tual, kepulauan Dobo dengan kedudukan di Dobo, kepulauan Tanimbar di Saumlaki, kepulauan Kisar Barat di Wonreli, Ternate di Ternate, Halmahera di Tobelo, New Guinea Barat di Fak Fak, New Guinea Utara di Manokwari dan kepulauan Japen di Serui. Pendidikan yang ada mencakup 10 sekolah dasar negeri, lima sekolah swasta bersubsidi dan enam sekolah swasta tidak bersubsidi. Di Ternate terdapat sebuah sekolah ELS negeri dan sebuah sekolah HIS negeri. Jumlah sekolah di sini menunjukkan bahwa kebutuhan bagi pendidikan dasar dengan bahasa Belanda sebagai pengantar telah terpenuhi. Ini tidak bisa membantah bahwa apabila pada pagi hari beberapa sekolah WLO dibuka, segera ini akan dipenuhi dengan pengunjung.

Dorongan orang-orang Ambon untuk mencari pendidikan dengan bahasa Belanda sebagai pengantar bagi anak-anaknya sangat besar sehingga berkali-kali kebutuhan keluarga harus dikorbankan dan sebagian penghasilan dicurahkan untuk pendidikan (*Mvo Gubernur Maluku R.J. Koppenol April 1934, koleksi Mvo seri 2, rel nomer 26 Arsip Nasional RI Jakarta. bl 56*). Suatu kondisi diduduki khusus oleh ELS di Manokwari. Sekolah ini pada tanggal 1 Oktober 1933 dibuka demi

kepentingan anak-anak kaum kolonis. Menurut laporan inspeksi dari inspektur pendidikan pribumi tanggal 18 Desember nomer 4917/X sekolah ini memuat 50 murid termasuk 6 siswa enam kolonis. Pada saat itu tidak lagi ada anak di Manokwari yang dipertimbangkan untuk masuk. Dengan adanya penelitian yang dilakukan, inspektur memberi nasehat kepada dewan pendidikan agar memperlakukan sekolah MULO Eropa ini sebagai sekolah negeri. Dalam hal ini bisa dilihat nasehat dari inspektur MULO dimana menurut surat direktur pendidikan tanggal 13 Februari 1934 nomer 3642/B, yang pada prinsipny tidak disetujui. Lembaga pendidikan ini memiliki sifat yang sama dengan sekolah swasta namun tetap dibawah pengawasan komisi Eropa yakni kepala pemerintah setempat dan penerimaan para siswa perlu dilakukan menurut prinsip yang berlaku bagi sekolah negeri Eropa.

Sampai beberapa tahun pendidikan standar di Maluku berkembang dengan pesat terutama sekolah pribumi klas dua. Di bawah inspektur pendidikan sekolah pribumi saat itu Tuan Geuts telah dimulai penerapan dari sistim pendidikan yang dilaksanakan di tempat lain, yakni pengurangan jumlah sekolah standar dengan perubahan sekolah swasta dengan sekolah rakyat maupun sekolah lanjutan. Perubahan yang terjadi terutama diperhitungkan sekolah kecil yang tidak menunjukkan kemajuan lagi, kecuali sekolah-sekolah dari dua negeri yang letaknya saling berdekatan. Dalam kasus ini sekolah-sekolah rakyat di negeri perlu memenuhi pendidikan dasar (tiga klas terbawah dari sekolah standar) sementara dua sekolah lanjutan rakyat yang lain disalah satu negeri ini memberikan kesempatan untuk pendidikan lanjut) dua klas tertinggi dari sekolah standar).

Pada sekolah rakyat lanjutan mereka harus dibedakan antara sekolah lanjutan pria, wanita dan campuran. Rata-rata sekolah lanjutan wanita menampung tiga kelas mengingat banyak orangtua yang tidak mau menyekolahkan anak gadfisnya. Ada perkecualian satu sekolah lanjutan pemuda didirikan khusus kepada anak gadfis maupun putra disamping itu ada sekolah campuran yang terdiri dari tiga klas. Sistem ini berkaitan erat dengan tingkat kemajuan sekolah rakyat. Proses perkembangan dan bagaimana kelanjutan sekolah jenis ini berlangsung, tergantung pada informasi personil yang ada yaitu tenaga pengajar dan animo masyarakat yang masuk ke jenis sekolah tersebut di atas. Rata-rata pada sekolah rakyat ditempatkan para guru yang berasal dari sekolah rakyat dan sebagian

besar sekolah lanjutan ditempatkan satu orang guru atau maksimal dua tenaga pengajar. Apabila ada kelebihan tenaga pengajar maka, para kepala sekolah dan para pembantu tetap menjalankan tugasnya sedangkan pengajar yang sudah memasuki usia pensiun, dilakukan penanganan sebagai berikut.

- 1) Pemensiunan tenaga pengajar dengan masa kerja 30 tahun atau lebih.
- 2) Pemecatan kepada tenaga pengajar wanita yang menikah.
- 3) Pemecatan kepada tenaga pengajar pria dan dinas sementara.
- 4) Penetapan kembali para kepala dan pemberian uang tunggu pada tenaga pengajar dalam kerja ketat.

Dengan penerapan empat tindakan ini, pola tersebut mengalami kemajuan dalam tempo yang singkat dan tujuan yang diinginkan ternyata tercapai yakni;

- 1) Sekolah standar hanya dibuka di tempat-tempat yang dianggap sebagai pusat perdagangan dan lalu lintas.
- 2) Sekolah lanjutan rakyat di semua daerah akan dipertimbangkan.

Perubahan tersebut memang berdampak luas dan persoalan ini berkembang secara pesat pada pendidikan rakyat. Namun pemerintah tetap menjalankan aturan tersebut karena mengingat kondisi keuangan Negara yang ada pada pemerintah Belanda semakin sulit maka pada akhir tahun ajaran 1931-1933 terjadi penghapusan disamping perubahan sekolah standar sebagai kebijakan mengingat kondisi keuangan yang sangat sulit. Kasus yang menarik sebagai akibat dari pemberhentian semua tenaga pembantu pria pada akhir Maret akhirnya 6 sekolah dihapuskan dan 4 sekolah diubah statusnya. Daftar sekolah-sekolah yang telah dikemukakan sebelumnya memberikan gambaran mengenai jumlah sekolah standar negeri. Dan sekolah rakyat lanjutan di Maluku di samping juga jumlah tenaga pengajar pada tanggal 1 April 1934.

Dari data yang diperoleh ternyata terbukti bahwa sekolah-sekolah sangat terpusat di pulau Ambon dan Uliaser. Di Pulau Ternate terdapat satu sekolah militer dan satu sekolah lanjutan rakyat sedangkan di Tidore hanya satu sekolah lanjutan rakyat, dan jumlah muridnya 166 orang. Kunjungan sekolah cukup normal dengan pengertian bahwa pelaksanaan sekolah tetap berlangsung dan sangat banyak siswa yang masuk pada kelas satu yang sangat banyak namun lama kelamaan pada kelas akhir hanya terdapat beberapa murid saja. Dari gambaran diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa banyak yang ingin masuk sekolah sehingga terkadang melebihi jumlah yang diinginkan oleh sekolah rakyat sehingga tidak

bisa ditampung. Dilain sisi beberapa daerah yang memiliki sekolah rakyat saat itu terdapat penurunan jumlah murid yang disebabkan karena buruknya kondisi keuangan.

Dalam surat keputusan residen Ambon tanggal 17 Oktober 1932 nomer 349 dan keputusan residen Ternate tanggal 8 Oktober 1932 nomer 135, tentang pembagian aktifitas kantor untuk pendidikan rakyat bagi inspektur pendidikan pribumi di Ambon diatur berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan (*Mvo Gubernur Maluku R. J. Koppenol April 1934, koleksi Mvo seri 2, rel nomer 26 Arsip Nasional RI Jakarta. hl 61*). Jika pada pendidikan standar bisa dikatakan bahwa pendidikan swasta menduduki posisi khusus, maka dalam pendidikan rakyat hal ini tidak terjadi. Dengan perkecualian onderafdeling Ambon, Saparua, Ternate dan kepulauan Sula, sekolah rakyat negeri lebih bersifat pelengkap yang berada ditangan ketiga lembaga, Gereja Hindia, Yayasan Zending Utrech dan Misi Katolik. Gereja Hindia menemukan lahan kerjanya sebagian besar di afdeling Ambon, sedangkan Yayasan Zending Utrech di Halmahera, New Guinea Utara dan Barat, dan gereja Katolik terutama di Kei serta di kepulauan Tanimbar.

Dengan demikian telah jelas bahwa dengan pendirian dan perawatan sekolah-sekolah rakyat swasta yang dilakukan oleh zending untuk membangun sebuah peradaban dalam dunia pendidikan merupakan tujuan utama dari misinya. Sekolah ini menjadi sarana yang sangat cocok untuk mencapai tujuan tersebut karena melalui sekolah orang dapat mengenal dan memahami akan arti kekristenan yang disebarkan lewat pendidikan. Pendidikan di beberapa daerah terpaksa mengalami kemunduran terutama yang dialami oleh sekolah rakyat swasta yaitu kualitasnya lebih rendah daripada sekolah rakyat negeri. Jika dianalisa hal ini disebabkan karena adanya praktek pendidikan yang dilakukan oleh zending ganda yang berkarya di suatu daerah yang sama sehingga muncul persaingan yang akan menghambat pertumbuhan sekolah yang ada di daerah tersebut. Contoh yang dapat dilihat pada waktu itu adalah di New Guinea Barat dan Selatan, sedangkan daerah Mimika perkembangannya stabil, namun tidak menutup kemungkinan akan mengalami hal yang sama dengan New Guinea barat dan Selatan. Pada perluasan jumlah sekolah rakyat telah diakhiri di sini, dengan penerapan peraturan subsidi umum yang baru dan untuk afdeling Ambon dan Ternate aturan-aturan kerja ditetapkan. Dalam surat keputusan para kepala afdeling tersebut, jumlah sekolah rakyat yang perawatannya disetujui bisa

dibakukan. Penurunan jumlah ini mungkin terjadi dan juga bisa dilaksanakan apabila sekolah ini tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sementara itu penambahan sekolah masih belum diperkenankan.

Yang paling penting pendidikan rakyat adalah perjalanan direktur pendidikan pada bulan September dan Oktober 1932. Penelitian tentang pendidikan ini dimana pada tahun 1931 pembicaraan awal telah diadakan baru berhasil selama perjalanan ini setelah sejumlah pembicaraan bersama para wakil berbagai lembaga dilakukan. Jumlah sekolah rakyat pada tanggal 1 April milik pemerintah menunjukkan 67 sementara daerah 46; sekolah rakyat Kristen 166, milik Yayasan Zending 178 dan Katolik 64. Disini 31 sekolah rakyat yang tidak bersubsidi dipertahankan oleh ketika lembaga itu, yang menunjukkan jumlah 832 sekolah rakyat di wilayah Maluku. (*Mvo Gubernur Maluku R. J. Koppenol April 1934, koleksi Mvo seri 2, rel nomer 26 Arsip Nasional RI Jakarta. hl 63*) jumlah subsidi bagi pendidikan rakyat swasta sekitar 208.000 gulden pada tahun 1932 yang turun menjadi 122.000 gulden pada tahun 1933. Untuk itu peraturan gaji baru bagi guru sekolah rakyat telah ikut mendukung. Aturan ini dirubah dan ditetapkan kembali setelah 1 April 1934 dimana para guru sekolah rakyat pribumi yang bekerja di New Guinea menduduki posisi yang sangat khusus dan digaji lebih rendah daripada rekan-rekannya di daerah lain. Tujuan akhir yakni pembiayaan pendidikan rakyat oleh penguasa pribumi bagi daerah Maluku masih belum bisa tercapai.

Kondisi keuangan kas setempat dan daya pikol penduduk menunjukkan bahwa gaji guru sebagian besar bisa dibayar berkat subsidi pemerintah. Dana ini dikelola oleh suatu komisi yang dipimpin oleh kepala onderafdeling sebagai anggota perwakilan dari pendidikan rakyat swasta yang bersubsidi dan negara. Konsep peraturan itu kini menjadi tanggungan nasehat yang akan dikirim kepada yang bersangkutan. Terlepas dari pelaksanaan peraturan ini memang juga setiap tahunnya perhitungan dibuat dengan para pengelola sekolah melalui dana subsidi yang diberikan, sementara untuk saat ini pemberian subsidi dilakukan oleh pejabat inspektur pendidikan pribumi atas nama dua kepala afdeling yang diserahkan berdasarkan beberapa permintaan dan anggaran yang diajukan. Anggaran mengenai sekolah rakyat negeri di wilayah daerah dan pemerintah juga dibahas oleh inspektur.

Kursus pendidikan bagi guru rakyat atau kursus normal bertujuan untuk melengkapi perluasan jumlah guru sekolah rakyat dan pembentukan guru pribumi. Sampai sekarang jabatan guru sebagian besar diisi oleh orang Ambon dan Manado. Proyek ini di luar Ambon dan Uliaser, ini mereka melayani guru Hindia, gereja Hindia dan yayasan zending di seluruh Maluku dan juga ada orang lain yang sulit untuk mencarinya. Tingkat perkembangan dan peradaban dari penduduk di berbagai bagian wilayah pemerintah menunjukkan bahwa mereka tidak bisa mengharapkan penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah bisa menggaji guru. Hal itu berarti kebijakan pemerintah sangat diperlukan agar sekolah rakyat menjadi bagian integral dari masyarakat sebagai ganti disamping masyarakat seperti yang terjadi di beberapa daerah saat itu. Dengan melihat tujuan tersebut maka pemerintah mengadakan kursus pendidikan di daerah Papua dan di daerah Kei serta Tanimbar dengan tujuan untuk mendidik para guru.

Dalam kaitan ini usaha dari guru Zending di Mieï perlu yang bertujuan untuk menjadikan sekolah sebagai bagian dari masyarakat, mencoba mencapainya dengan membuka jalan baru oleh mereka dan dirancang dalam rencana pendidikan yang untuk persetujuan disampaikan kepada direktur pendidikan dan bisa diterapkan di 10 sekolah yang terletak di sekitar Teluk Wandamen (*Mvo Gubernur Maluku R.J. Koppenol April 1934, koleksi Mvo seri 2, rel nomer 26 Arsip Nasional RI Jakarta. bl 65*). Kursus pendidikan negara tidak terdapat di Maluku, kecuali 4, yakni kursus yayasan zending di Mieï untuk sekolah di New Guinea Barat dan Utara, kursus Katolik di Langgur untuk sekolah di Kei, Tanimbar dan New Guinea Barat Laut, kursus Katolik di Ambon dan Tual. Menurut laporan tertulis jumlah sekolah Cina terdapat 18 dan jumlah sekolah Arab ada 7.

Jumlah sekolah rakyat tahun 1931 dan 1936 adalah 911 dan 940 ditambah 47 sekolah pedalaman termasuk 109 dan 160 sekolah negeri. Sementara itu kenaikan pesat jumlah sekolah negeri menciptakan kesan tidak benar, karena sejumlah besar yaitu 66 termasuk sekolah rakyat dan sekolah klas-2 yang diubah menjadi sekolah lanjutan. Perlu ditunjukkan adanya kesulitan besar tetapi hampir tidak bisa terselesaikan. Ada keinginan umum bahwa pendidikan rakyat diberikan dalam bahasa daerah. Tetapi terwujudnya pemikiran ini di berbagai daerah terbentur pada kondisi bahwa daerah bahasa ini sangat kecil (*MvO van Haga 1937 dalam van Fraassen, ed. 1997³: 526*).

Minat terhadap sekolah untuk masyarakat Maluku Tengah sangat tinggi karena dengan mengenyam pendidikan akan meningkatkan status mereka di mata masyarakat sehingga setiap tahun banyak siswa yang ditolak baik untuk masuk sekolah Eropa maupun sekolah pribumi. Hal ini terutama disebabkan oleh sejumlah besar mereka yang disamakan dengan orang Eropa (anak dari ayah pribumi dengan ibu Eropa) dan kembalinya para pensiunan militer yang anak-anaknya memasuki sekolah HIS khusus bagi anak-anak militer di tempat lain. Mereka semua menghendaki agar anak-anaknya bisa memasuki sekolah Eropa atau setidaknya HIS. Anak-anak pensiunan ini terutama juga menerima pendidikan HIS dan bisa dipahami bila orangtuanya tidak ingin menempatkan mereka di sekolah pribumi. Dengan demikian jika bagi anak-anak pensiunan ini *Ambonsche Burgerschool* menjadi sebuah sekolah, kategori lain berhak diterima masuk sekolah Eropa, di mana juga oleh Departemen Pendidikan ijin diberikan bagi anak-anak Cina, suatu tindakan penghematan untuk lolos dari kebutuhan bagi pendirian HCS di ibukota. Tetapi kondisi ini mengakibatkan bahwa baik 8 Sekolah Eropa maupun 3 HIS setiap tahun harus menolak sejumlah besar siswa.

Selanjutnya keberatan terasa terhadap pendidikan anak-anak Ambon di sekolah Eropa, karena di rumah anak-anak ini menggunakan bahasa Melayu dan harus menerima pendidikan awal dari para guru Eropa yang tidak menguasai bahasa itu sementara anak-anak pensiunan tidak berhak untuk diterima di sekolah ini. Pada saat itu tampak menurut aturan-aturan bagi sekolah Eropa, anak-anak yang bisa memberikan bukti bahwa mereka tidak dapat meneruskan pendidikan ini tidak boleh diusir, sehingga seleksi murid tidak terjadi dan para calon yang cerdas ditolak karena kekurangan tempat. Akhirnya anak-anak yang berasal dari sekolah Eropa tidak memahami bahasa Melayu yang menjadi kesulitan dalam mencari pekerjaan.

Kondisi ini memberi alasan bagi Dewan Ambon pada tahun 1923 untuk menerima mosi dengan suara bulat yaitu meminta kepada Direktur Pendidikan untuk mengubah sekolah Eropa Kelas Dua dan Kelas 3 menjadi HIS. Perubahan ini menimbulkan beban tanggung jawab di kalangan dunia Eropa di ibukota (yang kondisinya sebelumnya telah disebutkan) dan cabang *Indo-Europesche Verbond* di ibukota mengadakan rapat di mana terdapat protes keras terhadap perubahan ini. Sejak itu oleh Inspektur Pendidikan Tinggi usul-usul diajukan setelah berunding dengan IEV untuk mengatasi keberatan tersebut dengan tetap mempertahankan

sifat Eropa di kedua sekolah ini. Usul-usul ini diterima setelah pembicaraan lama dengan IFEV, meskipun sekolah ini ternyata hanya di atas kertas bersifat Eropa.

Tindakan yang diusulkan adalah mengganti beberapa pengajar Eropa dengan tenaga pribumi, penerapan bahasa Melayu sebagai pelajaran, perubahan aturan dalam arti bahwa seorang siswa yang telah belajar dua kali di kelas yang sama dan tidak bisa beralih ke kelas yang lebih tinggi bisa dikeluarkan, dan hak untuk masuk bagi anak-anak pensiunan militer yang kembali. Apabila tindakan ini diambil, semua keberatan bisa diatasi sementara nama sekolah itu tetap Eropa (*MvO van Schmidt* 1924 dalam van Fraassen, ed. 1997²: 480-1).

Di sekolah-sekolah bagi pendidikan dasar Barat di Ambon, dengan perkecualian sekolah Kelas 1 Eropa di Ambon terutama harus memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak pejabat dan militer pribumi, juga di luar ibukota. Sehubungan dengan itu dua persoalan menarik perhatian: penampungan anak-anak, dan cara pembayaran biayanya. Tentang persoalan pertama perlu disampaikan bahwa penampungan anak-anak di asrama tidaklah ideal. Perlu diperhitungkan apakah tidak mungkin untuk membangun sebuah asrama, lebih suka dengan subsidi pemerintah dan jika mungkin dengan bantuan dewan kotapraja dan dewan Ambon. Asrama ini bisa tumbuh di bawah kepemimpinan keluarga Eropa. Mungkin juga Gereja Hindia di sini memberikan bantuan. Dipenuhinya kebutuhan pegawai pribumi sebagai aparat, pengawas sekolah, guru, militer dan sebagainya yang sering bertahun-tahun lamanya ternyata hidup di tempat yang jauh dan melakukan pekerjaan yang baik demi kepentingan pemerintah, setidaknya bisa dibenarkan.

Mengenai persoalan kedua tersebut, perlu dinyatakan bahwa orangtua anak-anak yang berangkat ke sekolah di sini sering melakukan perjalanan yang sangat jauh sehingga mereka tetap tidak mampu untuk mengirimkan uang asrama tepat waktu yang disisihkan dari gajinya, sementara kiriman uang ini juga berulang kali menimbulkan biaya dan banyak kesulitan. Pertanyaan apakah tidak mungkin untuk menempatkan para pegawai ini secara gratis dengan cara seperti yang untuk itu ada kesempatan berangkat ke Belanda bagi para pegawai Eropa, karena itu diperlukan pertimbangan serius (*MvO van Tideman* 1930 dalam van Fraassen, ed. 1997³: 125).

Pendidikan pribumi di bawah pengawasan umum inspektur pendidikan di wilayah dengan kedudukan di Ambon. Inspektur ini dibantu oleh penilik

sekolah pribumi yang diangkat dan ditempatkan oleh inspektur pendidikan dan agama dan yang daerah kerjanya diatur lebih lanjut oleh inspektur. Cabang pendidikan ini sangat penting bagi wilayah tersebut dan wilayah ini dalam konteks pendidikan sangat diutamakan. Dari situ terbukti bahwa setiap tahun untuk gaji tenaga pengajar pada pendidikan negeri dan pendidikan umum dan bagi subsidi untuk pendidikan swasta mencapai kira-kira 300.000 yang dibayarkan oleh Negara. Pada semua sekolah pemerintah terdapat sebuah perpustakaan rakyat; pengelolanya adalah kepala sekolah yang meminjamkan buku dengan uang pinjam murah. Perpustakaan memuat buku-buku dalam berbagai bidang dan dalam bahasa Melayu. Melalui campur tangan inspektur pendidikan pribumi juga semua lembaga swasta dimana para guru sekolah rakyat dididik menerima perpustakaan dan juga semua sekolah standard an akhirnya pada para pengelola sekolah rakyat demi kepentingan tenaga pendidik bagi sekolah itu.

Pengawasan lokal dijalankan oleh Komisi sekolah yang disusun dengan cara yang sesuai seperti pada sekolah Eropa. Pengawasan atas pendidikan yang diberikan oleh orang pribumi kepada orang pribumi berlangsung lewat peraturan yang dimuat dalam Lembaran Negara 1923 no. 136 yang ketentuannya disampaikan kepada kepala pemerintah wilayah. Campur tangan ini seperti wewenang yang diberikan kepada kepala pemerintah wilayah dalam Lembaran Negara tersebut digunakan demi kepentingan ketertiban umum tentang larangan pendidikan terhadap seorang guru tertentu, juga setelah 1 Januari 1926 menurut Lembaran Negara 1925 no. 433 diserahkan kepada Gubernur. Pembuatan larangan ini belum diperlukan. Jumlah pemberitahuan yang sampai saat ini dicatat di kantor wilayah mencapai dengan perkecualian sebuah sekolah di Dobo (sekolah Cina), semua sekolah berpusat di Saparua (termasuk sebuah sekolah Cina). Akhirnya perlu disebutkan yayasan Arab Mohasan Alchalak (disetujui dengan Keputusan Pemerintah tanggal 19 Mei 1910 no 68) (*MrO van Sandick* 1926 dalam Fraassen, ed. 1997²: 613).

Pada tahun-tahun selanjutnya pengawasan atas sekolah pribumi di wilayah pemerintahan Maluku diserahkan kepada Inspektur Pengganti Pendidikan Pribumi di Resort 5 di Ambon, yang juga diserahi untuk mengawasi sekolah Pendidikan Dasar Barat tanpa mengurangi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Pendidikan Dasar Barat di resort 5. Sehubungan dengan pendidikan pribumi, inspektur itu dibantu dalam melaksanakan tugasnya oleh seorang

penilik kepala. Untuk itu resort inspeksi dibagi menjadi 12 daerah penilikan sekolah: daerah Ambon dengan kedudukan penilik di ibukota Ambon, daerah Saparua dengan kedudukan penilik di Saparua, daerah Seram dengan kedudukan penilik di Piru (*MvO van Keppenol* 1934 dalam van Fraassen, ed. 1997³: 306).

Kenaikan uang sekolah, di mana uang sekolah minimum (terlepas dari mereka yang gratis) ditetapkan dari 15 sen menjadi 25 sen per bulan (suatu jumlah yang tidak kecil apabila orang menyelidiki bahwa setiap negori tidak mampu membayar pajak tahunan untuk menutup gaji para guru selama sebulan) menimbulkan penurunan di sekolah, tetapi terutama lebih disebabkan oleh perlawanan dari pihak orangtua dibandingkan karena ketidakmampuannya. Yang jauh lebih terasa adalah tekanan kenaikan uang sekolah yang bertumpu pada prinsip lain pada orangtua yang anak-anaknya memasuki HIS atau *Ambonsche Burgerschool* (di Hindia Belanda sejak 1 Januari 1924 menurut garis ini uang sekolah dinaikkan. Untuk HIS pemerintah bagi setiap anak pertama dari satu keluarga yang orang tuanya menerima penghasilan bulanan tidak kurang dari 175 gulden per bulan, kenaikan terjadi dari 1,00 gulden menjadi 3,00 gulden per bulan). Lembaga pendidikan ini telah menghasilkan sejumlah besar tenaga kerja bagi pemerintah dan diharapkan agar peraturan uang sekolah yang lebih tinggi bagi lembaga ini diubah agar tidak begitu menekan. Sebuah sekolah milik Dana Studi Ambon dan sejumlah sekolah swasta kecil masih memasok pendidikan bagi anak-anaknya yang tidak mendapatkan pendidikan di sekolah lain. Jumlah anak yang menerima pendidikan di ibukota mencapai 3000 orang.

Jumlah sekolah cukup besar sehingga kebutuhan bagi pendidikan Barat dengan bahasa Belanda sebagai pengantar bisa terpenuhi. Tidak bisa dibantah bahwa apabila sekarang ini ada sejumlah sekolah dengan pendidikan dasar Barat dibuka, juga semua itu akan penuh. Dorongan bagi anak-anak Ambon untuk mencari pendidikan dengan bahasa Belanda sebagai pengantar bagi anak-anaknya begitu besar sehingga berulang kali kehidupan keluarga dikorbankan dan sebagian besar pendapatan digunakan (*MvO van Keppenol* 1934 dalam van Fraassen, ed. 1997³: 308).

Meskipun melalui pemberian peringkat penghematan penting bisa dicapai, dari situ terbukti bahwa seluruh jumlah subsidi bagi pendidikan rakyat swasta sekitar 208.000 gulden pada tahun 1932 turun menjadi 122.000 gulden pada tahun 1933. Untuk itu juga peraturan gaji baru bagi sekolah rakyat juga ikut

membantu. Peraturan ini diperbaharui dan ditetapkan kembali sejak 1 April 1934 di mana para guru rakyat pribumi yang bekerja di New Guinea menduduki posisi khusus dan bergaji lebih rendah daripada rekan-rekannya di daerah lain. Tujuan akhirnya, swadaya dalam sekolah rakyat, di wilayah Maluku masih jauh dari harapan. Dana ini dikelola oleh sebuah komisi yang dipimpin oleh kepala Onderafdeeling dan sebagai anggotanya adalah para penilik sekolah dan wakil resort dari pendidikan rakyat pemerintah dan bersubsidi. Konsep peraturan ini dikirimkan sebagai nasehat kepada yang bersangkutan. Terlepas dari pelaksanaan peraturan ini, memang kini setiap tahun perhitungan dibuat tentang uang subsidi bersama para pengelola sekolah, sementara pemberian subsidi pada pejabat Inspektur Pendidikan Pribumi atas nama kepala Afdeeling terjadi berdasarkan permohonan dan anggaran yang diajukan. Anggaran mengenai sekolah rakyat negeri bagi sekolah pemerintah dan daerah juga ditangani oleh inspektur (*M/O van Keppenol* 1934 dalam van Fraassen, ed. 1997³: 310).

Tabel 9
Jenis Sekolah Rakyat di Maluku
(1934)

NO.	JENIS SEKOLAH RAKYAT (PER 1 APRIL 1934)	JUMLAH
1.	Sekolah Rakyat Negeri (Pemerintah)	63
2.	Sekolah Rakyat Negeri (Daerah)	46
3.	Sekolah Rakyat Gereja Hindia Bersubsidi	166
4.	Sekolah Rakyat Zending Utrecht Bersubsidi	178
5.	Sekolah Rakyat Katolik Bersubsidi	64
Total		521

Sumber: van Fraassen (ed.) 1997 [III]: 3.

BAB V

PENDIDIKAN PADA MASA
PENDUDUKAN JEPANG

V

PENDIDIKAN PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG

5.1 Kebijakan Umum Pemerintah Pendudukan dalam Pendidikan

Akhir tahun 1939 situasi politik internasional menjadi panas akibat di kawasan Eropa meletus Perang Dunia II. Peristiwa itu terjadi setelah Jerman secara mendadak menyerang Polandia tanggal 1 September 1939. Situasi itu berdampak terhadap pemerintah Hindia Belanda, karena negeri Belanda terlibat dalam perang tersebut akibat Jerman juga menyerbu negeri Belanda (Salim 1971: 22, 29-30; Vlekke 1959: 398). Sementara itu, situasi politik di Hindia Belanda makin memanas akibat gerakan kaum nasionalis yang makin meningkat untuk menuntut kemerdekaan tanah air mereka. Tokoh-tokoh pergerakan nasional yang duduk di *Volksraad* (Dewan Rakyat) dan organisasi pergerakan nasional, khususnya partai-partai yang tergabung dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI) menuntut “Indonesia Berparlemen”. Situasi dan kondisi tersebut mendorong Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starckenborgh Stachouwer mengeluarkan pengumuman bahwa sejak tanggal 10 Mei 1940, Hindia Belanda dinyatakan dalam keadaan perang dan partai-partai politik dilarang menyelenggarakan rapat (Depdikbud 1981/1982: 154-155).

Pemerintah Hindia Belanda makin cemas, karena pada 8 Desember 1941 tentara Jepang mengebom Pearl Harbour, pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika di Pasifik (Oyong 2001: 1-3).³⁵ Oleh karena Belanda adalah sekutu Amerika, maka pemerintah Hindia Belanda pun menyatakan perang terhadap Jepang (Onghokham 1989: 165; Poesponegoro dan Notosusanto, ed. 1990: 1). Pemerintah Hindia Belanda di Pulau Ambon mempersiapkan diri untuk menghadapi serang Jepang. Hal itu turut mendorong pemerintah Australia sebagai

³⁵Menurut P. K.Ojong dalam karyanya *Perang Pasifik (2001)*, menjelaskan bahwa serangan mendadak dari 360 pesawat terbang jepang pembom dan pemburu atas Pearl Harbour pada 8 Desember 1941 berhasil menenggelamkan dan merusakkan delapan kapal tempur angkatan Laut Amerika Serikat. Dengan serangan Jepang ini, maka mendadak hilang lenyap superioritas armada Sekutu Inggris, Amerika disemua samudera, kecuali samudera Atlantik.

anggota sekutu untuk membantu Pemerintah Hindia Belanda dari ancaman serangan Jepang ke Maluku, Papua, dan Timor dengan tujuan menghalangi invasi tentara Jepang ke Australia (*Asia Raya*, 31 Maret 1942). Bantuan tentara Australia antara lain ditujukan ke Ambon, karena jumlah tentara Belanda di daerah itu sedikit dan kekurangan peralatan perang. Pada 17 Desember 1941 dua batalyon tentara Australia terdiri dari pasukan Infantri ke 21 dan dibantu oleh Skuadron 13 dari Angkatan Udara bernama *Gulf Force* yang dipimpin langsung oleh Letnan Kolonel Kepits* memasuki Pulau Ambon. Mereka menempati Negeri Amahusu, Laha, Poka, Gunung Nona, Kudamati, Lapangan Terbang Liang di Pantai Utara Pulau Ambon dan Pulau Haruku (Patikaihattu 1991: 1).

Sementara itu, tentara Jepang mengumumkan perang untuk menyerbu Asia Tenggara karena sudah lama mereka ingin menguasai potensi sumber alam yang dimiliki oleh Hindia Belanda. Keinginan itu ditantang oleh Pemerintah Belanda dengan menyatakan perang terhadap pasukan tentara Jepang yang masuk ke Maluku 1 Juni 1942. Serangan tentara Jepang ke Hindia Belanda dimulai pada 10 Januari 1942 (Notosusanto, 1969: 18). Serangan pertama tentara Jepang ke Hindia Belanda ditujukan ke daerah-daerah penghasil minyak antara lain Tarakan, Plaju, dan Sungai Gerong. Dalam waktu singkat tentara Jepang dapat menguasai Sulawesi, sebagian Sumatera, Nusa Tenggara, Maluku, dan Timor, Kupang (Notosusanto 1979: 17). Sejak itu runtuhlah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda termasuk pendidikan yang telah dibina bertahun-tahun di daerah Maluku, dan diganti dengan sistem pendidikan yang dikuasai oleh pemerintah militer Jepang selama 3,5 tahun. Sejak itu pula kebijakan pemerintah militer Jepang untuk menghapuskan sistem pendidikan yang ditanamkan oleh pemerintah Belanda dan memulai menerapkan sistem baru dengan pola pengawasan secara ketat oleh pemerintah militer Jepang di seluruh Bekas Hindia Belanda termasuk daerah Maluku mulai diterapkan.

Setelah Jepang menguasai wilayah Hindia Belanda termasuk daerah Maluku, maka mereka mulai menerapkan strategi politik baru, terutama untuk mengubah seluruh struktur masyarakat yang dibangun oleh pemerintah Kolonial Belanda. Seluruh orang Eropa di daerah Maluku tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas apapun terutama yang berkaitan dengan politik, pemerintahan, sosial budaya maupun ekonomi. Untuk menjalankan roda pemerintahan baru dibawah penguasa balatentra Jepang, mereka mengangkat para pegawai bekas pemerintah

Hindia Belanda untuk bertugas dikantor-kantor, sedangkan guru-guru pribumi ditempatkan pada sekolah-sekolah yang dibuka oleh penguasa militer Jepang dan tetap mendapat pengawasan secara rutin oleh tentara Jepang. Di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda yang telah dikuasai oleh balatentara Jepang, dikeluarkan suatu peraturan yang berlaku umum untuk menerapkan sistem pengajaran bagi rakyat bumiputra. Anjuran tersebut ditujukan kepada rakyat agar mereka dengan kesadaransendiri dapat membangun sekolah rendah, sekolah menengah dan sekolah tinggi bagi kepentingan putra-putri mereka (*Asia Raya*, 3 April 1942).

Menurut pemerintah Balatentara Jepang bahwa melalui pembangunan di bidang pendidikan masyarakat bisa mencapai cita-cita dan kemenangan akhir dari perjuangan bangsa Indonesia, sehingga sangat perlu memperluas pengajaran bagi rakyat dan mengembangkan kebudayaan bangsanya sendiri. Untuk mencapai maksud itu, pemerintah balatentara Jepang menjalankan berbagai kebijakanmenyambut tahun pelajaran baru pada tanggal 1 April 1942 (*Surat khabar Asia-Raya, selasa Kliwon 3 april 1942*). Menurut rencana baru yang ditetapkan berdasarkan tujuan pendidikan yang diprogramkan oleh pemerintah Balatentara Jepang, sebenarnyabertujuan untuk memajukan pendididkanrakyat dengan harapan pendidikan dan kebudayaan bangsa dapat diperluas. Oleh sebab itu menurut pandangan pemerintah balatentara Jepang bahwa untuk memajukan pendidikan bumiputra, rakyat harus mempunyai kemauan sendiri dan dinyatakan dalam bentuk yang nyata. Disamping itu harapan dari pemerintah balatentara Jepang agar rakyat harus membantu kebijakan pemerintah dan diharapkan ada rasa tanggungjawab moral sebagai suatu proses untuk mengembangkan diri sendiri. Untuk merealisasikan rancana pemerintah balatentara Jepang dalam dunia pendidikan saat itu,maka merekamengeluarkan suatu aturan untuk menangani pendidikan sesuai tingkatan, dan berbagai program peningkatan mutu, seperti yang diberitakan oleh surat khabar Asia-Raya selasa 3 april 1942sebagai berikut:

5.1.1 Usaha Memajukan Pengajaran Rendah

Sesuai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran rendah, maka Sekolah Rakyat diselenggarakan sesuai tujuan dan sasaran pengajaran sekolah rendah atau sekolah rakyat. Pendirian sekolah rendah dan seluruh sarana prasarananya didasarkan pada aturan yang berlaku, terutama menyangkut pembagian

lingkungan administratif dimana sekolah itu akan didirikan. Pendirian sekolah rendah harus memperhatikan Sonatau beberapa Ku di dalam Son, sesuai peraturan *Kokumin Gakkoo Gakku* artinya “batas lingkungan pengajaran dari suatu sekolah rakyat”. Sekolah rakyat yang sekian lama diusahakan oleh Ken akan diurus oleh Gakku. Dengan demikian penduduk negeri atau desa dimana sekolah rendah yang akan dibangun lebih merasa bertanggungjawab atas sekolahnya sendiri. Yang menarik dari berita surat khabar ini adalah penjelasan pemerintah balatentra Jepang bahwa dalam tahun pelajaran baru, akan dibangun sekitar 2000 ruang belajar untuk peningkatan mutu pendidikan khususnya bagi murid-murid sekolah rendah (*Asia Raya*, 3 April 1942).

5.1.2 Memajukan Pengajaran Pertengahan

Usaha untuk mendirikan sekolah menengah mulai dilakukan oleh Pemerintah Ken dan Si. Sekolah-sekolah menengah tersebut diperuntukan kepada siswa laki-laki dan perempuan walaupun pada akhirnya minatnya sangat sedikit sekali, sebab adanya aturan sekolah partikelir, yang tidak mengizinkan partikelir mendirikan sekolah-sekolah menengah. Sebagai susunan mendidik kaum pemimpin pertengahan, sangat perlu sekali diperluas pengajaran pertengahan, supaya dilahirkan kaum yang mengambil kedudukan juga amat penting buat meletakkan dasar kemerdekaan, dan begitupun hal itu dinyatakan dengan usul Tyuoo Sangi In ke-7. Dari itu aturan sekolah partikelir hendak diubah, agar dapat diperluas serta diperkuat sekolah pertengahan.

Sekolah pertengahan pemerintah akan dipindahkan kepada Syuu dan disuruh urus dan diusahakan dengan ongkos Syuu. Penambahan sekolah menengah kemudian haripun akan diurus oleh Syuu.

- a. Buat usaha sekolah pertengahan Ken dan Si akan diberi dukungan dana dari Kas pemerintah Jepang
- b. Pemerintah Balatentera, supaya usaha dan dasarnya menjadi teguh, dan juga hendak diatur dengan mudah perluasannya dikemudian hari.
- c. Pendirian sekolah menengah partikelir dan sekolah menengah perempuan partikelir diperkenankan, dan rakyat dianjurkan membantu meluaskan pengajaran pertengahan.

- d. Dalam pelajaran sekolah menengah dan sekolah menengah perempuan akan ditambah bermacam pelajaran industri supaya sekolah demikianpun lantas dapat bekerja dalam masyarakat dengan praktis.

Pada waktu ini sekolah pertengahan berjumlah 70 buah, sedangkan dalam tahun pelajaran ini akan ditambah 14 buah lagi.

5.1.3 Memperluas Sekolah Guru

Untuk memperluas serta memperdalam pengajaran rakyat yang teguh, pendidikan guru sangat penting artinya. Menimbang alasan ini, aturan sekolah guru baru telah ditetapkan.

- 1) Sekolah guru yang didirikan oleh Ken dan Si untuk mendidik guru bagian pertama dari sekolah rakyat kebanyakan kecil usahanya. Syuu akan menggabungkan semua sekolah itu dan mengurus serta mengusahakannya sendiri.
- 2) Sekolah guru pemerintah untuk mendidik guru sekolah rakyat (terhitung bagian rendah dan tinggi) dijadikan sekolah guru pertengahan, dipindahkan kepada Syuu, disuruh mengurus dan mengusahakan oleh Syuu, sedang penambahan dikemudian haripun diserahkan kepada Syuu.
- 3) Perguruan mendidik guru sekolah pertengahan, serta bagian perempuan dari sekolah tersebut dan perguruan mendidik guru urusan rumah tangga yang sekarang dibuka, masing-masing akan dijadikan Sekolah Guru Tinggi Pemerintah dan Sekolah Guru Tinggi Perempuan Pemerintah.
- 4) Di dalam semua sekolah guru diadakan bagian mendidik guru dengan tepoh pendek dan bagian latihan. Dalam tempo pendek akan dididiknya guru sebanyak-banyaknya, juga dilakukan latihan buat kaum guru lama. Selanjutnya dengan ujian pemeriksaan akan diangkat guru-guru yang berkepandaian dengan seluas-luasnya agar keperluan guru dapat lekas dicukupinya dengan sebanyak-banyaknya.

Sekolah guru pertengahan yang kini sudah ada 12 buah dalam tahun ini akan ditambah 6 buah lagi sehingga menjadi 18 buah.

5.1.4 Pembangunan Pengajaran Tinggi

Pengajaran tinggi bermaksud mendidik orang-orang yang berguna yang

menjadi dasar pendirian negara baru. Terutama buat menyokong pergerakan penduduk dalam kalangan industri dan ekonomi, maka akan diadakan aturan *senmon gakkoo*, yaitu suatu *college*. Dengan tindakan itu maka diluaskan dan diperkuat pengajaran tinggi tadi.

- 1) Sekolah Menengah Tinggi Pemerintah akan diserahkan kepada Syuu yang akan mengurus dan mengusahakannya seterusnya. Begitu juga hal penambahannya di kemudian hari.
- 2) Supaya pengajaran itu dapat diluaskan Ken dan Si pun diberi kesempatan untuk mengadakan pengajaran tinggi tersebut.
- 3) Di dalam Zyookyuu Nippongo Gakkoo, yaitu Sekolah Bahasa Nippon Tinggi, diadakan bagian Kootoozitungka, ialah bagian pekerjaan praktis tinggi. Disitu diadakan pengajaran tinggi. Lain daripada itu kini dipertimbangkan pula akan adanya Sekolah Dagang Tinggi buat hari yang akan datang. Selanjutnya dalam tahun pengajaran ini akan diadakan lagi sebuah sekolah Zyookyuu Nippongo Gakkoo.

5.1.5 Soal Pengajaran Partikelir

Adapun pengajaran partikelir yang sekian lama terbatas pada sekolah rakyat partikelir, sekolah industri partikelir dan sekolah rumah tangga partikelir dan yang berdirinya ditentukan dengan badan hukum, mengingat keperluan pembagunan pengajaran rakyat, lebih jauh ditetapkan boleh mendirikan sekolah menengah, sekolah perempuan, sekolah menengah tinggi dan juga *college*, yaitu *Senmon Gakkoo Partikelir*. Juga selain badan hukum, badan yang ditunjuk oleh Gunseikan pun boleh mendirikan sekolah partikelir. Dengan jalan demikian dan sesuai dengan kegiatan penduduk maka pengajaran rakyat dapat diperluas serta diperkuat.

5.1.6 Tindakan Pemberantasan Buta Huruf

Untuk pemberantasan buta huruf susunan pengajaran rendah yang luas perlu diperluas. Tetapi berhubung dengan persiapan dengan alat-alat, ongkos dan lain-lain sebagainya, hal itu sekarang agak susah dilaksanakan dengan segera. Meskipun demikian sebagai tindakan pertama menyampaikan pengharapan tadi, buat tiap-tiap Ku diseluruh Jawa akan didirikan sebuah latihan anak-anak. Dengan mengambil tempo yang baik disitu akan diberikan

pengajaran rendah kepada anak-anak yang sama sekali tidak masuk sekolah. Maksudnya supaya dengan jalan demikian usaha pemberantasan buta huruf yang sangat penting itu diperkuat adanya.

5.1.7 Soal Meneruskan Pelajaran

Untuk mendidik orang yang bisa bekerja di kemudian hari dan yang kependaiannya terpendam berhubung dengan kekurangan ongkos pelajaran, kini sudah diadakan sistem meneruskan pelajaran buat murid-murid sekolah menengah tinggi, *senmon gakkoo (college)* dan *daigaku* (sekolah tinggi). Tetapi sistem itu sekarang akan diperluas buat murid-murid sekolah pertengahan juga. Adapun yang mengenai urusan yang pertama akan diatur oleh *Djawa Hookoo Kai Honbu*, sedang urusan yang kedua dijalankan oleh *Hookoo Kai Honbu Djawa Hookoo Kai* akan mengadakan asrama bagi murid-murid yang kekurangan ongkos pelajaran, supaya sistem meneruskan pelajaran tadi dapat diperluas adanya.

5.2 Sistem Pendidikan Pemerintah Pendudukan Jepang

Masalah sosial yang sangat mengalami perubahan secara menyeluruh pada waktu itu adalah bidang pendidikan, karena bidang ini dipakai oleh pemerintah militer jepang untuk menjalankan misi propaganda mereka tanpa memperdulikan ketrampilan dan peningkatan sumber daya manusia yang telah terbina pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sasaran mereka terutama adalah melalui media pendidikan para guru dan anak didik dapat memahami tujuan kedatangan Jepang sebagai pelindung bangsa Asia dan akan membebaskan Hindia Timur dari belenggu penjajahan Belanda. Konsep ini ditanamkan dan diwajibkan kepada guru dan anak didik untuk menyampaikannya kepada orang tua dan masyarakat secara luas agar tersosialisasi secara baik.

Strategi ini dianggap sebagai propaganda anti-pemerintah Hindia Belanda dan merupakan salah satu manajemen perang untuk membantu militer Jepang dalam memerangi pihak sekutu selama berlangsungnya perang Asia Timur Raya. Jepang menanamkan konsep idenditas kebersamaan sebagai satu ras dan satu kawasan yang perlu dipahami oleh masyarakat di seluruh kawasan Hindia Timur termasuk di daerah Maluku. Nilai positif dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah militer Jepang dalam bidang pendidikan adalah menghilangkan

diskriminasi yang sejak lama diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan klasifikasi kulit putih (Eropa), Timur Asing (Cina, India, Arab), dan kelompok pribumi (Isnaeni dan Apid 2008 : 40).

Sistem diskriminasi dalam bidang pendidikan dihapus oleh pemerintah Jepang karena Jepang menghendaki setiap orang dari lapisan manapun berhak mengikuti pendidikan formal. Penghapusan sistem pendidikan yang bersifat elitisme yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebenarnya mempunyai pengaruh langsung terhadap tujuan perang saat itu. Sasaran pemerintah Jepang saat itu adalah menghilangkan kebudayaan barat yang ditanamkan kepada masyarakat di Maluku dan memberikan kesempatan secara terbuka untuk semua lapisan masyarakat untuk mengikuti pendidikan. Salah satu sistem pendidikan yang dibangun oleh Pemerintah militer Jepang di Hindia Timur adalah menerapkan jenjang pendidikan formal seperti di negerinya yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun dan sampai saat ini masih dipertahankan oleh pemerintah Indonesia sebagai satu bentuk warisan zaman Jepang.

Mata pelajaran yang diajarkan kepada para siswa disekolah dasar setelah aktivitas awal dipagi hari berupa menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, menaikkan bendera Hinomaru, penghormatan kepada kaisar Jepang Teno Heika, sumpah setia kepada Asia Raya (Dai Toa), dan pelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sedangkan bahasa Jepang adalah pelajaran wajib. Satu hal yang dianggap lemah dari sistem pendidikan Jepang saat itu adalah pengajaran dan kurikulumnya yang hanya bertujuan untuk kepentingan perang. Para siswa diwajibkan untuk mengikuti latihan dasar kemiliteran dan menghafal lagu kebangsaan Jepang serta wajib berbahasa Jepang dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar menggantikan bahasa Belanda (Isnaeni dan Apid; 2008 : 40-42). Untuk misi yang dicita-citakan oleh Pemerintah militer Jepang dapat terlaksana maka, mereka mengeluarkan maklumat khusus untuk menggantikan bahasa Belanda Sebagai bahasa pengantar karena dianggap melemahkan mereka dalam strategi perang.

5.3 Kemunduran Pendidikan

Dari gambaran mengenai kondisi pendidikan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada dua sisi yang perlu dicermati yaitu *pertama* kelebihan dari sistem pendidikan pada zaman pemerintah Hindia Belanda adalah bersifat liberal

namun terbatas karena lebih diperuntukan kepada kaum bangsawan dan menengah. *Kedua* pada zaman pemerintah Jepang sistem pendidikan dijalankan secara terbuka dan diberikan kebebasan untuk setiap kalangan manapun tanpa ada unsur diskriminasi. Namun disatu sisi pendidikan pada zaman Jepang terjadi penurunan mutu atau kualitas yang sangat drastis, baik bagi para siswa maupun para gurunya. Kondisi seperti ini sangat terkait dengan strategi pemerintah Jepang untuk menghasilkan tenaga-tenaga perang yang dapat membantu mereka dalam menjalankan misi gerakan tiga A untuk seluruh kawasan Asia, sehingga mutu pendidikan bukan menjadi target tetapi tenaga trampil dalam medan perang yang menjadi sasaran utama dalam sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang saat itu. Dari gambaran kesimpulan diatas hampir semua sumber yang menyoroti masalah pendidikan di Indonesia zaman Jepang memberikan keterangan yang sama mengenai keterpurukan pendidikan dan pada akhirnya menimbulkan penurunan mutu yang drastis. (Isnaeni dan Apid 2008: 42)

Daerah Maluku termasuk salah satu wilayah yang tidak terlepas dari strategi pemerintah Jepang dalam menjalankan sistem pendidikan mereka di seluruh Hindia Belanda. Sistem penerapan pendidikan di daerah Maluku pada zaman pendudukan Jepang sampai berakhirnya masa penjajahan Jepang, memiliki pengalaman sejarah yang sangat menarik, terutama mengenai perkembangan pengajaran yang diterapkan oleh penguasa militer Jepang yang pernah dialami oleh masyarakat di daerah Maluku. Kurangnya tenaga pengajar akibat perang merupakan salah satu penyebab merosotnya mutu pendidikan saat itu (Leirissa 1975: 96).

Dari berita surat kabar diketahui bahwa pemerintah balatendra Jepang menyampaikan maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah sipil Jepang di Kota Ambon kepada seluruh masyarakat di daerah Maluku mengenai pembukaan kembali sekolah-sekolah yang ditutup pada waktu perang berlangsung antara Jepang dengan pihak sekutu. Surat yang ditanda tangani oleh P. Lawalata mewakili pemerintah Jepang di Kota Ambon menerangkan bahwa daerah Maluku telah diizinkan untuk melakukan aktivitas belajar mengajar seperti biasanya. Bekas murid sekolah Normal yang tidak bersekolah akibat perang berlangsung akan diterima tanpa mengikuti ujian masuk dan akan dinaikan pada kelas yang lebih tinggi apabila sudah pernah duduk dikelas pertama. Syarat-syarat yang perlu

dipenuhi oleh siswa adalah wajib membawa surat keterangan kelakuan baik dari kepala sekolah dan raja negeri dimana peserta didik berasal, serta surat keterangan dokter mengenai kesehatan siswa yang bersangkutan. Surat keterangan dokter dapat diurus di Kota Ambon kalau mendapat kesulitan di negeri tempat kediaman calon murid (*Sinar Matahari*, 30 Januari 1943)

Dimintakan segera kepada bekas murid sekolah Normal yang tersebar di seluruh negeri-negeri agar segera mendaftarkan diri di kantor *Minseibu* bagi yang berminat untuk bersekolah lagi. Menyangkut pengurusan keberangkatan ke Makasar akan diurus oleh pemerintah (*Sinar Matahari*, 30 Januari 1945). Sejak berlakunya Maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah sipil Jepang di Ambon saat itu, maka sekolah-sekolah yang sarana belajarnya tidak megalami kerusakan mulai kembali melakukan aktivitasnya seperti semula walaupun dengan perasaan yang tidak menentu. Pada awalnya hampir tidak ada murid yang berminat untuk mengikuti pendidikan karena kondisi keamanan yang tidak menentu dan kondisi ekonomi sangat terpuruk. Umumnya sekolah di zaman Jepang lebih banyak digunakan sebagai sarana propaganda untuk mengindoktrinasi para murid. Guru-guru sekolah tetap diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas mengajarnya seperti biasa pada sekolah-sekolah yang telah ada semasa pemerintah Belanda yang tidak rusak di hantam bom pada waktu pendaratan tentara Jepang maupun Sekutu (*Sinar Matahari*, 30 Januari 1943).

Ada sedikit perbedaan sistem pendidikan yang dijalankan oleh Jepang, yaitu tidak ada perbedaan berdasarkan stratifikasi seperti pada masa Belanda karena lembaga pendidikan terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Lewat sekolah-sekolah, penyelenggaraan kursus bahasa Jepang dan latihan-latihan militer dijalankan dengan pola disiplin. Banyak sekolah dizaman pendudukan Jepang dijadikan sebagai tempat propaganda militer Jepang untuk kepentingan kekuasaannya. Masyarakat dilarang menggunakan bahasa Belanda, bahkan buku-buku berbahasa Belanda dibakar. Semua sekolah HIS, dan MULO ditutup, dan untuk sementara Bahasa Indonesia dan Melayu Ambon digunakan sebagai bahasa resmi di setiap sekolah. Secara perlahan-lahan Jepang menerapkan pemberlakuan bahasa Jepang di setiap sekolah maupun kantor-kantor pemerintah dan swasta sebagai bahasa pengantar.

Surat kabar *Sinar Matahari* memberitakan suatu seruan yang dikeluarkan oleh pemerintah militer Jepang dan disebar luaskan oleh pemerintah sipil

di Ambon yang isinya menjelaskan bahwa “Kami percaya Dai Nipon Akan memimpin seluruh Asia maka bahasa Nipon mesti menjadi bahasa dasar Asia Raya”. Dalam seruan itu ditegaskan bahwa kami orang-orang Indonesia harus mempelajari bahasa Nipon dengan rajin di setiap sekolah yang telah dibuka oleh pemerintah Nipon karena mengingat: (1) Bahasa Nipon adalah jembatan yang menghubungkan tali persaudaraan Nipon Indonesia, (2) Bahasa Nipon sekarang ini dalam berbagai segi kehidupan sangat berguna dan berfaedah, (3) Bahasa Nipon dalam pergaulan dan berbagai aktivitas kehidupan tak dapat terpisah malah sebaliknya terkait erat antara Nipon Indonesia (*Sinar Matahari*, 11 Februari 1943).

Imbauan tersebut disebarakan secara luas bahkan disetiap sekolah guru dan murid-murid diwajibkan untuk menyampaikan himbawan itu kepada orang tua dan masyarakat umum yang mereka kenal. Sistem pendidikan yang lebih mengarah pada propaganda penanaman sikap dan ketaatan terhadap pemerintah dan bangsa Jepang terlihat saat siswa dan para guru setiap pagi diwajibkan untuk menaikan bendera Jepang Hinomaru, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang *Kimigayo*, dan menghormati kaisar Jepang di Tokyo dengan mengheningkan cipta ke arah Timur (*Sinar Matahari*, 11 Februari 1943). Pendidikan saat itu mengalami banyak kendala terutama disebabkan karena banyak bangunan sekolah yang rusak selama perang dan tenaga-tenaga guru profesional banyak yang dibunuh oleh tentara Jepang selama perang berlangsung, bahkan ada yang keluar meninggalkan daerah Maluku terutama ke Australia dan negeri Belanda.

Di Keresidenan Ternate Maluku Utara, setelah Jepang menduduki daerah ini seluruh aktivitas pendidikan tidak berjalan karena sekolah-sekolah ditutup dan para guru tidak melaksanakan tugas akibat perang yang melanda daerah tersebut. Banyak pemuda di daerah ini direkrut oleh tentara Jepang sebagai tenaga bantuan perang dalam menghadapi pihak sekutu sehingga pendidikan tidak pernah dilaksanakan. Dari beberapa catatan sejarah diperoleh keterangan bahwa pendidikan di Ternate baru dibuka pada tahun 1943 oleh pemerintah Jepang, sedangkan di pelosok-pelosok tidak dapat dilaksanakan. Beberapa sekolah di kota Ternate dipimpin oleh tenaga-tenaga guru pribumi sedangkan beberapa orang tentara Jepang bertugas untuk mengajar bahasa Jepang dan memberikan propaganda anti bangsa Barat. Pendidikan yang diberikan kepada anak didik berorientasi pada pembentukan karakter anak didik untuk mengenal

dan mencintai Jepang sebagai kaum pembebas dari belenggu penjajahan Barat. Hal yang sama juga terjadi dalam bidang budaya khususnya drama-drama yang diperankan oleh para kaum muda yang disebut panggung keliling mengandung propaganda Jepang terhadap pihak Barat. Intinya adalah pengaruh budaya Barat yang telah lama dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat Maluku diganti dengan kebiasaan bangsa Jepang walaupun belum begitu banyak diserap oleh masyarakat secara luas.

Di Kota Piru yang terletak di Seram Barat, sarana dan prasarana pendidikan pada saat itu hancur berat sehingga aktivitas pendidikan tidak dilaksanakan pada awal kedatangan pasukan Jepang, namun setelah tahun 1943 ada perhatian untuk membuka kembali sebuah sekolah di daerah itu oleh pemerintah Jepang. Menyangkut hal ini berita surat kabar Sinar Matahari 13 Februari 1943 meguraikan bahwa di kota Piru Seram Barat dr. Dunda seorang petugas kesehatan Jepang berstatus sebagai seorang dokter umum, namun ia turut membina sebuah sekolah yang dibangun oleh pemerintah Jepang, dan ia juga ikut mengajar anak-anak di sekolah tersebut. Dr Dunda bertugas di Piru selama satu tahun dan turut mengajar di sekolah yang diberi nama oleh pemerintah Jepang “Semporna” selama satu tahun, kemudian ia dipindahkan ke Ambon bersama keluarganya pada 8 Februari 1943 (*Sinar Matahari*, 13 Februari 1943).

Sekolah ini pernah dikunjungi oleh pimpinan militer Jepang tuan Hatakiana bersama rombongan yang datang dari kota Ambon dan mereka disambut dengan lagu-lagu *Nipon* serta peragaan senam *Taiso* oleh murid-murid sekolah (*Sinar Matahari*, 13 Februari 1943). Selama perang berlangsung antara sekutu dan Jepang, aktivitas pendidikan di kota Piru tidak berjalan dengan baik sehingga banyak siswa sekolah rakyat yang semula dibina oleh pemerintah Hindia Belanda pindah ke Saparua dan Ambon untuk mengikuti pendidikan di kedua daerah tersebut karena tidak ada guru saat itu. Para siswa yang pindah ke Ambon dan Saparua, banyak yang bertahan sampai kemenangan sekutu bahkan kemerdekaan Indonesia diumumkan (*Sinar Matahari*, 13 Februari 1943).

Lebih menyedihkan lagi bagi sekolah-sekolah pendidikan pribumi dibagian Tenggara kepulauan Maluku terutama Kei, Tanimbar, Aru, Kisar dan beberapa pulau di wilayah Selatan Daya. Sekolah-sekolah di wilayah ini sangat terpuruk pada masa pendudukan Jepang karena banyak tenaga pengajar dan penilik sekolah didaerah ini dihukum mati sehingga untuk menatanya memerlukan waktu dan

perhatian yang serius. Untungnya gedung-gedung sekolah di wilayah tersebut tetap utuh karena tidak dihantam bom. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di Pulau Selaru, wilayah terluar yang berbatasan dengan negara Australia ini, mengatakan bahwa guru atau yang disebut oleh Jepang *Sin Sei* di pulau ini, semuanya adalah orang pribumi sehingga mereka mendapat perlakuan baik dari tentara Jepang (E. I. Saineran, wawancara, 27 Februari 2011).

Beberapa orang guru berkebangsaan Jepang masih dikenang oleh beberapa informan semasa mereka dididik seperti Kubos Heco dan Sato Gonso yang sering memberikan pelajaran propaganda untuk menanamkan rasa benci terhadap bangsa Barat. Selain menanamkan sikap anti bangsa Barat, mereka memberikan penerangan mengenai keberadaan Jepang sebagai pemimpin Asia, Pelindung Asia, dan cahaya Asia. Pola pengajaran ini bertahan sampai pada waktu berakhirnya perang Asia Timur Raya dengan peristiwa Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat.

BAB VI
PENDIDIKAN PADA
MASA KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA

VI PENDIDIKAN PADA MASA KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

6.1 Kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku dalam Pendidikan

Kekalahan Jepang terhadap Sekutu merupakan momen sejarah yang sangat berharga bagi kaum nasionalis di wilayah Hindia Belanda untuk memerdekakan diri dan membentuk sebuah bangsa yang merdeka lepas dari belunggu penjajahan. Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari yang bersejarah bagi masyarakat di Maluku karena secara *de Jure* daerah di bagian Timur Nusantara ini menjadi bagian dari negara Republik Indonesia yang baru diproklamkan. Hasil rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 19 Agustus 1945, mengenai “Pengaturan Daerah, Kementrian, dan Tentara kebangsaan”, memutuskan bahwa untuk sementara daerah negara Indonesia dibagi dalam 8 provinsi yang masing-masing daerah dikepalai oleh seorang Gubernur. Berdasarkan Pasal 18 berikut Pasal I dan II Aturan Peralihan UUD 1945 serta Peraturan Pemerintah No 2 tahun 1945 ditetapkan antara lain (1) Wilayah negara republik Indonesia dibagi dalam provinsi-provinsi yang terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Boneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil.

Wilayah Provinsi dibagi kedalam kresidenan dan dikepalai oleh residen. Gubernur dan residen dibantu oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah. Dengan berlakunya UU No 1 tanggal 23 November 1945, Komite Nasional Indonesia (KNI), KNI Daerah Kresidenan, Kotapraja, Kabupaten dan lain-lain yang dianggap perlu oleh Menteri dalam Negeri, dijadikan Badan Perwakilan Daerah, yang bersama-sama dipimpin oleh kepala daerah mengatur rumah tangga daerahnya masing-masing. Pasal 3 UU tersebut menetapkan bahwa oleh KNI daerah dapat dipilih sebanyak-banyaknya 5 orang sebagai Badan Eksekutif yang bersama sama dan dipimpin oleh kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Pada tanggal 18 Agustus 1945 dibentuk kabinet pertama dan diangkat para gubernur di tiap-tiap propinsi dan berdasarkan “Pengumuman Pemerintah”, tanggal 19 Agustus 1945 tentang pengangkatan Menteri dan kepala Daerah. Kedelapan gubernur yang

diangkat pada waktu itu adalah Sutardjo Kartohadikusumo (Jawa Barat), R. P. Suroto (Jawa Tengah), R. M. T. A. Sutoyo (Jawa Timur), Mr. Teuku Muhamad Hasan (Sumatra), Ir. Pengeran Muhamad Hasan (Borne), Dr. G. S. S. J. Ratulagi (Sulawesi), Mr. J. Latuharhary (Maluku), dan Mr. I. Gusti Ketut Pudja untuk Sunda Kecil (Depdikbud 1993: 11).

Berdasarkan pengumuman pemerintah tersebut, Provinsi Maluku dengan ibu kota Ambon untuk pertama kalinya dipimpin oleh Gubernur Mr. J. Latuharhary, dan selama masa awal kepemimpinannya semua birokrasi pemerintahan diatur dari Jakarta mengingat pada masa itu negara berada dalam keadaan yang tidak stabil karena diserang oleh tentara Belanda (NICA) yang ingin merebut kembali wilayah Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proses pembangunan yang terjadi saat itu termasuk pembangunan pendidikan dalam negara yang baru diproklamirkan itu penuh dengan latar belakang yang sangat menarik.

Sebagai dasar dan pedoman pertama bagi rakyat dan pemerintah di lapangan pendidikan, dipergunakan rencana pendidikan dan pengajaran yang telah dipersiapkan pada hari-hari terakhir penjajahan Jepang. Anggota subpanitia pendidikan dan pengajaran yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara menjelang kemerdekaan Republik Indonesia telah menyusun suatu rencana pengajaran bagi negara yang dicita-citakan itu. Hal-hal yang dipersiapkan oleh subpanitia pendidikan dan pengajaran itu adalah (Helius Sjamsuddin, dkk. 1993: 10):

- 1) Undang-Undang kewajiban belajar
- 2) Pendidikan dan pengajaran nasional bersendikan agama dan kebudayaan bangsa
- 3) Perkembangan kebudayaan bangsa
- 4) Pendirian sekolah-sekolah swasta yang dibiayai oleh pemerintah
- 5) Susunan pengajaran dan pengetahuan dan kepandaian umum sesuai dengan rencana pelajaran
- 6) Sistem persekolahan
- 7) Ketentuan pelajaran bahasa dan kebudayaan
- 8) Ketentuan mengenai pendidikan rakyat
- 9) Pendirian balai bahasa Indonesia
- 10) Pengiriman pelajar-pelajar Indonesia keseluruhan dunia.

Kebijakan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ditindaklanjuti oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Ki Hadjar Dewantara.

Menteri mengeluarkan instruksi umum yang isinya menugaskan kepada semua kepala-kepala sekolah dan murid-murid supaya melaksanakan beberapa hal pokok yang terkait dengan tanggung jawab sebagai warga negara yaitu mengibarkan Sang Merah-Putih setiap hari di halaman sekolah, menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapuskan nyanyian kebangsaan Jepang *Kimigayo*, dan sebaliknya menyanyikan lagu kebangsaan *Indonesia Raya*. Kemudian menghapus pelajaran bahasa Jepang serta segala upacara yang berasal dari pemerintah militer Jepang, dan memberi semangat kebangsaan kepada murid-murid (Depdikbud 1980: 44)

Selain rencana usaha pendidikan atau pengajaran dan instruksi umum tersebut, pemerintah menggunakan juga Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai pedoman di lapangan pendidikan. Untuk mengembangkan pendidikan saat itu pemerintah secara sistematis melakukan langkah-langkah penyempurnaan di bidang pendidikan terutama membentuk suatu Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran. Namun situasi politik semakin parah karena Belanda melakukan penyerangan terhadap kota-kota di daerah Republik Indonesia. Daerah Maluku bahkan tidak merasakan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah secara menyeluruh kecuali di Kota Ambon karena di kota ini banyak kaum nasionalis yang mencoba menyampaikan berita proklamasi di seluruh lapisan masyarakat termasuk di lembaga-lembaga pendidikan, namun tidak bertahan lama karena pada September 1945 Sekutu bersama Belanda (NICA) kembali menduduki kota Ambon.

Lebih parah lagi ketika Aksi Militer Belanda yang terjadi pada Juli 1947 terutama ditujukan ke pulau Jawa, Madura, dan Sumatera sehingga sebahagian besar kementerian Republik Indonesia berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta yang ditetapkan sebagai ibu kota Republik Indonesia. Saat itu Kementrian Pengajaran berpusat di kota Surakarta (Solo) sejak Januari 1946 dan nama kementrian ini diubah menjadi Kementrian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan, disingkat Kementrian PP dan K (Kartodirdjo 1977: 265).

Hampir empat tahun lamanya Provinsi Maluku dipimpin dari Jakarta yang berpusat di Jalan Heutzplein Nomor 7, kemudian dipindahkan ke Yogyakarta bertepatan dengan pindahnya Pemerintah Republik Indonesia ke daerah itu, sehingga untuk memperlancar aktivitas politik pemerintahan dibuat kantor pusat propinsi Maluku yang berkedudukan di jalan Margokridonggo Nomor

2 Yogyakarta. Dari tempat inilah pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Mr. J. Latuharhary dan dibantu oleh sekretaris J. Defretes, bersama staf lain yaitu A. Tahya, Dolf Tutupoly, Mias Supusepa, Ny. Tahya, Nn. Fransin Putiray, Nn. Schikkher, J. Hillapu, H. Tuasikal, dan Ety Laupatty. Mereka inilah yang mencoba melakukan berbagai aktivitas bersama pemerintah Republik Indonesia termasuk mengurus pendidikan di Maluku dan menyalurkan setiap anak-anak yang datang dari Kota Ambon ke pulau Jawa untuk melanjutkan pendidikan.

Zaman yang penuh dengan pergolakan politik menyebabkan anak-anak sekolah yang memperoleh tunjangan belajar dari pemerintah banyak yang meninggalkan daerah Maluku untuk mengikuti pendidikan diluar daerah terutama di Makasar dan di pulau Jawa. Tantangan yang paling berat bagi pemerintah Mr. J. Latuharhary dan stafnya adalah berupaya untuk mengembalikan Maluku dari NICA yang ingin mengembalikan kekuasaan Belanda di seluruh wilayah Republik Indonesia.

6.2 Penataan Pendidikan oleh NICA Setelah Kemerdekaan

6.2.1 Penyelenggaraan Pendidikan di Tengah Situasi Revolusi

Proses berikutnya setelah kemerdekaan Indonesia, pendidikan di wilayah Maluku kembali ditata oleh pemerintah Belanda melalui NICA yang masuk bersamaan dengan tentara sekutu ke Indonesia. Dari *Rapport van besprekingen over de radio Omroep te Batavia*, 19 Januari 1946, dilaporkan tentang kondisi pendidikan di Keresidenan Maluku selama tanggal 1-10 Januari 1946 yang termuat dalam lampiran C sebagai tambahan dalam laporan tersebut, Laporan tesenut terutama membahas menyangkut penyelenggaraan pendidikan di Maluku. Menurut laporan ini bahwa pada bulan November dan Desemberr 1945, dimulai persiapan untuk membuka kembali sekolah-sekolah yang ditutup pada masa kekuasaan Jepang (Van der Wal 1973: 184-185).

Sebenarnya langkah awalnya sudah dimulai sejak tanggal 4 Januari 1946, dengan program utamanya memberikan kursus kepada tenaga-tenaga pengajar sebagai bagian strategi dari rencana perbaikan pendidikan di Maluku. Kesulitan yang dialami pada pendidikan dasar Barat saat itu adalah

kurangnya ruang sekolah, tenaga pengajar, maupun buku-buku karena banyak yang telah dimusnahkan oleh tentara Jepang. Keberadaan Dari 2.700 siswa sebelum Jepang menduduki wilayah ini, baru kembali terdaftar sebagai siswa aktif sebanyak 1.296 orang. Pendidikan dasar Barat sampai dengan saat itu masih memiliki 13 ruang yang siap menampung 1.040 siswa untuk menerima pelajaran (Van der Wal 1973: 186).

Untuk mengatasi kekurangan ruang belajar, pemerintah menambah 26 kelas untuk memberikan les baik pada pagi maupun sore hari untuk mengejar ketinggalan dan keterpurukan kualitas. Setelah gedung-gedung sekolah dan sarana belajar disiapkan, maka pemerintah Belanda mendatangkan tenaga-tenaga pengajar dari Australia yang pada waktu pernyerangan Jepang ke Maluku, mereka meninggalkan daerah ini sehingga berangsur-angsur pendidikan di daerah Maluku dapat diperbaiki walupun tidak seperti waktu sebelumnya. Yang menjadi problem utama saat itu adalah tidak ada tenaga pengajar bagi sekolah MULO sehingga sekolah ini untuk sementara tetap tidak ada kegiatan belajar mengajar walaupun animo masyarakat untuk belajar disekolah ini sangat banyak (Van der Wal 1973: 186).

Di Pulau Saparua dua sekolah dasar yang dibuka pada 12 November 1945, ternyata melakukan aktivitas belajar mengajar secara penuh dengan jumlah siswa 900 orang dan pengajarnya 22 orang. Pulau Saparua tidak begitu parah dibom oleh Jepang maupun sekutu seperti kota Ambon, sehingga gedung-gedung sekolah di kota kecil ini masih tetap utuh, dan sarana belajarnya cukup memadai, bahkan semakin banyak calon siswa yang melamar untuk mengikuti pendidikan. Kendala yang dialami oleh kedua sekolah saat itu adalah kurangnya tenaga pengajar yang profesional dalam menagani proses belajar mengajar. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah membuka sebuah kursus bagi sekolah rakyat dengan tujuan untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar saat itu (van der Wal 1973: 186-187).

Catatan yang diperoleh dari *Rapport van besprekingen over de radio Omroep te Batavia*, 19 Januari 1946, diketahui bahwa ada inisiatif dari pemerintah Belanda untuk mengupayakan pemulihan sekolah dasar di Bandaneira sejak tanggal 4 Januari 1946 mengingat jumlah murid di daerah ini mencapai 250 orang dengan tenaga pengajar 5 orang. Sekolah ini lolos dari pemboman

pihak Jepang maupun sekutu pada waktu perang antara kedua kekuatan itu berlangsung, sehingga sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut tetap utuh dan sarana belajar cukup memadai untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar (Van der Wal 1973: 187).

Secara umum upaya pemulihan pendidikan di wilayah Maluku langsung ditangani berdasarkan instruksi Departemen Pendidikan dan Agama sampai menjelang pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) tahun 1946. Dari berbagai sumber resmi pemerintah Belanda pada zaman itu dapat diperoleh keterangan mengenai penyelenggaraan pendidikan yang kembali ditangani oleh pemerintah Hindia Belanda setelah berakhirnya perang Asia Timur Raya ditengah-tengah kondisis politik, ekonomi, dan sosial yang sangat tidak menentu karena terjadi beberapa fibrasi sejarah penting di bekas tanah jajahan sehingga turut berpengaruh langsung terhadap proses penyelenggaraan pendidikan saat itu.

Di luar kota Ambon ada Sekolah Menengah di Saparua, Ternate dan Tual yang dibuka tahun 1947 untuk menampung anak-anak sekolah yang sudah lama tidak mengikuti pendidikan dengan baik akibat Perang Dunia II antara Sekutu dan Jepang yang dilanjutkan dengan perang selama Revolusi Indonesia berlangsung. Upaya pendirian kembali sekolah-sekolah menengah di ketiga kota diatas merupakan pengintegrasian dari *Middellbare School* (MS), kemudian dibuka juga kursus *Normaalschool* untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar pada sekolah dasar (van der Wal 1973: 186-188).

6.2.2 Aksi Militer Belanda dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan di Maluku

Penanganan pendidikan di daerah Maluku tidak terlepas dari kondisi politik yang timbul setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 karena faktor politik dan keamanan saat itu turut berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan di daerah tersebut. Beberapa fibrasi sejarah yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, telah mengubah sruktur politik di wilayah hukum Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah hukum Hindia Belanda sebelum perang Dunia kedua. Setelah kemerdekaan struktur politik di daerah Maluku sangat berbeda dengan kondisi politik yang ada di pulau Jawa maupun daerah-daerah lain di Indonesia, karena setelah

kemerdekaan ternyata pemerintah Hindia Belanda langsung melakukan aktivitas pemerintahannya di Maluku saat kedatangan pihak sekutu karena saat itu pula pihak Belanda dalam hal ini NICA datang bersamaan dengan pihak sekutu yang masuk ke Indonesia termasuk Maluku.

Kedatangan NICA di Maluku telah membawa ketidakpastian politik termasuk pembangunan pendidikan yang telah diusahakan oleh pemerintah Republik Indonesia lewat menteri pendidikan dan pengajaran Ki hajar Dewantara. Politik di daerah Maluku saat itu sangat tidak memungkinkan karena terjadi pergolakan antara NICA dan kaum Nasionalis Indonesia sehingga pemerintahan Gubernur Maluku Mr. J. Latuharhary tidak beraktivitas di kota Ambon, dan kondisi ini berlangsung sampai berdirinya Negara Indonesia Timur.

Peristiwa Perjanjian Linggarjati bulan November 1946 yang telah memutuskan wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda hanyalah pulau Jawa, Madura dan Sumatera. Pada saat Linggarjati dilaksanakan Sebelum itu di wilayah timur terutama daerah Maluku, tentara Sekutu khususnya pasukan Australia pada bulan Agustus 1946 telah tiba di Maluku dan diikuti oleh orang-orang Belanda yaitu NICA untuk menduduki kota Ambon, Tual, dan Ternate untuk menjalankan misi mereka. Saat itu pula pihak Belanda mulai bertindak sebagai residen-residen dengan nama *Staff Officers NICA*, sedangkan pejabat-pejabat Hindia Belanda yang telah dibebaskan dari status tahanan Jepang diangkat kembali sesuai tugas dan fungsinya semula sehingga secara perlahan-lahan Belanda kembali menanamkan pengaruhnya di Indonesia Timur termasuk Daerah Maluku (Leirissa 1975: 36-37). Kondisi ini bertahan sampai pembentukan Negara Indonesia Timur yang terbentuk setelah konferensi Malino bulan Juli 1946, dan muktamar di Denpasar Bali 8 Desember (tahap pertama), dan tahap kedua 18-24 Desember 1946.

Pemerintah Belanda lewat Van Mook berupaya mencari jalan keluar untuk menyelesaikan kondisi politik yang semakin rumit di seluruh bekas tanah jajahan, pimpinan NICA di Kota Ambon Dr. Ruyking seorang staf NICA mulai berupaya menyusun pemerintahan dengan mengajak E. U. Pupella namun pada waktu itu residen van Wyek menahan Pupella dan mengurungnya dalam tahanan karena dituduh telah bekerja sama dengan pihak Jepang. Berdasarkan pembicaraan antara Dr. Ruyking dengan residen

van Wyek, maka E. U. Pupella dibebaskan kemudian ia dibawa ke markas NICA untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah Belanda, tetapi Pupella menginginkan agar ia harus bebas dari status tahanan. Kesepakatan kerja sama dengan pihak Belanda disetujui, namun bersifat *gelykheid* atau sama rata (Lundry 2009 102-204).

Aktivitas pertama dari hasil kesepakatan antara E. U. Pupella dengan staf NICA dalam hal ini van Wyek, maka dibentuklah suatu badan yang dinamakan *Adviesraad* yang anggota-anggotanya terdiri dari Dr. D. P. Taihito, J. Picauly, A.S. Seharlawan, Imam Hatala, E. U. Pupella, Hamid bin Hamid, dan Hang Bung Hiong. *Adviesraad* inilah yang kemudian mengusulkan kepada Residen van Wyek untuk membentuk dewan Maluku Selatan dan disertai tugas khusus kepada M. A. Pelupessy yang menjabat *Handeleounsulent* menyusun peraturan Dewan Maluku Selatan (Lundry 2009: 103-104; Pattykaihatu 1991: 32).

Di Ternate NICA masuk ke daerah ini bersamaan dengan tentara sekutu pada awal tahun 1946, termasuk Sultan Ternate Mohammad Djabir Syah yang menyingkir ke Australia dengan bantuan tentara sekutu melalui Morotai. Sultan diangkat oleh sekutu sebagai pimpinan stap KONICA dan kemudian menjabat residen Ternate. Di Ternate pemerintah Belanda juga berhasil membentuk dewan Maluku Utara yang bersama-sama dengan residen menjalankan politik pemerintahan dibawah pengontrolan NICA sehingga rakyat ingin berjuang untuk melepaskan semua ikatan kerja sama dalam bentuk apapun (Amal 2002: 400).

Setelah tentara Australia meninggalkan daerah Maluku pada pertengahan tahun 1946, Belanda mengambil oper kekuasaan tertinggi dari sekutu sehingga kondisi keamanan semakin tidak menentu. Sultan Ternate yang menjabat selaku residen mencoba melakukan hubungan pembicaraan dengan beberapa tokoh nasionalis terutama Arnol Mononutu dan Boesoirie di kedatonnya dengan tujuan untuk melakukan langkah-langkah kongkrit mengenai aktivitas pemerintahan saat itu. Sultan Djabir Syah menawarkan kepada kedua tokoh nasionalis untuk membentuk partai politik bercorak "*rijks Verband*", yang dapat bekerja sama dengan pemerintah Belanda (Kotambunan 2003: 28).

Situasi politik semakin parah karena Belanda melakukan penyerangan terhadap kota-kota di daerah Republik Indonesia pada Juli 1947 terutama pulau Jawa, Madura, dan Sumatera sehingga sebahagian besar kementerian Republik Indonesia berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta yang ditetapkan sebagai ibu kota Republik Indonesia. Saat itu Kementerian Pengajaran berpusat di kota Surakarta (Solo) sejak Januari 1946 dan nama kementerian ini diubah menjadi Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan, disingkat Kementerian PP dan K (Kartodirdjo 1977: 265). Gubernur Maluku Mr. J. Latuharhary bersama stafnya selalu mengadakan hubungan kerja sama untuk memajukan pendidikan di wilayah Maluku. Mereka mencoba mendirikan satu badan yang bernama “College Seberang” yang diketuai oleh Mr. J. Latuharhary dan ia di bantu oleh A. S. Pilouw, Kindangen dan G. M. Ibrahim yang menjadikan organisasi ini sebagai alat perjuangan (Touwe 2013: 312).

6.3 Penataan Pendidikan pada Masa Negara Indonesia Timur

6.3.1 Kebijakan Pemerintah NIT dalam Bidang Pendidikan

Sesuai rencana Undang-Undang Pengajaran yang dirancang oleh pemerintah dan anggota Parlemen Negara Indonesia Timur yang diketuai oleh Menteri Pengajaran P.J.M. Katopo, telah berhasil menetapkan berbagai kebijakan menyangkut penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berlaku untuk seluruh wilayah Negara Indonesia Timur (*Negara Baroe*, 17 Juni 1947). Beberapa pasal yang terkait dengan usaha pengembangan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Pengajaran Pendidikan tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai tingkatan yaitu mulai dari pendidikan rendah, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan rendah diatur berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Pendidikan Negara Indonesia Timur yang lebih menekankan pada pemberlakuan mata pelajaran sesuai kurikulum yang berlaku dengan dua kategori yaitu mata pelajaran umum dan mata pelajaran “didikan masyarakat”. Mata pelajaran sesuai kurikulum yang diajarkan pada sekolah rendah adalah membaca, menulis, bahasa, berhitung, Ilmu bumi, Sejarah, pengetahuan alam yang didalamnya termasuk ilmu kesehatan (*Negara Baroe*, 17 Juni 1947).

Mata pelajaran yang termasuk ke dalam “didikan masyarakat” adalah menggambar, pekerjaan tangan, pergerakan badan, dan pengajaran pengajaran kerajinan untuk anak-anak perempuan. Startegi pemerintah Negara Indonesia Timur dalam menjalankan pendidikan saat itu tidak berjalan secara menyeluruh tetapi secara bertahap karena situasi negara berada pada kondisi transisi dari sistem pendidikan yang lama terutama pada zaman Jepang. Pemerintah Negara Indonesia Timur lewat menteri pendidikannya beranggapan bahwa walaupun dalam kondisi peralihan seperti yang sedang dialami oleh negara tetapi untuk sekolah-sekolah rendah yang lama pendidikannya tiga tahun perlu diubah menjadi empat tahun. Dalam perkembangannya sesuai amanat undang-undang pendidikan negara Indonesia Timur yang berlaku diubah lagi pendidikan yang lamanya empat tahun menjadi enam tahun, mengingat kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan meningkatnya animo masyarakat yang ingin menyekolahkan anak-anak mereka selama dua tahun berturut-turut setelah terbentuknya Negara Indonesia Timur.

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah lewat Menteri Pendidikan dan Pengajaran P. J. M. Katopo menetapkan pendidikan 4 tahun menjadi 6 tahun. Dengan demikian Pendidikan menengah pada masa negara Indonesia Timur lamanya 6 tahun sampai 7 tahun. Pendidikan ini terbagai atas dua bagian yaitu (a) pendidikan menengah dengan waktu belajarnya 4 tahun (Sekolah Menengah), dan (b) pendidikan tinggi dengan waktu belajarnya 2-3 tahun (Sekola Menengah Tinggi).

Menyangkut penyelenggaraan kurikulum pendidikan menengah diatur berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Pendidikan Negara Indonesia Timur. Sesuai aturan tersebut, kurikulum terbagi atas dua bagian yaitu mata pelajaran umum dan mata pelajaran didikan masyarakat. Mata pelajaran umum yang ditetapkan pada sekolah menengah adalah: Bahasa Indonesia, bahasa Belanda, bahasa Inggris, Ilmu pasti, ilmu bumi, sejarah, ilmu hayat yang di dalamnya termasuk ilmu kesehatan, dan ilmu alam termasuk ilmu kimia. Sedangkan kategori mata pelajaran didikan masyarakat adalah: menggambar, seni musik, seni suara, pekerjaan tangan, latihan jasmani dan pelajaran kerajinan untuk anak-anak perempuan (*Negara Baroe*, 17 Juni 1947).

Penyelenggaraan pendidikan tinggi diatur berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang pendidikan Negara Indonesia Timur dan memiliki empat kategori yaitu:

- 1) Kategori A1: Ilmu Kesusastraan timur dengan lama belajar 4 tahun
- 2) Kategori A2: Ilmu Kesusastraan barat dengan lama belajar 3 tahun
- 3) Kategori B: Ilmu Pasti dan ilmu Alam dengan lama belajarnya 2 tahun
- 4) Kategori C: Ilmu Sosial dan EkonoI dengan lama belajarnya 2 tahun.

Mata pelajaran kategori A1 terdiri dari bahasa Indonesia, bahasa Belanda, bahasa Inggris dan sebuah bahasa timur lain sesuai daerah sekolah berada (bahasa daerah), mata pelajaran sejarah kebudayaan, ilmu bangsa-bangsa, ilmu hayat manusia, seni musik, menggambar, sejarah kesenian, dan latihan jasmani. Kurikulum mata pelajaran ini dijalankan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Pendidikan Negara Indonesia Timur. Berikutnya adalah kurikulum mata pelajaran kategori A2 terdiri dari bahasa Latin, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Indonesia, bahasa Jerman sejarah kebudayaan, ilmu bumi, sejarah kesenian, menggambar, dan latihan jasmani. Kurikulum mata pelajaran kategori B terdiri dari bahasa Indonesia, bahasa Belanda, bahasa Inggris, Ilmu Pasti, Ilmu Alam, Ilmu Kimia, Ilmu Hayat, menggambar dan latihan jasmani. Terakhir adalah kurikulum matapelajaran kategori C terdiri dari bahasa Indonesia, bahasa Belanda, bahasa Inggris, Ilmu Pasti, Ekonomi dan Tata Negara, Ilmu Bumi, sejarah, menggambar dan Sejarah kesenian.

Pemerintah Negara Indonesia Timur melalui Menteri Pendidikan dan Pengajaran menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang saat itu disebut pengajaran *Vak* yang memiliki kesamaan dengan pendidikan kecerdasan umum. Sekolah-sekolah ini terdiri dari tiga kategori atau golongan yaitu:

- a. Golongan pertama setingkat dengan sekolah rendah
- b. Golongan kedua setingkat dengan sekolah menengah yang lamanya 2 tahun
- c. Golongan ketiga setingkat dengan pendidikan menengah yang lamanya 4 tahun.

Lulusan sekolah golongan ketiga ijazahnya dapat dipergunakan untuk mengajar pada sekolah-sekolah *vak* baik pada kategori pertama kedua dan ketiga. Sekolah-sekolah *vak* yang dibangun pemerintah Negara Indonesia

Timur bertujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga terdidik untuk dipekerjakan dalam berbagai bidang seperti tata uaha pada kantor-kantor pemerintah maupun swasta, dan menjadi tenaga terampil dalam dunia usaha tata boga dan tata busana untuk perempuan dan pekerjaan lain sesuai ketrampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk mengisi kekosongan tenaga guru yang diakibatkan karena perang Jepang melawan Sekutu yang telah mengakibatkan banyak guru meninggalkan daerah atau wilayah negara Indonesia Timur, maka pemerintah telah berupaya melaksanakan kursus-kursus pendidikan guru dengan tujuan memperoleh tenaga guru untuk diangkat pada sekolah-sekolah rendah, dan tenaga guru yang memiliki sertifikat resmi sebagai tenaga pengajar yang diperoleh dari Pemerintah Republik Indonesia.

Selain sertifikat yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia, bagi mereka yang mempunyai akta mengajar yang diperoleh secara syah lewat pelatihan atau pendidikan diklat yang dikeluarkan berdasarkan keputusan menteri, akan diangkat menjadi guru. Yang menarik dari proses perekrutan tenaga pengajar saat itu adalah setiap orang yang memiliki akta kecakapan untuk mengajar yang diakui syah oleh berdasarkan Undang-Undang pendidikan Nederland, tetap diakui dan diterima untuk mengajar pada sekolah rendah sesuai pasal 47 Undang-Undang Negara Indonesia Timur (*Negara Baroe*, 17 Juli 1947). Upaya ini ternyata dapat membantu proses penyelenggaraan pendidikan selama negara Indonesia Timur melaksanakan berbagai amanat sesuai arah dan tujuan sebagai negara bagian di bawah Negara Republik Indonesia Serikat. Pola pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Negara Indonesia Timur berlaku umum di setiap wilayah dari negara bagian ini.

6.3.2 Pendidikan pada Masa NIT di Daerah Maluku

Pada 26 Mei 1947 pemerintah Negara Indonesia Timur (NIT), di wilayah Maluku, mulai membuka pendidikan yang ditangani oleh suatu maskapai yang dinamakan “Pelajaran Pesisir Nasional Maloeko Selatan”. Peresmian maskapai pendidikan ini dilakukan oleh Residen Ambon Vissers dalam suatu upacara resmi yang dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat dan para pejabat di kota Ambon (*Negara Baroe*, 29 Mei 1947). Dijelaskan

bahwa Residen Visers dalam sambutannya mengatakan bahwa Pelajaran Pesisir Nasional Maloekoe Selatan dibentuk sesuai tuntutan kebutuhan dan kepentingan pendidikan seluruh rakyat di daerah Maluku Selatan. Pada kesempatan yang sama dr. Sitanala memberikan ucapan terima kasih kepada Residen Visser yang telah berupaya untuk kembali menata pendidikan di Maluku setelah berakhirnya perangan antara Jepang dan Sekutu yang mengakibatkan kehancuran dan keterpurukan pendidikan di daerah tersebut (*Negara Baroe*, 29 Mei 1947).

Banyak data mengenai aktivitas pendidikan saat itu yang musnah akibat pergolakan antara kaum nasionalisme dengan pasukan Republik Maluku Selatan yang secara sepihak telah memproklamasikan daerah Maluku Selatan lepas dari negara Republik Indonesia Serikat pada 25 April 1950. Yang bisa diperoleh hanyalah data umum dari sekolah-sekolah yang dibuka semasa Negara Indonesia Timur. Data jumlah sekolah yang dapat ditampilkan berikut (Tabel 10) merupakan sumber yang diperoleh dari arsip pemerintah Hindia Belanda khususnya sekolah yang beroperasi setelah Perang Dunia II berakhir.

Tabel 10
Jenis Sekolah, Guru dan Murud pada Masa NIT
(1946 dan 1947)

NO	NAMA SEKOLAH	1 AGUSTUS 1946		1 AGUSTUS 1947	
		JUMLAH SEKOLAH	JUMLAH MURID	JUMLAH SEKOLAH	JUMLAH MURID
1	Sekolah Rendah	3798	456700	3987	622000
2	Sekolah Rendah Umum	67	18600	75	24600
3	Sekolah Pendidikan Guru	46	1475	60	2460
4	Sekolah Normal	14	1120	16	1200
5		6	1750	7	2250
MULO					
6	Sekolah Menengah	19	1980	28	3250

NO	NAMA SEKOLAH	1 AGUSTUS 1946		1 AGUSTUS 1947	
		JUMLAH SEKOLAH	JUMLAH MURID	JUMLAH SEKOLAH	JUMLAH MURID
7	HBS/AMS	1	300	3	580
8	Sekolah Pangreh Praja Yang Pindah Dalam Pendidikan Menengah (<i>Bestuurs Opleiding Omgezet in een Middlebare</i>)	1	60	1	190
9	Sekolah Teknik Rendah	4	100	6	280
10	Sekolah Kepandaian Gadis Tingkat Pertama	10	780	17	1100
11	Sekolah Pendidikan Guru	-	-	1	-
	Jumlah	3966	482865	4201	657865 (657910)

Sumber: *Algemeen Verslag van Nijverheids-onderrwijs en nijverheidsscholen 1948*, dalam Arsip Tanah Toraja 489/48 Anriwil Sulsel. Lihat juga Arsip Algemeene Secretarie, No. 1341, ARA.

6.4 Pemulihan Pendidikan Setelah Integrasi

Tanggal 17 Agustus 1950, kaum Unitaris yang dipelopori oleh Presiden Soekarno berhasil menggagalkan negara federasi dan kembali pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersamaan dengan perubahan ketatanegaraan tersebut, maka menurut Undang-Undang Dasar RIS 1950, seluruh Maluku dijadikan provinsi dan perlu diangkat seorang gubernur untuk mengatur jalannya aktivitas pemerintahan di Maluku termasuk bidang pendidikan. Untuk sementara Dr. Rehatta diangkat sebagai kepala daerah dengan pusat kegiatannya di kota Namlea dan Piru mengingat kondisi politik dikota Ambon sedang bergolak akibat aksi-aksi kaum Republik Maluku Selatan (RMS).

Walaupun kota Ambon dilanda kekacauan akibat aksi-aksi teror dan kekejaman RMS, namun sejak 17 Agustus 1950 pemerintahan Provinsi Maluku

secara *de facto* tetap berkedudukan di kota Ambon dan pengangkatan kembali Mr. J. Latuharhary sebagai Gubernur Maluku untuk kedua kalinya atas persetujuan Presiden Soekarno sesuai hasil pertimbangan dan dukungan masyarakat Maluku. Pada 12 Desember 1950, Gubernur Mr. J. Latuharhary tiba di pelabuhan Ambon dengan sebuah Kapal KPM, dari Surabaya untuk segera melaksanakan roda pemerintahan di Maluku.

Selaku Gubernur ia membentuk staf pembantunya yang terdiri dari Frans Pattiasina, Residen Koordinator Pemerintahan, Mr. Chr. Soplanit, Sekretaris Provinsi Maluku (didatangkan dari Makasar), H. Pattirajawane, Kepala Bagian Otonomi dan Desentralisasi (Tenaga Pamong Praja di Ambon), Adjid Latuconsina Kepala Bagian Pemerintahan Umum (Tenaga Pamong Praja di Ambon), Wim Tutupoly, Kepala Bagian Politik (Pegawai Tinggi Departemen Dalam Negeri), J. D. Supusepa, Kepala Bagian Umum (bekas Pegawai Kantor Gubernur Maluku Pusat di Yogyakarta), J. F. Kailola, Pembantu Umum Gubernur Maluku, E. Lesilolo, Pembantu Khusus Gubernur Maluku (pegawai Sekretaris Parlemen RIS/RI). Ada juga pengangkatan pegawai untuk mengisi formasi di Kantor Gubernur yang berasal dari bekas organisasi Serikat Ambon atau pegawai dari masa pemerintahan semasa Hindia Belanda.

Tugas-tugas pemerintahan sudah mulai ditangani oleh Gubernur Maluku, Mr. J. Latuharhary sejak 1951 dan prestasi yang diraih oleh Latuharhary adalah :

- Pembentukan jawatan-jawatan vertikal.
- Reorganisasi kepolisian daerah.
- Pengangkatan Sultan Tidore, Zainal Abidin Syah menjadi Residen/Kepala Daerah Tingkat II Maluku Utara.
- Pengangkatan Sultan Ternate Djabir Syah, menjadi Residen dan diperbantukan pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
- Penyiapan mental rakyat Maluku ke alam kemerdekaan terutama membangun hubungan Persatuan dan Kesatuan Nasional untuk menempuh hidup baru lepas dari alam kolonial dengan segala akibatnya.
- Implementasi kurikulum nasional yang berlandaskan Pancasila, dan peletakan dasar-dasar bagi terciptanya mental masyarakat Maluku dalam rangka pemberantasan buta huruf
- Pengembangan bidang seni budaya daerah
- Pembangunan fisik generasi muda di bidang pendidikan jasmani.

- Rencana pemindahan ibu kota provinsi ke Pulau Seram yang memerlukan *achterland*, sedangkan Kota Ambon yang hancur akibat perang Jepang melawan sekutu dibangun kembali dan diusahakan pembagunan saran dan prasarana yang dapat menunjang roda pemerintahan.
- Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah darurat bagi para pengungsi peperangan melawan kaum Republik Maluku Selatan (RMS).
- Perencanaan tata kota mengadopsi konsep Ir. Fliers.
- Pembangunan bidang spiritual dengan para alim ulama Islam, Protestan dan Katolik, yaitu memperbaiki Mesjid Djame, Gereja Pusat GPM dan Gereja Katolik
- Pembentukan Kantor Agama, demi tugas penanganan bimbingan kepada ketiga agama
- Pembangunan ekonomi rakyat yang harus ditata dari awal.

Keberhasilan lain Mr. J. Latuharhary dalam memimpin Provinsi Maluku adalah membina politik daerah Maluku dengan menempatkan daerah ini dibawah keadaan SOB (*Staaf van Oorlog en Beleg*) kemudian diganti dengan keadaan perang SO (*Staat van Oorlog*) bagi Ambon, Lease, dan Seram dengan tujuan menghancurkan gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) pada tahun 1951. Gubernur Mr. J. Latuharhary juga mulai membuka kesempatan kepada organisasi-organisasi dan partai-partai politik yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia untuk membuka cabangnya di Kota Ambon. Sejak saat itu di kalangan pemuda, bermunculan Front Pemuda Maluku, Gerakan Pemuda Indonesia, Front Pemuda Nusa Ina, dan lain-lain. Tujuan pembentukan cabang-cabang organisasi dan partai politik di Ambon adalah untuk mendukung pemerintah Republik Indonesia mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari setiap rongrongan yang datang dari luar maupun dalam negeri sendiri. Prestasi dan dedikasi yang gemilang dari Gubernur Mr. J. Latuharhary dalam membangun Maluku.

6.4.1 Penataan Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 mengenai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah oleh Presiden Republik Indonesia dan menteri PP dan K yaitu Mr. Soewardi Mangunsarkoro, lewat berbagai upaya pemerintah telah melakukan beberapa

kali kongres pendidikan untuk meninjau berbagai masalah pendidikan dan pengajaran yang telah diletakkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Pada 1946 di Yogyakarta, pemerintah berhasil merumuskan beberapa pikiran dasar untuk pengembangan pendidikan saat itu.

Langkah-langkah yang pernah dilakukan pemerintah saat itu kembali dijadikan sebagai dasar pengembangan setelah integrasi, antara lain:

- 1) Membentuk Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran yang pernah diketuai Ki Hadjar Dewantara pada 1946 kembali ditata oleh Menteri PP dan K. Mr. Soewardi. Panitia ini bertugas untuk meninjau kembali dasar-dasar, isi susunan dan seluruh usaha pendidikan/ pengajaran.
- 2) Panitia pembentukan rencana undang-undang pokok pendidikan dan pengajaran yang juga diketuai Ki Hadjar Dewantara pada tahun 1948 di tinjau kembali untuk melakukan perbaikan oleh tim yang dipimpin Menteri PP dan K Ali Sastroamidjojo. Panitia diberi tugas untuk menyusun rencana Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran di sekolah. Dengan berbagai usaha yang penuh dengan berbagai rintangan akhirnya undang-undang tentang dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah itu lahir pada 1950 dan terkenal sebagai Undang-Undang No. 4 tahun 1950 dengan Norma Undang-Undang tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah (UUPP) dan berlaku di seluruh Indonesia.

Kemudian atas dasar UUPP itulah diadakan perbaikan dan penyempurnaan terhadap semua struktur pendidikan pada zaman lampau terutama zaman pemerintah kolonial Belanda dan zaman Jepang. Usaha-usaha dimulai dari pendidikan dasar dan kemudian pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Semua sekolah Dasar dijadikan Sekolah Rakyat 6 tahun. Tingkatan dan mutu pendidikan diperbaiki. Pada akhir 1950 Departemen/ Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengambil alih tanggung jawab bidang pendidikan dan kebudayaan di Maluku.

Kota Ambon dijadikan pusat kedudukan pimpinan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan dalam iklim kemerdekaan. Dari Kota Ambon diorganisasi satu jaringan aktivitas pendidikan dan pengajaran serta pembentukan suatu watak nasional yang berdasarkan Pancasila di seluruh Provinsi Maluku. Organisasi disusun sesuai tuntutan masa. Setiap kali

diperluas dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan sekolah-sekolah, seperti pembebasan buta huruf pendidikan orang dewasa, pembangunan desa-desa, peningkatan kegiatan olah raga, kesenian dan lain-lain.

6.4.2 Kondisi Pendidikan Setelah Proklamasi RMS

Di tengah berkecamuknya kelompok Republik Maluku Selatan yang secara sepihak telah memproklamasikan berdirinya negara baru itu, upaya untuk membangun masyarakat Maluku lewat dunia pendidikan berjalan terus walaupun banyak sekolah yang tutup dan dibakar oleh kelompok Republik Maluku Selatan yang rata-rata adalah pasukan Baret Merah dan Hijau yang sengaja didatangkan oleh Ir. Soumokil ke Maluku khususnya kota Ambon untuk mendukung strategi politiknya. Dapat dikatakan bahwa mulai dari tahun 1950 yang ditandai dengan peristiwa proklamasi Republik Maluku Selatan sampai tahun 1955 kondisi pendidikan sangat terpuruk karena sekolah-sekolah ditutup dan para penduduk banyak yang lari meninggalkan rumah-rumah mereka ke hutan-hutan mencari perlindungan. Kondisi ini bertahan sampai pada masa Gubernur Maluku yang kedua S. M. Josan.

Keberhasilan yang dicapai pada masa kepemimpinan S. M. Josan adalah melaksanakan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Sementara Tingkat I Maluku terutama membentuk sejumlah kantor dan jawatan tingkat Propinsi seperti Perwakilan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Maluku, Jawatan Penerangan, Jawatan Koperasi, Dinas Pekerjaan Umum. Dewan Perwakilan Daerah Belum dapat dibentuk pada masa kepemimpinan Gubernur S. M. Jossan sampai menjelang akhir masa kepemimpinannya mengingat saat itu di Maluku berlaku SOB di bawah Panglima Daerah Militer Maluku Irian Barat, Kolonel Heraman Pieters. Beberapa perkembangan menarik mengenai pembangunan pendidikan di daerah Maluku terutama pembangunan pendidikan tinggi dicapai semasa kepemimpinan Gubernur Maluku yang ketiga Mohammad Padang.

Pada masa pemerintahan Muhammad Padang diadakan pengembangan pendidikan berkelanjutan bersama Pemerintah Pusat dengan membentuk Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan, yang mewakili Menteri P dan K dan mengkoordinasi empat kantor Daerah Direktorat Jenderal, yakni:

- 1) Kantor Daerah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
- 2) Kantor Daerah Direktorat Jenderal Kebudayaan
- 3) Kantor Daerah Direktorat Jenderal Olah Raga
- 4) Kantor Daerah Direktorat Jenderal Pemuda dan Pramuka

Kantor Daerah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar terdiri dari:

- 1) Inspeksi Pendidikan Dasar/Prasekolah
- 2) Inspeksi pendidikan umum, kejuruan dan kursus-kursus yang meliputi urusan SMP, urusan SMA, urusan Pendidikan Ekonomi, urusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, dan urusan Kursus-kursus kejuruan.
- 3) Inspeksi pendidikan guru
- 4) Inspeksi pendidikan teknologi
- 5) Inspeksi pendidikan masyarakat.

Kantor-kantor Daerah Direktorat Jenderal mempunyai cabang-cabang di setiap wilayah dengan tujuan menjalankan pendidikan dan pengajaran secara baik. Semua jenis sekolah dari SD sampai SLTA dan kursus langsung diurus oleh Kantor Daerah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dengan berbagai Inspeksi dan Urusan. Organisasi pendidikan ini jauh lebih luas dan lebih banyak usahanya daripada organisasi pendidikan di zaman penjajahan. Sebabnya karena rencana-rencana ditujukan untuk mempertinggi kecerdasan seluruh rakyat agar tercapailah kesejahteraan spiritual maupun material. Hasil-hasil usaha pendidikan dalam alam kemerdekaan ternyata sangat menggembirakan karena sejak 1951 sampai 1966 dan kelanjutannya telah terjadi kemajuan dan perkembangan yang pesat dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Hal ini disebabkan karena kesadaran kesatuan nasional Indonesia dan kesadaran bernegara Pancasila telah tertanam di dalam jiwa masyarakat, terutama di dalam jiwa generasi muda.

Buta huruf di daerah ini secara perlahan-lahan dapat diatasi dan perluasan sekolah-sekolah baik di kota-kota maupun di desa-desa yang dahulu tidak pernah dibuka karena pergolakan kelompok Republik Maluku Selatan kembali dibuka dan beraktivitas seperti biasanya. Ibu kota propinsi Ambon dan ibu kota Kabupaten Maluku Utara, Maluku Tengah dan Maluku Tenggara seperti Ternate, Masohi, Tual dan kota-kota kecamatan lainnya di propinsi Maluku telah dibangun sekolah-sekolah dan animo orangtua untuk menyekolakan anaknya sangat tinggi karena mereka berharap anaknya

menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan bangsa.

Akibat dari perkembangan pendidikan yang sangat cepat saat itu, berpengaruh terhadap ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan terutama kurangnya buku-buku pengajaran, bahkan tenaga pengajarnya dirasakan sangat minim. Saat itu Langkah strategi untuk mengatasi problem tersebut adalah dengan melibatkan orang tua murid dan organisasi POM dan BP3 untuk membantu pemerintah membiayai sekolah-sekolah dan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler dari murid-murid yang tersebar di setiap kapulauan di Maluku. Disamping pemerintah terdapat yayasan-yayasan pendidikan milik gereja-gereja Protestan, Roma Katolik, organisasi-organisasi Islam, ABRI, organisasi-organisasi wanita membantu pemerintah dengan jalan membuka sekolah-sekolah swasta untuk menampung murid-murid yang setiap tahun bertambah jumlahnya.

Untuk guru sekolah-sekolah lanjutan dididik pada PGSLP dan IKIP Ambon Cabang Jakarta, kemudian baru dilanjutkan pada FK dan FIP Universitas Pattimura. Ada juga yang datang dari IKIP-IKIP di pulau Jawa dan Ujung Pandang dan lain-lain. Di samping sekolah-sekolah yang diasuh oleh Departemen P dan K, ada pula sekolah-sekolah yang dibuka oleh departemen lain, misalnya Sekolah Bidang/Perawat di Kota Ambon yang dibuka oleh Departemen Kesehatan. Sebuah sekolah Perikanan Laut dan sebuah Sekolah Pertanian Menengah atau (SPMA) milik Departemen Perhubungan Laut juga dibuka untuk memenuhi tuntutan kebutuhan kerja saat itu.

6.4.2.1 Pembangunan Pendidikan Tinggi

Pada masa kepemimpinan Mohammad Padang selaku gubernur ketiga berhasil membangun pendidikan tinggi di Maluku dan ini merupakan prestasi yang tidak bisa dilupakan oleh generasi di daerah Maluku. Kemajuan yang dicapai merupakan catatan sejarah yang perlu diketahui dan dipelajari oleh generasi untuk menjadi bahan renungan untuk mengem-bangkan pendidikan di daerah ini lebih maju setaraf dengan daerah lain di Indonesia.

a. Sejarah Pembentukan Universitas Pattimura

Universitas Pattimura didirikan pada 3 Oktober 1956 oleh sebuah yayasan swasta yang bernama Yayasan Perguruan Tinggi Maluku yang dibentuk pada 20 Juli 1955. Pada 3 November 1961 yayasan ini diubah namanya menjadi Yayasan Perguruan Tinggi Maluku dan Irian Barat dan diketuai oleh dr. Haulussy. Yayasan ini dibentuk atas prakarsa beberapa tokoh dan pemuka masyarakat di daerah ini yang nama-namanya tidak lepas dari sejarah pendirian Universitas Pattimura, yaitu Cor Loppies, E. U. Pupella, F. M. Pupella, H. Hamid Bin Hamid, Tomas Sahertian, Ais Kainama, H. J. K. Corputty, D. Tahitu, Mohamad Syah Kamarullah, Z. M. Sitanala, M. H. de Queljoe, Abdul Basir Latuconsina dan D. Renyaan. Beberapa tokoh lainnya yang mempunyai jasa yang besar dalam membantu pendirian Universitas Pattimura ialah Letnan Kolonel Herman Pietersz yang pada waktu itu menjabat sebagai Panglima Kodam Maluku dan Irian Barat bersama dua orang kepala stafnya Mayor Leo Lopulissa dan mayor Minggus Nanlohy.

Pada awal pendirian Universitas Pattimura, dimulai dengan satu fakultas yaitu Fakultas Hukum dan yang dipimpin oleh Mr. Chris Soplanit sebagai dekan dengan jumlah mahasiswa sebanyak 660 orang. Gedung Fakultas Hukum merupakan gedung pertama dari Universitas Pattimura yang peletakkan batu pertamanya dilakukan oleh Almarhum Dr. J. B. Sitanala seorang sarjana tertua pada waktu itu di Kota Ambon dan gedung tersebut kemudiiian dijadikan Kantor Pusat Universitas Pattimura (Patikaihattu 1980: 25-26).

Pendirian Universitas Pattimura pada hakikatnya merupakan suatu tuntutan zaman dan lahir dari aspirasi tokoh-tokoh Maluku yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang pendidikan serta didukung oleh rakyat di daerah Maluku untuk secara nyata turut serta dalam pembangunan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Pendirian Universitas Pattimura merupakan salah satu tonggak sejarah yang sangat penting di daerah Maluku dan merupakan suatu momentum kebangkitan rakyat daerah Maluku untuk ikut mengisi cita-cita kemerdekaan Indonesia. Melihat situasi dan kondisi politik dalam negeri terutama pergolakan Republik Maluku Selatan pada waktu itu, rasanya pendirian Universitas Pattimura tidak akan terwujud kalau tidak didukung oleh cita-cita luhur semangat dan tekad yang kuat dari putera-

putera terbaik yang berasal dari daerah daerah Maluku dengan dukungan sepenuhnya dari seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia.

Pada 6 Oktober 1959 dibuka Fakultas Sosial Politik, menyusul Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada September 1961. Pada 1 Agustus 1962 dengan Surat Keputusan Menteri PTIP No. 99 tahun 1962, tanggal 8 Agustus 1962, Universitas Pattimura ditetapkan sebagai Universitas Negeri. Dengan surat Keputusan Presiden RI No. 66 tahun 1963 tanggal 23 April 1963 dan sejak 1 Agustus 1962 nama Universitas Pattimura dikukuhkan sebagai Universitas Pattimura. Bagi rakyat Maluku khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya nama Universitas Pattimura ini mempunyai pengertian yang khas. Nama Universitas diambil dari nama seorang pahlawan nasional bangsa Indonesia yang pada tahun 1817 berjuang dengan hebat melawan penjajahan Belanda di daerah Maluku, Dipilihnya nama Pattimura untuk universitas ini tentu saja mempunyai pengertian yang khusus. Semangat berjuang, semangat berkorban dan kecintaan serta pengabdian kepada tanah air yang telah dirintis oleh para pahlawan dalam perang Pattimura diharapkan akan menjiwai setiap mereka yang menuntut ilmu pada almamater Universitas Pattimura (sambutan Presiden RI Soekarno pada peresmian Universitas pattimura: ANRI)

Pada waktu penergian Universitas Pattimura, kepemimpinan universitas berbentuk Presidium dengan ketuanya yang pertama Soetrisno Hamidjojo, dan beranggotakan Kolonel Boesiri, Pangdam XV Pattimura; Muhamad Padang, Gubernur Maluku; Soehardjo, Pangdak XX Maluku, dan Dr. M. Haulussy. Pada 1 September 1964 dibuka lagi dua fakultas masing-masing Fakultas Pertanian/Kehutanan dan Fakultas Peternakan, menyusul pembukaan Fakultas Ekonomi pada 1 September 1964. Pada 8 Agustus 1964 FKIP Universitas Pattimura beralih statusnya menjadi IKIP Jakarta Cabang Ambon. Namun pada 16 September 1969 IKIP Jakarta Cabang Ambon diintegrasikan kembali ke dalam Universitas Pattimura dengan dua fakultas, yaitu Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada 1 Januari 1970 dibuka Fakultas Teknik dalam rangka pengintegrasian kembali ke dalam Universitas Pattimura dari ex Proyek Institut Teknologi Ambon (Patikaihattu 1980: 30-34).

Pada 1974 Fakultas Peternakan dilengkapi dengan Jurusan Perikanan sehingga menjadi Fakultas Peternakan/Perikanan. Dengan demikian sampai saat ini Universitas Pattimura mempunyai delapan buah fakultas, masing-masing Fakultas Hukum, Fakultas Sosial Politik, Fakultas Pertanian/Kehutanan, Fakultas Peternakan/Perikanan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Teknik. Universitas Pattimura dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia No. 99 Tahun 1962 tanggal 8 Agustus 1962. Universitas Yayasan Perguruan Tinggi Maluku–Irian Barat dikukuhkan sebagai Universitas Negeri yang terdiri dari beberapa fakultas yang telah disebutkan dan disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 66 Tahun 1963 tanggal 23 dan berlaku surut tanggal 1 Agustus 1962 dengan nama Universitas Pattimura.

Sebenarnya sebelum pendirian Universitas Pattimura, telah ada upaya untuk mendirikan institut teknologi di kota Ambon sebagai realisasi kerja sama antara Pemerintah Uni Soviet dan Pemerintah Indonesia. Institut Teknologi Ambon pada waktu itu peletakan batu pertamanya dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 1960. Yang mewakili Pemerintah Pusat dan Pemerintah Uni Soviet pada upacara peletakan batu pertama pendirian kampus Institut Teknologi Ambon antara lain Prof. Dr. Prijono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Michailo selaku Menteri Kebudayaan Uni Soviet (Sumber: ANRI)

Pembangunan kampus Institut Teknologi Ambon tidak berjalan mulus akibat terputusnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Uni Soviet. Walaupun gagal melakukan kerjasama dengan pemerintah Unisoviet, namun Universitas Pattimura membuka Fakultas Ekonomi dan Fakultas teknik berturut-turut pada tanggal 15 September 1965 dan 16 April 1970. Universitas Pattimura untuk pertama kali dipimpin oleh satu Presidium yang terdiri dari Soetrisno Hamidjojo, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku selaku ketua; Kolonel Baesiri, Pangdam XV Pattimura selaku anggota; Drs. Soehardjo, Pangdal XV Maluku selaku anggota, dan Dr. M. Haulusy, Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Maluku-Irian Barat selaku anggota; dengan surat Keputusan Presiden RI Nomor 40/M Tahun 1971, Ir. L. Nanlohy Dekan Fakultas Teknik ditetapkan sebagai Rektor Universitas Pattimura I (yang pertama).

Selama tahun 1960 terjadi perkembangan di bidang pembangunan, antara lain galangan kapal di Amahai, milik Institut Teknologi Ambon dengan bantuan Pemerintah Uni Soviet, Dermaga laut di Ternate dan Ambon, Pembukaan Kota Goal di Halmahera, Pembantik Tenaga Listrik di Tual, Ternate dan Masohi serta penambahan beberapa kapal angkutan dari rampasan angkatan perang serta bantuan pinjaman dari Polindia. Semua ini merupakan hasil yang dicapai atas kerjasama antara perguruan tinggi dengan negara-negara luar. Beberapa hal penting yang terkait dengan pembangunan pendidikan yang berhasil dilaksanakan oleh pemerintah daerah Maluku atas kerjasamanya dengan pemerintah Republik Indonesia adalah

b. Proses Perkembangan

Melihat proses pembentukan Universitas Pattimura sebagai yang dikemukakan di atas jelas bahwa pembukaan berbagai fakultas terjadi pada waktu yang berbeda-beda namun dilakukan dalam situasi dan kondisi persyaratan yang hampir sama dengan yang dialami pada waktu pembentukan Universitas Pattimura sendiri. Dari tahun 1956-1962 Universitas Pattimura masih berstatus swasta dan dari tahun 1962-1971 Universitas Pattimura berstatus negeri dipimpin oleh sebuah Presidium yang sering berganti-ganti sedang anggota pimpinan dan anggota presidium sebagian besar terdiri dari pejabat anggota Muspida Tingkat I Maluku yang karena tugas pokoknya yang sudah cukup berat tidak dapat melaksanakan pembinaan akademi secara intensif dan terarah. Barulah pada tahun 1971, Universitas Pattimura untuk pertama kalinya mempunyai seorang rektor Ir. L. Nanlohy.

Dengan demikian maka Universitas sampai saat ini telah mengalami tiga fase perkembangan yaitu:

- Fase I (1956-1962), Universitas Pattimura berstatus swasta dan diasuh oleh Yayasan Perguruan Tinggi Maluku dan Irian Barat.
- Fase II (1962-1971), Universitas Pattimura berstatus negeri dan dipimpin oleh sebuah presidium.
- Fase III (1971 sampai sekarang), Universitas Pattimura dipimpin oleh seorang rektor.

Tiap fase perkembangan sudah tentu menghadapi problema masing-masing dan mempunyai rencana kerja yang berbeda sesuai dengan kondisi

dan situasi yang dihadapinya. Dengan tetap menghormati semua usaha dan kemauan baik yang telah diperlihatkan oleh kepemimpinan Universitas pada waktu itu, namun pada dasarnya dapat dikatakan kondisi dan situasi seperti yang terdapat pada fase perkembangan pertama dan kedua itu tidak banyak membawa perubahan yang berarti. Pada waktu itu masih terdapat banyak masalah yang belum terpecahkan, banyak hal yang belum dilihat dan banyak cara yang belum diterapkan dan belum terdapat banyak tenaga staf yang bisa mendukung semua usaha pembinaan. Pada waktu itu pikiran dan segala usaha lebih banyak tenaga staf yang bisa mendukung semua usaha pembinaan. Pada waktu itu pikiran dan segala usaha lebih banyak diletakkan pada bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup universitas dari pada bagaimana universitas seharusnya dikembangkan.

Dari gambaran sepintas jelaslah bahwa dalam kurun waktu 15 tahun pertama dari perkembangan Universitas Pattimura yaitu antara tahun 1956-1971 belum banyak yang dapat dilakukan untuk pengembangan universitas tersebut karena banyak tantangan yang dihadapi terutama menyangkut dana maupun keamanan yang belum begitu stabil akibat pergolakan Republik Maluku Selatan di daerah ini. Pengembangan baru dirasakan setelah daerah ini bebas dari berbagai ancaman dan rongrongan dari dalam negerisehingga pada masa kepemimpinan Rektor Ir. L. Nanlohy dan diteruskan oleh Moh. R. Lestaluhu, SH, barulah universitas ini berkembang dengan baik. Dengan moto “Hotu Mese” (Maju terus) universitas ini terus mengembangkan diri sehingga bisa bersaing dengan universitas-universitas negeri di tanah air. Banyak tenaga pengajar yang dikirim keluar negeri dan dalam negeri sehingga mutu dosen semakin baik.

6.4.2.2 Pendirian Pendidikan Akademi Pemerintahan

Pendirian Pendidikan akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Ambon sebagaimana halnya APDN lainnya di seluruh nusantara, APDN, dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1965. Sekolah ini didirikan pada masa gubernur Maluku Mohamad Padang dan para muridnya tidak bersekolah di Ambon karena tidak ada fasilitas yang memadai, maka semuanya dikirim ke Malang untuk melanjutkan studi mereka pada Akademi Dalam Negeri yang dibuka pada tahun 1956. Akademi ini

kemudian ditutup dalam tahun 1967 karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1965 terbentuk APDN di Daerah Tingkat I yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab tiap pemerintah daerah provinsi.

Dalam perkembangannya Pemerintah Daerah Maluku membentuk sebuah APDN di Maluku pada tanggal 2 Mei 1969 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 28 Pebruari 1969 No. 17 Tahun 1969. APDN Ambon merupakan suatu lembaga pendidikan yang bertujuan mendidik kader-kader pemerintahan yang nation wide guna peningkatan efisiensi dan efektivitas adminitrasi. Mengingat Maluku adalah daerah kepulauan maka perlu ada tenaga-tenaga yang trampil dalam duani pemerintahan.

6.4.2.3 Pendidikan Tinggi Swasta

a. Pembagunan Universitas Hairun

Dalam bidang pendidikan tinggi terdapat pula usaha dari pihak swasta. Di Maluku lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi itu terdapat di Kota Ambon dan Ternate. Di Ternate dapat dicatat antara lain Universitas Hairun, Akademi Theologia dari Gereja Injili Halmahera (GMIH), akademi Pendidikan Itnggi dan IAIN. Di Kota Ambon hanya terdapat sebuah lembaga Pendidikan Tinggi yaitu Sekolah Tinggi Theologia dari Gereja Protestan Maluku. Universitas Hairun didirikan pada tahun 1964. Lembaga Pendidikan Tinggi ini diasuh oleh Yayasan Pembina Universitas Hairun di bawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Utara. Pada mula berdirinya Universitas ini dimulai dengan membuka tiga fakultas masing-masing Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pertanian . kemudian disusul dengan pembukaan FKIP dengan jurusan-jurusan Teori dan Sejarah Pendidikan, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Jurusan Civics dan Hukum, Jurusan Ekonomi dan Jurusan Ilmu Pasti.

Pada mulanya Universitas Hairun bekerja sama dengan Universitas SamRatulangi di manado. Kini mengadakan hubungan dengan Kopertis Ujung Pandang. Universitas ini berstatus Universitas Swasta yang terdaftar. Rektor pertama yang memimpin universitas ini ialah A. S. Abdulatif B. A.

dengan masa jabatan dari tahun 1978-1980, kemudian diganti dengan Dr. Saleh Sahib, M.P.H. Universitas terus membenahi diri karena pada waktu itu belum mempunyai kampus yang sesuai dengan persyaratan. Sarana yang ada berupa lima buah gedung yang dibangun atas bantuan masyarakat ditambah dengan tiga gedung pinjaman dan sebuah lembaga penelitian. Sampai dengan tahun kuliah 1980 jumlah lulusan sarjana Muda yang telah dilahirkan sebanyak 184 orang. Pada tahun kuliah 1980 jumlah mahasiswa sebanyak 378 orang dan diasuh oleh 80 orang tenaga dosen/asisten. Kebanyakan dari para dosen berstatus dosen luar biasa. Saat ini Universitas Hairun sedang berusaha untuk mengembangkan dan menyempurnakan berbagai sarana belajar untuk dapat diakui sebagai Universitas Negeri (Depdikbud 1975: 165).

b. Sekolah Tinggi Teologi GPM

Pendidikan teologia dalam Gereja Protestan Maluku tercatat dalam sejarah meliputi tenggang waktu sekitar 160 tahun. Pertama, masa 1819-1833; fase ini disebut sebagai fase pendidikan teologia yang mula-mula sekali dibuka dan diasuh oleh pendeta Joseff Kam, yang pernah digelar Rasul Maluku. Sebagai pengasuh maka Joseff Kam mendidik siswa-siswa untuk menjadi pendeta dan sekaligus Guru Sekolah (*schoolmeester*) langsung olehnya secara pribadi di rumahnya. Sebagian besar siswa-siswanya adalah anak semangnya sendiri. Para siswa lulusan lembaga pendidikan Teologia Kam ini doisebarkan ke seluruh wilayah Gereja di Maluku malahan sampai ke Timor, Minahasa dan Sangir Talaud. Dengan meninggalnya Kam ini di tahun 1833, maka berakhir pula usaha pendidikannya.

Kedua, periode 1836-1864. Tiga tahun setelah meninggalnya Kam, maka oleh pendeta Roskott dibuka suatu sekolah untuk mendidik para pendeta, dan sekaligus berfungsi sebagai guru sekolah. Sekolah ini berlangsung kira-kira 28 tahun dan baru berakhir ketika pada tahun 1964 pemerintah Belanda menjadikan sekolah ini sebagai Sekolah Guru Pemerintah.

Ketiga, 1885-1949; fase ini dapat disebutkan sebagai fase Stovil dan Sekolah Guru Jemaat. Pada tahun 1885 GPM membuka secara resmi suatu Lembaga Pendidikan Teologia yang disebut Stovil di Ambon yang dipimpin oleh pendeta Gornfeld sebagai direktur Stovil yang pertama. Tingkat dan persyaratan pendidikan Stovil ini ialah sekurang-kurangnya tamatan Lagere School (Sekolah

Dasar) ditambah dengan 6 tahun pendidikan Teologia. Di tahun 1982 dibuka pula sekolah guru jemaat di Ambon dan Tual karena kebutuhan yang besar akan tenaga-tenaga guru, sehingga para lulusan sekolah guru jemaat dapat berfungsi rangkap, yakni sebagai penghantar jemaat dan sekaligus sebagai guru sekolah. Hingga tahun 1949 Stovil sempat menghasilkan 659 orang dan sekolah jemaat 300 orang.

Keempat, meliputi 1949-1962 (Fase Sekolah Theologia). Pada 1 September 1949 Stovil dan Sekolah Guru Jemaat berakhir dengan diresmikannya pembukaan Sekolah Teologia Gereja Protestan Maluku oleh Badan Pekerja Sonode GPM. Untuk itu Pendeta S. Marantika ditunjuk sebagai direktur pertama lembaga tersebut. Dengan adanya Sekolah Theologia, maka bukan hanya sejarah pendidikan dari zaman kolonial telah berakhir, tetapi sekaligus tingkat dan taraf pendidikan theologia mengalami peningkatan, yaitu lulusan SMP sederajat ditambah dengan pendidikan khusus theologia selama 6 tahun.

Di tahun 1960 sidang Sinode GPM diputuskan untuk segera meningkatkan lagi taraf pendidikan teologia dari taraf semi akademis menjadi akademis penuh demi peningkatan pengabdian GPM kepada Tuhan, bangsa dan negara. Untuk itu maka sejak tahun 1962 langkah-langkah persiapan telah dijalankan dengan menghentikan./menutup penerimaan calon-calon masuk dari tamatan SLTP dan mulai menerima calon-calon yang berijazah SLTA hingga tahun 1965 dengan dibukanya Institut Theologia GPM sebagai suatu lembaga pendidikan yang murni akademis.

Pada 1965, nama institut diberikan kepada Lembaga Pendidikan Theologia ini, karena nama Institut inilah yang dirasakan tepat sekali dengan struktur Lembaga Pendidikan Theologia ini. Sebab sesuai pula dengan UU Perguruan Tinggi tahun 1961 pada Bab II pasal 8 mengenai “Nama, Bentuk dan susunan Perguruan Tinggi” disebutkan bahwa dengan Institut diartikan sebagai suatu Lembaga Pendidikan Tinggi yang mencakup pendidikan sejenis lainnya.

Pada tanggal 7 s/d 10 Pebruari 1973, Lembaga Pendidikan Theologia ini dikunjungi oleh Koordinator Perguruan Tinggi Wilayah VII untuk Indonesia Timur. Berdasarkan hasil penelitian kunjungan di atas, serta sesuai dengan jiwa UU Perguruan Tinggi No. 22 tahun 1961, maka oleh Koordinator Perguruan Tinggi Wilayah VII diusulkan untuk menggantikan nama lembaga

pendidikan ini menjadi Skeola Tinggi Theologia Gereja Protestan Maluku, sesuai surat tertanggal 5 Maret 1973, No. 195/E-III/65/KPT/73.

Di dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan Surrat Keterangan Terdaftar No. 59/DPT/B/1973 dari Direktur Jenderal Pendidikan Departemen Pendidikan Kebudayaan di Jakarta, maka Institut Theologia GPM dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi terdaftar dengan nama “Sekolah Tinggi Theologia Gereja Protestan Maluku” dan meliputi jurusan-jurusan : Theologia dan Pendidikan Agama Kristen.

Untuk pertama kalinya dalam perkembangan sekolah-sekolah Theologia di seluruh Indonesia bahwa Sekolah Tinggi Theologia Gereja Protestan Maluku menyelenggarakan ujian negara di bawah pengawasan Kopertis Wilayah VII sesuai peraturan yang berlaku. Ujian negara tingkat sarjana Muda Lengkap diselenggarakan pada tanggal 15-17 Januari 1974. Dari 45 peserta ujian, yang dinyatakan lulus 26 orang. Sejak tahun 1967-1980 sekolah Tinggi ini telah menghasilkan 456 orang Sarjana Muda. Pada tahun 1978 mulai dibuka studi doktoral untuk sarjana lengkap.

PENUTUP

PENUTUP

Pendidikan merupakan ukuran kemajuan suatu bangsa dan indentitas peradaban yang tumbuh dan berkembang pada bangsa itu. Masyarakat Maluku yang merupakan bagian dari masyarakat dunia juga memiliki peradaban yang tumbuh sebagai suatu proses dari zaman ke zaman dan mengikuti arus besar peradaban barat sebagai sebuah unsur baru yang turut mengembangkan peradaban orang Maluku. Proses ini merupakan suatu dinamika menarik karena telah mengubah pola hidup dan pandangan masyarakat dari waktu ke waktu melalui sejarah yang panjang dan penuh tantangan dan jawaban atas setiap unsur yang diterima dari luar untuk pengembangan indentitas orang Maluku.

Dinamika masyarakat Maluku yang begitu kompleks tidak terlepas dari unsur pendidikan baru yang masuk ke wilayah itu dan bersentuhan dengan pendidikan nonformal berupa kearifan lokal yang kemudian tumbuh sebagai peradaban baru yang dinamis dan berdaya guna bagi masyarakat. Pendidikan Islam yang masuk bersamaan dengan penyiaran agama ini ke Maluku secara langsung telah membentuk pengetahuan baru bagi masyarakat di daerah ini untuk mengenal huruf dan mampu membaca dan menulis yang tidak pernah mereka peroleh sebelumnya. Era baru pendidikan di Maluku ditandai dengan penerapan pendidikan bercorak Islam yang telah berhasil melahirkan generasi Maluku yang bisa melek aksara sehingga pada masa itu dapat dikatakan sebagai awal pencerahan budaya di daerah Maluku.

Era berikutnya adalah pendidikan bercorak Barat dengan segala kelebihanannya diperkenalkan kepada masyarakat di daerah Maluku secara sistematis, terpola, dan terkontrol. Pendidikan zaman itu ditandai oleh masuknya peradaban Eropa, terutama Portugis dan Belanda, dan lebih bersifat penerapan pendidikan agama dan berkembang secara perlahan-lahan mengikuti perubahan zaman hingga menjadi pola pendidikan modern. Perkembangan pendidikan Eropa lambat-laun turut mengubah pola kehidupan masyarakat Maluku ke arah lebih maju. Era pendidikan Eropa diyakini sangat berguna dalam pertumbuhan peradaban di Maluku walaupun pada awalnya banyak tantangan karena bukan saja pendidikan yang menjadi problem hidup saat itu tetapi juga politik keamanan dan ekonomi turut mewarnai proses pertumbuhan dan perkembangan pendidikan di sana. Zaman yang merentang panjang dan mewarnai segala aspek kehidupan

masyarakat Maluku membuat mereka tumbuh sebagai masyarakat yang maju dalam dunia pendidikan. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap perkembangan pendidikan cukup baik walaupun pada awalnya bertujuan untuk memperluas misi kekristenan di wilayah Maluku.

Tanggung jawab pemerintah Kolonial Belanda dalam pendidikan bukan saja dalam bentuk penbagunan sekolah dan menyelenggarakan proses belajar mengajar, tetapi sampai pada tingkat pemberian subsidi kepada setiap lembaga pendidikan yang mereka bina di daerah Maluku. Sejumlah biaya telah mereka berikan demi mengembangkan masyarakat Maluku secara keseluruhan. Pola ini lebih digiatkan pada saat penerapan politik etis di tanah jajahan karena terjadi perubahan di Eropa soal peradaban di tanah jajahan. Perubahan ini ternyata telah berpengaruh secara positif bagi masyarakat di daerah Maluku karena lebih memajukan pendidikan formal di daerah ini. Partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan juga ternyata sangat tinggi yang ditandai dengan membangun sekolah-sekolah di setiap negeri dan memberikan sumbangan yang cukup besar dan tidak kalah dengan pemerintah Hindia Belanda. Partisipasi masyarakat ini menunjukkan adanya kesadaran besar terhadap pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah karena dianggap sangat berguna bagi kelanjutan hidup putra pitri mereka.

Pendidikan yang berlangsung di Maluku pada pertengahan abad ke-19 mengalami perubahan yang signifikan, sekolah yang sebelumnya memiliki corak agama Kristen karena dikelola oleh pihak *zendings* berubah menjadi sekolah sekuler atau sekolah yang tidak ada unsur agama di dalam kurikulumnya. Hal ini terjadi karena pada saat itu pemerintah melihat pendidikan yang dikelola oleh para *zendings* ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan aliran liberal. Pendidikan harus dibebaskan dari unsur-unsur agama. Pemerintah kemudian mengambil alih pengelolaan, administrasi, dan penyelenggaraan pendidikan dari tangan *zendings*. Sekolah-sekolah *zending* diubah menjadi sekolah pemerintah.

Setelah pemerintah mengambil alih pendidikan di Maluku, peranan *zending* tidak langsung hilang karena pihak pemerintah tidak membangun sekolah di daerah terpencil yang tidak membawa keuntungan ekonomi, maka daerah ini dimanfaatkan oleh pihak *zending* untuk melebarkan ajaran mereka dengan membangun sekolah-sekolah rakyat di daerah-daerah tersebut. Sekolah ini termasuk sekolah partikulir (swasta). Jadi, pendidikan yang dikelola di Maluku

Tengah adalah pendidikan yang dikelola oleh dua pihak, yaitu oleh Pemerintah Hindia Belanda dan oleh swasta, yaitu pihak gereja dan zending. Pada masa ini pemerintah membangun sekolah dasar yang bercorak sekuler untuk para *burger* dengan menggunakan bahasa Belanda, yaitu *Ambonsche Burgerschool*. Selain itu, pemerintah juga membangun sekolah guru pribumi atau *Kweekschool* untuk memenuhi kebutuhan guru pribumi dari sekolah-sekolah pemerintah.

Memasuki abad ke-20 perkembangan pendidikan semakin pesat, pemerintah mulai membuka sekolah dengan bahasa Belanda karena banyak tuntutan rakyat yang ingin bersekolah di sekolah jenis ini agar memudahkan mereka mendapatkan pekerjaan. Perkembangan ini juga diikuti oleh pihak swasta, mereka juga membuka sekolah-sekolah Kristen berbahasa Belanda. Pada masa ini pemerintah juga membuka sekolah-sekolah di negeri-negeri Islam. Negeri Islam pada masa sebelumnya tidak menikmati perkembangan pendidikan karena tidak ada sekolah yang dibangun di negeri mereka. Semua sekolah pemerintah didirikan di negeri-negeri Kristen. Masyarakat Islam juga tidak ingin mengikuti sekolah-sekolah tersebut karena takut anak-anak mereka terpengaruh dengan agama yang dianut oleh pemerintah tersebut. Sekolah-sekolah yang dibangun pada abad ke-20 di negeri Islam ini tidak berkembang pesat karena kurangnya minat masyarakat terhadap sekolah tersebut sehingga banyak sekolah yang terpaksa ditutup karena tidak ada murid.

Reaksi dari masyarakat Maluku Tengah terhadap pendidikan sangat baik. Mereka terutama dari masyarakat Kristen sangat menikmati pendidikan baik yang dikelola oleh pihak pemerintah, swasta, atau pihak negeri. Pendidikan menyebabkan terjadinya perubahan status sosial, sehingga minat masyarakat terhadap pendidikan sangat tinggi. Dengan bersekolah, dapat mengubah nasib dan memperoleh status yang lebih tinggi di mata masyarakat, bahkan dengan mengikuti pendidikan berbahasa Belanda mereka dapat berperilaku seperti orang Belanda sehingga mereka meminta status disamakan dengan Belanda. Hal yang berpengaruh terhadap minat terhadap sekolah adalah keinginan menjadi pegawai pemerintah baik sebagai pegawai rendahan, guru maupun tentara.

Keinginan mereka ini banyak dipengaruhi oleh kondisi negeri yang tidak bisa menunjang ekonomi keluarga yang hanya mengharapkan perkebunan cengkeh sebagai hasil pendapatan keluarga. Ditambah lagi dengan perdagangan mandiri yang berlangsung sejak dihapuskannya monopoli rempah-rempah oleh

pemerintah. Masyarakat yang telah hilang kemampuan berdagang karena telah dibiasakan dengan sistem monopoli, turut mempengaruhi kondisi kelesuan ekonomi di Maluku Tengah. Dengan banyaknya masyarakat yang memiliki pendidikan yang cukup membuat tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup di daerah sehingga banyak orang Maluku Tengah yang ke luar dari Maluku Tengah untuk bekerja sebagai pegawai pemerintah dan tentara. Banyak juga yang keluar dengan alasan karena ingin melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi karena di Maluku Tengah tidak tersedia, pendidikan yang tertinggi hanya hingga MULO.

Manfaat yang nyata adalah penerapan pendidikan dengan segala bentuk atau pola yang dibangun oleh pemerintah Kolonial Belanda telah melahirkan generasi Maluku yang terdidik dan berdaya guna untuk mereka. Melalui pendidikan barat orang-orang Maluku menjadi dinamis karena menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat itu. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang sangat banyak di tanah jajahan walau tidak di Maluku, sudah dapat diisi oleh tenaga-tenaga terampil yang berasal dari Maluku, bahkan pada saat berkembangnya gerakan nasionalisme di Hindia Belanda, kaum terpelajar Maluku juga turut memainkan peranannya dalam kanca pergerakan Nasional Indonesia.

Pada masa pendudukan Jepang keadaan pendidikan di Maluku menurun drastis karena pihak Jepang menggunakan sarana sekolah hanya untuk propaganda kepentingan perang mereka melawan sekutu, banyak bangunan sekolah yang hancur karena bom dari pihak Jepang maupun Sekutu. Namun ada perubahan yang dilakukan oleh pihak Jepang bagi perubahan pendidikan dari jaman Belanda yaitu dihilangkan diskriminasi pendidikan terhadap pribumi, tidak ada lagi pemisahan berdasarkan garis keturunan dan warna kulit. Pendidikan dibagi menjadi tiga yaitu sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah tingkat atas.

Kondisi pendidikan memasuki masa kemerdekaan mulai ditata kembali oleh pemerintah Republik Indonesia dengan mengadopsi sistem Jepang namun tidak secara langsung diadopsi, dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai kebutuhan bangsa yang baru merdeka, namun perkembangan ini selalu diwarnai oleh kondisi bangsa yang masih bergolak. Di Maluku, dari masa kemerdekaan hingga pemberontakan Republik Maluku Selatan, perkembangan pendidikan sangat lambat karena kondisi daerah yang belum stabil. Walaupun demikian ada perubahan kurikulum yang berlaku pada masa NIT, yaitu dengan dua kategori

yaitu mata pelajaran umum dan mata pelajaran “didikan masyarakat”. Kemudian pada masa RMS pendidikan tetap berjalan namun lambat karena pergolakan dimana-mana sekolah dibakar dan dihancurkan. Pada masa sesudah RMS pendidikan mulai ditata kembali hingga mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga pada tahun 1960-an Maluku sudah memiliki Perguruan Tinggi.

Perkembangan pendidikan di Maluku sangat berbeda dengan pendidikan di wilayah Indonesia bagian barat terutama pada masa Kolonial Belanda karena sistem yang diterapkan berbeda, orang Maluku dari kalangan mana saja boleh bersekolah tidak ada diskriminasi dari segi keturunan karena mereka memang disiapkan untuk menjadi ambtenar dan tentara. Namun walaupun demikian tujuannya mereka bias menjadi orang-orang yang memiliki intelektual tinggi, hingga pada masa kemerdekaan mereka dapat membangun Maluku sesuai dengan cita-cita sebuah bangsa yang merdeka.

DAFTAR SUMBER

Arsip

- Algemeen Verslag van den Staat van het Schoolwezen in Nederlandsch-Indie over het Jaar 1864* (Batavia, 1865).
- Algemeen Verslag van den Staat van het Schoolwezen in Nederlandsch-Indie over het Jaar 1865* (Batavia, 1866)
- Arsip Ambon*, 992, Jakarta: ANRI
- Arsip Ambon*, No. 994, Jakarta: ANRI
- Besluit van Gouverneur-General van Nederlandsch-Indie van 6 Januari 1869 No. 13*. Jakarta: ANRI
- Besluit van Gouverneur-General van Nederlandsch-Indie van 11 April 1885 No. 3*, Jakarta: ANRI
- Besluit van Gouverneur-General van Nederlandsch-Indie van 6 Januari 1887 No. 6*, Jakarta: ANRI
- Besluit van Gouverneur-General van Nederlandsch-Indie van 3 Juli 1892 No.33*, Jakarta: ANRI

Sumber Resmi Tercetak

- Derde Algemeen Vijfjarig Verslag van Inlandsch Onderwijs in Nederlandsch-Indie 1883-1887*. Batavia: Landsdrukkerij, 1890.
- Van Fraassen, Ch. F. (1997), *Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942* (2). Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
- (1997), *Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942*, 3. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
- GPI 416, Amboina, 13 Juli 1933, *Namens de Examen-Commissie; De Predekant-Voorzitter in de Molukken, de Hulppredikers Opleider; Tutuarima*. Jakarta: ANRI.
- GPI 416, *Uittreksel uit het Register der Besluit van een Predekant-Voorzitter in de Molukente Amboina*, No. 203, 19 Juni 1935. Jakarta: ANRI.
- GPI 468, *Afschrift Gegevens betreffende Stovil-opleiding te Amboina*. Jakarta: ANRI
- GPI 468, *School- tot Opleiding voor Inlandsch Leeraar Stovilj Regeling betreffende School en Internaat*. Jakarta: ANRI
- Jobse, P. (1997), *Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942* (1). Den Haag:

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

Jacobs, H. 1980. *The Portuguese Town of Ambon*. Second International Seminar on Indo-Portuguese History. Lisabon.

— (1975), “Brief Notes on the vicars and other secular clerics of Portuguese-fortresses in Maluku up to 1906,” *Neuwe Zeitschrift fur Missionswissenschaft*. Deel 31: 207-287.

Kementrian Penerangan NIT (1949), Suatu Ikhtisar tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom dalam Negara Indonesia Timur. Makasar: Pembangunan Negara.

Knapp, G. J. (1987), *Memories van Overgave van Gouverneurs van Ambon in de Zeventiend Eeuw*. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhof.

Koppennol, R. J. (1934), *Memorie van Overgave Gubernur Maluku*, Seri 2, Rel 26. Ambon, April 1934. ANRI.

Regeerings Almanak voor Nederlandsch-Indie, 1814-1914. Eerste Gedeelte. Batavia: Landsdrukkerij.

— 1874. Eerste Gedeelte. Batavia: Landsdrukkerij.

— 1875. Eerste Gedeelte. Batavia: Landsdrukkerij.

— 1898. Eerste Gedeelte. Batavia: Landsdrukkerij.

— 1898. Tweede Gedeelte. Batavia: Landsdrukkerij.

Staatsblad Nederlandsch-Indie voor het Jaar 1824 No. 19a.

— 1874 No. 99.

— 1885 No. 204.

— 1892 No. 82.

— 1893 No. 125.

— 1894 No. 100.

— 1895 No. 146.

— 1924 No. 68

Tiele P. A. “Documenten voor de Geschiedenis der Nederlanders in het Oosten,” dalam *Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap*, VI,

— *Bouwstoffen voor de Geschiedenis der Nederlanders in den Maleischen Archipel*.

van der Wal, S. L. (1973), *Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950*. Derde deel, 1 Januari-30 Maret 1946. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.

— (1974), *Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-*

1950. *Vierde deel*, 31 Maret-16 Juli 1946. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- (1975), *Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950*. *Vijfde deel*, 16 Juli - 28 Oktober 1946. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- (1976), *Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische berekkingen 1945*. *Zesde deel*, 29 Oktober 1946 – 5 Januari 1947. 's-Gravenhagen: Martinus Nijhoff.
- (1976), *Officeelle bescheiden de Nederlands-Indonesicsche betrekkingen 1945-1950*. *Twaalfde deel*, 6 Januari – 20 Maret 1947. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Van Ros (1909), *Memorie van Overgave Residen Ternate* 65, Ternate, 1 April 1909.
- (1927), *Memorie Van Overgave Gubrnur Maluku*, Ambon, April 1927.
- Verbeke A. (1917), *Memorie van Overgave Resident*, Ternate, 20 Januari 1917.
- Verslag van het Inlandsch Ondernijis in Nederlandsch-Indie over 1866*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Verslag van het Eindexamen Gebouden aan den voor Inlandsche Kweekschool te Ondernijzers Amboina*, 1877 dan 1879. Batavia: Landsdrukkerij.

Surat Kabar dan Majala

- Sinar Maluku*. Tahun 1930.
- Sinar Matabari*, 30 Januari 1943.
- Sinar Matabari*, 11 dan 13 Februari 1943.
- Sinar Matabari*, 1, 6, 11, 12 Nopember 1943.

Buku

- Abdurrachman, Paramitha R. (1973), *Bunga Rampai Sejarah Maluku* (I). Jakarta: Lembaga Penelitian Sejarah Maluku.
- Alyona, Cornelis Adof (2009), “Pendidikan Barat di Maluku Tengah 1885-1942: Timbulnya Dualism dalam Sistem Pendidikan,” Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Baron, C. W. Th. (1947), *De Protestantische Kerk in Nederland Indie*. Batavia: Martinus Nijhoff, s'Gravenhage.

- Bartels, Dieter (1977). "Guarding the Invisible Mountain: Intervillage Alliances, Religious Syncretism and Ethnic Identity among Ambonese Christians and Moslems in the Moluccas," Disertasi. Cornell University. USA)
- Benda, Harry J, (1983), "Kaum Inteligensia Timur sebagai Golongan Elite Politik," dalam Sartono Kartodirdjo (ed). *Elite dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: LP3ES.
- Beversluis, A. J. dan Gieben, A. H. C. (1929), *Het Gouvernement der Molukken*. Landsdrukkerij. Wetevreden.
- Boissevain, H. D. J., dkk. (1934), *De Zending in Oost en West-Verleden en Heden*, Deel I, 's-Gravenhage: N.V. Algemeene Boekhandel voor Inwendige en Uitwendige Zending.
- Brugmans, I. J. (1938). *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch Indie*. Groningen: J.B. Wolters.
- Chauvel, Richard. 1990. *Nationalists, Soldiers and Separatists*. Leiden: KITLV Press..
- Cooley, F. L. (1973), "Persentuhan Kebudayaan di Maluku Tengah 1475-1675", dalam Paramitha R. Abdurrachman, *Bunga Rampai Sejarah Maluku*. Jakarta: Lembaga Penelitian Sejarah Maluku.
- Coolsma, S. (1901), *De Zendingseem van Nederlands Oost-Indie*. (tp)
- de Graaf, H. J. (1977). *De Geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken*. Uitgeverij T. Weever B.V. Franeker.
- Indonesia, Depdikbud (1981). *Sejarah Daerah Maluku*. Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Depdikbud.
- Djumhur, I dan H. Danasuparta (1976), *Sejarah Pendidikan*. Bandung: Ilmu.
- Effendi. Ziwar (1987), *Hukum Adat Ambon Lease*. Jakarta: Pradya Paramitha.
- Enklaar, I. H. (1980). *Joseph Kam Rasul Maluku*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 5 (1989). Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
- van Fraassen, Chris (1972). "Ambon-Rapport," Tesis M.A. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden.
- Gottschalk, Louis (1975), *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Groeneboer, Kees (1993), *Weg tot het Weste.: Het Nederlands voor Indie 1600-1950*. Leiden: KITLV Uitgeverij.
- Herlina, Nina (2008), *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- van Hoevell, Baron G. W. W. C. (1875), *Ambon en meer bepaaldelijk de Oeliasers:*

- Geografisch, Ethnografisch, Politisch en Historisch*. Dordrecht: Blusse en Van Braam.
- Holleman, F. D. (1923). *Het Adat Grondenrecht van Ambon en de Oeliaser*. W.D. Weimena Delft.
- Kartodirdjo, Sartono (ed.) (1983), *Elite dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: LP3ES.
- (1999), *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- (1993), *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Keuning, J. (1973). *Sejarah Ambon sampai pada Abad ke-17*. Jakarta. Bhratara.
- Koolen, G. M. J. M. (1993). *Een seer Bequaem Middel, Onderwijsen Kerke onder de 17e eeuwse VOC*. KTC. Deel 19. Kok Kampen.
- Kroeskamp, H. (1974), *Early Schoolmasters in a Developing Country: a History of Experiments in School Education in 19th Century Indonesia*. Van Gorcum & Comp. B.V.-Assen, Nederlands.
- Kruger, Muler Th. (1959), *Sejarah Gereja di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Kutoyo Sutrisno (1977), *Sejarah Daerah Maluku*. Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Lapian, Adrian B. (2009), *Orang Laut Bajak Laut Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Leirissa, R. Z. (1975), *Maluku dalam Perjuangan Nasional Indonesia*. Jakarta: Lembaga Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- (1983), *Sejarah Sosial di Daerah Maluku*. Jakarta: Depdikbud.
- (1989), “Midras dan Ambonsche Burgerschool: Dua Bentuk Sekolah yang Bertolak Belakang di Maluku Tengah dalam Masa Penjajahan,” dalam *Pendidikan sebagai Faktor Dinamisasi dan Integrasi Sosial*. Jakarta: Depdikbud.
- Leirissa, R. Z., dkk. (1982), *Maluku Tengah di Masa Lampau: Gambaran Sekilas Lemat Arsip Abad Sembilan Belas*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (1984), *Sejarah Sosial di Daerah Maluku*. Jakarta: Depdikbud.
- Lestaluhu, Maryam. R. L. (1988), *Sejarah Perlawanan Masyarakat Islam terhadap Imperialisme di Daerah Maluku*. Bandung: Al-Ma’arif.
- Liong, Liem Soei (1982), *Maluku Geografie en Geschiedenis van de Molukken sinds het kolonialisme*. Wim Schroevers.

- Lokollo, J. E., dkk. (1997), *Seri Budaya Pela-Gandong dari Pulau Ambon*. Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku.
- Lubis, Nina Herlina (1998), *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.
- Lubis, Nina H., dkk. (2003), *Sejarah Tatar Sunda*. Jilid 2. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- Manuhuttu, E. J. *Sejarah Pergerakan Nasional*, Jilid 2. Manado
- Manusama. Z. J. (1973), “Sekelumit Sejarah Tanah Hitu dan Nusa Laut Serta Struktur Pemerintahannya sampai Pertengahan Abad ke-17,” dalam Paramitha R. Abdurrachman, *Bunga Rampai Sejarah Maluku*. Jakarta: Lembaga Penelitian Sejarah Maluku.
- Mestoko, Sumarsono, dkk. (1986), *Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Monografi Daerah Maluku*. Depdikbud: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan.
- Nanulaitta, I. O. (1966), *Timbulnja Militarisme Ambon sebagai Suatu Persoalan Politik, Sosial-Ekonomis*. Jakarta: Bhratara.
- Nasution, S. (2008), *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- van Niel, Robert (1984), *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Pattikayhattu, Jhon A. 1978. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Maluku*. Jakarta: P3KD Depdikbud.
- Pattikayhatu, Jhon A., dkk. (1980), *Sejarah Pendidikan Daerah Maluku*. Jakarta: Depdikbud Proyek IDKD.
- (2005), *Album Berseri Sejarah Para Pahlawan, Tokoh, dan Pejuang Dearah Maluku*. Ambon: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
- Poeze, Harry A. (1986), *In het land van de overheerser: Indonesiërs in Nederland 1600-1950*, Jilid I. Dordrecht.
- Pringgodigdo, A. K. (1986), *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat
- Purwanto, M. Ngalim (1992), *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rumphius, G. E. (1950), “De Ambonesche historie,” *Bijdragen Tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde van Nedelands Indie*, Vol 64. Deel II.
- Saches, F. J. P. (1907), *Het eiland Seran en zijne bewoners*. Leiden: E. J. Brill

- Sanderson, Stephen K. (2000), *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Silver, H. (1985), "Historiography of Education," dalam *The International Encyclopedia of Education*.
- Sjamsuddin, Helius (2007), *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sudirman, N., dkk. (1990), *Ilmu Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syah, Muhibbin (2003), *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Talbott, John E. (1972), "Education in Intellectual and Social History," dalam Felix Gilbert dan Stephen R. Graubard (ed.), *Historical Studies Today*. New York: W.W.
- Tanamal, Pieter (1987), *Pendidikan Kristen di Maluku, Peranan dan Permasalahannya dalam Sejarah*. Ambon: GPM Maluku.
- Wilken, G. A. dan Ossenbruggen, F. D. E. (1926), *Opstellen van het Adatrecht*. G.T.C. Van Dorp & Co, Semarang, Surabaya, Bandung, 's-Gravenhage.

Situs Internet

- Jusnick, Anamofa (2010), "Kweekschool STOVIL di Batu Gantung, 1925," diunduh dari <http://facebook.com>. "Ambon Manise" Ambon Jaman Dulu, 14 Maret 2011, 10.00 WIB.
- Koleksi Tempo Doeloe (2010), "Guru-guru Pribumi Asli Ambon," diunduh dari <http://koleksitempodoele.blogspot.com/2010/03/ambon-tempo-doele-74-foto2-jadul-dalam.html>, 14 Maret 2011, 09.30 WIB.
- Poeze, Harry A. (1986), *In het land van de overheerser, I. Indonesiërs in Nederland 1600-1950*, diunduh dari <http://www.wiezoekje.nl/click.php?c=Bing&url=http://www.iisg.nl/collections/tehupeior/d31-398.php>, 14 Maret, 10.20 WIB.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Gouvernement der Molukche Eilanden.....	15
Gambar 2 Kondisi Alquran yang tersimpan di Mesjid Tua Wapauwe, Negeri Kaitetu	34
Gambar 3 Sekolah Kweekschool voor Inlanshe Onderwijzers di Ambon.....	77
Gambar 4 Guru-guru Pribumi Asli Ambon.....	85
Gambar 5 Guru dan Murid HIS 1908.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Presentasi Jumlah Penduduk Maluku Menurut Etnis	17
Tabel 2 Volume Ekspor Maluku 1934–36 (dalam jutaan kilogram).....	21
Tabel 3 Volume Impor Maluku 1934–36 (dalam jutaan kilogram)	22
Tabel 4 Daftar Lokasi Sekolah Rendah, Tenaga Pengajar dan Jumlah Siswa 1866.....	61
Tabel 5 Daftar Lokasi Sekolah Rendah dan Tahun Berdirinya.....	69
Tabel 6 Jumlah Sekolah Lanjutan dan Sekolah Standar di Maluku 1934.	111
Tabel 7 Subsidi Pendidikan dari Pemerintah dan Penduduk.....	122
Tabel 8 Perbandingan Subsidi Pendidikan di Maluku 1931 dan 1937	123
Tabel 9 Jenis Sekolah Rakyat di Maluku 1934	146
Tabel 10 Jenis Sekolah, Guru dan Murud pada Masa NIT 1946 dan 1947	177

DAFTAR ISTILAH

<i>Ambonsche Burgerschool</i>	: Sekolah untuk anak-anak golongan burger
<i>Ambonsche Kiesvereniging</i>	: Perkumpulan Pemilihan Ambon
<i>Ambonsche Studiefonds</i>	: organisasi pengumpul beasiswa untuk orang Maluku yang ingin melanjutkan sekolah.
<i>borgor</i>	: istilah dalam bahasa Melayu untuk menyebut burger yang berarti <i>aurang beybas</i> 'orang bebas'
<i>burger</i>	: warga kota; suatu golongan penduduk di Ambon yang tidak digolongkan anak negeri
<i>Christelijke Ambon Vlokbond dati</i>	: Perkumpulan Masyarakat Ambon Kristen
<i>De Scholen der Eerste Klasse</i>	: Kesatuan kerja wajib
<i>De Scholen der Tweede Klasse</i>	: Sekolah Dasar Kelas Satu
<i>European gelijkstelling</i>	: Sekolah Dasar Kelas Dua
<i>fam</i>	: persamaan hak dengan orang Eropa
<i>Gedelegeerd Bestuur</i>	: nama keluarga
<i>GPM</i>	: badan pengurus luar biasa
<i>gelijkgesteld</i>	: Gereja Protestan Maluku
<i>goeroe midras</i>	: persamaan kedudukan hukum dengan orang Belanda
<i>berendiensten</i>	: guru zending
<i>Hollandsh Inlandsche Kweekschool</i>	: kerja wajib untuk pemerintah
<i>hongitochten</i>	: sekolah pendidikan calon guru
<i>Hoofdenschool</i>	: pelayaran menggunakan <i>kora-kora</i> (perahu perang) untuk melakukan operasi pembersihan dan penjagaan terhadap daerah yang tidak menaati peraturan VOC yang mengharuskan hasil rempah-rempah dijual hanya kepada VOC
<i>hulpprediker</i>	: sekolah khusus untuk kedudukan pamong atau calon pegawai
<i>indische kerk</i>	: pendeta pembantu
	: Gereja Hindia

<i>inlandsche burgers</i>	: anak negeri yang mendapatkan status burger
<i>inlandsche onderwijs</i>	: pendidikan bumiputra
<i>Kam's Institute</i>	: sekolah yang didirikan oleh Joseph Kam di Batu Merah Ambon
<i>Kopschool</i>	: sekolah untuk kerajinan wanita
<i>kwartodienst</i>	: pekerjaan yang dibebankan kepada anak negeri untuk kepentingan kepala negeri (raja) tanpa upah
<i>Kweekschool</i>	: Sekolah Guru
<i>mardijkers</i>	: pengikut Portugis, budak yang dibebaskan VOC dan diberi pemukiman sendiri yaitu di Kampung Mardika
<i>marinyo</i>	: pesuruh negeri yang bertugas menyampaikan pengumuman dari raja kepada anak negeri dengan cara <i>tabaos</i> atau berteriak; juga bertugas membantu guru di sekolah rakyat seperti membersihkan sekolah dan gereja, memukul tifa pada waktu sekolah dan waktu gereja, dan memanggil murid yang tidak ke sekolah
<i>masobi</i>	: gotong royong
<i>Moluksch Politiek Verbond</i>	: Perserikatan Politik Maluku
<i>Moorsche burgers</i>	: orang-orang Asia seperti Cina, Arab, dan Melayu yang termasuk warga kota
<i>negeri</i>	: persekutuan teritorial yang terdiri atas beberapa <i>soa</i> yang pada umumnya berjumlah paling sedikit tiga <i>soa</i>
<i>oppermeester</i>	: guru kepala
<i>pamerentah</i>	: kepala pemerintahan negeri yang biasa dipanggil <i>Bapa Raja</i>
<i>pela</i>	: sistem hubungan (persaudaraan) yang mengikat dua atau lebih negeri yang terpisah bahkan dari pulau yang berbeda
<i>raja, patty, orang kaya</i>	: gelar yang diberikan oleh pemerintah Hindia

	Belanda kepada kepala negeri dan perangkat negeri; <i>raja</i> adalah gelar tertinggi, <i>patty</i> dan <i>orang kaya</i> adalah gelar terendah.
<i>Regentenbond</i>	: organisasi para kepala negeri atau raja
<i>rijst-Christenan</i>	: Kristen beras
<i>schakelschool</i>	: sekolah penghubung/peralihan
<i>schoolmeester</i>	: guru agama; dalam bahasa Melayu berarti guru Injil
<i>schutter</i>	: penjaga keamanan yang dipersenjatai
<i>schutterij</i>	: kewajiban ronda (penjagaan) bagi burger
<i>soa</i>	: persekutuan teritorial genealogis atau penge-lompokan masyarakat berdasarkan keturunan yang dominan dan kesatuan wilayah tempat tinggal
<i>Sou Maloeka</i>	: perkumpulan atau federasi berbagai organisasi di Maluku
<i>tua agama</i>	: orang yang membantu guru di sekolah zending
<i>tuang guru</i>	: imam; orang yang mengajarkan mengaji Alquran dan mengajarkan agama Islam
<i>tussenklasse</i>	: kelas tengah-tengah atau kelas menengah
<i>Vereeniging voor Moluksche Belagen</i>	: Perkumpulan untuk Kepentingan Maluku
<i>verplichte domicillieering</i>	: tempat tinggal yang telah ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda bagi burger
<i>vervolgschool</i>	: sekolah lanjutan
<i>Volksschool</i>	: Sekolah Desa/Rakyat
<i>wijkmeesters</i>	: kepala lingkungan di perkampungan burger
<i>zending</i>	: pengabar injil/penyiar agama Kristen

TENTANG PENULIS

Sem Touwe adalah dosen sejarah Aktif di Universitas Pattimura Ambon sejak tahun 1991, setelah menyelesaikan studi S1 Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Sejarah di Universitas Pattimura sampai sekarang. Ketertarikannya terhadap Ilmu sejarah, mendorong ia untuk melanjutkan studi S2 bidang pendidikan sejarah di Universitas Negeri Jakarta dan memperoleh master dalam bidang Pendidikan Sejarah pada tahun 2001. Studi S3 baru dijalannya pada tahun 2008 karena kembali ke Maluku untuk mengabdikan selama 8 tahun di almamaternya. Pendidikan doctoral dalam bidang Ilmu Sejarah diperoleh pada Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2013. Peluang yang sangat berharga selama mengikuti pendidikan S3, di Universitas Padjadjaran ketika itu adalah, adanya program kemitraan antara Universitas Padjadjaran dengan Universitas Leiden khususnya bagi mahasiswa Ilmu Sejarah. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk melakukan studi arsip dan mencari sumber-sumber kolonial mengenai Maluku di Negeri Belanda.

Selama menjadi dosen, ia aktif melakukan penelitian-penelitian dan hasil karyanya lebih banyak mengenai sejarah dan budaya daerah Maluku yang merupakan bentuk kerjasama dengan Balai Pelestarian dan Nilai tradisional Maluku dan Maluku Utara. Selain itu aktif menulis artikel ilmiah di beberapa media seperti Jurnal Masyarakat dan Budaya LIPI Jakarta, Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya Balai Pelestarian sejarah dan Nilai Tradisional Maluku dan Maluku Utara, dan sejumlah tulisan lainnya di media masa.



TENTANG PENULIS

Rina Pusparani, SS, M.Hum lahir di Ambon 18 September 1980. Menempuh pendidikan S1 di Universitas Andalas Padang, di jurusan Ilmu Sejarah, lulus pada tahun 2003. Pendidikan S2 di Universitas Padjadjaran Bandung , di Jurusan Ilmu Sejarah. Untuk menyelesaikan studi S1 dan S2, memilih tema sejarah pendidikan sebagai tugas akhirnya. Menjadi staf pengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura Ambon sejak tahun 2005. Pengampu mata kuliah sejarah pendidikan sejak 2012.



Buku ini membahas sejarah pendidikan formal di Maluku dengan berbagai macam pola penerapan maupun pembiayaannya yang dijalankan selama beberapa abad, dan terpola secara periodik sesuai anasir budaya yang dibawa masuk ke daerah tersebut. Buku sejarah Pendidikan ini mengulas sejumlah bukti mengenai persentuhan dunia pendidikan formal di Maluku yang pada akhirnya dapat mengubah pola pikir orang Maluku dalam hal berpikir, bertindak, berperilaku, dan melahirkan gagasan sebagai manusia yang berpendidikan. Semua itu dengan jelas terpapar dalam buku ini yang dimulai dari keberpihakan para mubalik dalam kepeduliannya membangun pendidikan dan peradaban Islam pada abad ke 14 dan masuknya peradaban Barat Portugis dan Belanda abad 15-20. Kemerosotan pendidikan selama masa pemerintahan Belanda, dan keseriusan untuk memperbaiki sistem pengajaran dan pembiayaan pada masa politik etis sampai masuknya sang *superpower* Asia, (Jepang) dengan strategi pengajarannya yang baru. Bukan hanya itu, buku ini juga membahas kebangkitan bangsa Indonesia dalam membangun dunia pendidikan setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, walaupun dalam suasana revolusi fisik dan ketidak stabilan politik dalam negara akibat agresi militer Belanda.

Buku ini memberi kita inspirasi dan pengetahuan tentang cara tokoh-tokoh besar, baik pemimpin agama, politik, pemerintahan, dan para ilmuwan membangun dunia pendidikan baik dimasa awal kedatangan agama Islam, periode penjelajahan samudera oleh bangsa Portugis dan Belanda (VOC), periode penjajahan, periode kemerdekaan Republik Indonesia (RI), dan periode Republik Indonesia Serikat (RIS) yang lebih spesipik menampilkan proaktif dari parlemen Negara Indonesia Timur (NIT) dalam membangun pendidikan di Maluku. Perbaikan pendidikan setelah pergolakan kelompok Republik Maluku Selatan (RMS) dengan mendirikan perguruan tinggi baik negeri dan swasta. Buku Sejarah pendidikan di Maluku akan menyuntingkan motivasi dan semangat bagi kita generasi muda, pelajar, mahasiswa, negarawan, pengusaha, dan politisi untuk meninggalkan keterbelakangan dan bangkit dari keterpurukan untuk menjadi orang yang berguna bagi negara dan bangsa.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI BUDAYA**

Perpustakaan
Jenderal